



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
RKPD TAHUN 2025**



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR **11 TAHUN 2025**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan rumusan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan serta asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);
 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan Daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta program Asta Cita.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada Perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dan Ketua DPRD.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan perubahan APBD Tahun 2025 Pemerintah Daerah menggunakan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum

perubahan APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun 2025.

- (2) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bappelitbangda melakukan sinkronisasi antara perubahan rencana kerja dan perubahan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025.

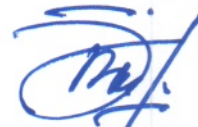
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SOPPENG,



SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 11.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridha-nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini dapat dirampungkan. Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan perubahan terhadap dokumen RKPD Tahun 2025 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, antara lain kondisi perkembangan dan kebijakan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2024 yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 ini dilakukan sebagai koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi seluruh Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya Perubahan RKPD 2025 dijadikan pedoman perumusan pada penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah, serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.

Untuk itu diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna mewujudkan “Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”.

BUPATI SOPPENG

SUWARDI HASENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I-12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I.....	II-1
2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro	II-1
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-1
2.1.1.2 Inflasi	II-6
2.1.1.3 PDRB Perkapita	II-7
2.1.1.4 Indeks Gini	II-9
2.1.1.5 Kemiskinan.....	II-10
2.1.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan.....	II-13
2.1.1.7 Penguatan Cadangan Pangan	II-14
2.1.1.8 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	II-15
2.1.1.9 Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	II-15
2.1.1.10 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB.....	II-16
2.1.1.11 Produksi Sektor Pertanian	II-17
2.1.1.12 Produksi Sektor Perkebunan	II-18
2.1.1.13 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	II-18
2.1.1.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	II-19
2.1.1.15 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II-20
2.1.1.16 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	II-20
2.1.1.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	II-21
2.1.1.18 Pertumbuhan Industri	II-23
2.1.1.19 Indeks Pembangunan Manusia	II-23
2.1.1.20 Indeks Pendidikan	II-25
2.1.1.21 Rata-Rata Lama Sekolah.....	II-26
2.1.1.22 Harapan Lama Sekolah.....	II-26
2.1.1.23 Indeks Kesehatan	II-27
2.1.1.24 Umur Harapan Hidup	II-28
2.1.1.25 Pengeluaran Perkapita	II-29
2.1.1.26 Persentase Balita Gizi buruk.....	II-29
2.1.1.27 Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	II-30

2.1.1.28 Cakupan Desa Siaga Aktif.....	II-31
2.1.1.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-31
2.1.1.30 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-32
2.1.1.31 Rasio Penduduk yang Bekerja.....	II-33
2.1.1.32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-34
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja	II-34
2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng Tahun 2024.....	II-34
2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024	II-36
2.2.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-56
2.2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>)	II-58
2.2.5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 ..	II-65
2.3. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	II-164
2.4. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan Ke I	II-164
2.5. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Untuk Triwulan Selanjutnya	II-165

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-15
3.2.1. Aspek Eksternal	III-15
3.2.2. Aspek Internal	III-17
3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III-18
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH..... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.1.1 Tujuan Pembangunan Nasional.....	IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-5
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng	IV-10
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-13
4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-13
4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	IV-14
4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025.....	IV-16
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	IV-26
4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng.....	IV-41

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5. 1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-1
--	-----

5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-3
5.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-10

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Makro	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
6.3.	Indikator Kinerja Daerah.....	VI-3
6.4.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VI-19

BAB VII PENUTUP VII-1

7.1.	Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2.	Kesimpulan.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2. 2	Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2. 3	Kontribusi PDRB Pertanian Khusus Palawija Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2. 4	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2. 5	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2. 6	Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2. 7	Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024.....	II-18
Tabel 2. 8	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2. 9	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023	II-19
Tabel 2. 10	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2019-2023.....	II-21
Tabel 2. 11	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2019-2023.....	II-22
Tabel 2. 12	Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2. 13	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2. 14	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2. 15	Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024.....	II-31
Tabel 2. 16	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2. 17	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng Tahun 2024.....	II-35
Tabel 2. 18	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 (Permendagri 86 Tahun 2017).....	II-37
Tabel 2. 19	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 (Permendagri 18 Tahun 2020).....	II-50
Tabel 2. 20	Capaian SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-56
Tabel 2. 21	Capaian TPB/SDG's Kabupaten Soppeng Tahun 2024	II-58
Tabel 2. 22	Kategori Penilaian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	II-65
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025.....	II-65
Tabel 2. 24	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Ada dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025.....	II-67
Tabel 2. 25	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Soppeng Triwulan I Tahun 2025.....	II-68
Tabel 2. 26	Rekapitulasi Capaian Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Soppeng Triwulan I Tahun 2025.....	II-72
Tabel 2. 27	Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Triwulan I Kabupaten Soppeng Tahun 2025	II-75
Tabel 2. 28 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Triwulan I Kabupaten Soppeng	II-77
Tabel 3. 1. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)	III-6
Tabel 3. 2. Perubahan Target Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2024	III-20
Tabel 3. 3. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ...	III-24
Tabel 3. 4. Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng	III-29
Tabel 3. 5. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025.....	III-31
Tabel 3. 6. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025	III-31
Tabel 4. 1. Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	IV-8
Tabel 4. 2. Penjelasan Visi sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.....	IV-10
Tabel 4. 3. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025.....	IV-11
Tabel 4. 4. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025	IV-12
Tabel 4. 5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	IV-15
Tabel 4. 6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025	IV-19
Tabel 4. 7. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2025	IV-21
Tabel 4. 8. Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2025.....	IV-23
Tabel 4. 9. Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-25
Tabel 4.10. Program Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025.....	IV-29
Tabel 4.11. Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025	IV-41
Tabel 4.12. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2025.....	IV-42
Tabel 5. 1. Rincian Kerangka Belanja Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025	V-2
Tabel 5. 2. Perbandingan Program Prioritas RKPD 2025 dengan Perubahan RKPD 2025 Kabupaten Soppeng	V-4
Tabel 5. 3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.....	V-11
Tabel 6. 1 Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2025	VI-1
Tabel 6. 2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama	VI-2
Tabel 6. 3 Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025	VI-3
Tabel 6. 4 Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Soppeng.....	VI-19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-2
Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-3
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	II-3
Grafik 2.4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	II-7
Grafik 2.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku	II-8
Grafik 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar	II-8
Grafik 2.7. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	II-9
Grafik 2.8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-11
Grafik 2.9. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	II-13
Grafik 2.10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	II-14
Grafik 2.11. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II-20
Grafik 2.12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng,	II-24
Grafik 2.13. IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-25
Grafik 2.14. Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-26
Grafik 2.15. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-26
Grafik 2.16. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng	II-27
Grafik 2.17. Indeks Kesehatan Tahun 2020-2024	II-28
Grafik 2.18. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-28
Grafik 2.19. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024.....	II-29
Grafik 2.20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-32
Grafik 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024	II-33
Grafik 2.22. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Soppeng.....	II-33
Grafik 3. 1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Tahun 2025	III-8
Grafik 3. 2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	III-8
Grafik 3. 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024, Target RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD	

Tahun 2025.....	III-10
Grafik 3. 4 Inflasi Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024 dan Triwulan I 2025 Serta Target Tahun 2025	III-13
Grafik 3. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024, Target RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III-14
Grafik 3. 6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024 serta Target RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III-15

Lampiran : Peraturan Bupati Soppeng
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 1 Juli 2025
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan dan berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah pada jangka waktu tertentu. Selain itu pembangunan daerah juga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing daerah serta dukungan terhadap pembangunan di tingkat nasional dalam mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Kualitas perencanaan yang baik mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *topdown/bottom up*.

Perubahan RKPD merupakan perubahan atas dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Soppeng telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan dokumen perubahan RKPD ini dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan sebelumnya yang telah disusun karena adanya perubahan kondisi mengingat

Kepala Daerah telah dilantik pada bulan februari tahun 2025. Sehingga dalam perubahan RKPD tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Selain itu dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng telah memedomani Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Nasional Tahun 2025.

Dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal dimaksud juga mengatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan: a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; b. Target sasaran pembangunan daerah; c. Prioritas pembangunan daerah; d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 345 Perubahan RKPD disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang lahir dari hasil analisis dan kebutuhan terkini terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS). Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.

Kondisi pembangunan daerah berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan I). Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan fokus pada percepatan pembangunan baik dalam pemulihan ekonomi dan sosial maupun pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,06%, Angka Kemiskinan 6,90%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,32, Gini Rasio 0,371, Indeks Pembangunan Manusia 71,39 poin dan PDRB Perkapita Rp67,26 Juta. Untuk capaian indikator makro tersebut masih menggunakan capaian kinerja pembangunan di tahun 2024 dikarenakan data tahun 2025 per triwulan 1 belum dirilis oleh BPS.

Di samping itu, dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya serta memastikan akselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang penting lainnya adalah bahwa Perubahan RKPD ini juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 dari masing-masing kegiatan;

2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Kebutuhan akan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

- 6856);
13. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 26. Peraturan Presiden Peraturan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

- Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 910);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

- 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543);
 43. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
 46. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);
 51. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2017 Nomor 40);
 52. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);
 53. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan sinergitas terutama menyangkut tentang tujuan dan sasaran pembangunan, program prioritas maupun kegiatan nasional. Serta keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2025 yang menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
- b) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan provinsi. Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025 serta Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi;

- c) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur;
- d) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RENJA-PD. Dimana program dan kegiatan yang telah disesuaikan tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RENJA-PD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS).

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesaian prioritas program dan kegiatan tahun 2025;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025, Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Untuk dasar hukum menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada sub bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
- **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025**, pada bab ini diuraikan tentang hasil evaluasi dan realisasi capaian kinerja pembangunan daerah, indikator makro daerah dan permasalahan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025.
- **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**, dimana pada bab ini termuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah) serta perubahan asumsi pendapatan dan belanja

daerah, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**, bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
- **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** pada bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
- **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, pada bab ini memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya, yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Baik Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator SDG's pada akhir tahun perencanaan. Pada bab ini juga dilakukan penyesuaian target capaian kinerja pembangunan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya.
- **BAB VII PENUTUP**, mengemukakan tentang hal-hal pokok yang menjadi harapan berkenan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2025, berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD serta kesimpulan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2024 dan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 pada Triwulan I, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian kinerja keluaran kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah.

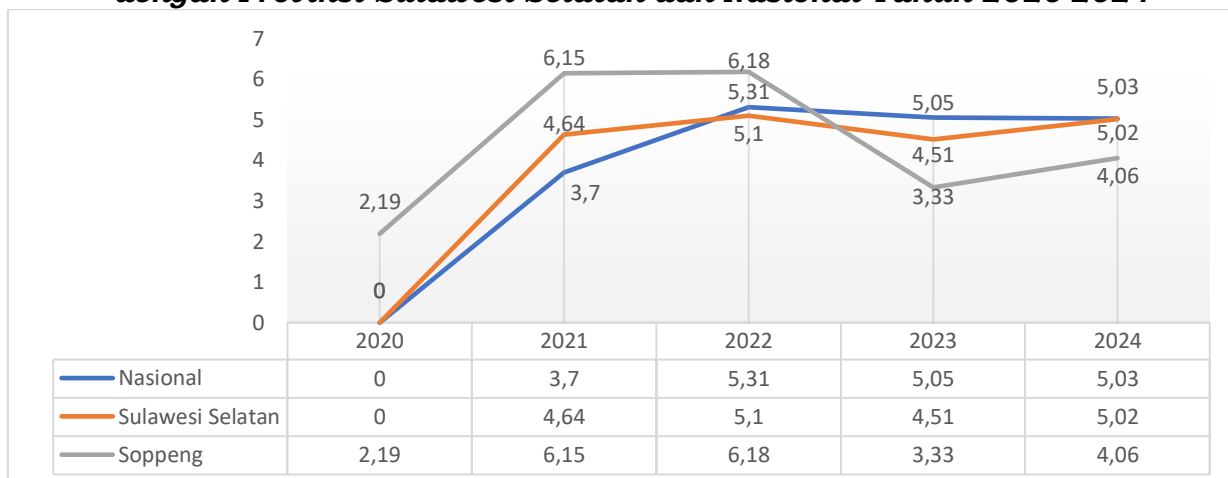
2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1.1 *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

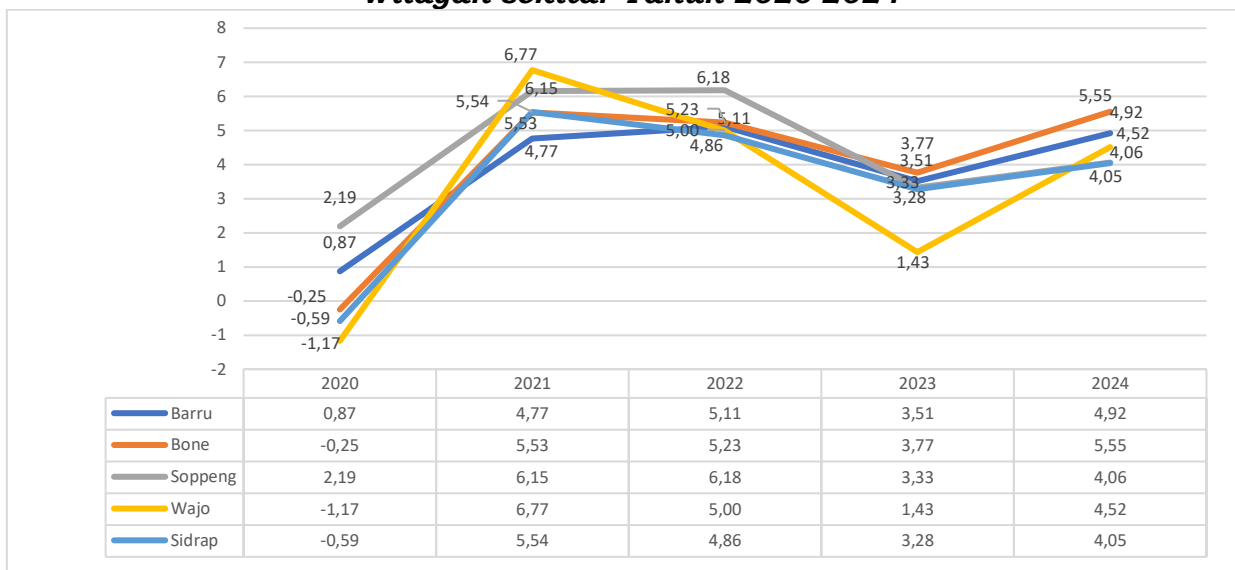


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dengan capaian 3,33%, dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 dengan capaian 4,06%, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya hasil pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 5,02% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,03% di tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun capaian Nasional.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 berada pada urutan ke 4 dari 5 kabupaten skitar dengan capaian sebesar 4,06%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru, Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo lebih tinggi dengan capaian masing-masing 4,92%, 5,55% dan 4,52%. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidrap dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,05%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada grafik berikut.

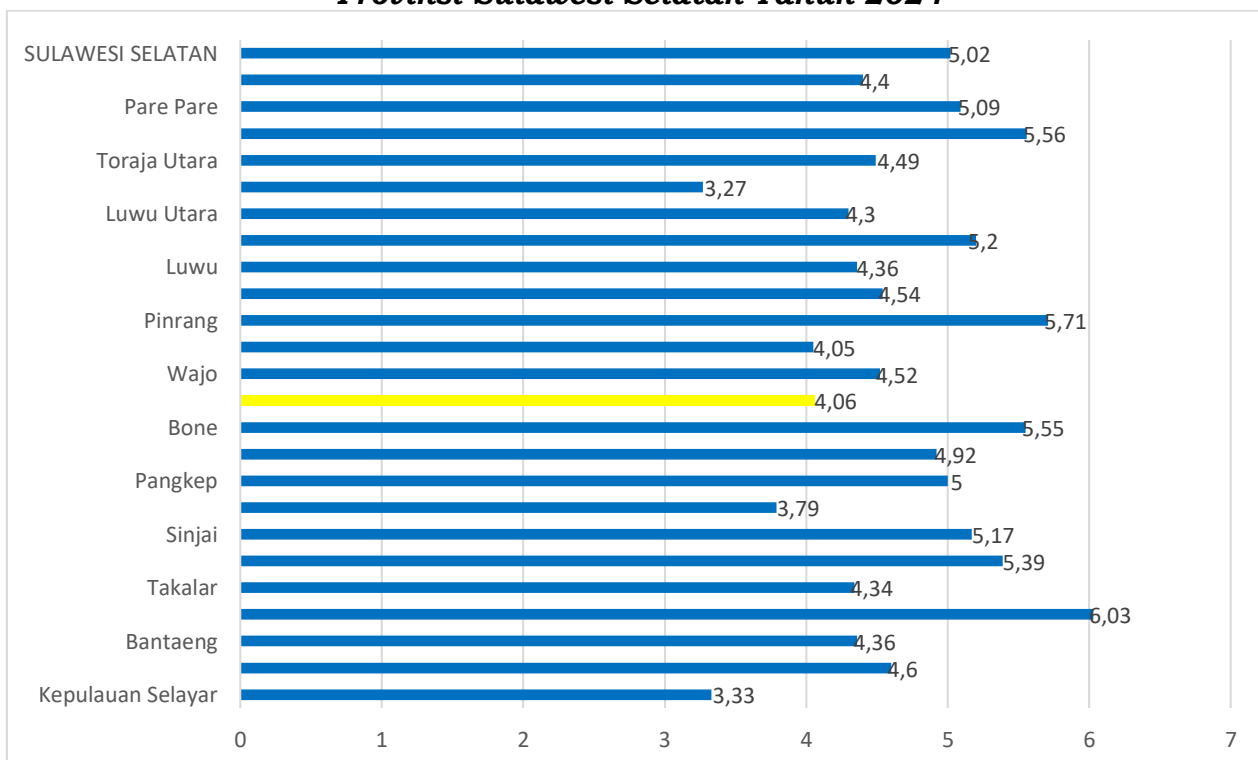
Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng belum bisa mencapai kondisi maksimal, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota lainnya Kabupaten Soppeng menempati urutan ke 20 dari 24 Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan sebesar 4,06% di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan cerminan bahwa ekonomi tetap tumbuh positif walau tidak signifikan di tengah situasi ekonomi yang sulit dan masih tersisa dampak dari fenomena El Nino. Untuk lebih jelas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Pertumbuhan ekonomi tersebut pada tahun 2024 menjadi penting untuk di analisis penyebabnya, sehingga sub sektor yang dominan berpengaruh terhadap pembentukan pertumbuhan dapat dimaksimalkan di masa yang akan datang. Berdasarkan dari sub sektor pembentuknya maka beberapa sub sektor utama mengalami pelambatan seperti industri pengolahan sebesar 5,08%, pengadaan listrik dan gas diangka 6,12%, sub sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah yang menurun sebesar -2,56%, konstruksi menurun dengan angka -1%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melamban sebesar 6,33%, Transportasi dan Pergudangan yang melamban dengan angka 4,84%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diangka 0,08% sedangkan sub sektor yang lainnya mengalami pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.50	1.11	3,98	-3,02	3,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3.86	4.14	4,47	-0,47	4,74
C	Industri Pengolahan	-2.68	8.82	8,59	11,19	5,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.96	6.74	5,05	6,30	6,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.46	6.02	7,96	0,22	-2,56
F	Konstruksi	4.51	9.99	10,09	6,35	-1,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.03	8.61	5,49	9,62	6,33
H	Transportasi dan Pergudangan	-6.04	10.15	10,32	13,45	4,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2.88	12.72	9,82	9,26	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	11.74	12.06	4,74	3,40	6,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.52	4.21	2,13	-0,46	4,75
L	Real Estate	3.96	4.17	3,78	1,23	5,28
M,N	Jasa Perusahaan	-5.37	10.30	10,34	2,45	5,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.61	0.33	1,77	-2,76	0,79
P	Jasa Pendidikan	10.92	10.95	10,84	1,77	9,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.57	10.36	6,78	-0,03	2,85
R,S, T,U	Jasa lainnya	-5.55	6.65	7,19	-0,24	5,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2.19	6.15	6,18	3,33	4,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Berdasarkan tabel di atas terkait sektor industri pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas pasca-COVID-19. Selain itu program dan kebijakan terkait pemulihan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan sektor industri tersebut. Transportasi dan Pergudangan terjadi peningkatan karena pemulilhan ekonomi dan mobilitas yang meningkat tajam. Selin itu, pemulihan sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan pada sektor transportasi dan pergudangan. Penurunan yang terjadi pada tahun terahir diakibatkan adanya potensi kenaikan biaya logistik yang terjadi. Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan

dikarenakan Kenaikan konsumsi masyarakat, didorong oleh stimulus, bansos, dan pertumbuhan UMKM. Akan tetapi dalam pertumbuhan pada sektor tersebut, terdapat kondisi peningkatan harga yang mempengaruhi melambatnya belanja yang dilakukan oleh masyarakat. Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan dikarenakan digitalisasi, kerja jarak jauh, dan e-commerce. Untuk Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan seiring dengan normalisasi kegiatan belajar tatap muka akibat pandemi Covid-19. Selain itu pertumbuhan yang terjadi mencerminkan peningkatan investasi sektor pendidikan, baik swasta maupun pemerintah.

Terkait sektor Pengadaan Air, Limbah, dan Daur Ulang mengalami penurunan dikarenakan menurunnya investasi infrastruktur dasar atau bantuan pemerintah di tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu biaya operasional yang mengalami peningkatan juga mempengaruhi penurunan pada sektor ini. Pada sektor Konstruksi terjadi penurunan dikarenakan menurunnya proyek pemerintah (karena pengalihan anggaran) serta bantuan dari pemerintah Pusat maupun pemerintah di Provinsi. Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir dikarenakan daya beli masyarakat yang mulai tertekan, serta gejolak harga bahan pangan dan energi yang terjadi. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami Kontraksi. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta dana transfer dari pusat yang mengalami penurunan. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dan untuk Jasa Kesehatan dan Sosial terjadi Pertumbuhan selama pemulihan pandemi Covid 19. Namun mengalami penurunan seiring penurunan kasus COVID-19 yang menyebabkan penurunan belanja kesehatan.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh program pembangunan daerah seperti peningkatan investasi, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan sektor pariwisata dan UMKM maupun peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2.1.1.2 Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

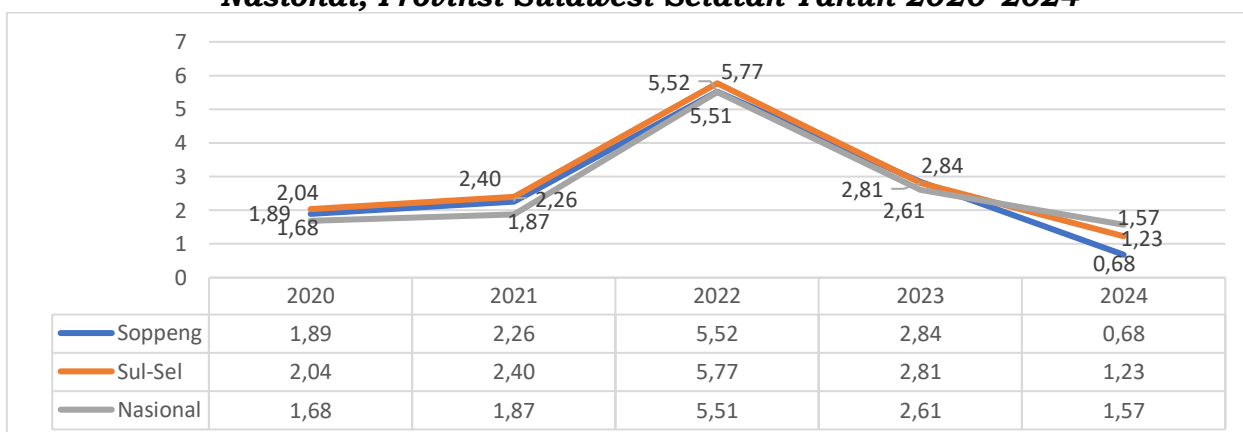
Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng merujuk ke inflasi Bone sebagai daerah terdekat, Pada tahun 2022 sebesar 5,52% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan inflasi tercatat sebesar 2,84% (year on year). Di tahun 2024 laju inflasi Kabupaten Soppeng merujuk ke Kabupaten Wajo sebagai *sistercity* dengan capaian sebesar 0,68%. Inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum tidak mengalami kenaikan cukup signifikan. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan,

minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi.

Berdasarkan capaian inflasi tersebut perlu dilakukan upaya untuk menjaga kondisi inflasi agar tetap stabil yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk pengendalian inflasi tersebut didukung oleh program stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi pertanian/peternakan dan lain-lain.

Grafik 2. 4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020–2024



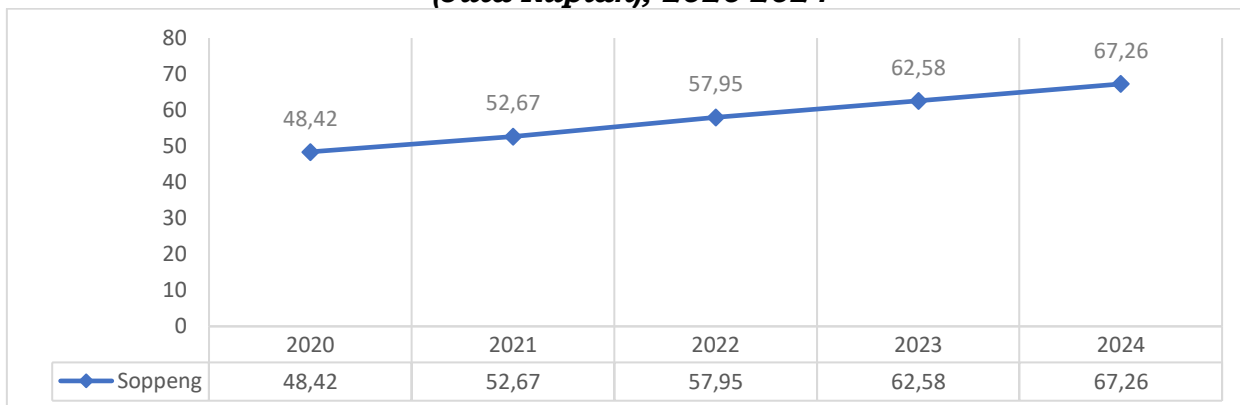
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52,75 juta dan mengalami peningkatan

tahun 2022 menjadi Rp58,21 Juta. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan menjadi Rp62,58 juta dan Rp67,26 juta.

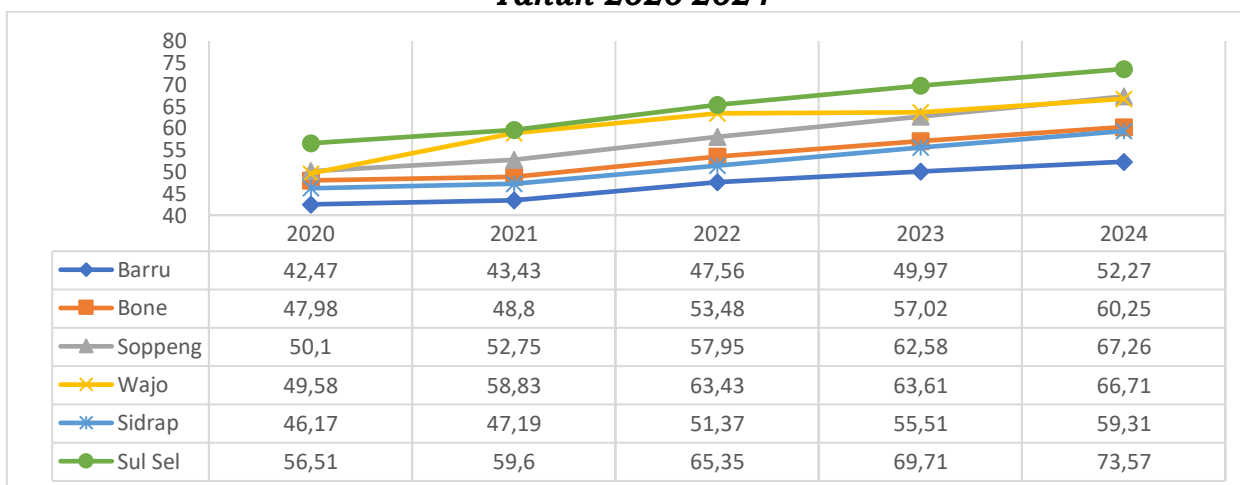
Grafik 2. 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo serta Provinsi Sulawesi Selatan PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh di tahun 2024, walaupun dalam pertumbuhannya mengalami pelambatan sebesar 4,06% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,33%. Selain itu faktor seperti intervensi dari pemerintah daerah melalui bantuan yang diberikan pada sektor unggulan di bidang pertanian maupun peternakan, peningkatan teknologi yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Dari grafik tersebut di atas penyebab meningkatnya PDRB per kapita dikarenakan Pemulihan ekonomi di sektor-sektor utama seperti perdagangan, pertanian, konstruksi, dan jasa transportasi. Daya beli masyarakat yang

membaik, serta meningkatnya produktivitas per sektor. Investasi dan belanja publik yang stabil. Selain itu Inflasi yang terkendali, sehingga peningkatan PDRB per kapita mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan capaian PDRB per kapita tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PDRB per kapita yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk peningkatan PDRB per kapita tersebut didukung oleh program peningkatan penanaman modal, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan program lainnya.

2.1.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini (GR) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

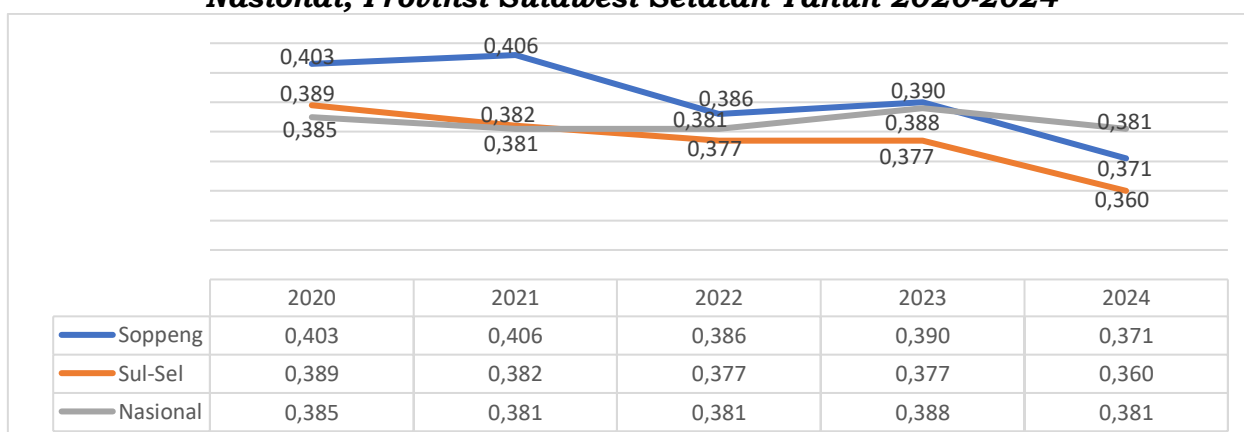
Nilai indeks gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai Indeks Gini kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai indeks gini:

GR < 0,3 → ketimpangan rendah

0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang

GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Grafik 2. 7. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Selama kurun waktu lima tahun, periode 2020-2024 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng diukur oleh indeks gini mengalami fluktuasi, dimana tahun 2020 mencapai 0,403 poin dan 2021 indeks gini ratio mencapai sebesar 0,406 poin sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai 0,386 poin. Di tahun 2023 capaian tersebut sebesar 0,390 poin atau meningkat sebesar 0,004 point dari tahun sebelumnya dan menurun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,371 poin. Ketimpangan pengeluaran atau gini ratio tersebut masih berada pada ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan indeks gini Kabupaten Soppeng pada Tahun 2024 lebih tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,360 akan tetapi lebih redah jika dibandingkan Nasional dengan capaian sebesar 0,381 poin.

Ketidakstabilan capaian indeks gini Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi ekonomi atau sosial. Hal tersebut juga diakibatkan oleh pandemi Covid 19, daya saing dan produktivitas daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu meningkatkan akses layanan dasar, mengembangkan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan dan mendorong pemerataan pendapatan dan akses produktif. Selain itu untuk menurunkan indeks gini, pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk menekan indeks gini tersebut didukung oleh program jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengelolaan pendidikan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan program prioritas lainnya.

2.1.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan,

dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut kondisi kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 yang disajikan dalam grafik.

Grafik 2. 8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 17,23 ribu jiwa atau mencapai 7,59% dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 17,27 ribu jiwa atau mencapai 7,53% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dengan berjumlah 17.210 jiwa atau mencapai 7,49% sedangkan persentase kemiskinan pada tahun 2023 dengan capaian 7,48%. Penurunan angka kemiskinan tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15,90 ribu jiwa atau angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar 6,90%.

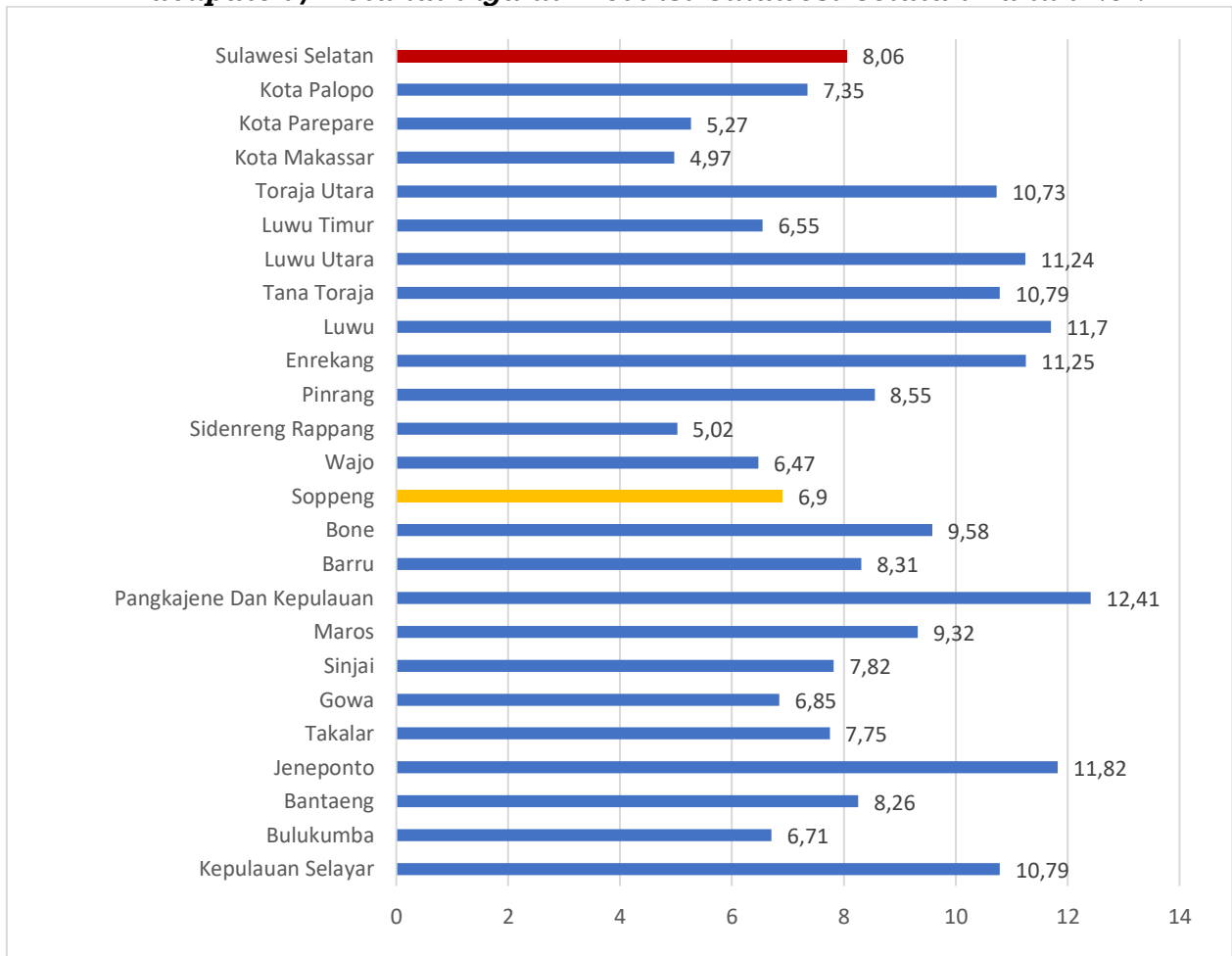
Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi angka indeksinya, semakin parah kemiskinannya. Selama tahun 2020–2024 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dimana pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,83%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,24%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan capaian angka 0,91%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 1,44%. Indeks kedalaman kemiskinan tersebut kembali menurun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,79%. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,16% dan pada tahun 2021 sebesar 0,28% sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan pada capaian 0,21%. Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 0,40% dan kembali menurun di tahun 2024 sebesar 0,15%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (*poverty gap*) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah. Hal tersebut didukung oleh program pembangunan untuk mengatasi kemiskinan tepat sasaran. Selain itu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 serta peningkatan akses layanan dasar yang dilakukan. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor maupun intervensi terhadap wilayah dengan indeks kedalaman yang tinggi. Hal tersebut didukung oleh program prioritas pembangunan daerah seperti jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perumahan dan Kawasan permukiman kumuh, pengelolaan pendidikan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan sarana/prasarana pertanian dan program lainnya. Untuk lebih jelasnya capaian angka kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 9. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

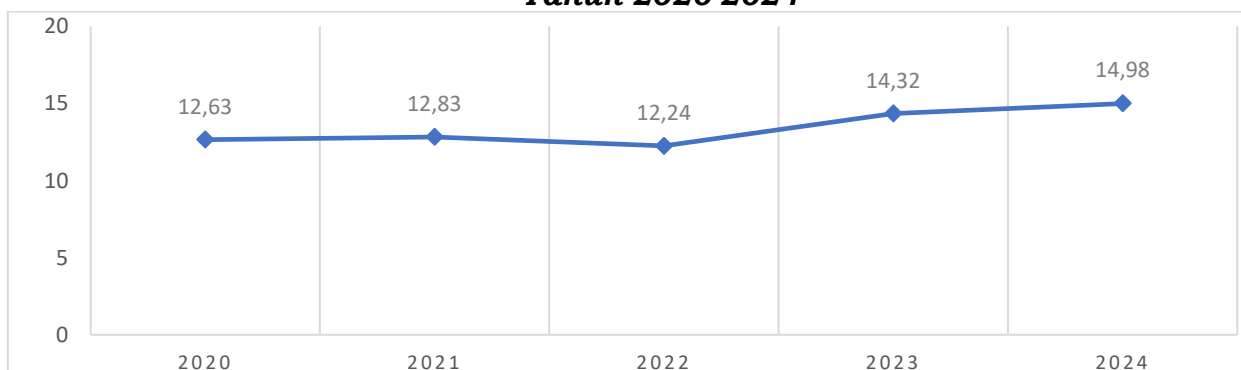
Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*Pro Job*).

2.1.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2020 mencapai 12,63% dan mengalami peningkatan sebesar 12,83% pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 12,24%. Pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat menjadi 14,32% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 14,98%. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.

Grafik 2. 10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng, 2025

2.1.1.7 Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	20,0	25,34	14,52	15,00	24,00
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan / 100)*100%)	%	20,0	25,34	14,52	15,00	24,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 penguatan cadangan pangan mencapai 20 Ton, meningkat menjadi 25,34 ton pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14,52 ton dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 15,00 ton, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 24,00 ton.

Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.1.1.8 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Kontribusi PDRB Pertanian Khusus Palawija Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	672.229,70	737.123,00	737.808,95	574.186,29	743.845,99
2	Jumlah PDRB sektor pertanian /perkebunan	Juta Rp	2.931.461,20	3.564.663,27	3.356.938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
	Kontribusi Sektor Pertanian(Palawija) Terhadap PDRB	%	22,93	20,68	21,98	15,76	17,53

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2020 sebesar 22,93% mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,98% sedangkan untuk tahun 2023 kembali menurun dengan persentase capaian sebesar 15,76%. Di tahun 2024 Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB dalam sektor pertanian sebesar 17,53%.

2.1.1.9 Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2. 4 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan	Juta Rp	2,931,461.20	3.064.634,30	3.356,938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	11,382,120.00	12.426.780,00	13.741.836,11	14.909.330,00	16.099.180,00
	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	%	25,75	24,66	24,43	24,43	26,35

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada Tahun 2020, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB mencapai 25,75% dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 24,66%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi 24,43% dan pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,35%.

2.1.1.10 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB sektor pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2. 5 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	808,273.63	1,026,402.00	1.075.044,90	1.219.899,50	1.613.006,70
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	2,931,461.20	3,564,663.27	3.356.938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	27,57	28,79	32,02	33,49	38,02

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa tahun 2020 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian

sebesar 27,57% dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 28,79%, sedangkan pada tahun 2022 kontribusi sektor perkebunan mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 32,02%. Di tahun 2023 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 33,49% dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 38,02%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.1.1.11 Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	276.589	280.911	296.945	275.768,25	247.784,99
	b. Jagung	Ton	195.504	178.341	191.742	138.096,46	182.031,10
	c. Kedelai	Ton	525	108	220	142,69	144,70
	d. Kacang Tanah	Ton	1.067	801	135	734,42	19,29
	e. Kacang Hijau	Ton	61	217	160	55,51	56,20
	f. Ubi Kayu	Ton	1.526	-	298	469,59	382,54
	g. Ubi Jalar	Ton	104	101	209	247,15	506,34
	Jumlah	Ton	475.376	460.479	489.709	415.514,07	430.925,16

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis tanaman pangan sebagaimana tabel di atas yaitu 475.376 ton dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 460.479 ton, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 489.709. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 415.514,07 ton dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 430.925,16 ton. Untuk tahun 2022 peningkatan produksi sektor pertanian mengalami peningkatan untuk padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, sementara untuk kacang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terjadi fenomena el nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang sangat sangat

signifikan. Di tahun 2024 kembali terjadi peningkatan produksi dikarenakan kondisi iklim yang membaik.

2.1.1.12 Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 7 Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Sektor Perkebunan						
	a. Kelapa Dalam	Ton	2.988,43	3.024,38	3.123,97	3.451,40	3.495,27
	b. Kelapa Hibrida	Ton	84,9	83,85	83,32	81,69	81,50
	c. Kopi Robusta	Ton	63,12	-	53,06	6,04	50,63
	d. Cengkeh	Ton	37,21	37,04	37,43	1,08	34,68
	e. Kakao	Ton	4.158,15	3.483,11	6.148,82	6.216,74	6.278,70
	f. Jambu Mete	Ton	930,48	825,12	825,16	26,67	562,84
	g. Lada	Ton	23,90	21,01	21,10	6,23	14,78
	h. Kemiri	Ton	2.028,02	2.029,42	2.031,06	2.100,50	2.102,16
	i. Aren	Ton	160,27	101,33	101,34	98,75	99,05
	j. Tembakau	Ton	101,25	121,60	104,16	131,49	168,30
	Jumlah	Ton	10.575,73	9.726,86	12.529,42	12.120,59	12.887,91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2021 jumlah produksi hasil perkebunan mencapai 9.726,86 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 12.529,42 ton. Peningkatan produksi hasil perkebunan tersebut pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya produksi kakao sebagai komoditi terbesar pada sub sektor perkebunan melalui peningkatan luas lahan maupun peningkatan kualitas budidaya produksi kakao. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12.120,59 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 12.887,91 ton.

2.1.1.13 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh

perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel kontribusi produksi kelompok tani terhadap total produksi tahun 2020-2024.

Tabel 2. 8 Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	276,589	280,911	296.945	275.768	247.785
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	276,589	280,911	296.945	275.768	247.785
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.1.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng. Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakkan ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2. 9 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	120.543,40	117.067,77	131.956,60	144.912,80	158.324,93
2	Total PDRB	Juta Rp	6.993.513,10	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,72	1,64	1,74	1,80	1,90

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2019-2024

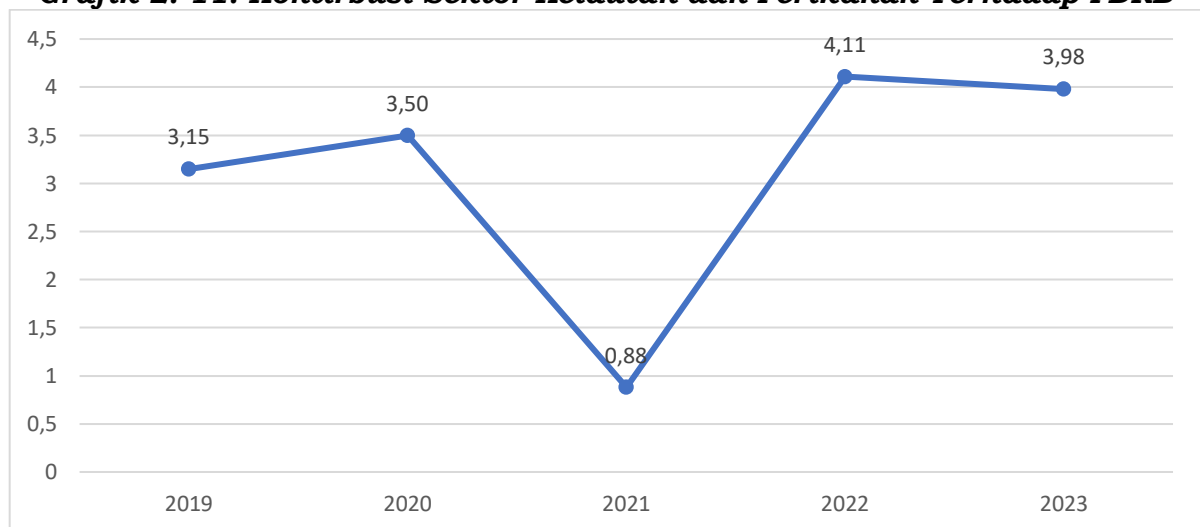
Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,72 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 1,64 persen sementara untuk tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,74% atau lebih tinggi dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada sektor pariwisata, sedangkan tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng Kembali mengalami peningkatan dengan capaian 1,80%. Pada tahun 2023 meningkat dengan capaian 1,90%.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.1.1.15 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2017, kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 2,84%, dan meningkat menjadi 3,15% ditahun 2019. Trend peningkatan terus berlanjut sampai menyentuh angka 3.50% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan secara signifikan pada angka 0,88%. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,11%, hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas pada sub sektor perikanan.

Grafik 2. 11. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2024

2.1.1.16 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan kontribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan

kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keililing, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2. 10 Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	1.047.940,10	1.005.657,51	1.092.249,20	1.152.253,51	1.263.130,07
2	Total PDRB	Juta Rp	6.993.533,30	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,98	14,07	14,40	14,31	15,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 14,98%, dan cenderung menurun pada tahun 2021 dengan capaian 14,40% penurunan tersebut merupakan dampak Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19, terutama untuk subkategori perdagangan besar. Sedangkan pada pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dengan capaian 14,31%. Pada tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 15,17%.

2.1.1.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATU AN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	710.989,40	691.955,40	753.015,10	817.720,00	909.235,93
2	Total PDRB	Juta	6.993.513,10	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,17	9,68	9,93	10,15	10,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 10,17%.

Pada tahun 2020 hampir seluruh subkategori pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi negatif. Namun, untuk Industri Kimia dan Farmasi mengalami peningkatan pertumbuhan dikarenakan konsumsi masyarakat terkait obat-obatan meningkat di masa pandemi corona. Selain itu, industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan dikarenakan ketiadaan pesanan yang menyebabkan nilai omzetnya bahkan tidak ada, oleh karena itu Pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020 yang sebesar 9,68% dan Kembali naik pada tahun 2021 sebesar 9,93% sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 10,15%, peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa sektor industri tumbuh positif. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sehingga capaian menjadi 10,92%

2.1.1.18 *Pertumbuhan Industri*

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	21	31	41	50	60
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3.749	3.780	3.821	3.871	3.931
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0,56	0,83	1,08	1,31	1,55

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2025

Pertumbuhan industri adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 s.d 2024) mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng terdapat penambahan jumlah unit industri setiap tahunnya.

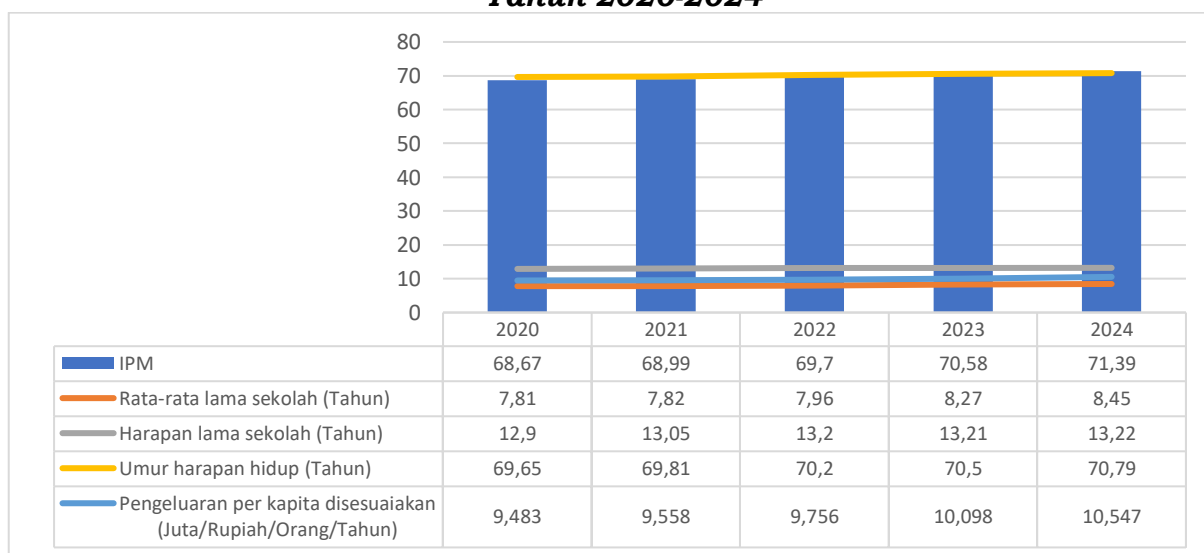
Pada tahun 2020 pertumbuhan industri mengalami peningkatan menjadi 0,56% dan pada tahun 2021 bertumbuh menjadi 0,83% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 1,08%. Pada tahun 2022 pertumbuhan industri meningkat menjadi 1,31% dan terus berlanjut di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 1,55%.

2.1.1.19 *Indeks Pembangunan Manusia*

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut,

pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2. 12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2020-2024

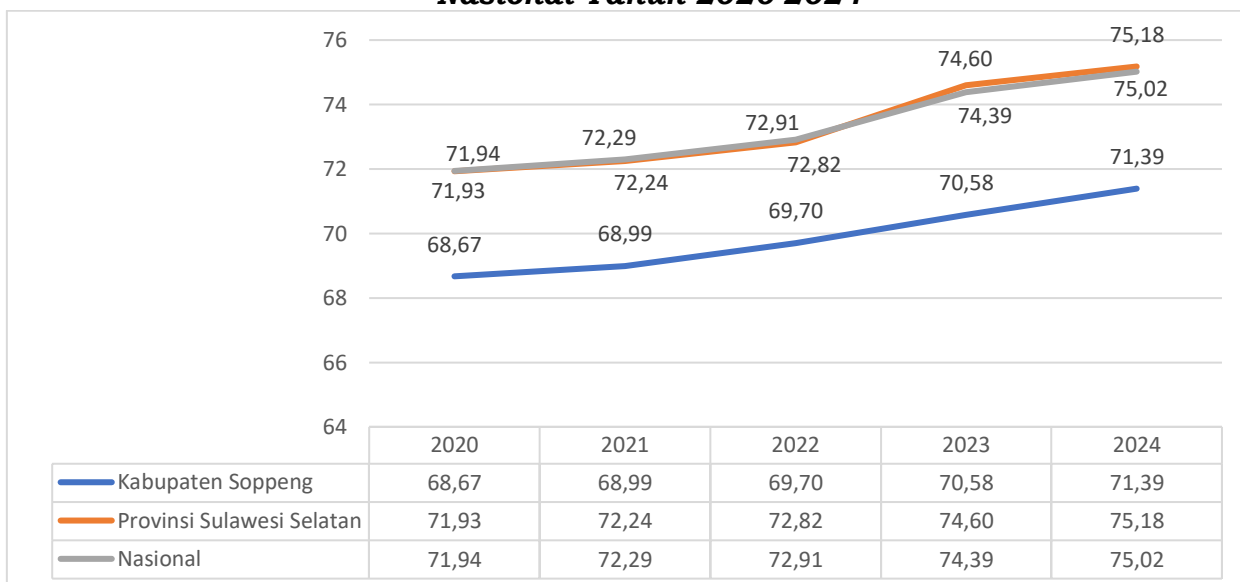


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun melalui penghitungan dengan metode baru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 poin meningkat di tahun 2021 telah mencapai 68,99 poin, di tahun 2022 kembali meningkat dengan capaian 69,70 poin atau naik sebanyak 0,71 poin. Pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Soppeng naik menjadi 70,58 poin dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 71,39 poin. Kenaikan menjadi indikator bahwa selama kurun

waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Akan tetapi, IPM Kabupaten Soppeng masih berada di bawah nilai IPM Nasional dengan capaian 75,02 poin dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 poin. Untuk capaian IPM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 13. IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

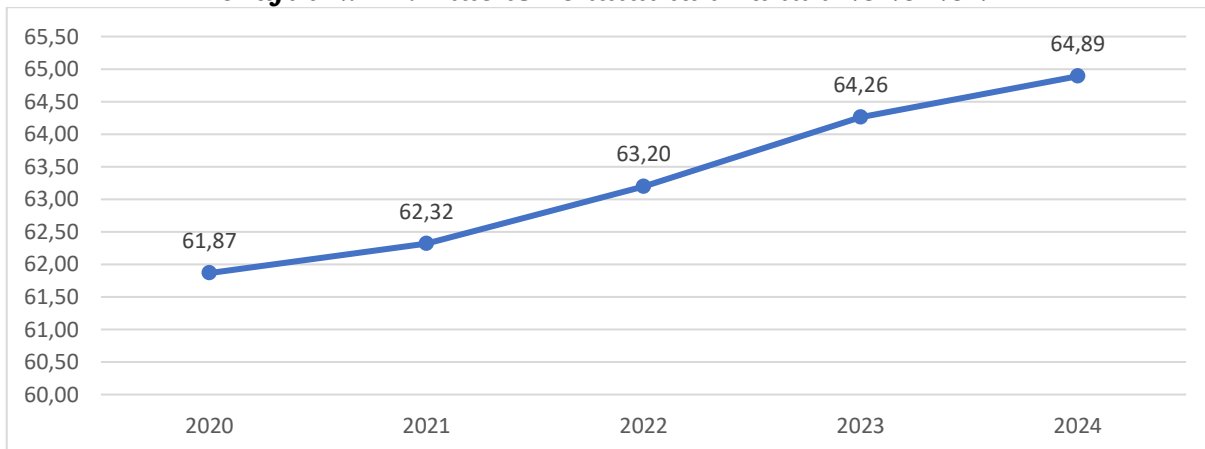


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.20 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai masing-masing sebesar 61,87 poin dan 62,32 poin. Pada tahun 2022 sebesar 62,20 poin, meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 64,26 poin dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 64,89 poin. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Grafik 2. 14. Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024

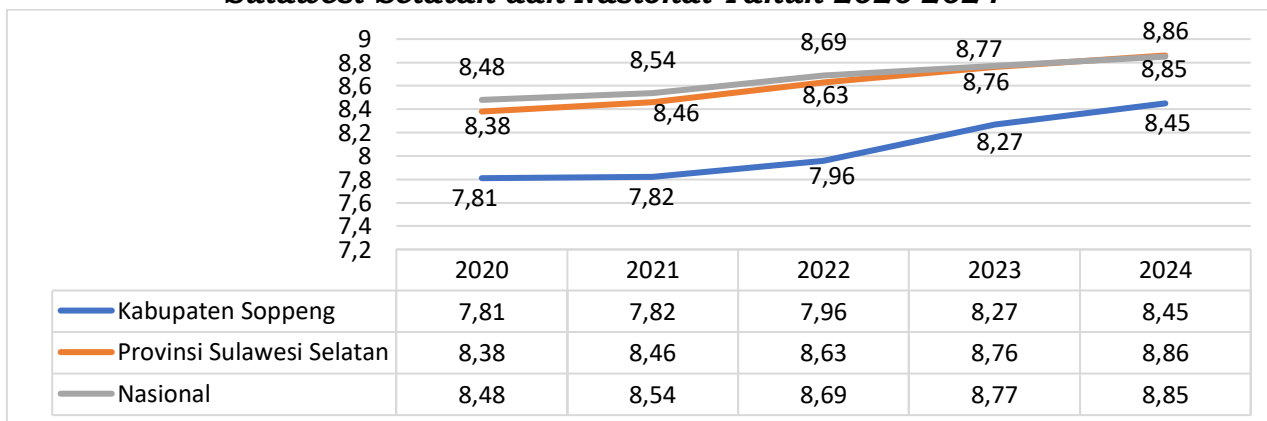


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.21 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng mencapai 7,81 tahun meningkat di tahun 2021 sebesar 7,82 tahun. Rata-rata lama sekolah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 7,96 tahun dan tahun 2023 menjadi 8,27 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar 8,45 tahun. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,86 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,85 tahun.

Grafik 2. 15. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

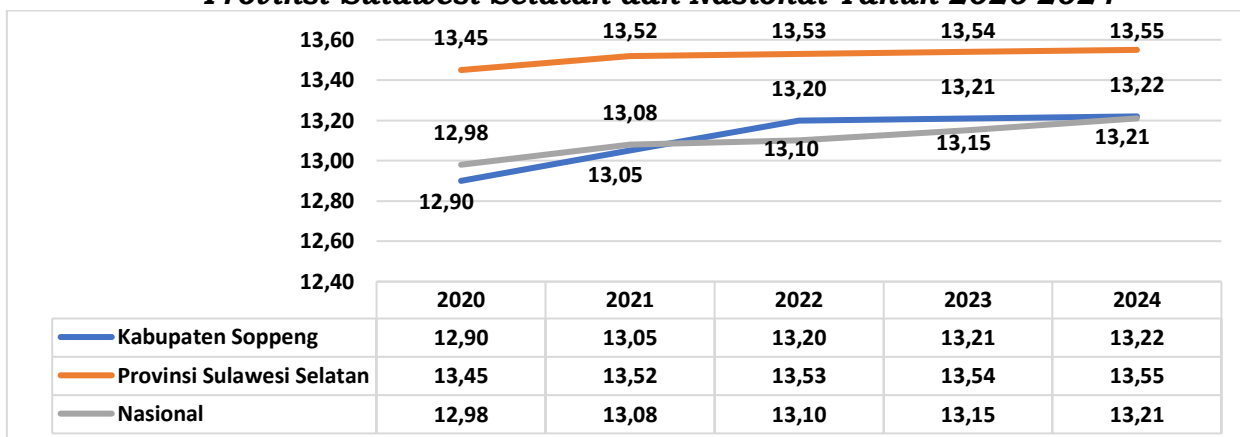
2.1.1.22 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat

ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 masih rendah yaitu sebesar 12,90 tahun mengalami peningkatan sampai tahun 2021 menjadi 13,05 sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 13,20 tahun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 13,21 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan harapan lama sekolah sebesar 13,22 tahun. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah.

Perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 16. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

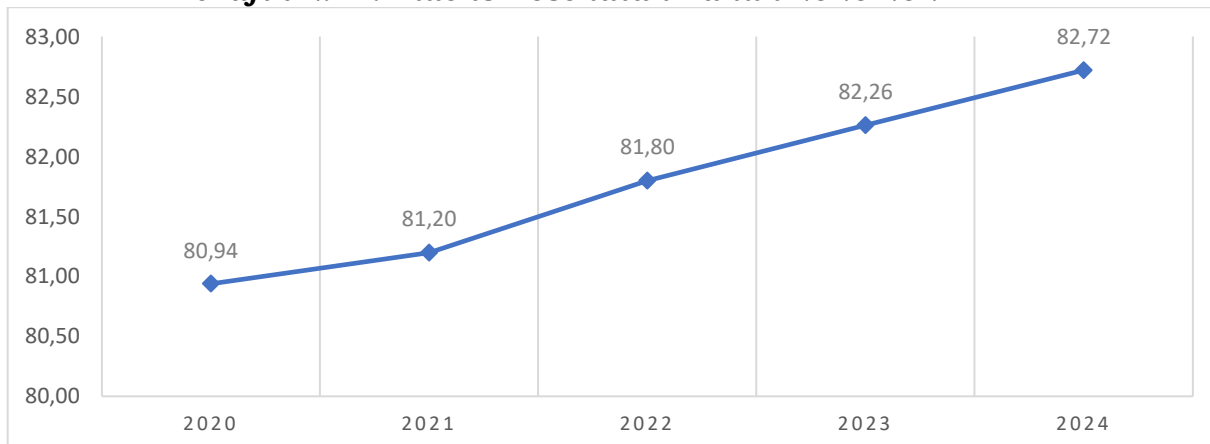


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.23 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 indeks kesehatan (metode baru) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2020 indeks kesehatan sebesar 80,94 sedangkan tahun 2021 sebesar 81,20 dan pada tahun 2022 sebesar 81,80 meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 82,26 dan 82,72. Berdasarkan hasil capaian lima tahun terakhir tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor kesehatan selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks kesehatan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut ini.

Grafik 2.17. Indeks Kesehatan Tahun 2020-2024

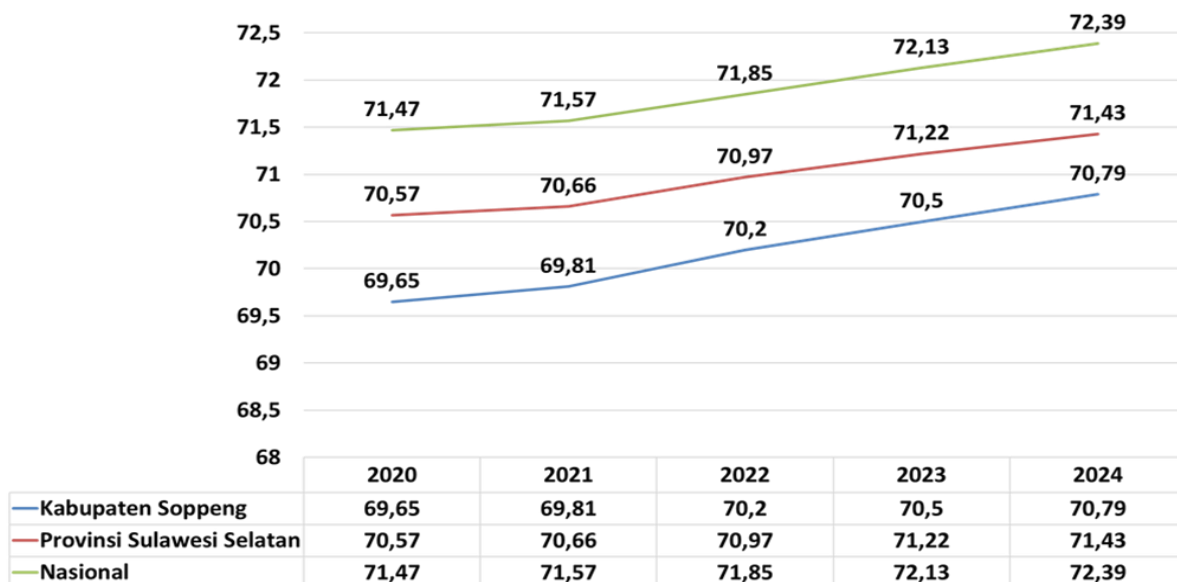


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.24 Umur Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 rata-rata angka harapan hidup mencapai 69,65, meningkat setiap tahun hingga mencapai 70,79 di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Capaian usia harapan hidup dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.18. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

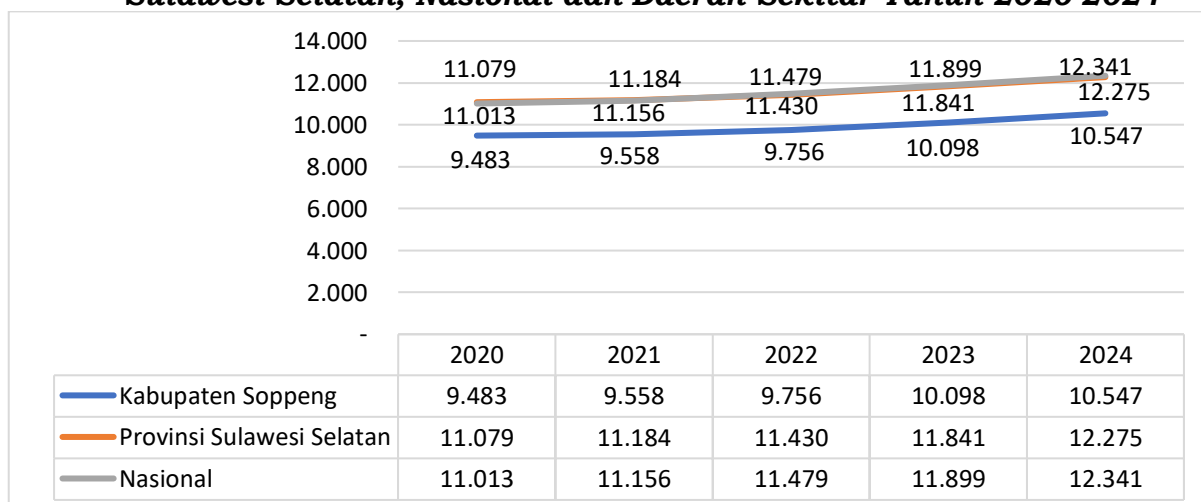
Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 70,79 tahun atau lebih pada tahun 2024. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai

jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

2.1.1.25 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng selama 5 (lima tahun terakhir memperlihatkan trend kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat capaian pengeluaran perkapita sebesar Rp9.483.000 hingga tahun 2021 mencapai sebesar Rp9.558.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.756.000,00 dan Rp10.098.000,00. Di tahun 2024 pengeluaran per kapita Kabupaten Soppeng kembali meningkat dengan capaian sebesar Rp10.547.000,00, walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan nasional yang sebesar Rp12.341.000,00 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp12.275.000,00.

Grafik 2. 19. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.26 Persentase Balita Gizi buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156 balita, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,024% atau sebanyak 3 kasus dari total balita sebanyak 12.759 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 4 kasus dengan capaian 0,034 kemudian pada tahun 2023 jumlah balita gizi buruk sebanyak 10 balita atau sebesar 0,090%. Di tahun 2024

capaian tersebut menurun sebesar 0,08% dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 9 balita.

Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua balita.

Tabel 2. 13 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	2	3	4	10	9
2	Jumlah balita	Balita	13.156	12.759	11.887	11.027	11.533
	% Balita Gizi Buruk	%	0,015	0,024	0,034	0,090	0,080

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.27 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 3,28% sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,67%. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi kurang kembali meningkat menjadi 4,75% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 5,41%.

Jumlah balita yang gizi kurang didapatkan berdasarkan data yang digunakan dalam aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2. 14 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	431	441	555	524	624
2	Jumlah balita	Balita	13.156	12.759	11.887	11.027	11.533

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,28	3,46	4,67	4,75	5,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.28 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sampai 2024 mencapai 100%. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari. Meskipun cakupan desa siaga aktif sudah mencakup seluruh desa, evaluasi terhadap kualitas pelayanan di masing-masing desa tetap perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada desa yang memerlukan dukungan lebih lanjut dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2. 15 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100

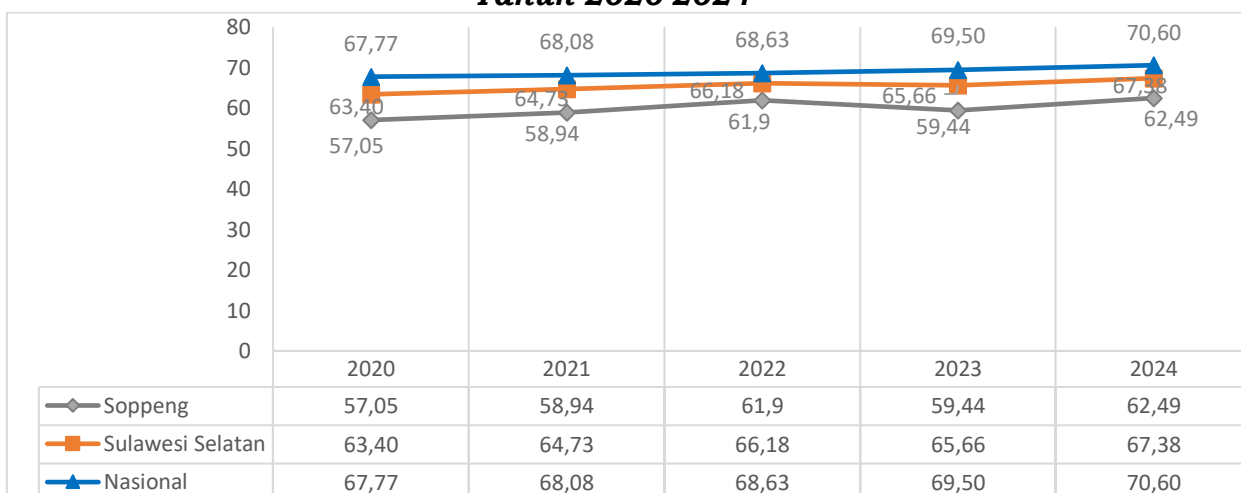
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dengan nilai 62,49% dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,38% dan capaian Nasional sebesar 70,60%. Kabupaten Soppeng menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang, namun harus didorong oleh upaya yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan

pertumbuhannya. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang relatif lebih rendah namun lebih dapat diandalkan. Nasional menunjukkan pertumbuhan yang paling stabil tetapi paling lambat. Ini mungkin mencerminkan hasil yang lebih terkontrol dan mungkin lebih dipengaruhi oleh kebijakan makro atau tren yang lebih luas. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



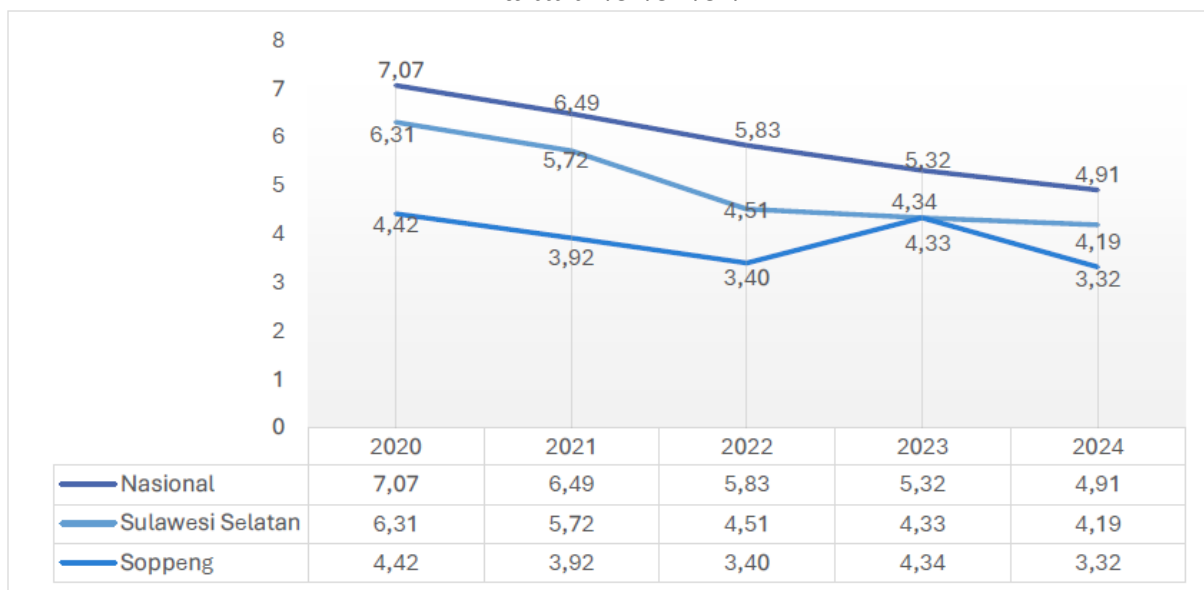
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.30 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada grafik selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan capaian yang lebih baik dari capaian nasional dan capaian provinsi. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dengan capaian sebesar 3,32%, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional.

Capaian tingkat pengangguran terbuka dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

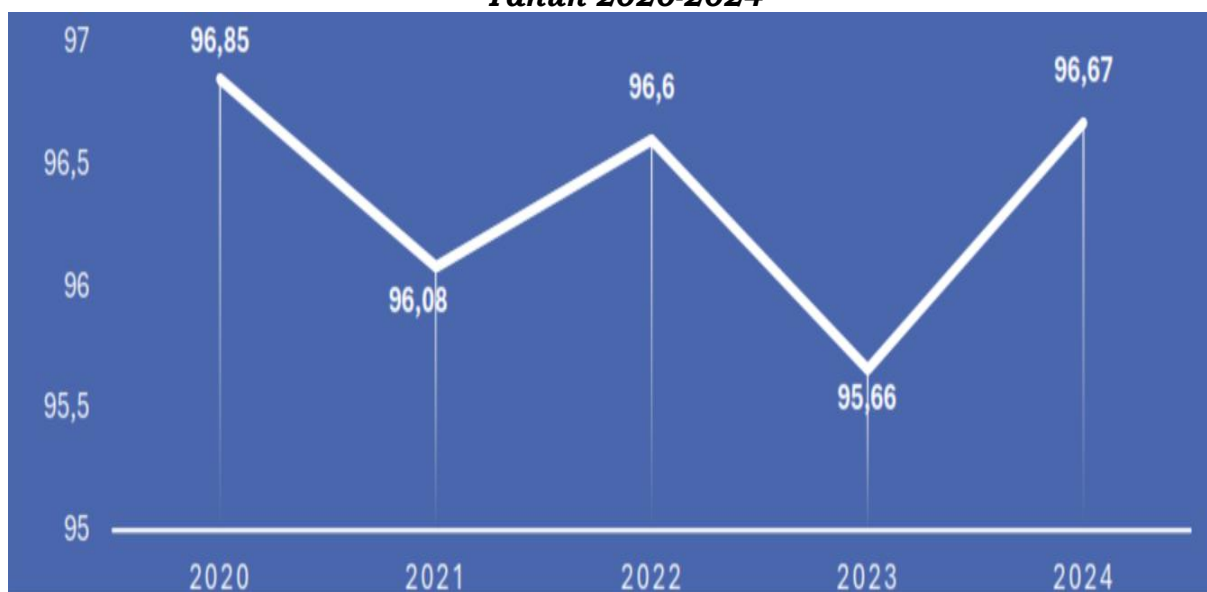


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.31 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja sebesar bekerja sebesar 95,85% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 96,08%, dan tahun 2022 sebesar 96,60%, Pada tahun 2023 rasio penduduk yang bekerja menurun dengan capaian 95,66% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 96,67%.

Grafik 2.22. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Soppeng, 2025

2.1.1.32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 16 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing-masing Kelompok Pangan	Skor	93,3	75,8	76,8	80,8	81,8
	Padi-Padian	Skor	25	25	25	25	25
	Umbi-Umbian	Skor	2,5	0,3	0,4	0,5	0,3
	Pangan Hewani	Skor	24	18,5	18,7	20,5	20,6
	Minyak dan Lemak	Skor	0,4	4,5	5,0	5,0	4,9
	Buah/Biji Berminyak	Skor	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
	Kacang-Kacangan	Skor	10	3,8	3,7	5,2	4,5
	Gula	Skor	1,1	1,7	1,9	1,7	1,7
	Sayur dan Buah	Skor	30	21,7	21,8	22,5	24,4
	Lain-lain	Skor	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 capaian skor pola pangan harapan sebesar 93,3% dan pada tahun 2021 menurun dengan capaian sebesar 75,8% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 76,8%. Di tahun 2023 skor pola pangan harapan Kabupaten Soppeng sebesar 80,8% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 81,8%.

Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100%, capaian 2020-2024 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng tahun 2024 masih

mengacu ke dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 dengan menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 5 Tujuan pembangunan serta 11 Sasaran yang terdiri dari 6 indikator tujuan dan 18 indikator sasaran. Penetapan tujuan, sasaran beserta indikator tersebut untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini capaian IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng Tahun 2024

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak (T1)	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Nilai	88,46	88,41	99,94
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	%	100	98,78	98,78
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	%	87	88,72	101,98
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) (T2)	IPM	Nilai	70,87	71,39	100,73
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	Indeks Pendidikan	Nilai	64,92	64,89	99,95
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	Indeks Kesehatan	Nilai	78,08	82,72	105,94
Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata (T3)	Indeks Gini	Nilai	0,371	0,371	100
	PDRB/Perkapita (Rp)	Rp	66.942.000	67.260.000	100,48
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	6,71	4,06	60,51
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	4,15	3,32	125
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	Angka kemiskinan (%)	Jiwa	6,28	6,9	91,01
Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah (T4)	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Nilai	75,75	-	-
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	67,71	72,53	107,12
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya terhadap PDRB	Milyar Rupiah	343,618	341,07	99,26
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (Kasus)	Kasus	70	26	269,23
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif (T5)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / kategori	60/B	72,05	120,08
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	Skor / Status Kinerja	4,2/Tinggi	2,19/Rendah	52,14
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	A	B	80
	Opini laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	100
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Skor / Status Kinerja	63 (B)	65,17	103,44
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	45,01-50,00 (inovatif)	64,54	129,08
Memelihara daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup (T6)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nilai / kategori	Belum terlampaui	Belum terlampaui	100
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	131,2	131,2	100
	Indeks Gas Rumah Kaca (IRK)	Ton Co2	36238	36899,79	101,83
	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	Nilai	66,94	68,74	102,69

2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kinerja urusan pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi target. Selain itu ada beberapa indikator yang memiliki realisasi akan tetapi tidak memiliki target dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026. Untuk hasil rekapitulasi capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 (Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5,8	6	6,31	6,71	6,15	6,18	3,33	4,06	<	
1.2	Laju Inflasi					3	2,26	5,52	2,84	0,68	>	
1.3	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	55,12	59,06	63,01	66,942	52,75	58,216	62,8	70,12	>	
1.4	Indeks Gini		0,395	0,387	0,379	0,371	0,406	0,386	0,39	0,371	=	
1.7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%				93	92,47	92,51	92,86	93,10	>	
1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,13	69,71	70,29	70,87	68,99	69,7	70,58	71,39	>	
1.11	Angka melek huruf	%				94,5	87,83	91,99	94,5			
1.12	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)					8,16	7,82	7,96	7,96	8,45	>	
1.13	Angka usia harapan hidup (tahun)					70,6	69,81	70,2	70,5	70,79	>	
1.14	Persentase balita gizi buruk	%	0	0	0	0,03	0,024	0,034	0,09	0,08	<	
1.15	Prevalensi balita gizi kurang		0	0	0	4,47	3,46	4,67	4,75	5,41	<	
1.16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
1.17	Angka partisipasi angkatan kerja											
1.18	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%				62,1	58,94	61,9	59,44	62,49	>	
1.19	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,4	3,9	4,22	4,15	3,92	3,4	4,34	3,32	>	
1.20	Rasio penduduk yang bekerja	%				96,8	59,04	96,6	95,66	96,67	<	
1.25	Indeks Kepuasan Masyarakat						84,09 (Baik)	85,48 (Baik)	86,2 (Baik)	88,04	>	
1.26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%				14,5	12,83	12,12	14,32	14,98	>	
1.27	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	
1.28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin					75,8	76,8	80,8	81,8	>	
1.29	Penguatan cadangan pangan	ton			15		25,34	14,52	15,6	24	>	
1.30	Penanganan daerah rawan pangan						n.a	10,9				
1.31	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%					14,27	28,59	24,43	26,35	>	
1.32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%					20,68	21,98	15,76	17,53	>	
1.33	Produksi sektor pertanian (ton)				425042		460.479	1.935,69	415.515	430925	>	
1.34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%					28,79	32,02	33,49	38,02	>	
1.35	Produksi sektor perkebunan (Ton)	ton			10391,62		9.726,86	12.529,42	12.120,59	12887,91	>	
1.36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
1.39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%					1,74	1,8	1,9	1,90 *	>	
1.40	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%					0,88	4,11	3,98	3,98 *	>	
1.41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%					14,4	14,31	15,17	15,17 *	>	
1.42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%					9,93	10,15	10,92	10,92 *	>	
1.44	Pertumbuhan industri	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,83	1,08	0,36	1,55	>	
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
2.1	Nilai tukar petani (Sektor Pangan)						103,15	103,61	102,95	103,42	>	
2.2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%					12,24	14,29	12,24	18,37	>	
2.3	Rasio ketergantungan						45,7	44,76	46,06	46,13	>	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3	ASPEK PELAYANAN UMUM											
3,1	Layanan Urusan Wajib											
3.1.2001	Pendidikan											
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100	100	100	100	65,75	68,07	67,72	73,35	<	
3.1.1.2	Angka Partisipasi kasar											
3.1.1.2.1	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	100	100	100	100	99,38	97,76	98,47	98,47*	<	
3.1.1.2.2	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	89,21	100	100	100	101,08	99,42	99,04	99,04*	<	
3.1.1.3	Angka Partisipasi Murni											
3.1.1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	100	100	100	100	90,04	91,1	91,9	91,9*	<	
3.1.1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	100	100	100	100	65,07	81,35	81,61	81,61*	<	
3.1.1.4	Angka Partisipasi Sekolah:											
3.1.1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	100	100	100	100	107,22	96,23	98,87	98,87*	<	
3.1.1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	100	100	100	100	82,38	94,07	96,29	96,29*	<	
3.1.1.5	Angka Putus Sekolah:											
3.1.1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0	0	0	0	0,063	0,035	0,05	0,05*	<	
3.1.1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0	0	0	0	0,106	0,24	0,12	0,12*	<	
3.1.1.6	Angka Kelulusan:											
3.1.1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100	100	99,83	99,92	99,86	99,86*	<	
3.1.1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100	100	100	100	99,91	99,29	99,53	99,53*	<	
3.1.1.7	Angka Melanjutkan (AM):											
3.1.1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs		100	100	100	100	102,41	98,63	100,45	100,45*	>	
3.1.1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	100	100	100	100	95,44	95,62	99,82	99,82*	<	
3.1.1.8	Fasilitas Pendidikan:											
3.1.1.8.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	85,9	86,07	86,24	86,41	77,2	78,1	75,77	75,77*	<	
3.1.1.8.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik		83,15	84,44	85,72	87,01	80,81	81,01	81,28	81,28*	<	
3.1.1.9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar		125,82	125,82	125,82	125,82	107,43	109,65	110,72	110,72*	<	
3.1.1.10	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar		9	10	11	11	12,08	12,39	8	0,12*	<	
3.1.1.11	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	88	90	92	92	87,83	n/a	92	94,50*	>	
3.1.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	100	100	100	94,44	96,9	96,05	96,05*	<	
3.2.2002	Kesehatan											
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		10,6	10,5	10,3	10	11,83	20,75	5,43	14,8	<	
3.1.2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		95	89,5	89,7	90	98,82	97,93	100	98,52	>	
3.1.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		1,02	1,2	1,1	1	0,36	23,71	0,017	3,05	<	
3.1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		7,5	7,6	7,5	7,4	0,36	14,08	1,32	12,64	<	
3.1.2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		1,2	1,2	1,1	1	0,72	0,74	0,12	249,58	<	
3.1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita		25	25	25	25	25,34	30,6	28,33	28,15	>	
3.1.2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,26	<	
3.1.2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,004	0,004	0,004	0,008	0,004	0,0042	0,0042	0,0041	<	
3.1.2.9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	0,43	0,49	0,42	>	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.1.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		3,49	3,49	3,49	3,49	4,09	6,06	6,01	5,36	>	
3.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100	100	100	100	100	61,99	100	100	=	
3.1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		100	100	100	100	100	94,37	100	100	=	
3.1.2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		82,86	80	85	90	78,57	90	97,14	0	<	
3.1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		100	30	28	25	1,32	1,49	1,54	1,58	<	
3.1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		100	100	100	100	80,93	112,73	100	63,06	<	
3.1.2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		100	> 1	>1	> 1	0	0	0	0,0043	>	
3.1.2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		100	100	100	100	2,56	8,75	8,75	12,09	<	
3.1.2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		100	100	100	100	25,98	35,47	100	22,05	<	
3.1.2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0	0	0	0	83,24	166,38	78,94	168,65	<	
3.1.2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0	0	0	0	0	4,19	17,45	14,92	<	
3.1.2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		100	100	100	100	25,98	46,32	54,85	26,65	<	
3.1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		100	100	100	100	96,55	85,85	81,5	81,7	<	
3.1.2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	33,33	41,74	100	=	
3.1.2.25	Penderita diare yang ditangani		100	100	100	100	4,41	49,52	77,88	57,96	<	
3.1.2.26	Angka kejadian Malaria		0	0	0	0	0	7,54	5,81	5,39	<	
3.1.2.27	Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0	0	0	=	
3.1.2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		0	0	0	0	0	0	0	0	=	
3.1.2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		0	0	0	0	0	0	0	0	=	
3.1.2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0	0	0	0	0,0055	0,0109	0	0,0095	<	
3.1.2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100	100	100	100	9,84	42,05	65,44	65,44*	<	
3.1.2.34	Cakupan kunjungan bayi		100	100	100	100	100	108,24	100	105,23	>	
3.1.2.35	Cakupan puskesmas		212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	=	
3.1.2.36	Cakupan pembantu puskesmas		62,86	62,86	62,86	62,86	62,86	61,43	61,4	87,75	>	
3.1.2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100	100	100	100	100	82,3	100	53,25	<	
3.1.2.38	Cakupan pelayanan nifas		100	100	100	100	100	91,26	100	55,17	<	
3.1.2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100	100	100	100	100	61,88	100	97,82	<	
3.1.2.40	Cakupan pelayanan anak balita		100	100	100	100	76,06	94,66	100	53,75	<	
3.1.2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		100	100	100	100	92,54	94,74	100	100	=	
3.1.2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100	100	100	100	97,76	97,76	88,73	100*	=	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.1.2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	100	100	100	100	0	100	100	=	
3.1.2003	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
3.1.3.1	Pekerjaan Umum:											
3.1.3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,6	0,61	0,62	0,63	0,57	0,59	0,52	0,54	<	
3.1.3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,0038	0,0038	0,0039	0,0039	0,0038	0,0041	0,004	0,004	>	
3.1.3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	10	9,5	9	8,5	8,12	9,76	9,76	9,76	<	
3.1.3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	58,45	58,5	58,6	58,6	57,32	58,59	52,8	52,8	<	
3.1.3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	48	48,2	48,4	48,6	47,12%	47,12%	46,8	46,8	<	
3.1.3.1.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70	72,5	75	77,25	99,95	72,68	75,05	75,02	<	
3.1.3.1.7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,27	55,5	56	56,5	54,21	54,21	54,21	54,21	<	
3.1.3.1.8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		1,79	1,7	1,6	1,5	1,79%	1,79%	2,28	0,9	>	
3.1.3.1.9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%								2,28	>	
3.1.3.1.10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	65	68	72	75	65,31	53,28	81	81	>	
3.1.3.1.11	Rasio Jaringan Irigasi		0,044	0,066	0,088	0,11	0,022	4,85	9,62	9,62	>	
3.1.3.1.12	Persentase penduduk berakses air minum		95	95,5	96	96,5	94,71	94,58	98,95	98,95	>	
3.1.3.1.13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan		30	35	40	45	46,10%	33,07%	38,29	38,29	<	
3.1.3.1.14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		1,25	1,5	1,75	2	22,15	11,84	15,38	15,38	>	
3.1.3.1.15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,018	0,018	0,019	0,019	0,017	0,017	0,165	0,165	>	
3.1.3.1.16	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	2,068	2	0,0021	0,0021	<	
3.1.3.1.17	Penataan Ruang:											
3.1.3.1.18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		64	65	66	67	3,27%	3,27%	5,02	5,02	<	
3.1.3.1.19	Ketaatan terhadap RTRW		32	40	43	45	97,96	60,53	60,53	60,53	>	
3.1.2004	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
3.1.4.1	Rasio rumah layak huni		0,2134	0,2138	0,2142	0,2146	0,211	0,21	0,217	0,217	>	
3.1.4.2	Rasio permukiman layak huni		0,98	0,98	0,98	0,98	Na	0,98	0,98	0,98	=	
3.1.4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		88,21	88,38	88,56	88,73	88,21	88,21	92,14	92,14	>	
3.1.4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19	68,88	68,88	>	
3.1.4.5	Persentase permukiman yang tertata	%	0,74	0,74	0,74	0,74	98,54	98,54	98,54	98,54	>	
3.1.4.6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,06	0,055	0,0523	0,0493	0,06	0,06	0,06	0,06	<	
3.1.4.7	Proporsi rumah tangga layak permukiman		3,41	3,41	3,41	3,41	2,05	2,05	2,05	2,05	>	
3.1.4.8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		63,84	63,84	63,84	63,84	100	100	100	100	>	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.1.2005	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
3.1.5.1	Cakupan petugas :											
3.1.5.1.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	68,49	68,49	68,49	129,1	126,09	128	128	>	
3.1.5.1.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	75	80	85	85	100	100	100	100	>	
3.1.5.2	Cakupan pelayanan :											
3.1.5.2.1	bencana kebakaran kabupaten/kota		100	100	100	100	94,2	94,2	94,2	94,2	<	
3.1.5.2.2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	100	100	64,44	77,78	92,38	92,38	<	
3.1.5.2.3	Persentase Penegakan PERDA		100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.2006	Sosial											
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	50	60	70	80	100	100	100	100	>	
3.1.6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	0	0	0	0	<	
3.1.6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.1.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	20	30	40	100	100	100	100	>	
3.2.6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3,2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
3.2.2001	Tenaga Kerja											
3.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		0	0	0	0	0	0	0	0	=	
3.2.1.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25	25,5	26	26,5	61,32	95,53	6,95	6,95	<	
3.2.1.3	Keselamatan dan perlindungan		8,5	8,6	8,7	8,8	9,82	5,45	2,3	2,3	<	
3.2.1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	95	95,3	95,4	95,5	71,36	11,42	21,64	21,64	<	
3.2.1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.2002	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
3.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12,5	13,25	13,25	14,25	13,79	13,79	13,58	8,79	<	
3.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	23,35	24	24	25	23,33	23,33	23,33	26,67	>	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	93	93,27	93,52	93,75	90,27	90,27	97,23	91,21	<	
3.2.2.4	Rasio KDRT		0	0	0	0	0,0127	0,01	0,06	0,011	<	
3.2.2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,13	98,25	98,75	98,75	89,1	97,23	97,23	97,24	<	
3.2.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	86,67	100	100	=	
3.2.2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	17,39	17,39	17,39	17,39	0,64	0	6,38	2,22	<	
3.2.2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	0	100	100	=	
3.2.2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		0,94	0,94	0,95	0,96	0,93	0,99	0,95	0,95	<	
3.2.2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,31	1,32	1,35	1,36	1,04	124,23	1,06	1,06	<	
3.2.2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1,1	1,3	1,5	1,5	0,8	0,86	1,43	1,43	<	
3.2.2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		1,1	1,2	1,3	1,35	1,45	1,27	1,66	1,66	<	
3.2.2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		0,97	0,98	0,98	0,99	0,98	0	0,98	0,98	<	
3.2.2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	36,36	40	49,7	50,75	19,22	19,22	19,25	19,44	<	
3.2.2003	Pangan											
3.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	%	252	283	316	350	351,3	373,1	317	339,78	<	
3.2.3.2	Ketersediaan energi perkapita	kcal	9438	9721	10110	10615	11,995.00	12802	10383	11061	>	
3.2.3.3	Ketersediaan protein perkapita	gram	241,26	248,5	258,44	271,36	288.20	308,61	265,61	265	<	
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	78	0	0	<	
3.2.2004	Pertanahan											
3.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%				0	95,37	34,13	100	36,78	>	
3.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0	0	50	0	50	33,33	50	0	=	
3.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.2005	Lingkungan Hidup											
3.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	<	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	<	
3.2.5.3	Terseleenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		72	72	72	72	60	50	55	54,44	<	
3.2.5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		91,5	91,6	91,7	91,8	93,87	94,8	94,35	95,18	>	
3.2.5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		78,9	78,9	78,9	78,9	40,85	40,85	44,51	44,39	<	
3.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	63	65	67	69	66%	65%	11,47%	7	<	
3.2.5.8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		50	50	50	50	1	1	1	2	<	
3.2.5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.2.5.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.5.11	Timbulan sampah yang ditangani	%	74	73	72	71	74,06	77,57	66,5	80	>	
3.2.5.12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	24	26	27	28	9,62	9,18	13,11	14	<	
3.2.5.13	Persentase cakupan area pelayanan	%	27,2	27,2	27,2	27,2	27%	27%	28,60%	28,6	>	
3.2.5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	74	73	72	71	74,06	77,57	66,5	80,29	>	
3.2.5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		75	75	75	75	0	0	73,9	75	=	
3.2.5.16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	=	
3.2.5.17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	2,94	2,94	0	0	=	
3.2.2006	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
3.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	=	
3.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	>	
3.2.6.3	Rasio pasangan berakte menikah		0,53	0,63	0,64	0,65	0,64	0,67	0,71	0,76	>	
3.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=	
3.2.6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	99	99	99	99,27	99,1	99,24	98,61	<	
3.2.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,35	98	98	98	97,67	99,29	99,27	99,3	>	
3.2.2007	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
3.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	89,8	89,8	92	96	<	
3.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3	3	3	3	3	3	3	1	<	
3.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	4	4	4	4	3	3	3	11	>	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.2.7.4	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	4	4	4	4	0%	0%	0%	100	>	
3.2.7.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,4	34,5	34,6	34,7	34,4	34,4	34,4	34,6	<	
3.2.7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80	80	80	80	80	80	=	
3.2.2008	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
3.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,07	0,07	0,06	0,05	0,13	0,13	0,13	0,16	<	
3.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)		2,16	2,15	2,13	2,1	2,16	2,32	2,11	2,07	>	
3.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	29,41	38,24	50	100	=	
3.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	85	90	95,9	100	61,76	17,65	17,65	38,24	<	
3.2.8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1	1	1	1	0	0	0	0	<	
3.2.8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7	7	8	9	10	6	0	9	=	
3.2.8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1	1	2	3	2	1	0	3	=	
3.2.8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	1,21	1,21	1,21	1,21	1,15	0,17	0,27	1	<	
3.2.8.9	Ratio Akseptor KB	%	78,22	78,22	78,22	79	75,05	58,5	64,4	64,25	<	
3.2.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	77,38	77,38	77,38	78	75,05	64	65,4	64,25	<	
3.2.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		16,66	16,1	15,9	15,6	16,65	39,5	20,65	20,9	<	
3.2.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,81	3,27	32,12	32,46	<	
3.2.8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12	11	10	13,98	26,77	13,64	10,64	<	
3.2.8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	19,19	30	35	36	2,97	18,13	20,58	22,33	<	
3.2.8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	29,83	45	56	57	33,25	0,48	6,26	31,66	<	
3.2.8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	60,67	65,67	67	70	64,23	94,89	44,29	100	>	
3.2.8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56,73	58,73	60	65	56,1	0,33	13,29	78,45	>	
3.2.8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	53	53	60	65	36,91	6,85	6,62	72,04	>	
3.2.8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	50	62,5	75	25	25	100	100	>	
3.2.8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	jiwa	7,75	7,7	7,8	7,9	7,75	6,625	6,37	662,5	>	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.2.8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	85	86	87	47,87	35,12	27,35	140,52	>	
3.2.8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	25,97	26	27	28	77,61	33,41	14,76	75,12	>	
3.2.8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0			0	0	=	
3.2.8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	85,85	87,57	88,44	89,33	23,01	71,28	94,73	60,96	<	
3.2.8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	20	20	21	22	20	20	21	21,5	<	
3.2.8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,02	0	0,58	>	
3.2.2009	Perhubungan											
3.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1005	1005	1005	1005	848	720	720	720	<	
3.2.9.2	Rasio izin trayek		0,0008	0,0009	0,0009	0,0009	0,0002	0,0001	0,00014	0	>	
3.2.9.3	Jumlah uji kir angkutan umum		90	100	130	130	0	0	1988	1988 *	>	
3.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		2	2	2	2	2	2	2	2*	=	
3.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	26,67	28,16	31,14	31,13	17,45	28,73	45,45	45,45*	>	
3.2.9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	65	70	100	100	0,00%	0,00%	12,26	12,26*	<	
3.2.9.7	Pemasangan Rambu- rambu		86	86	89	93	61,00%	81,40%	83,3	83,3*	<	
3.2.10	Komunikasi dan Informatika											
3.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		675	675	675	675	675	675	675	550	<	
3.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		65,88	65,88	65,88	65,88	66,15	71,48	73,41	66,67	>	
3.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	76	76	76	76	75%	77%	82%	80	>	
3.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	81,49	82,02	91,67	>	
3.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		61	61	61	61	61%	61%	63	66,67	>	
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah											

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	89,25	89,25	89,25	89,25	90,36	90,42	89,94	92,26	>	
3.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,16	99,25	99,32	99,37	99,16	99,26	99,33	99,38	>	
3.2.11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,16	99,25	99,32	99,37	99,16	99,26	99,33	99,38	>	
3.2.12	Penanaman Modal											
3.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		46	52	58	64	63	87	115	115	>	
3.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	RP	Rp 2.749	Rp 2.836	3.225	10090	Rp 1.23	Rp 1.01	3.478	3.478	<	
3.2.12.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	61,10%	64,76%	68,64	72,75	114,52%	37,85%	42,02	42,02 *	<	
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga											
3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	37,25%	51,02%	22	21,69	<	
3.2.13.2	Persentase wirausaha muda	%					100	93,44	5,23	5,31	>	
3.2.13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	33	41	50	58	84	69,23	58	51,85	<	
3.2.13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	90	90	90	100	69,7	63,89	63	56,94	<	
3.2.13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	55,4	60	66	72	98,45	41,12	7,73	16,13	<	
3.2.13.6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	7	10	15	20	9	68	47	105	>	
3.2.13.7	Jumlah prestasi olahraga	Atlet	14	14	14	18	4	68	136	105	>	
3.2.14	Statistik											
3.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.2.14.3	Buku "PDRB"	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.2.15	Persandian											
3.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	13	13	13	13	76%	100%	100	91	>	
3.2.16	Kebudayaan											
3.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		5	7	8	9	5	4	8	8	<	
3.2.16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		380	380	380	380	25	25	39,02	39,02	<	
3.2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		0	1	1	1	n.a	4	1	4	>	
3.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		3	3	3	3	8	8	16	16	>	
3.2.17	Perpustakaan											
3.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,65	3,71	4,15	4,27	1,41	10,51	63	0,48	<	
3.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	31,69	31,69	31,8	31,95	100	33,04	31,25	34,13	>	
3.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,19	0,21	0,23	0,25	1,58	1,57	0,15	0,49	>	
3.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	8924	11.340	12.096	12600	8.924	24.750	122.149	122.849	>	
3.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	15687	15687	15947	15947	15.687	200.477	111.018	12953	<	
3.2.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	56%	42%	100	5	<	
3.2.18	Kearsipan											

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	78,36	79,94	82,23	85,29	20,59	44,12	100	100	>	
3.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		1	2	2	2	1	1	2	2	=	
3,3	Layanan Urusan Pilihan											
3.3.2001	Pariwisata											
3.3.1.1	Kunjungan wisata	%	25	35	40	45	323	259,26	175	129	>	
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2	2	2	2	2	2	=	
3.3.1.3	PAD sektor pariwisata	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,18	0,19	0,24	1,54	>	
3.3.2002	Pertanian											
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,01	26,67	26,53	26,79	14,27	28,59	24,43	24,43	<	
3.3.2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	13	14	15	16	4	0	15,76	15,76	<	
3.3.2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,48	27,39	27,3	27,21	28,79	0	33,49	33,49	>	
3.3.2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.3.2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,36	5,43	5,5	5,56	5,67		5,49	5,49	<	
3.3.2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100,00	0	100	100	=	
3.3.2003	Perdagangan											
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)						-	-409000,2	-	-		
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.3.2004	Perindustrian											
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	50	50	50	56,94	62,2	66,3	66,3	>	
3.3.2005	Kelautan dan Perikanan											
3.3.5.1	Produksi perikanan	%	85	85	90	90	100,24	100,3	80,63	3252,94	>	
3.3.5.2	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	102,5	102,6	104	100	=	
3.3.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	10	10	10	10	0	31,4	0	<	
3.3.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	88	88	90	90	87,26	87,17	81,21	86,3	<	
3.3.5.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	125	125	125	125	125	113	125	=	
3.3.5.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	=	
3,4	Penunjang Urusan											
3.4.2001	Perencanaan Pembangunan											
3.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.4.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	97,96%	60,53%	100	100	=	
3.4.2002	Keuangan											
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP /WDP /TMT /TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	
2.2.	Persentase SILPA	%	9,99	8,99	7,99	6,99	12,26	8,28	2,95	2,95	>	
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,99	8,99	7,99	6,99	12,26	8,28	2,95	1,12	>	
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	1,14	0	0,006	0,017	<	
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana		0	0	0	0	4	1,24	0,004	0,021	<	
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20	20	20	31,29	27,44	30,64	30,64	>	
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	24,73	20,75	21,56	21,56	>	
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	43,52	43,52	43,52	43,52	1,3	92,16	88,59	86,92	>	
			56,48	56,48	56,48	56,48	9,83	7,84	11,41	13,08	<	
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,21	0,21	0,21	0,21	0,2	0,2	0,26	0,26	>	
2.9.	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	=	
3.4.2003	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan											
3.4.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	20	20	20	19,92 JP	59,31 JP	17	20	=	
3.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,5	7,7	7,8	7,9	6,66	6,63	51,82	19,11	>	
3.4.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	87,32	87,1	86,79	86,57	83,13	47,18	83,4	6,22	<	
3.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	33	33	33	33	33	33	33	25	<	
3.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1926	1915	1900	1890	1880	1368	1436	126	<	
3.4.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	3277	3300	3320	3330	3.091	3.533	3.037	3.981	>	
3.4.2004	Penelitian dan pengembangan											
3.4.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
3.4.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	0	100	100	100	0	100	100	100	=	
3.4.4.3	Penerapan SIDA:											
3.4.4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	17,65	35,29	52,94	23,53	41,18	35,35	41,18	<	
3.4.4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	100	100	100	0	100	100	100	=	
3.4.2005	Pengawasan											
3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	75	79	83	87	59,54	83,19	46,67	51,1	<	

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3.4.5.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,1	0,06	0,04	0,02	0,55	0,04	0,0006	0,0006	>	
3.4.5.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	15	14	13	12	12	6	14	14	<	
3.4.2006	Sekretariat Dewan											
3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
3.4.6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	

Tabel 2. 19 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 (Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
URUSAN WAJIB												
1	URUSAN PENDIDIKAN											
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	112,25	71,2	87,47	69	<	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	107,48	95,94	91,90	91,99	<	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	120,62	81,3	81,61	79,83	<	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	0,95	100	10,95	0,96	<	
2	URUSAN KESEHATAN											
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,13	0,13	0,135	0,14	0,13	0,11	0,11	0,1	<	DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	19,68	24573	100	100	=	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	51,86	48,32	100	38,4	<	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	51,86	64,32	100	100	=	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	2,19	27,8	100	45,4	<	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	95,9	100	43,9	<	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	102,65	100	124,5	>	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	63,85	63,86	76,1	<	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	63,85	84,62	0,25	<	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM											
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,14	0,2	0,25	0,3	9,72	864,43	0,23	0,05	<	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	%	Tidak ada Pantai									

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota											
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,65	0,68	0,72	0,75	6,21	65,31	9,47	0,84	>	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	30	35	40	45	98,02	98,52	38,29	44,43	<	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70	72,5	75	77,25	99,95	99,95	75,02	77,1	<	
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Poin	0,5	0,55	0,6	0,65	100	0	0,7	0,92	>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	58,5	59	59,5	60	57,32	48,89	53	54,76	<	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Poin	0,2	0,25	0,3	0,35	0	0	0,46	0,337	<	
	Rasio proyek yang menjadi pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	1	1	1	0	100	0,8	1,72	>	
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT											
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	106,25	100	100	0	<	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0	=	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	25,23	50,45	77,01	0	0	0	0	<	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	n/a	2,64	2,44	2,24	11,79	0	9,13	7,82	<	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	1	1	1	1	0,43	0,33	0,26	0,29	<	
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	50	62	62	55,56	30	43	40	<	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	101735	101735	101735	101735	53426	100	40	100	<	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	101735	101735	101735	101735	53426	0	40	100	<	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa (KK)	1000	1001	1002	1003	123456 Jiwa	0		100		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	90	90	90	44,44	75,56	100	100	>	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	7,75	7,75	7,75	7,75	5,53	9,67	15,00	8,39	<	
6	URUSAN SOSIAL											
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	49,7	100	100	107	>	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS SOSIAL

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota											
7	URUSAN KETENAGA KERJAAN											
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	15	20	25	40	61,32	91,59	91,29	100	>	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	23,8	23,9	24	30	0,47	1,61	1,16	0,09	<	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,8	3,85	3,89	4,15	579642	0,88	0,24	0,36	<	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	4,75	4,9	5	5,15	3,98	91,59	6,95	25,71	>	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja						1.625.451	1.625.451	1.625.451	123337350	>	
8	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5	2,75	3	3,25	1,56	1,4	3,24	8,36	>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	0,03	0,2	60,58	0,06	<	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,001	0,001	0,001	0		18,69	0	9,64	<	
9	URUSAN PANGAN											
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	30	32	34	36	25,82	14,46	32,16	64,44	>	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
10	URUSAN PERTANAHAN											
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	67,5	70	72,5	75	100	67,5	100	100	>	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	100	100	>	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	100	100	100	n/a	100	100	=	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	>	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	50	100	50	100	=	
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP											
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	82,13	82,16	82,2	82,24	69,52	65,39	68,64	68,74	<	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	67	68	69	70	74,06	77,57	67	80	>	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	63	65	67	69	11,43	30,91	76	8	<	
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII											
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,33	99,33	99,33	99,5	99,59	98,52	99,24	99,24	<	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
	Persentase anak usia 01-07 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,1	60,15	60,2	60,23	64,25	64,91	67,14	67,14	>	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,5	96	96,5	97	99,54	99,4	99,27	99,27	>	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	%	76,47	88,23	88,23	88,23	23,53	17,65	38,24	0	<	

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama											
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25	33	50	20	0	0	100	>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	3	3	3	3,85	13,33	57	25	>	
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,16	2,15	2,13	2,1	2,16	2,32	2,11	2,07	>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,24	78,25	78,26	78,27	74,52	57,09	64,41	62,86	<	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12,1	12	11,9	14,24	26,2	13,64	10,64	>	
15	URUSAN PERHUBUNGAN											
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	81	82	83	84	63	0,046	0,22	0,22*	<	DINAS PERHUBUNGAN
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,063	0,065	0,07	0,08	0,9	0,065	0,064	0,064*	<	
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	97,06	97,06	97,06	91,18	<	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0,5	1	1,5	2	100	100	100	100	>	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	22	25	27	30	42,25	17,54	64,89	79,8	>	
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,17	38,17	38,17	38,17	45,18	44,91	44,97	38,69	>	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,09	3,3	4,52	5,73	7,5	7,59	7,79	7,36	>	
18	URUSAN PENANAMAN MODAL											
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	61,1	64,76	68,64	72,75	114,52	282,26	44,02	-13,22	<	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,99	1,03	1,07	1,11	1,03	1,62	1,25	1,3	>	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	27,25	28,54	29,83	31,12	5,49	28,8	23,28	37,86	>	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	1	1	1	2	2	5	89	42	>	
20	URUSAN STATISTIK											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	=	
21	URUSAN PERSANDIAN											
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	255	260	265	270	49,8	56,4	56,40	100	<	
22	URUSAN KEBUDAYAAN											
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	21,88	21,88	21,88	21,88	25	100	117	40	>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	URUSAN PERPUSTAKAAN											
	Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat	Nilai	n/a	51	52	53				52,32	<	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0	0	0	0	28,73	18,58	18,58	58,62	>	

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
24	URUSAN KEARSIPAN											
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	0	1,71	2,137	100	=	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	n/a	25	65	100	0	0,18	0,06	100	=	
	URUSAN PILIHAN											
25	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3417,56	3451,73	3486,25	3538,54	3425,7	3461,93	3123,24	3252,94	<	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2987,48	3017,35	3047,53	3093,24	2989,1	3017,85	2749,82	2807,22	<	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	430,08	434,38	438,72	445,3	436,61	444,08	373,42	445,72	>	
26	URUSAN PARIWISATA											
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	33	40	46	0	330	19	39,66	<	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	44,11	44,5	44,62	44,78	365,94	0,16	0,16	6,32	<	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	10	10	10	10	2184,13	0,56	36,79	9,61	<	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,46	1,48	1,5	1,51	4,97	0	1,9	1,90*	>	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,18	0	0,24	1,54	>	
27	URUSAN PERTANIAN											
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,36	5,43	5,5	5,56	547,85	2,08	4,84	5,17	<	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	29,5	29,5	29,5	29	-42,86	-41,67	-41,67	71	<	
28	URUSAN PERDAGANGAN											
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	0	0	0	3,77	31,12	22,07	34	>	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	25,99	22,5	23,8	24,1	26,81	8,19	71,67	44,74	>	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	77,21	80,88	84,56	88,24	70,55	88,84	70,74	37,23	<	
29	URUSAN PERINDUSTRIAN											
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	42,86	43,33	44,19	45,16	47,62	32,26	34,15	13,31	<	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	20	24,39	100	100	=	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	18	<	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	=	

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait												
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	100	0	0	0	=		
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini									90	>		
	1. Keterkinian informasi industri :												
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0	0	0	50	0	50	50	50	=		
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	0	25	25	25	0	25	25	25	=		
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	=		
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :												
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	0	10	10	10	10	10	10	10	=		
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	0	10	10	10	10	10	10	10	=		
30	URUSAN TRANSMIGRASI												
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan							1	3	>		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	kk							85	3	<		
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	pemukiman							1	0 (Sudah Lepas Bina)	<		
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	31,75	31,75	31,75	31,75	13,78	11,56	10,58	11,46	<		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Rasio PAD	Poin	1,31	1,31	1,31	1,31	1,46	1,22	1,42	14,98	>		
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	=		
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	<		
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	0,66	0,66	0,66	0,66	14,28	63,95	67,43	71,68	>		
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=		
2	PENGADAAN												
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	0	=		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	9,38	9,9	9,9	9,9	84	0	100	2,32	<		
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	97	97	98	98	49,77	52,65	67,67	95,48	<		
3	KEPEGAWAIAN												
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,06	7,81	8,72	9,84	675,93	740	8,67	60,76	>		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,25	0,25	0,25	0,26	21,39	23,53	0,18	0,69	>		
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,55	0,62	0,69	0,75	39,75	45,84	0,68	11	>		
4	MANAJEMEN KEUANGAN												
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,04	0,04	0,04	0,04	-7,28	7,21	13,71	5,11	>		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

No	Urusan / IKK outcome	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,2	0,2	0,2	0,2	21,61	-7,99	7,11	15,04	>	PENDAPATAN DAERAH
	Assets Management		Ya	Ya	Ya	Ya	YA	YA	YA	Ya	=	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	4,99	4,99	4,99	4,99	12,81	11,19	8,28	1,19	>	
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK											
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	90	57,24	100	=	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	83,33	100	100	=	

2.2.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya Kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan mandatory yang merupakan kewenangan Kabupaten. Adapun capaian indikator SPM tersebut di Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

Tabel 2. 20 Capaian SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	59,91%	100%	111%	72,80%	73,35%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	90,67%	56,10%	111%	91,89%	82,38%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)		62,55%	67,89%	77,40%	81,50%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	66,66%	100%	0,95%	0,94%	12,21%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	-	-	36,84%	46,14%	84,62%	
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	20%	90%	100%	
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,11%	20,11%	65,71%	48,30%	38,30%	
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	51,80%	70%	100%	
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	45,40%	
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	43,90%	
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	125%	
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	63,86%	76,10%	
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	0,25%	
	PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16%	94,55%	98,13%	98,95%	99,36%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	58,78%	100%	98,13%	100%	100%
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	106%	0%	100%	100%	
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%	100%	
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	100%	40%	100%	100%	

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	0,28%	0,28%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	180%	100%

2.2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDG's))

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan lingkungan dan tata kelola yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan, SDGs menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Soppeng tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 21 Capaian TPB/SDG's Kabupaten Soppeng Tahun 2024

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah	Persen	6,9	Dinas Sosial

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3. 1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	-	Dinas Kesehatan
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3. 1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	-	Dinas Sosial
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4. 1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4. 1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	44,36	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4. 1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95,67	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol	1.4. 1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	91,90 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4. 1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	81,61 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5. 1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi/ Daerah	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5. 1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks	131,2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1 *	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Persen	-	Dinas Sosial
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2 *	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan	2.1. 1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	Persen	12,87	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		Undernourishment).			dan Ketahanan Pangan
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2. 2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	81,7 **	Dinas Kesehatan
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2. 2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	81,8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3. 1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Persen	87,4 **	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1. 2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	88 **	Dinas Kesehatan
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7. 1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		64,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap	3.8. 2.(a)	Cakupan Jaminan	Persen	78,34	Dinas Kesehatan

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		Kesehatan Nasional (JKN).			
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	98,47 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	99,04 *	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	67,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	26,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	Persen	20 **	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	44,36	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	24,5 *	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	95,67	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	-	Dinas Lingkungan Hidup
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		4,06	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	-	3,32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rupiah	1.494.680.000 **	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	77,9 **	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	67,85 **	Dinas Komunikasi dan Informatika
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat	10.1.1*	Koefisien Gini.	-	0,371	Dinas Sosial

Target TPB (1)		Indikator TPB (2)		Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
	yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1 .1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,90	Dinas Sosial
10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2 .1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	8,45 **	Dinas Sosial
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6 .1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	-	Dinas Lingkungan Hidup
15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1 .1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	17,28 **	Dinas Lingkungan Hidup
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6 .1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen	90,88 **	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9 .1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Jiwa	13,012 **	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara	17.6 .2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	67,85 **	Dinas Komunikasi dan Informatika

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Satuan	Capaian Tahun 2024	SKPD Penanggung jawab
mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.				

Keterangan : - * Capaian Tahun 2023
- ** Capaian Tahun 2022

2.2.5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 sampai pada triwulan I merupakan kriteria atau standar dalam proses analisis pencapaian pembangunan, baik melalui pencapaian target kinerja maupun target anggaran. Untuk persentase capaian diukur dalam 5 kategori, yakni **Sangat Rendah** ($\leq 50\%$), **Rendah** ($51\% \leq 65\%$), **Sedang** ($66\% \leq 75\%$), **Tinggi** ($76\% \leq 90\%$) dan **Sangat Tinggi** ($91\% \leq 100\%$).

Tabel 2. 22 Kategori Penilaian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Kategori Penilaian	Interval Nilai Capaian	Simbol
1	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	SR
2	Rendah	$51\% \leq 65\%$	R
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$	S
4	Tinggi	$76\% \leq 90\%$	T
5	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$	ST

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Soppeng diperoleh persentase nilai sebesar 18,53%, sedangkan untuk realisasi anggaran persentase nilainya mencapai 10,49%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai Permendagri Nomor 23 tahun 2013, hasil kinerja RKPD termasuk dalam kategori sangat rendah, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori sangat rendah. Walaupun hasil yang diperoleh sangat rendah namun masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar. Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

NO	NAMA OPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Kinerja (%)	Predikat	Kinerja (%)	Predikat
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19,91%	Sangat Rendah	14,99%	Sangat Rendah

NO	NAMA OPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Kinerja (%)	Predikat	Kinerja (%)	Predikat
2.	DINAS KESEHATAN	7,75%	Sangat Rendah	9,25%	Sangat Rendah
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,65%	Sangat Rendah	2,69%	Sangat Rendah
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14,34%	Sangat Rendah	14,35%	Sangat Rendah
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	17,88%	Sangat Rendah	18,46%	Sangat Rendah
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16,80%	Sangat Rendah	14,85%	Sangat Rendah
7.	DINAS SOSIAL	12,26%	Sangat Rendah	11,80%	Sangat Rendah
8.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	18,81%	Sangat Rendah	10,00%	Sangat Rendah
9.	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	24,35%	Sangat Rendah	18,58%	Sangat Rendah
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24,21%	Sangat Rendah	19,57%	Sangat Rendah
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26,29%	Sangat Rendah	17,22%	Sangat Rendah
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21,27%	Sangat Rendah	26,72%	Sangat Rendah
13.	DINAS PERHUBUNGAN	17,04%	Sangat Rendah	16,02%	Sangat Rendah
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26,15%	Sangat Rendah	26,52%	Sangat Rendah
15.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	14,74%	Sangat Rendah	17,21%	Sangat Rendah
16.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	25,77%	Sangat Rendah	21,07%	Sangat Rendah
17.	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	24,22%	Sangat Rendah	9,15%	Sangat Rendah
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,06%	Sangat Rendah	16,66%	Sangat Rendah
19.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	18,53%	Sangat Rendah	17,45%	Sangat Rendah
20.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16,41%	Sangat Rendah	22,31%	Sangat Rendah
21.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23,23%	Sangat Rendah	10,10%	Sangat Rendah
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	26,46%	Sangat Rendah	28,45%	Sangat Rendah
23.	INSPEKTORAT DAERAH	11,00%	Sangat Rendah	10,25%	Sangat Rendah
24.	SEKRETARIAT DAERAH	18,28%	Sangat Rendah	16,69%	Sangat Rendah
25.	SEKRETARIAT DPRD	27,51%	Sangat Rendah	26,86%	Sangat Rendah
26.	KECAMATAN MARIORIWAWO	18,83%	Sangat Rendah	17,39%	Sangat Rendah
27.	KECAMATAN LALABATA	16,87%	Sangat Rendah	19,82%	Sangat Rendah
28.	KECAMATAN DONRI-DONRI	21,84%	Sangat Rendah	17,37%	Sangat Rendah
29.	KECAMATAN LILIRIAJA	18,92%	Sangat Rendah	16,56%	Sangat Rendah
30.	KECAMATAN LILIRILAU	22,22%	Sangat Rendah	16,70%	Sangat Rendah
31.	KECAMATAN MARIORIAWA	16,22%	Sangat Rendah	15,20%	Sangat Rendah
32.	KECAMATAN GANRA	22,09%	Sangat Rendah	21,78%	Sangat Rendah
33.	KECAMATAN CITTA	24,51%	Sangat Rendah	19,57%	Sangat Rendah

NO	NAMA OPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Kinerja (%)	Predikat	Kinerja (%)	Predikat
34.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10,68%	Sangat Rendah	11,30%	Sangat Rendah
TOTAL		18,53%	Sangat Rendah	10,49%	Sangat Rendah

Sumber: Emonev Kabupaten Soppeng Triwulan I, 2025

2.2.5.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPd Tahun 2025 yang Terakomodir di APBD Tahun 2025

Informasi terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPd tahun 2025 yang terakomodir ke dalam APBD tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Ada dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15	39
2	DINAS KESEHATAN	5	22	72
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	25	58
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15	27
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	12	34
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	10	27
7	DINAS SOSIAL	6	16	48
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	27	51
9	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	6	16	29
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	14	31
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	11	31
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	10	34
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	16	38
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	14	35
15	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	12	20	36
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	17	31
17	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6	17	37
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	12	31
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	8	17	37
20	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	57
21	SEKRETARIAT DPRD	2	16	63
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	14	38
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	13	54

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	42
25	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	37
26	KECAMATAN LILIRILAU	5	12	28
27	KECAMATAN CITTA	5	9	24
28	KECAMATAN GANRA	5	10	24
29	KECAMATAN DONRI-DONRI	5	10	21
30	KECAMATAN MARIORIAWA	5	11	29
31	KECAMATAN LILIRIAJA	5	12	31
32	KECAMATAN LALABATA	5	13	31
33	KECAMATAN MARIORIWAWO	5	11	23
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	36
TOTAL		183	493	1264

Sumber: SIPD, Emonev Kabupaten Soppeng 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang terakomodir dalam APBD tahun 2025 menunjukkan terdapat 34 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah keseluruhan program sebanyak 183, untuk jumlah kegiatan sebanyak 493, sedangkan jumlah sub kegiatan sebanyak 1264.

2.2.5.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan informasi realisasi pendanaan Kabupaten Soppeng sampai dengan triwulan I tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Soppeng tahun 2025. Realisasi pendanaan sebagaimana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Soppeng Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Tw I	Persentase
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	389.266.651.135	58.337.384.413	14,99%
2	DINAS KESEHATAN	267.445.739.639		0,00%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102.077.541.461	2.749.609.164	2,69%
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.676.276.104	527.546.870	14,35%
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.841.318.129	2.185.317.776	18,46%
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.475.232.626	516.239.928	14,85%
7	DINAS SOSIAL	5.955.094.016	702.858.723	11,80%
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.315.979.692	1.031.424.730	10,00%

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Tw I	Persentase
9	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	6.282.309.711	1.167.347.120	18,58%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.354.095.557	1.634.819.282	19,57%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.049.517.660	750.926.452	18,54%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.994.130.354	1.067.032.970	26,72%
13	DINAS PERHUBUNGAN	5.626.612.021	901.574.327	16,02%
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.343.667.306	1.417.098.135	26,52%
15	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	6.920.553.254	1.191.359.180	17,21%
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.750.660.651	1.000.932.811	21,07%
17	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.013.802.089	947.259.844	15,75%
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.602.401.880	766.938.680	16,66%
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	16.550.493.870	2.887.931.951	17,45%
20	SEKRETARIAT DAERAH	26.298.284.945	4.384.848.092	16,67%
21	SEKRETARIAT DPRD	33.160.213.823	8.905.751.454	26,86%
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.028.577.280	1.344.788.027	22,31%
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	161.745.642.447	16.338.530.280	10,10%
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.595.009.180	1.876.466.872	28,45%
25	INSPEKTORAT DAERAH	15.582.664.976	1.597.075.223	10,25%
26	KECAMATAN LILIRILAU	6.025.634.650	1.006.362.313	16,70%
27	KECAMATAN CITTA	1.609.272.682	314.895.820	19,57%
28	KECAMATAN GANRA	1.981.885.533	431.666.793	21,78%
29	KECAMATAN DONRI-DONRI	2.066.119.310	358.885.802	17,37%
30	KECAMATAN MARIORIAWA	6.821.312.097	1.037.134.294	15,20%
31	KECAMATAN LILIRIAJA	5.118.356.840	847.466.171	16,56%
32	KECAMATAN LALABATA	10.724.309.756	2.121.291.065	19,78%
33	KECAMATAN MARIORIWAWO	4.679.573.702	813.915.265	17,39%
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.513.669.175	735.867.113	11,30%
TOTAL		1.161.492.603.551	121.898.546.940	10,49%

Sumber : Emonev Kabupaten Soppeng, 2025

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran dalam APBD Pokok Kabupaten Soppeng tahun 2025 sebesar Rp1.161.492.603.551, dengan total realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp121.898.546.940 atau sebesar 10,49% (Sangat Rendah). Capaian realisasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh 34 Perangkat Daerah Pemerintah di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan sampai triwulan I tahun 2025 menunjukkan capaian yang masih di bawah 50,00%.

2.2.5.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Level Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi capaian pendanaan memberikan informasi tentang gambaran realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian kinerja pendanaan terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu **Sangat Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran $\leq 50\%$, **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran $51\% \leq 65\%$, **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran $66\% \leq 75\%$, **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran $76\% \leq 90\%$ dan **Sangat Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran $91\% \leq 100\%$.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah program yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 183 program dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 182 program dan untuk kategori rendah ($51\% \leq 65\%$) sebanyak 1 program.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan untuk tiap perangkat daerah jumlah kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 493 kegiatan dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 490 kegiatan dan untuk kategori rendah ($51\% \leq 65\%$) sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Untuk hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level sub kegiatan untuk tiap perangkat daerah jumlah sub kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 1264 sub kegiatan dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 1239 sub kegiatan. Untuk kategori rendah ($51\% \leq 65\%$) sebanyak 10 sub kegiatan, kategori sedang ($66\% \leq 75\%$) sebanyak 5 sub kegiatan, kategori tinggi ($76\% \leq 90\%$) sebanyak 6 sub kegiatan dan kategori sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$) sebanyak 4 sub kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 26 Rekapitulasi Capaian Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Soppeng Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah program berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	6	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	11	11	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	6	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
7	Dinas Sosial	6	6	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	48	47	0	0	0	1
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	51	50	1	0	0	0
9	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	6	6	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0
10	Dinas Lingkungan Hidup	8	8	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	34	32	1	0	1	0
13	Dinas Perhubungan	2	2	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
14	Dinas Komunikasi dan informatika	5	4	1	0	0	0	14	13	1	0	0	0	35	34	0	1	0	0
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	12	12	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	11	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6	6	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	37	36	1	0	0	0
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	8	8	0	0	0	0	17	16	1	0	0	0	37	36	0	0	1	0
20	Sekretariat Daerah	3	3	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	57	55	0	1	1	0
21	Sekretariat DPRD	2	2	0	0	0	0	16	15	1	0	0	0	63	58	4	0	0	1

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah program berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	38	33	1	2	1	1
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	4	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	42	36	2	1	2	1
25	Inspektorat Daerah	3	3	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
26	Kecamatan Lilirilau	5	5	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0
27	Kecamatan Citta	5	5	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0
28	Kecamatan Ganra	5	5	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0
29	Kecamatan Donri-Donri	5	5	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0
30	Kecamatan Marioriawa	5	5	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0
31	Kecamatan Liliriaja	5	5	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
32	Kecamatan Lalabata	5	5	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
33	Kecamatan Marioriwawo	5	5	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
TOTAL		183	182	1	0	0	0	493	490	3	0	0	0	1264	1239	10	5	6	4
			183					493					1264						

Sumber : Emonev Kabupaten Soppeng Triwulan I, 2025

2.2.5.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja memberikan informasi tentang gambaran realisasi target kinerja pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian kinerja tersebut terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu **Sangat Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja $\leq 50\%$, **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja $51\% \leq 65\%$, **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja $66\% \leq 75\%$, **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja $76\% \leq 90\%$ dan **Sangat Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja $91\% \leq 100\%$.

1. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja *outcome* pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah program yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 183 program dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 183 program pada triwulan I tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Output* Pada Level Kegiatan

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja *output* level kegiatan untuk tiap perangkat daerah dengan jumlah kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 493 kegiatan dengan capaian kinerja yang masuk kategori sangat rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 488 kegiatan. Untuk kategori tinggi ($76\% \leq 90\%$) sebanyak 1 kegiatan dan kategori sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$) sebanyak 4 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Output* Pada Level Sub Kegiatan

Untuk hasil evaluasi capaian kinerja *output* pada level sub kegiatan untuk tiap perangkat daerah dengan jumlah sub kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 1264 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang masuk kategori sangat rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 1229 sub kegiatan. Untuk kategori rendah ($51\% \leq 65\%$) sebanyak 3 sub kegiatan, kategori sedang ($66\% \leq 75\%$) sebanyak 6 sub kegiatan, kategori tinggi ($76\% \leq 90\%$) sebanyak 3 sub kegiatan dan kategori sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$) sebanyak 23 sub kegiatan.

Tabel 2. 27 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Triwulan I Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah program berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	6	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	11	11	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	6	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
7	Dinas Sosial	6	6	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	48	47	0	0	0	1
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	51	50	0	0	1	0
9	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	6	6	0	0	0	0	16	14	0	0	0	2	29	27	0	0	0	2
10	Dinas Lingkungan Hidup	8	8	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	0	0	0	0	11	10	0	0	1	0	31	30	0	0	0	1
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	34	33	0	0	1	0
13	Dinas Perhubungan	2	2	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0
14	Dinas Komunikasi dan informatika	5	5	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	35	34	0	1	0	0
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	12	12	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	11	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	31	27	1	1	0	2
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6	6	0	0	0	0	17	16	0	0	0	1	37	33	0	0	0	4
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	8	8	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	37	36	0	0	1	0
20	Sekretariat Daerah	3	3	0	0	0	0	19	18	0	0	0	1	57	52	0	3	0	2
21	Sekretariat DPRD	2	2	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	63	60	0	0	0	3

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah program berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	38	36	0	0	0	2
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	4	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	54	50	0	0	0	4
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	42	38	2	1	0	1
25	Inspektorat Daerah	3	3	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
26	Kecamatan Lilirilau	5	5	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0
27	Kecamatan Citta	5	5	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	24	23	0	0	0	1
28	Kecamatan Ganra	5	5	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0
29	Kecamatan Donri-Donri	5	5	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0
30	Kecamatan Marioriawa	5	5	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0
31	Kecamatan Liliriaja	5	5	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
32	Kecamatan Lalabata	5	5	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
33	Kecamatan Marioriwawo	5	5	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
TOTAL		183	183	0	0	0	0	493	488	0	0	1	4	1264	1229	3	6	3	23
			183					493					1264						

Sumber : Emonev Kabupaten Soppeng Triwulan I, 2025

Tabel 2. 28 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Triwulan I Kabupaten Soppeng

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Persen)	100	311.231.215.435	57.179.878.200	-	57.179.878.200	0,00%	18,37%	100,00	57.179.878.200	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	1	486.814.160	-	86.064.250	-	86.064.250	0,00%	17,68%	0,00	86.064.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	378.740.350	-	49.917.750,00	-	49.917.750	0,00%	13,18%	0,00	49.917.750
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	312	108.073.810	-	36.146.500,00	-	36.146.500	0,00%	33,45%	0,00	36.146.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	308.918.584.335	-	57.010.915.869	-	57.010.915.869	0,00%	18,45%	0,00	57.010.915.869
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2500	308.714.284.335	2,5	57.002.365.869,00	2,5	57.002.365.869	25,00%	18,46%	2500,00	57.002.365.869
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000.000	-	-	-	-	0,00%			-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	194.300.000	-	8.550.000,00	-	8.550.000	0,00%	4,40%	0,00	8.550.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	94.424.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	82.174.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket) (paket)	1	454.714.140	-	3.250.000	-	3.250.000	0,00%	0,71%	0,00	3.250.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.991.520	-	-	-	-	0,00%			-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	154.282.670	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	20	84.987.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	500	8.860.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	148	199.191.950	5	3.250.000,00	5	3.250.000	3,38%	1,63%	5,00	3.250.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	978.378.000	-	73.676.881	-	73.676.881	0,00%	7,53%	0,00	73.676.881
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	162.000.000	12	37.526.881,00	12	37.526.881	25,00%	23,16%	12,00	37.526.881
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	816.378.000	-	36.150.000,00	-	36.150.000	0,00%	4,43%	0,00	36.150.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik (1)	1	298.300.000	-	5.971.200	-	5.971.200	0,00%	2,00%	0,00	5.971.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	83	16.200.000	20	5.971.200,00	20	5.971.200	24,10%	36,86%	20,00	5.971.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	16	12.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			270.000.000	-	-	-	-	0,00%			-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,81%	18,37%		
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (Indikator pencapaian : Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan PAUD) (%)	100				-		0,00%		100,00	
	Pendidikan Dasar (Indikator Pencapaian : Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI/SMP/MTs) (%)	100	74.996.502.200		1.035.446.713		1.035.446.713	0,00%	1,38%	100,00	1.035.446.713
	Pendidikan kesetaraan (Indikator Pencapaian : Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yg blm menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menenbgah yg berpartisipasi dlm pendidikan kesetaraan) (%)	100				-		0,00%		100,00	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD (1)	1	51.549.473.000	-	479.126.412	-	479.126.412	0,00%	0,93%	0,00	479.126.412
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	254	5.880.276.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	21000	5.265.800.000	92	220.976.400,00	92	220.976.400	0,44%	4,20%	92,00	220.976.400
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1	3.585.087.500	-	258.150.012,00	-	258.150.012	0,00%	7,20%	0,00	258.150.012
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	250	18.760.749.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			5.497.560.000						0,00%		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	5000	1.705.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	47	10.855.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP (1)	1	13.933.463.000	-	260.136.781	-	260.136.781	0,00%	1,87%	0,00	260.136.781
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1500	1.265.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	10000	2.159.473.000	100	166.280.400,00	100	166.280.400	1,00%	7,70%	100,00	166.280.400
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	5	662.500.000	1	93.856.381,00	1	93.856.381	20,00%	14,17%	1,00	93.856.381
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	31	8.312.990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	1.533.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD (undefined)	1		-		-		0,00%		0,00	
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (%)	1	7.794.266.200	-	296.183.520	-	296.183.520	0,00%	3,80%	0,00	296.183.520
Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	166	3.428.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1	1.213.966.200	-	296.183.520,00	-	296.183.520	0,00%	24,40%	0,00	296.183.520
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	3	3.151.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (1)	1	1.719.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1.719.300.000						0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,24%	1,38%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum mulok yang dikembangkan (Jumlah)	1	300.826.500		6.750.000	-	6.750.000	0,00%	2,24%	1,00	6.750.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar yang ditetapkan (kali)	1	300.826.500	-	6.750.000	-	6.750.000	0,00%	2,24%	0,00	6.750.000
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	300.826.500	-	6.750.000,00	-	6.750.000	0,00%	2,24%	0,00	6.750.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	2,24%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 (%)	100	1.751.012.500		6.750.000	-	6.750.000	0,00%	0,39%	99,10	6.750.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru/Murid (: 16)	1	1.751.012.500	-	6.750.000	-	6.750.000	0,00%	0,39%	0,00	6.750.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.751.012.500		6.750.000,00		6.750.000		0,39%		6.750.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,39%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pencapaian Pengembangan Kesenian Tradisional (Persen)	100	391.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	92,94	-
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pementasan Kesenian Daerah (kali)	2	391.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	14	391.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	100	595.594.500		108.559.500	-	108.559.500	0,00%	18,23%	52,00	108.559.500
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan (Objek)	0	116.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	37	116.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	Jumlah cagar budaya yang dikelola (Objek)	0	478.714.500	-	108.559.500	-	108.559.500	0,00%	22,68%	0,00	108.559.500
Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	5	478.714.500	1	108.559.500,00	1	108.559.500	20,00%	22,68%	1,00	108.559.500
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				16,08%	18,23%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		389.266.651.135		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				19,91%	14,99%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Kesehatan											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Persen)	100	197.087.768.639		24.679.543.110	-	24.679.543.110	0,00%	12,52%	100,00	24.679.543.110
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun tepat Waktu; Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (100 Persen)	0	99.050.000	-	4.200.000	-	4.200.000	0,00%	4,24%	0,00	4.200.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	12.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	56.850.000	1	4.200.000,00	1	4.200.000	14,29%	7,39%	1,00	4.200.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan (Persen)	0	81.622.045.204	-	22.562.806.493	-	22.562.806.493	0,00%	27,64%	0,00	22.562.806.493
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	917	81.254.345.204	917	22.556.506.493	917	22.556.506.493	25,00%	27,76%	917,00	22.556.506.493
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	367.700.000	-	6.300.000	-	6.300.000	0,00%	1,71%	0,00	6.300.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			28.319.784		4.200.000		4.200.000		14,83%		4.200.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	28.319.784	-	4.200.000	-	4.200.000	0,00%	14,83%	0,00	4.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.867.965		4.200.000		4.200.000		15,63%		4.200.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	17	26.867.965	3	4.200.000	3	4.200.000	17,65%	15,63%	3,00	4.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			637.417.201		19.244.004		19.244.004		3,02%		19.244.004

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.895.000								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21.152.025	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	82.400.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	54.450.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	190.980.760	-				0,00%	0,00%	0,00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	269.539.416	1	19.244.004	1	19.244.004	8,33%	7,14%	1,00	19.244.004
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			388.700.000						0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	388.700.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			804.366.018		39.228.015		39.228.015		4,88%		39.228.015
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	350.887.218	12	39.228.015	12	39.228.015	25,00%	11,18%	12,00	39.228.015
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	453.478.800	-				0,00%	0,00%	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			725.643.765		32.250.000		32.250.000		4,44%		32.250.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	16.965.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	62	651.678.765	3	32.250.000	3	32.250.000	4,84%	4,95%	3,00	32.250.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	48	57.000.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Peningkatan Pelayanan BLUD			112.755.358.702		2.013.414.598		2.013.414.598		1,79%		2.013.414.598
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	112.755.358.702	-	2.013.414.598		2.013.414.598	0,00%	1,79%	0,00	2.013.414.598
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	10,39%	12,52%	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	67.019.382.750		71.289.589	-	71.289.589	0,00%	0,11%	100,00	71.289.589
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun (Unit)	4	12.075.700.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	17	1.010.000.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5	11.794.228.402	-				0,00%	0,00%	0,00	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	19	152.202.300	-				0,00%	0,00%	0,00	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	3.961.382.786	-				0,00%	0,00%	0,00	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	17	45.400.000	-				0,00%	0,00%	0,00	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			37.390.437.762		71.289.589		71.289.589		0,19%		71.289.589
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2574	362.860.000	-				0,00%	0,00%	0,00	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2811	266.548.750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2790	201.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9846	10.198.750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5673	817.735.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	76096	39.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20317	31.180.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4940	68.171.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2555	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	413	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	194	214.180.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	2596	334.699.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	17	73.781.550	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	17	26.472.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	17	2.802.030.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	17	61.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	17	994.657.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	17	313.574.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	7	160.386.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	689.960.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	17	1.661.763.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	18.158.911.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	46.430.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	2.466.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	17	4.424.938.200	1	71.289.589	1	71.289.589	5,88%	1,61%	1,00	71.289.589
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	760.939.962	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1.732.739.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2	151.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1	162.975.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	96.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	17	238.205.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			454.000.000	-	-	-	-	0,00%			-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	17	454.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			136.031.500						0,00%		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	2	38.260.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	20	86.911.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	10.860.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,39%	0,11%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2.760.274.450						0,00%		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.880.597.450						0,00%		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	150	1.880.597.450	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			879.677.000						0,00%		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	230	879.677.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			214.719.000						0,00%		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			48.635.000						0,00%		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	48.635.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			28.320.000						0,00%		
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	12	28.320.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			93.325.500						0,00%		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	270	93.325.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		8.500.000		-		-		0,00%		-	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			8.500.000		-		-		0,00%		-	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	8.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			35.938.500		-		-		0,00%		-	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			35.938.500		-		-		0,00%		-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			363.594.800		-		-		0,00%		-	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			92.000.000		-		-		0,00%		-	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	17	92.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			271.594.800		-		-		0,00%		-	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	17	271.594.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			267.445.739.639	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				7,75%	9,25%			
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
Semua Bidang												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	11.983.554.761		2.725.609.164		-	2.725.609.164	0,00%	22,74%	100,00	2.725.609.164
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.380.000		-		-		0,00%		-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	6.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.430.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	11.200.000	3	-	3	-	11,11%	0,00%	3,00	-	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi keuangan (1)	1	9.913.238.761	-	2.529.742.347	-	2.529.742.347	0,00%	25,52%	0,00	2.529.742.347
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125	9.889.988.761	125	2.529.742.347	125	2.529.742.347	25,00%	25,58%	125,00	2.529.742.347
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			13.000.000						0,00%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8	10.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1)	1	1.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	1.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4.042.500						0,00%		
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3	4.042.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.640.000						0,00%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	1.320.000	1	-	1	-	20,00%	0,00%	1,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	1.320.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			680.575.300		84.535.285		84.535.285		12,42%		84.535.285
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000.000						0,00%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	8.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	44.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	25.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	48.258.220	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	80	7.503.280	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1100	526.063.800	10	84.535.285	10	84.535.285	0,91%	16,07%	10,00	84.535.285
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160.085.000						0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	160.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			812.613.200		104.011.532		104.011.532		12,80%		104.011.532
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	183.900.000	8	32.711.532	8	32.711.532	22,22%	17,79%	8,00	32.711.532
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	628.713.200	1	71.300.000	1	71.300.000	25,00%	11,34%	1,00	71.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			383.540.000		7.320.000		7.320.000		1,91%		7.320.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	34.965.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	57	112.185.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	8	82.849.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	33	33.540.000	8	7.320.000	8	7.320.000	24,24%	21,82%	8,00	7.320.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			120.000.000						0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,41%	22,74%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persentase (%))	82	7.797.327.260	-	-	-	-	0,00%	0,00%	82,00	-
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	1.580.164.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Normalisasi/Restorasi Sungai			122.380.000						0,00%		
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	5	1.328.414.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	29.370.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Ha)	0	6.217.162.860	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	3	5.822.424.072	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	128.411.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	*Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya (DI)	50	213.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	*Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	5	53.327.788	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman (%)	100	1.250.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota yang dikelola dan dikembangkan (Unit)	1	1.250.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	40	300.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	250	850.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			260.000.000	-	-	-	-		0,00%		-
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Daerah yang dikelola dan dikembangkan (14)	14	260.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			260.000.000						0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	100	4.218.041.600	-	18.000.000	-	18.000.000	0,00%	0,43%	100,00	18.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan (Unit)	0	4.218.041.600	-	18.000.000	-	18.000.000	0,00%	0,43%	0,00	18.000.000
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	300	195.810.600	33	18.000.000	33	18.000.000	11,00%	9,19%	33,00	18.000.000
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	225	4.022.231.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,51%	0,43%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			472.550.000		-		-			0,00%	-
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan (Km)	0,4	472.550.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	122.550.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	350.000.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB (Persentase (%))	70	14.395.200.000		-		-			0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah rumah deret sederhana) yang laik fungsi (0,002)	0,002	14.395.200.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	14.072.800.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	200	322.400.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Pemerintah dalam kondisi baik (Persentase (%))	96	716.785.000		-		-			0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang bangunan dan lingkungannya ditata (Kawasan)	1	716.785.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	5	716.785.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang (Jalan mantap) (%)	61	59.235.018.140		6.000.000		6.000.000			0,00%	0,01%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara kabupaten (Km)	17	59.235.018.140	-	6.000.000	-	6.000.000			0,00%	0,01%
Penggantian Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	2	7.870.069.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	173.669.400	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	967	145.373.500	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	8	50.178.148.000	-	-	-	-			0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	10	867.758.240	-	6.000.000	-	6.000.000			0,00%	0,69%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,01%
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi (%)	40	445.022.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40,00	-
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih (Orang)	0	222.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	80	222.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten (Dokumen)	1	51.263.450	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	51.263.450	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dokumen)	1	170.938.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			170.938.600						0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan RTRW (%) (Persentase (%))	47	1.303.667.650	-	-	-	-	0,00%	0,00%	47,00	-
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab yang disusun (Dokumen)	0	347.738.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	347.738.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	600.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	600.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten (Dokumen)	1	150.022.150	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1	150.022.150	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun (Dokumen)	1	205.907.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	*Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	1	205.907.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		102.077.541.461		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				2,65%	2,69%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Persen)	100	2.671.176.104		527.546.870	-	527.546.870	0,00%	19,75%	100,00	527.546.870
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)	1	7.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	3.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)	1	1.857.067.904	-	464.640.911	-	464.640.911	0,00%	25,02%	0,00	464.640.911

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	1.851.542.904	21	464.640.911	21	464.640.911	25,00%	25,09%	21,00	464.640.911
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.500.000		-		-		0,00%		-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	4.025.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)	1	312.231.171	-	10.285.002	-	10.285.002	0,00%	3,29%	0,00	10.285.002
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.196.264		-		-		0,00%		-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.009.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	33.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.499.357	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	34.376.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	520	219.930.000	-	10.285.002	-	10.285.002	0,00%	4,68%	0,00	10.285.002
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)	1	37.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	37.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)	1	360.577.029	-	46.380.957	-	46.380.957	0,00%	12,86%	0,00	46.380.957
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	50.343.829	3	8.130.957	3	8.130.957	25,00%	16,15%	3,00	8.130.957
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	310.233.200	2	38.250.000	2	38.250.000	16,67%	12,33%	2,00	38.250.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (1)	1	96.400.000	-	6.240.000	-	6.240.000	0,00%	6,47%	0,00	6.240.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	52.590.000	-	6.240.000	-	6.240.000	0,00%	11,87%	0,00	6.240.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	17	11.410.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			32.400.000		-		-		0,00%		-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								19,74%	19,75%		
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	234.105.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (% %)	100	103.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	3.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (% %)	100	124.295.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	32	124.295.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (% %)	100	6.725.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	6.725.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	100	162.995.000			-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani (77,01 %)	0	5.100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	5.100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani (77,01 %)	0	2.595.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			2.595.000			-	-	-	0,00%	0,00%		-
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani (77,01 %)	0	155.300.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	10	155.300.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			154.550.000			-	-	-	0,00%	0,00%		-
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan (%)	0	154.550.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	10	154.550.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Kawasan)	1	451.100.000			-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	-
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (2 Lokasi)	0	451.100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	2	451.100.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Dengan Mediasi (%)	100	2.350.000			-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten yang diselesaikan Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (100 %)	0	2.350.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita)	1	2.350.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3.676.276.104		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		14,34%		14,35%			
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah		Sangat Rendah			
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Persen)	100	5.648.700.603		1.134.367.776	-	1.134.367.776	0,00%	20,08%	100,00	1.134.367.776
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			86.100.000		3.750.000		3.750.000		4,36%		3.750.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	5.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	27,27%	0,00	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	65.000.000	1	2.250.000	1	2.250.000	6,25%	3,46%	1,00	2.250.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.235.782.034		1.028.647.509		1.028.647.509		24,28%		1.028.647.509
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	4.210.182.034	62	1.023.747.509	62	1.023.747.509	25,00%	24,32%	62,00	1.023.747.509
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14.800.000		2.950.000		2.950.000		19,93%		2.950.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	48	10.800.000	8	1.950.000	8	1.950.000	16,67%	18,06%	8,00	1.950.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.800.000		1.650.000		1.650.000		15,28%		1.650.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	10.800.000	2	1.650.000	2	1.650.000	16,67%	15,28%	2,00	1.650.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.862.000		1.950.000		1.950.000		7,84%		1.950.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	24.862.000	1	1.950.000	1	1.950.000	8,33%	7,84%	1,00	1.950.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			476.337.975		50.235.336		50.235.336		10,55%		50.235.336
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.980.000		-		-		0,00%		-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4.795.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	39.732.400	1	6.210.000	1	6.210.000	25,00%	15,63%	1,00	6.210.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	59.800.000	-	7.000.000	-	7.000.000	0,00%	11,71%	0,00	7.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	72.912.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	273.118.575	-	37.025.336	-	37.025.336	0,00%	13,56%	0,00	37.025.336
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28.416.000		-		-		0,00%		-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	28.416.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138.740.094		22.197.931		22.197.931		16,00%		22.197.931
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	138.740.094	3	22.197.931	3	22.197.931	25,00%	16,00%	3,00	22.197.931
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			647.662.500		25.937.000		25.937.000		4,00%		25.937.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	118.278.000	-	5.716.000	-	5.716.000	0,00%	4,83%	0,00	5.716.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	32	520.284.500	2	20.221.000	2	20.221.000	6,25%	3,89%	2,00	20.221.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	14	9.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				20,17%	20,08%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.079.799.126		488.000.000		488.000.000		15,85%		488.000.000
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.899.441.200		488.000.000		488.000.000		16,83%		488.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	19.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	309	2.708.691.200	54	486.350.000	54	486.350.000	17,48%	17,96%	54,00	486.350.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	2	45.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	61.000.000	-	1.650.000	-	1.650.000	0,00%	2,70%	0,00	1.650.000
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12	64.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			164.857.926		-		-		0,00%		-
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2	15.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	136.507.926	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			15.500.000		-		-		0,00%		-
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	2	15.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				15,37%	15,85%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			3.112.818.400		562.950.000		562.950.000		18,08%		562.950.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.112.818.400		562.950.000		562.950.000		18,08%		562.950.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	3.026.174.400	2	562.950.000	2	562.950.000	16,67%	18,60%	2,00	562.950.000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			51.200.000		-		-		0,00%		-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	20	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	4	15.444.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				16,20%	18,08%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		11.841.318.129		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				17,88%	18,46%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0	2.516.482.056	-	452.239.928	-	452.239.928	0,00%	17,97%	20,00	452.239.928
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu (%) Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	31.690.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	17.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	12.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	1.695.344.226	-	341.194.845	-	341.194.845	0,00%	20,13%	0,00	341.194.845
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	1.680.844.226	16	341.194.845	4	341.194.845	25,00%	20,30%	4,00	341.194.845
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	125	11.000.000	5	-	5	-	4,00%	0,00%	5,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	2.400.000	5	-	5	-	41,67%	0,00%	5,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000						0,00%		-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	7.500.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	243.756.950	-	53.538.477	-	53.538.477	0,00%	21,96%	0,00	53.538.477
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	716	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4.349.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	23.427.600	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	63.613.550	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	150.000.000	50	53.538.477	50	53.538.477	20,00%	35,69%	50,00	53.538.477
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	434.238.400	-	57.506.606	-	57.506.606	0,00%	13,24%	0,00	57.506.606
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	37.000.000	3	5.770.606	3	5.770.606	25,00%	15,60%	3,00	5.770.606
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	397.238.400	3	51.736.000	3	51.736.000	25,00%	13,02%	3,00	51.736.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (Persen)	1	103.952.480	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	33.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	49.940.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	27	17.010.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3.252.480	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23,20%	17,97%		
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan Informasi Rawan Bencana (layanan)	1	958.750.570	-	64.000.000	-	64.000.000	0,00%	6,68%	0,00	64.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	800	30.077.520	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	316.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (layanan)	6	533.720.000	-	64.000.000	-	64.000.000	0,00%	11,99%	0,00	64.000.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	55	533.720.000	-	64.000.000	-	64.000.000	0,00%	11,99%	0,00	64.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (layanan)	4	74.876.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	2	20.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	800	53.976.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	75	3.926.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2	3.926.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	6,68%		
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		3.475.232.626		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				16,80%	14,85%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Sosial											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100	3.687.034.016	-	679.958.723	-	679.958.723	0,00%	18,44%	100,00	679.958.723
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	1	79.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	34.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	11.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	13.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	2.597.170.480	-	562.445.557	-	562.445.557	0,00%	21,66%	0,00	562.445.557
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	2.537.870.480	32	554.445.557	32	554.445.557	25,00%	21,85%	32,00	554.445.557
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.000.000		6.500.000		6.500.000		32,50%		6.500.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	27.800.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	5,40%	0,00	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			11.500.000		-		-		0,00%		-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan adminstrasi barang milik daerah (1)	1	9.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	9.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1)	1	135.110.000	-	1.100.000	-	1.100.000	0,00%	0,81%	0,00	1.100.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	32	75.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	19.600.000	-	1.100.000	-	1.100.000	0,00%	5,61%	0,00	1.100.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	25.510.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000		-		-		0,00%		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi umum (1)	1	298.426.100	-	90.859.974	-	90.859.974	0,00%	30,45%	0,00	90.859.974
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.795.000		-		-		0,00%		-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4.010.000	5	4.010.000	5	4.010.000	100,00%	100,00%	5,00	4.010.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	10.710.900	3	5.160.790	3	5.160.790	50,00%	48,18%	3,00	5.160.790
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	70000	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	50.447.500	2	22.171.500	2	22.171.500	40,00%	43,95%	2,00	22.171.500
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	5.170.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500	215.092.000	15	59.517.684	15	59.517.684	3,00%	27,67%	15,00	59.517.684
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	4.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik (1)	1	12.090.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12.090.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	1	245.885.200	-	12.774.942	-	12.774.942	0,00%	5,20%	0,00	12.774.942
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	69.580.000	9	9.224.942	9	9.224.942	25,00%	13,26%	9,00	9.224.942
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	176.305.200	-	3.550.000	-	3.550.000	0,00%	2,01%	0,00	3.550.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	309.172.236	-	12.778.250	-	12.778.250	0,00%	4,13%	0,00	12.778.250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	191.842.236	1	12.778.250	1	12.778.250	4,76%	6,66%	1,00	12.778.250
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20	17.670.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	69.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.000.000		-		-		0,00%		-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				18,90%	18,44%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
	Persentase Pekerja Sosial yang mendapatkan Layanan Pemberdayaan sosial (%)	100	109.000.000		1.100.000	-	1.100.000	0,00%	1,01%	100,00	1.100.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial (1)	1	109.000.000	-	1.100.000	-	1.100.000	0,00%	1,01%	0,00	1.100.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	43.100.000	2	1.100.000	2	1.100.000	2,86%	2,55%	2,00	1.100.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	65.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1,13%	1,01%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (%)	100	249.620.000		9.700.000	-	9.700.000	0,00%	3,89%	100,00	9.700.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (jiwa)	0	247.120.000	-	9.700.000	-	9.700.000	0,00%	3,93%	0,00	9.700.000
Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	366	114.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	39.450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	25.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	93	1.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	38.500.000	1	6.000.000	1	6.000.000	25,00%	15,58%	1,00	6.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	24.700.000	1	3.700.000	1	3.700.000	25,00%	14,98%	1,00	3.700.000
Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	600	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (2500 Orang)	0	2.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500	2.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				6,33%	3,89%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%)	100	1.764.490.000		7.300.000	-	7.300.000	0,00%	0,41%	100,00	7.300.000
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dipelihara ² (197 orang)	0	8.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	3.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rujukan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12	2.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	185	2.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM (KK)	0	1.755.740.000	-	7.300.000	-	7.300.000	0,00%	0,42%	0,00	7.300.000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	26764	20.500.000	3.916	3.000.000	3.916	3.000.000	14,63%	14,63%	3916,00	3.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	100	25.800.000	17	4.300.000	17	4.300.000	17,00%	16,67%	17,00	4.300.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1462	1.649.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	60.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,42%	0,41%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	95.360.000	-	4.100.000	-	4.100.000	0,00%	4,30%	100,00	4.100.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	0	65.360.000	-	4.100.000	-	4.100.000	0,00%	6,27%	0,00	4.100.000
Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	700	65.360.000	95	4.100.000	95	4.100.000	13,57%	6,27%	95,00	4.100.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna siaga Bencana yang diberdayakan (Orang)	0	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	17	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				9,30%	4,30%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persentase)	100	49.590.000	-	700	-	700	0,00%	1,41%	100,00	700
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang dikelola (TMP)	1	49.590.000	-	700	-	700	0,00%	1,41%	0,00	700
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	49.590.000	-	700	-	700	0,00%	1,41%	0,00	700
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	1,41%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			5.955.094.016	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				12,26%	11,80%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Persen)	100	3.634.202.692	-	783.379.380	-	783.379.380	0,00%	21,56%	100,00	783.379.380
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	100		25		6		6,25%		0,00	
	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100	37.750.000	20	6.750.000	5	6.750.000	5,00%	17,88%	0,00	6.750.000
	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100		30		8		7,50%		0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	4.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1.960.000	1	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	28.750.000	9	6.750.000	9	6.750.000	33,33%	23,48%	9,00	6.750.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (Persen)	100	3.083.452.092	25	706.796.039	6	706.796.039	6,25%	22,92%	0,00	706.796.039
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	3.043.552.092	8	700.971.039	8	700.971.039	26,67%	23,03%	8,00	700.971.039
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	98	5.750.000	10	1.625.000	10	1.625.000	10,20%	28,26%	10,00	1.625.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	34.150.000	9	4.200.000	9	4.200.000	25,00%	12,30%	9,00	4.200.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah (1)	100	14.520.000	25	1.650.000	25	1.650.000	25,00%	11,36%	0,00	1.650.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	14.520.000	1	1.650.000	1	1.650.000	25,00%	11,36%	1,00	1.650.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	38.620.000	25	6.450.000	6	6.450.000	6,25%	16,70%	0,00	6.450.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	24	38.620.000	6	6.450.000	6	6.450.000	25,00%	16,70%	6,00	6.450.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	153.640.300	25	48.000.092	6	48.000.092	6,25%	31,24%	0,00	48.000.092
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.358.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.450.000	-	690	-	690	0,00%	20,00%	0,00	690
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4.770.000	-	450	-	450	0,00%	9,43%	0,00	450
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	62.062.000	1	4.794.400	1	4.794.400	25,00%	7,73%	1,00	4.794.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	80	80.000.000	65	42.065.692	65	42.065.692	81,25%	52,58%	65,00	42.065.692
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	231.780.300	25	13.733.249	6	13.733.249	6,25%	5,93%	0,00	13.733.249
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	64.400.000	4	12.333.249	4	12.333.249	33,33%	19,15%	4,00	12.333.249
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	167.380.300	4	1.400.000	4	1.400.000	33,33%	0,84%	4,00	1.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	74.440.000	10	-	3	-	2,50%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	31.929.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	68	29.138.300	15	-	15	-	22,06%	0,00%	15,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	15	9.440.000	2	-	2	-	13,33%	0,00%	2,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.932.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27,79%	21,56%	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	14,5	15.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13,72	-
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	94						0,00%		93,51	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan (%)	100	9.225.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	26	9.225.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan yang dibina (%)	100	6.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	12	6.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pencegahan terhadap perempuan yang terlaksana (%)	100	22.915.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	22.915.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban yang terlaksana (%)	100	1.704.338.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	7	1.704.338.000	1	-	1	-	14,29%	0,00%	1,00	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terbina (1)	100	12.150.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	20	12.150.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				14,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang dibina (%)	2,96	36.500.000	-	4.200.000	-	4.200.000	0,00%	10,73%	77,80	4.200.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	36.500.000	-	4.200.000	-	4.200.000	0,00%	11,51%	0,00	4.200.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pembelajaran keluarga yang tersedia (Lembaga)	2	2.625.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	2	2.625.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	10,73%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak (%)	58,82	5.875.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	32,94	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	5.875.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase hak anak yang terpenuhi (%)	87,5	51.200.000		3.900.000	-	3.900.000	0,00%	7,62%	79,17	3.900.000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan n/kel/desa yang terfasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha (Kec /Kel/D esa)	15	43.175.000	-	3.900.000	-	3.900.000	0,00%	9,03%	0,00	3.900.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	43.175.000	-	3.900.000	-	3.900.000	0,00%	9,03%	0,00	3.900.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan penguatan kelembagaan (1)	100	8.025.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	8.025.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	7,62%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	100	362.899.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak (Rasio)	0,002	107.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	34	107.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan komprehensif (%)	100	179.565.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	35	179.565.000	8	-	8	-	22,86%	0,00%	8,00	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Lembaga)	14	76.249.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	35	76.249.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				11,31%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	58	221.000.000		13.856.350	-	13.856.350	0,00%	6,27%	49,17	13.856.350
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB (%)	27	221.000.000	-	13.856.350	-	13.856.350	0,00%	6,27%	0,00	13.856.350
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	8	59.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	8	66.000.000	1	-	1	-	12,50%	0,00%	1,00	-
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	8	96.000.000	1	13.856.350	1	13.856.350	12,50%	14,43%	1,00	13.856.350
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				9,16%	6,27%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	79,28	2.827.949.000		226.089.000	-	226.089.000	0,00%	7,99%	78,46	226.089.000
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Ummet Need) (%)	11,24				-		0,00%		12,00	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang didampingi (Kecamatan)	8	877.000.000	1	30.009.000	1	30.009.000	12,50%	3,42%	0,00	30.009.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	8	392.000.000	2	30.009.000	2	30.009.000	25,00%	7,66%	2,00	30.009.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	8	244.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	125.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	15	115.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih (%)	100	591.200.000	-	115.900.000	-	115.900.000	0,00%	19,60%	0,00	115.900.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	70	591.200.000	17	115.900.000	17	115.900.000	24,29%	19,60%	17,00	115.900.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di faskes (%)	100	917.161.000	25	80.180.000	25	80.180.000	25,00%	8,74%	0,00	80.180.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	18	73.800.000	5	6.600.000	5	6.600.000	27,78%	8,94%	5,00	6.600.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	5000	421.084.000	542	73.580.000	542	73.580.000	10,84%	17,47%	542,00	73.580.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	22	399.777.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	8	22.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan kemitraan yang dibina (%)	100	442.588.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	10	324.988.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	21	117.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				10,88%	7,99%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan (%)	87,5				-		0,00%		62,50	
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	1.418.725.000			-		0,00%	0,00%	100,00	-
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	90,22				-		0,00%		88,28	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d			
		K	Rp	1		K	Rp	K	Rp	6		7	
				K	Rp					K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina (Kelompok)	43	147.325.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	130.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	495	17.325.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan/ mitra kerja yang dibina melalui pembinaan ke tahanan kesejahteraan keluarga (1)	100	1.271.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	8	543.000.000	2	-	2	-	25,00%	0,00%	2,00	-		
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	8	728.400.000	2	-	2	-	25,00%	0,00%	2,00	-		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,40%	0,00%				
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		10.315.979.692		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				18,81%	10,00%				
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (Persen)	100				-		0,00%		100,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (Persentase (%))	0	4.663.835.346		1.100.697.120	-	1.100.697.120	0,00%	23,60%	20,00	1.100.697.120
	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (Persentase (%))	0				-		0,00%		20,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (Persentase (%))	0				-		0,00%		20,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100	8.918.400	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	4.558.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	4.360.000	8	-	8	-	29,63%	0,00%	8,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	4.096.759.511	25	1.017.466.264	25	1.017.466.264	25,00%	24,84%	0,00	1.017.466.264
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	4.093.269.511	46	1.017.466.264	12	1.017.466.264	24,47%	24,86%	11,50	1.017.466.264
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	3.490.000	9	-	9	-	25,00%	0,00%	9,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	161.637.100	25	43.871.392	25	43.871.392	25,00%	27,14%	0,00	43.871.392
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	655,6	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.645.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.760.000	1		690		100,00%	25,00%	1,00	690

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	26.516.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	153	125.000.000	13	43.181.392	13	43.181.392	8,50%	34,55%	13,00	43.181.392
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100	6.400.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	318.574.500	25	33.238.544	25	33.238.544	25,00%	10,43%	0,00	33.238.544
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	100.514.300	3	15.238.544	3	15.238.544	25,00%	15,16%	3,00	15.238.544
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	218.060.200	3	18.000.000	3	18.000.000	25,00%	8,25%	3,00	18.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	71.545.835	25	6.120.920	25	6.120.920	25,00%	8,56%	0,00	6.120.920
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	35	24.131.500	10	4.447.670	10	4.447.670	28,57%	18,43%	10,00	4.447.670
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	26.625.665	1	1.673.250	1	1.673.250	33,33%	6,28%	1	1.673.250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	4.428.670	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	6.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	9.860.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23,85%	23,60%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	3139,64	61.247.000		1.350.000		1.350.000	0,00%	2,20%	15285,24	1.350.000
	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	0						0,00%		0	
	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	0						0,00%		0	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/kota yang dikelola (paket)	1	28.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3	28.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan (Ton)	3139,64	5.250.000	681	-	681	-	21,69%	0,00%	0	-
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	40	5.250.000	10	-	10	-	25,00%	0,00%	10	-
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional (1)	100	27.497.000	25	1.350.000	25	1.350.000	25,00%	4,91%	0	1.350.000
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	2	27.497.000	2	1.350.000	2	1.350.000	100,00%	4,91%	2	1.350.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				47,04%	2,20%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	451,98	248.518.875		37.800.000		37.800.000	0,00%	15,21%	2200,46	37.800.000
	umlah produksi perikanan budidaya (Ton)	0						0,00%		89,06	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (kelompok)	6	4.535.000	1	-	1	-	16,67%	0,00%	0	-
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	6	4.535.000	1	-	1	-	16,67%	0,00%	1	-
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil pembudidaya ikan (ton)	451,98	243.983.875	86	37.800.000	86	37.800.000	18,95%	15,49%	0	37.800.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	165.600.000	1	37.800.000	1	37.800.000	33,33%	22,83%	1	37.800.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	78.383.875	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,52%	15,21%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
ROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jenis produk olahan hasil perikanan (%)	100	50.479.080		3.000.000		3.000.000	0,00%	5,94%	100	3.000.000
	Persentase peningkatan jenis produk olahan hasil perikanan (%)	0						0,00%		20	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mendapatkan rekomendasi (unit)	5	15.190.000	1	3.000.000	1	3.000.000	20,00%	19,75%	0	3.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	4	15.190.000	1	3.000.000	1	3.000.000	25,00%	19,75%	1	3.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina (kelompok)	30	35.289.080	8	-	8	-	26,67%	0,00%	0	-
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	35	35.289.080	9	-	9	-	25,71%	0,00%	0	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,50%	5,94%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (Kg)	570585	1.175.275.000		18.000.000		18.000.000	0,00%	1,53%	2535834	18.000.000
	Produksi telur (Kg)	10375451						0,00%			
	Produksi hasil ikutan lainnya (Kg)	111827						0,00%		505985	
	Jumlah Peserta Bimtek/Sosialisasi Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Orang/Peserta)	0						0,00%		0	
	Produksi daging (Kg)	0						0,00%		0	
	Produksi telur (Kg)	0						0,00%		0	
	Produksi hasil ikutan lainnya (Kg)	0						0,00%		0	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan (unit)	37	1.175.275.000	19	18.000.000	19	18.000.000	51,35%	1,53%	0	18.000.000
	Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB (ekor)	567		13		13		2,29%		0	
	Jumlah kelompok penerima bibit ternak yang disebar (kelompok)	3		-		-		0,00%		0	
	Jumlah luas lahan HPT (Hektar)	535,97		78		78		14,60%		0	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	16	1.175.275.000	4	18.000.000	4	18.000.000	25,00%	1,53%	4	18.000.000
			6.282.309.711	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				25,00%	1,53%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (Rabies) (%)	0	82.954.410		6.500.000		6.500.000	0,00%	7,84%	0	6.500.000
	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (Anthrax) (%)	0						0		0	
	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (Brucellosis) (%)	0,04						0		0,04	
	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (Avin Influenza) (%)	0						0		0	
	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (Brucellosis) (%)	0						0		0,01	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan dan kesmavet (ekor)	1400	77.746.660	3.789	6.500.000	3.789	6.500.000	270,64%	8,36%	0	6.500.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	13	77.746.660	4	6.500.000	4	6.500.000	30,77%	8,36%	4	6.500.000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan sampel kesmavet (sampel)	30	5.207.750	55	-	55	-	183,33%	0,00%	0	-
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	13	5.207.750	4	-	4	-	30,77%	0,00%	4,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				30,77%	7,84%		
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		6.282.309.711		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				24,35%	18,58%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Lingkungan Hidup											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (1)	1	64.550.000	-	17.703.800	-	17.703.800	0,00%	27,43%	0,00	17.703.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	32.850.000	1	7.204.600	1	7.204.600	50,00%	21,93%	1,00	7.204.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.100.000	1	4.999.600	1	4.999.600	50,00%	33,11%	1,00	4.999.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	16.600.000	9	5.499.600	9	5.499.600	33,33%	33,13%	9,00	5.499.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	3.964.634.157	25	917.394.463	25	917.394.463	25,00%	23,14%	0,00	917.394.463
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	3.921.534.157	56	906.194.463	14	906.194.463	25,00%	23,11%	14,00	906.194.463
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	100	5.800.000	25	1.900.000	25	1.900.000	25,00%	32,76%	25,00	1.900.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	37.300.000	9	9.300.000	9	9.300.000	25,00%	24,93%	9,00	9.300.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	15.600.000	25	1.950.000	25	1.950.000	25,00%	12,50%	0,00	1.950.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	56	15.600.000	56	1.950.000	14	1.950.000	25,00%	12,50%	14,00	1.950.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	180.595.200	25	55.320.832	25	55.320.832	25,00%	30,63%	0,00	55.320.832
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat/Penerangan Bangunan (Paket)	7	804,048	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	4	18.665.440	1	4.140.900	1	4.140.900	25,00%	22,18%	1,00	4.140.900
	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		1		1		25,00%		1,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	27.120.292	1	6.367.200	1	6.367.200	33,33%	23,48%	1,00	6.367.200
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	35.288.500	1	8.673.150	1	8.673.150	20,00%	24,58%	1,00	8.673.150
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.004.120	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	97.712.800	25	36.139.582	25	36.139.582	25,00%	36,99%	25,00	36.139.582
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	100	127.766.400	25	13.521.217	25	13.521.217	25,00%	10,58%	0,00	13.521.217
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	89.280.000	3	13.521.217	3	13.521.217	25,00%	15,14%	3,00	13.521.217
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	38.486.400	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi baik (1)	100	167.000.400	25	5.509.600	25	5.509.600	25,00%	3,30%	0,00	5.509.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	108.585.000	-	5.509.600	-	5.509.600	0,00%	5,07%	0,00	5.509.600

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	54	45.305.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	21	8.110.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000						0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,38%	22,38%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
			93.411.000		14.250.000		14.250.000		15,26%		14.250.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	83.336.000	1	14.250.000	1	14.250.000	33,33%	17,10%	0,00	14.250.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	4	73.186.000	-	12.300.000	-	12.300.000	0,00%	16,81%	0,00	12.300.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	10.150.000	-	1.950.000	-	1.950.000	0,00%	19,21%	0,00	1.950.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	10.075.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	10.075.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	15,26%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
			157.296.440		40.599.520		40.599.520		25,81%		40.599.520
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dikelola (Kawasan)	3	157.296.440	1	40.599.520	1	40.599.520	33,33%	25,81%	0,00	40.599.520
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1	157.296.440	0	40.599.520	0	40.599.520	25,00%	25,81%	0,25	40.599.520
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	25,81%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
			9.200.000		3.900.000		3.900.000		42,39%		3.900.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibina dan diawasi (120 Usaha)	120	9.200.000	30	3.900.000	30	3.900.000	25,00%	42,39%	0,00	3.900.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	120	9.200.000	30	3.900.000	30	3.900.000	25,00%	42,39%	30,00	3.900.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	42,39%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
			54.400.400		4.600.000		4.600.000		8,46%		4.600.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (Orang)	0	54.400.400	-	4.600.000	-	4.600.000	0,00%	8,46%	0,00	4.600.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	38.250.400	-	4.600.000	-	4.600.000	0,00%	12,03%	0,00	4.600.000	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	50	16.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	8,46%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			18.850.000		-		-		0,00%		-	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan (Penghargaan)	1	18.850.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program sekolah adiwiyata (sekolah)	48	18.850.000	24	-	24	-	50,00%	0,00%	24,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			5.050.000		-		-		0,00%		-	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindak Lanjuti (Kasus)	1	5.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1	5.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			3.495.741.560		560.069.850		560.069.850		16,02%		560.069.850	
Pengelolaan Sampah	volume timbulan sampah yang ditangani (M3) (M3)	81553	3.495.741.560	2.038	560.069.850	2.038	560.069.850	2,50%	16,02%	0,00	560.069.850	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	575	68.107.560	575	-	144	-	25,00%	0,00%	143,75	-	
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	*Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	10	86.144.000	2	19.387.200	2	19.387.200	20,00%	22,51%	2,00	19.387.200	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	23828,93	3.341.490.000	5.957	540.682.650	5.957	540.682.650	25,00%	16,18%	5957,00	540.682.650	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,88%	16,02%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			8.354.095.557	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				24,21%	19,57%			
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
Semua Bidang												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	3.895.233.160		697.267.370		-	697.267.370	0,00%	17,90%	100,00	697.267.370
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu (1)	100	21.211.400	22	-	22	-	22,00%	0,00%	0,00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	12.501.800	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				K	Rp						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	5.759.600	2	-	2	-	50,00%	0,00%	2,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	2.950.000	3	-	3	-	27,27%	0,00%	3,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	2.528.330.060	30	554.359.060	30	554.359.060	30,08%	21,93%	0,00	554.359.060
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	2.501.390.460	27	554.359.060	27	554.359.060	25,00%	22,16%	27,00	554.359.060
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	24.940.000	10	-	10	-	10,00%	0,00%	10,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	1.999.600	2	-	2	-	40,00%	0,00%	2,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	47.505.800	40	-	40	-	40,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	54	7.956.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	23.075.000	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	16.474.800	1	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	100	425.825.550	16	26.768.802	16	26.768.802	16,11%	6,29%	0,00	26.768.802
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			621,2	-	-	-	-		0,00%		-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	215.134.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	534	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	12.000.000	3	-	3	-	100,00%	0,00%	3,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.038.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	6	86.997.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3.500.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	702	100.000.000	114	26.768.802	114	26.768.802	16,24%	26,77%	114,00	26.768.802
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100	139.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	139.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) (1)	100	644.730.350	31	112.683.508	31	112.683.508	31,25%	17,48%	0,00	112.683.508
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	139.853.150	3	31.383.508	3	31.383.508	25,00%	22,44%	3,00	31.383.508
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	504.877.200	2	81.300.000	2	81.300.000	50,00%	16,10%	2,00	81.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	88.130.000	-	3.456.000	-	3.456.000	0,00%	3,92%	0,00	3.456.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	28.800.000	-	3.456.000	-	3.456.000	0,00%	12,00%	0,00	3.456.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	21.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	8	4.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	3.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.000.000	-	-	-	-		0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,87%	17,90%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	99	41.409.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	99,00	-
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (Dokumen)	99	41.409.600	25	-	25	-	25,25%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	12	36.500.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	12	4.909.600	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	97,5	10.088.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	96,50	-
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan (Dokumen)	96	5.009.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	1	5.009.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan (%)	96	5.079.000	26	-	26	-	27,13%	0,00%	0,00	-
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	12	5.079.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				12,59%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan (%)	88,23	102.786.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	85,88	-
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Paket)	88,23	102.786.300	68	-	68	-	77,07%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	74.413.188	2	-	2	-	100,00%	0,00%	2,00	-
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3	28.373.112	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				81,60%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah		
			4.049.517.660	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				26,29%	17,22%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Persen)	100	2.505.370.354	-	676.636.610	-	676.636.610	0,00%	27,01%	100,00	676.636.610
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0		-		-		0,00%		50,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100	13.890.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	4.540.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.790.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	4.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan (Persen)	1	1.994.935.554	-	573.398.809	-	573.398.809	0,00%	28,74%	0,00	573.398.809
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	1.981.645.554	23	573.398.809	23	573.398.809	25,00%	28,94%	23,00	573.398.809
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.330.000	-	-	-	-	0,00%			-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d			
		K	Rp	I		K	Rp	K	Rp	6		7	
				K	Rp					K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	3.960.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada dinasPMD (1)	1	4.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian pernakat daerah (1)	1	9.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	4.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	4.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	165.125.000	-	40.451.456	-	40.451.456	0,00%	24,50%	0,00	40.451.456	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			502,9						0,00%				-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	311,6	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12.760.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.509.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	42.490.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14	490	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	61	103.060.000	24	40.451.456	24	40.451.456	39,34%	39,25%	24,00	40.451.456	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	1	20.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	254.609.800	-	57.180.345	-	57.180.345	0,00%	22,46%	0,00	57.180.345	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	40.000.000	3	10.580.345	3	10.580.345	25,00%	26,45%	3,00	10.580.345	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	214.609.800	3	46.600.000	3	46.600.000	25,00%	21,71%	3,00	46.600.000	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	43.050.000	-	5.606.000	-	5.606.000	0,00%	13,02%	0,00	5.606.000	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	40.000.000	1	5.606.000	1	5.606.000	12,50%	14,02%	1,00	5.606.000	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	5	3.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,13%	27,01%				
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa menyusun RPJMDesa , RKPDesa dan APBDDesa sesuai regulasi (%)	100	952.120.000	-	229.669.700	-	229.669.700	0,00%	24,12%	100,00	229.669.700	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dibina dan diawasi (orang)	0	952.120.000	-	229.669.700	-	229.669.700	0,00%	24,12%	0,00	229.669.700	-	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	49	900.000.000	13	223.369.700	13	223.369.700	26,53%	24,82%	13,00	223.369.700	-	-
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	10.610.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	49	5.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	12.110.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	98	7.410.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	49	4.710.000	24	2.450.000	24	2.450.000	48,98%	52,02%	24,00	2.450.000	-	-
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	70	4.360.000	60	3.850.000	60	3.850.000	85,71%	88,30%	60,00	3.850.000	-	-
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	70	7.860.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,71%	24,12%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%)	4,29	536.640.000		160.726.660	-	160.726.660	0,00%	29,95%	4,29	160.726.660
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan (LKD)	7	536.640.000	-	160.726.660	-	160.726.660	0,00%	29,95%	0,00	160.726.660
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	70	23.870.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	5.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	7.710.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	21.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	478.700.000	-	160.726.660	-	160.726.660	0,00%	33,58%	0,00	160.726.660
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	29,95%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			3.994.130.354	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				21,27%	26,72%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Perhubungan											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan (Persen)	100	4.228.987.421		859.974.327	-	859.974.327	0,00%	20,34%	100,00	859.974.327
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100	38.650.000	-	2.900.000	-	2.900.000	0,00%	7,50%	0,00	2.900.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	11.850.000	-	1.400.000	-	1.400.000	0,00%	11,81%	0,00	1.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	12.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	12.950.000	1	1.500.000	1	1.500.000	16,67%	11,58%	1,00	1.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	3.665.986.005	-	803.053.763	-	803.053.763	0,00%	21,91%	0,00	803.053.763
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	3.626.636.005	50	797.653.763	50	797.653.763	25,00%	21,99%	50,00	797.653.763
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.500.000						0,00%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8	36.850.000	1	5.400.000	1	5.400.000	12,50%	14,65%	1,00	5.400.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	92.858.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	245	13.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	79.358.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	230.136.016	-	45.307.806	-	45.307.806	0,00%	19,69%	0,00	45.307.806
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.133.720						0,00%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	3.200.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.875.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	62.074.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	5.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	138.002.796	3	45.307.806	3	45.307.806	25,00%	32,83%	3,00	45.307.806
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%) (1)	1	3.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	3.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	95.577.500	-	7.250.458	-	7.250.458	0,00%	7,59%	0,00	7.250.458
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	44.217.500	3	7.250.458	3	7.250.458	25,00%	16,40%	3,00	7.250.458
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	51.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (Persen)	1	102.479.500	-	1.462.300	-	1.462.300	0,00%	1,43%	0,00	1.462.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	28.032.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	50.667.000	-	1.462.300	-	1.462.300	0,00%	2,89%	0,00	1.462.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	14	23.780.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,68%	20,34%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Nilai)	85	1.397.624.600		41.600.000	-	41.600.000	0,00%	2,98%	83,00	41.600.000
	V/C Ratio (Nilai)	0,09				-		0,00%		0,07	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan (%)	96	665.974.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	110	74.249.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	50	207.785.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1500	333.940.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	50	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (%)	1	12.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	12.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Retribusi Terminal dan Parkir (Rupiah)	0	315.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	17	315.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi Persyaratan Tekhnis dan Laik Jalan (%)	97	67.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	4.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1000	55.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara (Kegiatan)	6	7.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan (%)	0	316.050.000	-	41.600.000	-	41.600.000	0,00%	13,16%	0,00	41.600.000
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	19.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			297.000.000		41.600.000		41.600.000		14,01%		41.600.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Bersyarat yang Mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (%)	88	6.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	*Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2	4.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	40	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang Dilaksanakan (Kali)	2	2.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	10	2.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang Disediakan (Angkutan)	1248	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten yang di terbitkan (Re komen dasi)	100	8.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	8.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	2,98%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			5.626.612.021	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				17,04%	16,02%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Komunikasi dan Informatika											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.353.255.762		618.448.143		618.448.143		18,44%		618.448.143
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun tepat waktu (1)	1	228.085.000	-	4.500.000	-	4.500.000	0,00%	1,97%	0,00	4.500.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	2.215.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.700.000	-	2.250.000	-	2.250.000	0,00%	23,20%	0,00	2.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	10.470.000	1	2.250.000	1	2.250.000	16,67%	21,49%	1,00	2.250.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	201.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	2.400.729.744	-	561.771.499	-	561.771.499	0,00%	23,40%	0,00	561.771.499
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	2.387.019.744	9	559.521.499	9	559.521.499	23,08%	23,44%	9,00	559.521.499
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.700.000						0,00%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8	11.010.000	2	2.250.000	2	2.250.000	25,00%	20,44%	2,00	2.250.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD (%)	1	1.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	1.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	32.300.000	-	7.200.000	-	7.200.000	0,00%	22,29%	0,00	7.200.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	32.300.000	1	7.200.000	1	7.200.000	25,00%	22,29%	1,00	7.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	150.206.218	-	41.015.434	-	41.015.434	0,00%	27,31%	0,00	41.015.434
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.001.000						0,00%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1.062.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	16.000.000	-	2.185.000	-	2.185.000	0,00%	13,66%	0,00	2.185.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	11.473.000	1	4.982.450	1	4.982.450	33,33%	43,43%	1,00	4.982.450
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	288	7.175.000	30	750	30	750	10,42%	10,45%	30,00	750
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	113.494.718	6	33.097.984	6	33.097.984	25,00%	29,16%	6,00	33.097.984
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	1	144.202.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	144.202.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	136.810.000	-	3.961.210	-	3.961.210	0,00%	2,90%	0,00	3.961.210
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	19.000.000	3	1.219.210	3	1.219.210	25,00%	6,42%	3,00	1.219.210
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	117.810.000	-	2.742.000	-	2.742.000	0,00%	2,33%	0,00	2.742.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	259.222.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	29.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	13.812.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	18	25.710.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			190.000.000						0,00%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				17,93%	18,44%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
				I		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahuan Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	33	778.750.000		247.550.000	-	247.550.000	0,00%	31,79%	27,40	247.550.000
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	2,5				-		0,00%		1,50	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (%)	95	778.750.000	-	247.550.000	-	247.550.000	0,00%	31,79%	0,00	247.550.000
Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	86	719.400.000	28	237.050.000	28	237.050.000	32,56%	32,95%	28,00	237.050.000
Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10	21.600.000	1	3.450.000	1	3.450.000	10,00%	15,97%	1,00	3.450.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1.750.000		-		-		0,00%		-
Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	20	36.000.000	4	7.050.000	4	7.050.000	20,00%	19,58%	4,00	7.050.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				31,28%	31,79%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pertase organisasi perangkat daerah (opd) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (%)	100	993.142.544		540.199.992	-	540.199.992	0,00%	54,39%	100,00	540.199.992
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo no 5 tahun 2015	6	27.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	11,11%	0,00	3.000.000
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	27.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	11,11%	0,00	3.000.000
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks SPBE (%)	35	966.142.544	-	537.199.992	-	537.199.992	0,00%	55,60%	0,00	537.199.992
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	34	216.142.544	6	37.200.000	6	37.200.000	17,65%	17,21%	6,00	37.200.000
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	34	750.000.000	23	499.999.992	23	499.999.992	67,65%	66,67%	23,00	499.999.992
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				54,93%	54,39%		
				Predikat Kinerja				Rendah	Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah (opd) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	77.390.000		7.300.000	-	7.300.000	0,00%	9,43%	100,00	7.300.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten Soppeng (%)	1	77.390.000	-	7.300.000	-	7.300.000	0,00%	9,43%	0,00	7.300.000
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	100	77.390.000	9	7.300.000	9	7.300.000	9,00%	9,43%	9,00	7.300.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				9,00%	9,43%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks)	275	141.129.000		3.600.000	-	3.600.000	0,00%	2,55%	265,00	3.600.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	1	86.519.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	3	86.519.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan (%)	2	54.610.000	-	3.600.000	-	3.600.000	0,00%	6,59%	0,00	3.600.000
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	34	54.610.000	-	3.600.000	-	3.600.000	0,00%	6,59%	0,00	3.600.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	2,55%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			5.343.667.306	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				26,15%	26,52%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Persen)	100	5.552.498.130		1.109.346.180	100	1.109.346.180	100,00%	19,98%	100,00	1.109.346.180
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100	35.100.000	-	6.900.000	-	6.900.000	0,00%	19,66%	0,00	6.900.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	8.100.000	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	22,22%	0,00	1.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	0	7.500.000	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	24,00%	0,00	1.800.000
	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		-		-		0,00%		0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	19.500.000	17	3.300.000	17	3.300.000	62,96%	16,92%	17,00	3.300.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	4.050.970.874	-	936.039.757	-	936.039.757	0,00%	23,11%	0,00	936.039.757
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	4.030.870.874	53	932.739.757	13	932.739.757	25,00%	23,14%	13,25	932.739.757
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.300.000		1.500.000		1.500.000		23,81%		1.500.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	13.800.000	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	13,04%	0,00	1.800.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	1	52.518.056	-	7.650.000	-	7.650.000	0,00%	14,57%	0,00	7.650.000
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	52.518.056	-	7.650.000	-	7.650.000	0,00%	14,57%	0,00	7.650.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	23.800.000	-	3.300.000	-	3.300.000	0,00%	13,87%	0,00	3.300.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	13.800.000	-	3.300.000	-	3.300.000	0,00%	23,91%	0,00	3.300.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10.000.000		-		-		0,00%		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	414.170.000	-	54.921.504	-	54.921.504	0,00%	13,26%	0,00	54.921.504
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			845,8		-		-		0,00%		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.295.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	66.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	81.629.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	2.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	253.000.000	-	54.921.504	-	54.921.504	0,00%	21,71%	0,00	54.921.504
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (1)	1	17.525.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	17.525.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	904.939.200	-	95.534.919	-	95.534.919	0,00%	10,56%	0,00	95.534.919

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	844.800.000	-	94.034.919	-	94.034.919	0,00%	11,13%	0,00	94.034.919
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	60.139.200	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	2,49%	0,00	1.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (Persen)	1	53.475.000	-	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	9,35%	0,00	5.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	28.657.000	-	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	17,45%	0,00	5.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	12.228.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	11	2.590.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				18,37%	19,98%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif (%)	21,69	6.300.000		1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	21,69	1.500.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi (%)	0	6.300.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	0,00	1.500.000
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	30	6.300.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	0,00	1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	23,81%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat terhadap koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	72	6.300.000		1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	72,00	1.500.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat (Koperasi)	36	6.300.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	0,00	1.500.000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	50	6.300.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	0,00	1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	23,81%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang terfasilitasi (%)	1,9	14.000.000		1.500.000	-	1.500.000	0,00%	10,71%	1,90	1.500.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (UMKM)	5	14.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	10,71%	0,00	1.500.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	20	14.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	10,71%	0,00	1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	10,71%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	60,94	240.000.000		3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1,25%	60,94	3.000.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil (usaha mikro)	0	240.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1,25%	0,00	3.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	125	240.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1,25%	0,00	3.000.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	1,25%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)	100	730.825.000	-	59.508.000	-	59.508.000	0,00%	8,14%	100,00	59.508.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan termanfaatkan sesuai peruntukannya (unit pasar)	18	730.825.000	-	59.508.000	-	59.508.000	0,00%	8,14%	0,00	59.508.000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	18	730.825.000	-	59.508.000	-	59.508.000	0,00%	8,14%	0,00	59.508.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	8,14%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (%)	3,92	7.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3,92	-
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah harga rata-rata dan stok barang Bapokting yang terdokumentasi (dokumen)	3	900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terawasi (distributor)	8	6.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	16	6.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	18.305.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	16,39%	89,12	3.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat yang bertanda tera sah berlaku (alat)	0	18.305.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	16,39%	0,00	3.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	400	8.805.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	17,04%	0,00	1.500.000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	15	9.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	15,79%	0,00	1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	16,39%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri (%)	3,16	147.000.000	-	7.505.000	-	7.505.000	0,00%	5,11%	3,16	7.505.000
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam promosi penggunaan produk dalam negeri (pelaku usaha)	10	147.000.000	-	7.505.000	-	7.505.000	0,00%	5,11%	0,00	7.505.000
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	10	147.000.000	-	7.505.000	-	7.505.000	0,00%	5,11%	0,00	7.505.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	5,11%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan perencanaan dan pembangunan industri unggulan daerah (%)	53,33	185.525.124	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1,62%	53,33	3.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah paket pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota (paket)	0	185.525.124	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1,62%	0,00	3.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	169.525.124	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	0,88%	0,00	1.500.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	16.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	9,38%	0,00	1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	1,62%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			6.300.000		1.500.000		1.500.000		23,81%		1.500.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan izin industri yang dipantau (permohonan)	25	6.300.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	23,81%	0,00	1.500.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			6.300.000		1.500.000		1.500.000		23,81%		1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	23,81%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	95	6.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	95,00	-
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia (informasi)	4	6.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	6.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			6.920.553.254	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				14,74%	17,21%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Persen)	100	3.980.867.289		870.132.811	-	870.132.811	0,00%	21,86%	100,00	870.132.811
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0				-		0,00%		0,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu	100	48.300.000	100	8.250.000	100	8.250.000	100,00%	17,08%	0,00	8.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	20.100.000	1	4.350.000	1	4.350.000	100,00%	21,64%	1,00	4.350.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.700.000	1	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.700.000	1	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	14	2.700.000	3	-	3	-	21,43%	0,00%	3,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	14	2.700.000	3	-	3	-	21,43%	0,00%	3,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	17.400.000	2	3.900.000	2	3.900.000	25,00%	22,41%	2,00	3.900.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	3.124.339.289	100	737.364.772	100	737.364.772	100,00%	23,60%	0,00	737.364.772	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	3.100.639.289	37	732.114.772	37	732.114.772	25,00%	23,61%	37,00	732.114.772	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	23.700.000	1	5.250.000	1	5.250.000	33,33%	22,15%	1,00	5.250.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	9.000.000	100	-	100	-	100,00%	0,00%	0,00	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			9.000.000		-		-		0,00%		-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	353.270.000	-	87.085.602	-	87.085.602	0,00%	24,65%	0,00	87.085.602	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			906.452		-		-		0,00%		-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	28.150.000	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	102.241.500	3	25.600.250	3	25.600.250	75,00%	25,04%	3,00	25.600.250	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	204	191.972.048	50	61.485.352	50	61.485.352	24,51%	32,03%	50,00	61.485.352	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	1	4.030.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4.030.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	281.350.000	100	32.098.837	100	32.098.837	100,00%	11,41%	0,00	32.098.837	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	281.350.000	3	32.098.837	3	32.098.837	25,00%	11,41%	3,00	32.098.837	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	160.578.000	-	5.333.600	-	5.333.600	0,00%	3,32%	0,00	5.333.600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	148.028.000	5	5.333.600	5	5.333.600	55,56%	3,60%	5,00	5.333.600	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	12.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				27,56%	21,86%		
								Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
	besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	20.000.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota (dokumen)	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
	Persentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100	81.762.562		-	-	-	0,00%	0,00%	47,58	-	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja (Jenis)	2	81.762.562	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	20	81.762.562	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			99.000.000		17.650.000		17.650.000		17,83%		17.650.000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Yang Memperoleh Layanan Antar Kerja (persen)	1	99.000.000	-	17.650.000	-	17.650.000	0,00%	17,83%	0,00	17.650.000
Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	450	99.000.000	125	17.650.000	125	17.650.000	27,78%	17,83%	125,00	17.650.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				27,78%	17,83%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			76.480.800		-		-		0,00%		-
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota (jumlah)	0	76.480.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	1250	76.480.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			20.000.000		-		-		0,00%		-
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah jenis potensi investasi yang termuat dalam peta (dokumen)	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			38.650.000		-		-		0,00%		-
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal (laporan)	9	38.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	38.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP (persen)	100	343.000.000		92.000.000	-	92.000.000	0,00%	26,82%	100,00	92.000.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Diterbitkan Berdasarkan Rekomendasi Teknis (Izin)	0	343.000.000	-	92.000.000	-	92.000.000	0,00%	26,82%	0,00	92.000.000
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1510	259.000.000	275	72.950.000	275	72.950.000	18,21%	28,17%	275,00	72.950.000
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10	25.800.000	2	4.500.000	2	4.500.000	20,00%	17,44%	2,00	4.500.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	234	58.200.000	65	14.550.000	65	14.550.000	27,78%	25,00%	65,00	14.550.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				19,97%	26,82%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal (%)	0	9.000.000		2.250.000	-	2.250.000	0,00%	25,00%	0,00	2.250.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dipantau dibina dan diawasi menjadi kewenangan daerah (80 perusahaan)	90	9.000.000	-	2.250.000	-	2.250.000	0,00%	25,00%	0,00	2.250.000
Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	80	9.000.000	20	2.250.000	20	2.250.000	25,00%	25,00%	20,00	2.250.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	25,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			46.800.000		11.700.000		11.700.000		25,00%		11.700.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi (dokumen)	2	46.800.000	-	11.700.000	-	11.700.000	0,00%	25,00%	0,00	11.700.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2	46.800.000	-	11.700.000	-	11.700.000	0,00%	25,00%	0,00	11.700.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	25,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			35.100.000		7.200.000		7.200.000		20,51%		7.200.000
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pendapatan Perkapita Transmigran (Rupiah)	0	35.100.000	-	7.200.000	-	7.200.000	0,00%	20,51%	0,00	7.200.000
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	80	6.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	1	28.800.000	1	7.200.000	1	7.200.000	100,00%	25,00%	1,00	7.200.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				82,05%	20,51%		
				Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah		
			4.750.660.651	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				25,77%	21,07%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100	4.157.442.439		478.800.996	-	478.800.996	0,00%	11,52%	100,00	478.800.996
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun tepat Waktu Persentase Dokument Penganggaran Yang disusun Tepat Waktu	100	65.874.800	25	9.300.000	25	9.300.000	25,00%	14,12%	0,00	9.300.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	28.436.800	1	3.500.000	1	3.500.000	50,00%	12,31%	1,00	3.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	14.688.000	1	3.000.000	1	3.000.000	50,00%	20,42%	1,00	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	22.750.000	3	2.800.000	3	2.800.000	33,33%	12,31%	3,00	2.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	3.583.348.539	25	408.225.866	25	408.225.866	25,00%	11,39%	0,00	408.225.866

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	3.521.609.539	45	399.925.866	45	399.925.866	25,00%	11,36%	45,00	399.925.866
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	180	28.000.000	30	4.300.000	30	4.300.000	16,67%	15,36%	30,00	4.300.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	26.739.000	10	4.000.000	10	4.000.000	27,78%	14,96%	10,00	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	0	1.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	33		10		10		30,30%		10,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	5.200.000	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pengkat Daerah (1)	100	10.100.000	25	1.500.000	25	1.500.000	25,00%	14,85%	0,00	1.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	10.100.000	2	1.500.000	2	1.500.000	33,33%	14,85%	2,00	1.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	46.300.000	25	7.100.000	25	7.100.000	25,00%	15,33%	0,00	7.100.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	26.300.000	1	4.100.000	1	4.100.000	20,00%	15,59%	1,00	4.100.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	20.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	50,00%	15,00%	1,00	3.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	178.757.100	25	32.128.800	25	32.128.800	25,00%	17,97%	0,00	32.128.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.887.500	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5.777.600	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2.800.000	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	39.292.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	2.000.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	125.000.000	50	32.128.800	50	32.128.800	19,23%	25,70%	50,00	32.128.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Perkantoran (1)	100	20.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran (persen)	100	202.862.000	25	20.240.720	25	20.240.720	25,00%	9,98%	0,00	20.240.720
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	78.000.000	3	20.240.720	3	20.240.720	25,00%	25,95%	3,00	20.240.720
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	124.862.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	50.000.000	25	305,61	25	305,61	25,00%	0,61%	0,00	305,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	32.800.000	4	305.610	4	305.610	44,44%	0,93%	4,00	305.610
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	15	17.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							
								25,22%	11,52%		
								Predikat Kinerja			
								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (Persen)	1,15	292.248.200		2.600.000		2.600.000	0,00%	0,89%	1,15	2.600.000
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Persen)	32,41						0,00%		32,41	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang diberdayakan (Orang)	0	201.735.700	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	0,64%	0,00	1.300.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	40	108.942.000	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	1,19%	0,00	1.300.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	40	92.793.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Diberdayakan Dan Dikembangkan (24 Organisasi)	24	90.512.500	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	1,44%	0,00	1.300.000
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	24	90.512.500	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	1,44%	0,00	1.300.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,89%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahaaga (Persn)	0	1.052.800.000		4.800.000	-	4.800.000	0,00%	0,46%	0,00	4.800.000
	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga (Cabang Olahraga)	2				-		0,00%		7,00	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga (Cabang Olahraga)	0	202.130.000	-	3.500.000	-	3.500.000	0,00%	1,73%	0,00	3.500.000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	3	202.130.000	-	3.500.000	-	3.500.000	0,00%	1,73%	0,00	3.500.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah kabupaten/kota (Kali)	1	281.650.000	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	0,46%	0,00	1.300.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	5	68.400.000	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	1,90%	0,00	1.300.000
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	40	213.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga prestasi tingkat daerah provinsi yang dibina (Cabang Olahraga)	0	517.770.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	40	457.770.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	50	60.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina (5 Cabor)	0	51.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	51.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,46%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif (%)	92,46	31.151.800			-		0,00%	0,00%	90,95	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (organisasi)	355	31.151.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	31.151.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara (%)	45,1	387.729.850		34.600.000	-	34.600.000	0,00%	8,92%	44,62	34.600.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota Yang Dikelolah (Buah)	2	387.729.850	2	34.600.000	2	34.600.000	100,00%	8,92%	0,00	34.600.000
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi)	2	362.429.850	2	34.600.000	2	34.600.000	100,00%	9,55%	2,00	34.600.000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3	15.300.000	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				94,79%	8,92%		
				Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi (%)	41,7	92.429.800		29.730.000	-	29.730.000	0,00%	32,16%	33,34	29.730.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah fasilitasi peningkatan Sumber Daya Pariwisata tingkat dasar (Jenis)	2	92.429.800	1	29.730.000	1	29.730.000	50,00%	32,16%	0,00	29.730.000
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	40	52.200.000	-	3.700.000	-	3.700.000	0,00%	7,09%	0,00	3.700.000
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	12	40.229.800	12	26.030.000	12	26.030.000	100,00%	64,70%	12,00	26.030.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				43,52%	32,16%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			6.013.802.089	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				24,22%	9,15%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.594.337.601		754.438.680		754.438.680		20,99%		754.438.680
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.900.000		17.800.000		17.800.000		31,84%		17.800.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	30.400.000	-	7.900.000	-	7.900.000	0,00%	25,99%	0,00	7.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.900.000	-	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	38,76%	0,00	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	12.600.000	3	4.900.000	3	4.900.000	27,27%	38,89%	3,00	4.900.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.098.387.781		688.314.566		688.314.566		22,22%		688.314.566
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.079.987.781		683.764.566		683.764.566	25,00%	22,20%		683.764.566
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.400.000		2.300.000		2.300.000		24,47%		2.300.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	20	9.000.000	5	2.250.000	5	2.250.000	25,00%	25,00%	5,00	2.250.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.000.000		-		-		0,00%		-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.100.000		1.400.000		1.400.000		13,86%		1.400.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	10.100.000	1	1.400.000	1	1.400.000	20,00%	13,86%	1,00	1.400.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			163.492.380		18.759.202		18.759.202		11,47%		18.759.202
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.971.680		-		-		0,00%		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.400.000	-	400	-	400	0,00%	16,67%	0,00	400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	6.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	29.120.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	2.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400	120.000.000	61	18.359.202	61	18.359.202	15,25%	15,30%	61,00	18.359.202
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.814.400		23.864.912		23.864.912		14,14%		23.864.912
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	86.000.000	3	16.164.912	3	16.164.912	25,00%	18,80%	3,00	16.164.912
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	82.814.400	3	7.700.000	3	7.700.000	25,00%	9,30%	3,00	7.700.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.643.040		4.300.000		4.300.000		4,59%		4.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	35.000.000	-	2.600.000	-	2.600.000	0,00%	7,43%	0,00	2.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	25.000.000	1	1.700.000	1	1.700.000	20,00%	6,80%	1,00	1.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	25	5.240.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			28.403.040		-		-		0,00%		-
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			2,04%	20,99%		
							Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
			925.361.479		9.900.000		9.900.000		1,07%		9.900.000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			186.537.700		-		-		0,00%		-
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	20	44.810.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	600	141.727.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			738.823.779		9.900.000		9.900.000		1,34%		9.900.000
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	10	95.905.579	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	100	353.179.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	1	37.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	200	75.175.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	10	177.063.300	1	9.900.000	1	9.900.000	10,00%	5,59%	1,00	9.900.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				1,91%	1,07%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			45.272.800		-		-		0,00%		-	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			45.272.800		-		-		0,00%		-	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	1	45.272.800	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			37.430.000			2.600.000		2.600.000		6,95%	2.600.000	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			27.600.000			2.600.000		2.600.000		9,42%	2.600.000	
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	10	15.800.000	1		1.300.000	1	1.300.000	10,00%	8,23%	1,00	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	5	11.800.000	1		1.300.000	1	1.300.000	20,00%	11,02%	1,00	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			9.830.000			-		-		0,00%	-	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	25	9.830.000	-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				10,53%	6,95%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			4.602.401.880	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				2,06%	16,66%			
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan												
Semua Bidang												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	12.472.790.316			2.884.972.751		-	2.884.972.751	0,00%	23,13%	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Disusun tepat Waktu (%)	1	33.150.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	14.810.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	11.040.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.950.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	4.350.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	11.613.603.916	-		2.718.996.306		-	2.718.996.306	0,00%	23,41%	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	141	11.573.089.916	141		2.718.996.306	141	2.718.996.306	25,00%	23,49%	141,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			38.400.000			-		-		0,00%	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7	2.114.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	260.176.000	-		134.890.227		-	134.890.227	0,00%	51,85%	0,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			800						0,00%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	79.224.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	169.252.000	159	134.890.227	159	134.890.227	79,50%	79,70%	159,00	134.890.227
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			68.200.000						0,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	68.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat daerah (1)	1	391.040.400	-	26.790.798	-	26.790.798	0,00%	6,85%	0,00	26.790.798
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	152.940.000	3	26.790.798	3	26.790.798	25,00%	17,52%	3,00	26.790.798
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	238.100.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	106.620.000	-	4.295.420	-	4.295.420	0,00%	4,03%	0,00	4.295.420
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	17.820.000	-	4.295.420	-	4.295.420	0,00%	24,10%	0,00	4.295.420
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	149	85.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	8	3.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,58%	23,13%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi (%)	98,3	926.460.000					0,00%	0,00%	94,80	-
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah fasilitas Penyediaan dan Penyaluran Pangan Terhadap Stabilisasi Pasokan (Kali)	6	640.130.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	300	610.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	17.765.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	12.365.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Yang Dikelola (Kg)	0	240.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	192	240.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Paket fasilitas Kegiatan Upaya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Masyarakat yang Dilaksanakan (Paket)	0	46.330.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			17.765.000						0,00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	28.565.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	11,3	12.365.000					0,00%	0,00%	10,54	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2											
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kerentanan Pangan yang akan Dihilaskan (Dokumen)	1	12.365.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	12.365.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	100	16.965.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengawasan Keamanan Pangan yang Dilaksanakan (kali)	1	16.965.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	16.965.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (%)	31,99	1.660.963.554	-	-	2.959.200	-	2.959.200	0,00%	0,18%	23,05	2.959.200
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Penerima Sarana Pertanian yang Diawasi dan Didampingi Penggunaannya (Kelompok)	26	1.395.363.554	-	-	2.959.200	-	2.959.200	0,00%	0,21%	0,00	2.959.200
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	6	1.389.963.554	-	-	2.959.200	-	2.959.200	0,00%	0,21%	0,00	2.959.200
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	5.400.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sumber daya genetik tumbuhan yang dikelola dan dikembangkan (Jenis)	2	265.600.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	214.600.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	51.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,18%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan (%)	100	768.400.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Paket Dukungan Pengembangan Prasarana Pertanian (Paket)	0	27.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Kali)	2	27.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang Dibangun dan Berfungsi dengan Baik (%)	1	741.400.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	150.200.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3	591.200.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (%)	99,27	37.600.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	97,77	-
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	0	37.600.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5	37.600.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (Pemula ke Lanjut, Lanjut ke Madya, Madya ke Utama (%)	32	654.950.000						0,00%	0,00%	32,00	-
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani Yang meningkat Skor Kemampuannya Jumlah Posluhdes Aktif yang difasilitasi (Unit 4 Unit)	0	654.950.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	8	616.800.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	628	38.150.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	-
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%		
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		16.550.493.870							18,53%	17,45%		
									Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
Semua Bidang												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Persen)	100	5.195.215.280		1.248.591.027	-	1.248.591.027		0,00%	24,03%	100,00	1.248.591.027
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	100	13.250.000	25	3.620.000	25	3.620.000		25,00%	27,32%	0,00	3.620.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	3.370.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.620.000	2	3.620.000	2	3.620.000		100,00%	100,00%	2,00	3.620.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.620.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	2.640.000	6	-	6	-		22,22%	0,00%	6,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)	100	2.866.589.280	25	739.821.891	25	739.821.891		25,00%	25,81%	0,00	739.821.891
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	2.861.789.280	30	739.821.891	8	739.821.891		25,00%	25,85%	7,50	739.821.891
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	96	2.400.000	24	-	24	-		25,00%	0,00%	24,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	2.400.000	9	-	9	-		25,00%	0,00%	9,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (1)	100	733.568.800	25	303.635.231	25	303.635.231		25,00%	41,39%	0,00	303.635.231
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.601.060	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	206.050.000	-	182.870.000	-	182.870.000		0,00%	88,75%	0,00	182.870.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	18.880.000	-	2.800.000	-	2.800.000		0,00%	14,83%	0,00	2.800.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	19.283.640	-	1.200.000	-	1.200.000		0,00%	6,22%	0,00	1.200.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	53.246.100	2	35.199.000	2	35.199.000		50,00%	66,11%	2,00	35.199.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	433.508.000	50	81.566.231	50	81.566.231		16,67%	18,82%	50,00	81.566.231
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%) (1)	100	955.920.000	25	97.500.000	25	97.500.000		25,00%	10,20%	0,00	97.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	955.920.000	-	97.500.000	-	97.500.000		0,00%	10,20%	0,00	97.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)	100	548.667.200	25	97.869.905	25	97.869.905		25,00%	17,84%	0,00	97.869.905
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	171.210.000	3	23.115.905	3	23.115.905		25,00%	13,50%	3,00	23.115.905

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	377.457.200	3	74.754.000	3	74.754.000	25,00%	19,80%	3,00	74.754.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik (%)	100	77.220.000	25	6.144.000	25	6.144.000	25,00%	7,96%	0,00	6.144.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	45.000.000	-	6.144.000	-	6.144.000	0,00%	13,65%	0,00	6.144.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20	12.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	19.720.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				18,42%	24,03%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PERENCANAAN											
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100	491.732.000		96.197.000	-	96.197.000	0,00%	19,56%	100,00	96.197.000
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100				-		0,00%		100,00	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun tepat waktu (%)	100	413.232.000	25	90.947.000	25	90.947.000	25,00%	22,01%	0,00	90.947.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3	132.479.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	32.150.000	2	22.650.000	2	22.650.000	100,00%	70,45%	2,00	22.650.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	73.224.000	-	37.997.000	-	37.997.000	0,00%	51,89%	0,00	37.997.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	175.379.000	-	30.300.000	-	30.300.000	0,00%	17,28%	0,00	30.300.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang di manfaatkan SKPD (%)	100	5.550.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	34	5.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil Pengendalian dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan daerah (%)	100	72.950.000	25	5.250.000	25	5.250.000	25,00%	7,20%	0,00	5.250.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	72.950.000	-	5.250.000	-	5.250.000	0,00%	7,20%	0,00	5.250.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				6,54%	19,56%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur (%)	100	241.630.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan (%)	100	113.360.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	4.105.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	6.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	4.105.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	98.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian (%)	100	62.720.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	8.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	4.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	49.770.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup infrastruktur. Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan (%)	100	65.550.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	1.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	11.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	7.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	44.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	100	100.000.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (SIDa) (%)	88,23						0,00%		38,80	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan (%)	100	20.151.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1	20.151.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi (%)	100	79.849.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	79.849.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%		
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		6.028.577.280		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				16,41%	22,31%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100	23.639.848.540		4.416.483.583	-	4.416.483.583	0,00%	18,68%	100,00	4.416.483.583

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	1	31.750.000	-	1.200.000	-	1.200.000	0,00%	3,78%	0,00	1.200.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	9	16.550.000	2	1.200.000	2	1.200.000	22,22%	7,25%	2,00	1.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	15.200.000	11	-	11	-	40,74%	0,00%	11,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	10.617.824.240	-	1.890.997.075	-	1.890.997.075	0,00%	17,81%	0,00	1.890.997.075
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	93	10.553.734.240	93	1.885.204.075	23	1.885.204.075	25,00%	17,86%	23,25	1.885.204.075
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)	96	58.200.000	20	5.793.000	20	5.793.000	20,83%	9,95%	20,00	5.793.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	5.890.000	9	-	9	-	25,00%	0,00%	9,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	65.200.000	-	7.200.000	-	7.200.000	0,00%	11,04%	0,00	7.200.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	48.700.000	3	7.200.000	3	7.200.000	42,86%	14,78%	3,00	7.200.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Dokumen)	1	16.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	1.887.035.592	-	322.642.421	-	322.642.421	0,00%	17,10%	0,00	322.642.421
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan (Jenis)	2	14.733.092	2	-	1	-	25,00%	0,00%	0,50	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	8.450.000	3	-	1	-	25,00%	0,00%	0,75	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	252.038.700	3	-	1	-	25,00%	0,00%	0,75	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	282.993.200	3	-	1	-	25,00%	0,00%	0,75	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	25.500.000	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.303.320.600	1	322.642.421	0	322.642.421	25,00%	24,76%	0,25	322.642.421
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah (1)	1	202.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	202.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	10.567.718.708	-	2.186.186.787	-	2.186.186.787	0,00%	20,69%	0,00	2.186.186.787
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	9.831.832.308	9	2.036.570.787	2	2.036.570.787	6,25%	20,71%	2,25	2.036.570.787
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	735.886.400	1	149.616.000	0	149.616.000	25,00%	20,33%	0,25	149.616.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (1)	1	267.520.000	-	8.257.300	-	8.257.300	0,00%	3,09%	0,00	8.257.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	39.000.000	-	5.707.300	-	5.707.300	0,00%	14,63%	0,00	5.707.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	300	61.000.000	75	2.550.000	75	2.550.000	25,00%	4,18%	75,00	2.550.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	16	19.520.000	4	-	4	-	25,00%	0,00%	4,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	138.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16,81%	18,68%	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
KEUANGAN											
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu (Persentase)	100	136.144.606.196	-	11.690.568.697	-	11.690.568.697	0,00%	8,59%	100,00	11.690.568.697
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	1	1.049.215.200	-	141.100.000	-	141.100.000	0,00%	13,45%	0,00	141.100.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	4	535.205.000	-	7.500.000	-	7.500.000	0,00%	1,40%	0,00	7.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	4	484.615.200	-	133.600.000	-	133.600.000	0,00%	27,57%	0,00	133.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	29.395.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	1	365.575.000	-	64.100.000	-	64.100.000	0,00%	17,53%	0,00	64.100.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	4	15.150.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	16.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	25,00%	7,41%	1,00	1.200.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1	27.445.000	1	1.500.000	0	1.500.000	25,00%	5,47%	0,25	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	1	32.900.000	1	3.500.000	0	3.500.000	25,00%	10,64%	0,25	3.500.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	6	29.150.000	6	3.600.000	2	3.600.000	25,00%	12,35%	1,50	3.600.000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	34	244.730.000	34	54.300.000	34	54.300.000	100,00%	22,19%	34,00	54.300.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	1	576.910.300	-	35.700.000	-	35.700.000	0,00%	6,19%	0,00	35.700.000
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2	24.764.500	2	2.600.000	1	2.600.000	25,00%	10,50%	0,50	2.600.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	34	42.081.000	34	7.800.000	9	7.800.000	25,00%	18,54%	8,50	7.800.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	612	41.965.000	153	5.400.000	38	5.400.000	6,25%	12,87%	38,25	5.400.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	385.685.000	1	19.900.000	1	19.900.000	100,00%	5,16%	1,00	19.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	36.662.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	45.752.000	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	1	134.152.905.696	-	11.449.668.697	-	11.449.668.697	0,00%	8,53%	0,00	#####
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	194.652.216	1	194.652.216	1	194.652.216	100,00%	100,00%	1,00	194.652.216
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	6.026.209.199	1	2.137.387.390	0	2.137.387.390	25,00%	35,47%	0,25	2.137.387.390
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	114.461.704.600	1	8.583.819.091	0	8.583.819.091	25,00%	7,50%	0,25	8.583.819.091
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	8.405.237.431	1	533.810.000	0	533.810.000	25,00%	6,35%	0,25	533.810.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	5.065.102.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,34%	8,59%		
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	100	825.536.832	-	210.578.000	-	210.578.000	0,00%	25,51%	100,00	210.578.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi (Persentase)	1	825.536.832	-	210.578.000	-	210.578.000	0,00%	25,51%	0,00	210.578.000
Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	8.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	28.225.000	4	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	624.761.832	1	199.578.000	0	199.578.000	25,00%	31,94%	0,25	199.578.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	93.350.000	4	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5	61.050.000	5	11.000.000	1	11.000.000	25,00%	18,02%	1,25	11.000.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,45%	25,51%		
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)	100	1.135.650.879	-	20.900.000	-	20.900.000	0,00%	1,84%	100,00	20.900.000
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (1)	1	1.135.650.879	-	20.900.000	-	20.900.000	0,00%	1,84%	0,00	20.900.000
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	7.870.879	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	37.200.000	1	4.700.000	0	4.700.000	25,00%	12,63%	0,25	4.700.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	89.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	243.860.000	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	572.570.000	1	16.200.000	0	16.200.000	25,00%	2,83%	0,25	16.200.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	108.600.000	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	76.300.000	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23,04%	1,84%		
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		161.745.642.447		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				23,23%	10,10%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Persen)	100	5.016.002.180	-	1.468.665.872	-	1.468.665.872	0,00%	29,28%	100,00	1.468.665.872
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100	35.050.000	-	7.542.000	-	7.542.000	0,00%	21,52%	0,00	7.542.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	17.625.000	-	4.542.000	-	4.542.000	0,00%	25,77%	0,00	4.542.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.400.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	40,54%	0,00	3.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	5.625.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	3.651.740.180	-	941.507.550	-	941.507.550	0,00%	25,78%	0,00	941.507.550
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	3.624.065.180	12	937.007.550	12	937.007.550	25,53%	25,86%	12,00	937.007.550
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.425.000		2.250.000		2.250.000		14,59%		2.250.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	12.250.000	7	2.250.000	7	2.250.000	19,44%	18,37%	7,00	2.250.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD (%)	1	25.998.000	-	5.850.000	-	5.850.000	0,00%	22,50%	0,00	5.850.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	25.998.000	1	5.850.000	1	5.850.000	16,67%	22,50%	1,00	5.850.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	4.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	3.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	1.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%) (1)	1	510.036.000	-	187.130.534	-	187.130.534	0,00%	36,69%	0,00	187.130.534
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.922.880		-		-		0,00%		-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.570.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	17.140.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	65.000.000	3	36.750.000	3	36.750.000	60,00%	56,54%	3,00	36.750.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	55.353.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	9.180.900	-	5.006.130	-	5.006.130	0,00%	54,53%	0,00	5.006.130
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	358.868.170	5	145.374.404	5	145.374.404	41,67%	40,51%	5,00	145.374.404
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%) (1)	1	53.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	53.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	1	371.378.000	-	30.940.550	-	30.940.550	0,00%	8,33%	0,00	30.940.550
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	230.000.000	3	27.440.550	3	27.440.550	25,00%	11,93%	3,00	27.440.550
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	141.378.000	1	3.500.000	1	3.500.000	8,33%	2,48%	1,00	3.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik (%)	1	364.050.000	-	295.695.238	-	295.695.238	0,00%	81,22%	0,00	295.695.238
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	36.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	8.000.000	-	225.238	-	225.238	0,00%	2,82%	0,00	225.238
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	15	9.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	300.000.000	1	295.470.000	1	295.470.000	100,00%	98,49%	1	295.470.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.000.000		-		-		0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				29,70%	29,28%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KEPEGAWAIAN											
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi (%)	100	599.582.000		307.976.000		307.976.000	0,00%	51,37%	100	307.976.000
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100						0,00%		100	
	Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensinya (%)	0,49						0,00%		2,63	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang melayani administrasi Kepegawaian (%)	0	93.566.000	-	21.260.000	-	21.260.000	0,00%	22,72%	0,00	21.260.000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	20	10.000.000	2	1.225.000	2	1.225.000	10,00%	12,25%	2	1.225.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	4	34.766.000	1	12.010.000	1	12.010.000	25,00%	34,55%	1	12.010.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	14	43.800.000	3	8.025.000	3	8.025.000	21,43%	18,32%	3	8.025.000
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kapasitasnya (ASN)	0	66.400.000	-	6.700.000	-	6.700.000	0,00%	10,09%	0,00	6.700.000
Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	40.000.000	-	850.000	-	850.000	0,00%	2,13%	0,00	850.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	800	26.400.000	177	5.850.000	177	5.850.000	22,13%	22,16%	177	5.850.000
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya (ASN 29 ASN)	0	368.266.000	-	280.016.000	-	280.016.000	0,00%	76,04%	0,00	280.016.000
Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	25	210.450.000	17	150.000.000	17	150.000.000	68,00%	71,28%	17	150.000.000
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	5	144.816.000	3	130.016.000	3	130.016.000	60,00%	89,78%	3	130.016.000
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	232	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN (%)	1	71.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	650	66.850.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	21	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				42,52%	51,37%		
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-Rata Lama Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	20	979.425.000	-	99.825.000	-	99.825.000	0,00%	10,19%	20,00	99.825.000
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang dapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (ASN)	0	9.675.000	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	18,60%	0,00	1.800.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	40	450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	1	9.225.000	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	19,51%	0,00	1.800.000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang dapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (ASN)	0	969.750.000	-	98.025.000	-	98.025.000	0,00%	10,11%	0,00	98.025.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	3	967.725.000	-	98.025.000	-	98.025.000	0,00%	10,13%	0,00	98.025.000
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	1	2.025.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	10,19%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d			
		3		4		5		6		7			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		6.595.009.180		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				26,46%		28,45%			
								Sangat Rendah		Sangat Rendah			
Inspektorat Daerah													
Semua Bidang													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah (Persen)	100	11.795.872.676	-	1.355.740.223	-	1.355.740.223	0,00%	11,49%	100,00	1.355.740.223		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu. Persentase Dokumen Pelaporan dan yang disusun tepat waktu. Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu.	100	30.663.800	-	4.200.000	-	4.200.000	0,00%	13,70%	0,00	4.200.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	12.343.800	-	2.250.000	-	2.250.000	0,00%	18,23%	0,00	2.250.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.080.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.080.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	8.960.000	2	1.950.000	2	1.950.000	22,22%	21,76%	2,00	1.950.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	5.616.268.996	-	1.298.499.604	-	1.298.499.604	0,00%	23,12%	0,00	1.298.499.604		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	5.575.098.996	57	1.293.599.604	57	1.293.599.604	25,00%	23,20%	57,00	1.293.599.604		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.970.000		2.950.000		2.950.000		9,23%		2.950.000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	9.200.000	-	1.950.000	-	1.950.000	0,00%	21,20%	0,00	1.950.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah (1)	1	8.110.000	-	1.950.000	-	1.950.000	0,00%	24,04%	0,00	1.950.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	8.110.000	1	1.950.000	1	1.950.000	20,00%	24,04%	1,00	1.950.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	3.465.385.145	-	11.932.128	-	11.932.128	0,00%	0,34%	0,00	11.932.128		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20	41.900.000	6	6.000.000	6	6.000.000	30,00%	14,32%	6,00	6.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	57	2.050.221.072	-	5.932.128	-	5.932.128	0,00%	0,29%	0,00	5.932.128		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			1.373.264.073		-		-		0,00%		-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	1.285.970.435	-	23.029.802	-	23.029.802	0,00%	1,79%	0,00	23.029.802		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.311.228		-		-		0,00%		-		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	35.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	22.930.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	92.439.750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	80	19.552.425	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	1.109.857.032	2	23.029.802	2	23.029.802	3,33%	2,08%	2,00	23.029.802		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%) (1)	1	840.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	54	217.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	623.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	200.368.400	-	14.346.689	-	14.346.689	0,00%	7,16%	0,00	14.346.689
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	47.600.000	16	14.346.689	16	14.346.689	33,33%	30,14%	16,00	14.346.689
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	152.768.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik (%)	1	348.705.900	-	1.782.000	-	1.782.000	0,00%	0,51%	0,00	1.782.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	27	64.500.000	1	1.782.000	1	1.782.000	3,70%	2,76%	1,00	1.782.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	78	53.780.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			230.425.900	-	-	-	-		0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				12,42%	11,49%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
INSPEKTORAT DAERAH											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	95	2.519.101.300	-	189.450.000	-	189.450.000	0,00%	7,52%	95,00	189.450.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa (LHP)	0	2.150.746.300	-	185.550.000	-	185.550.000	0,00%	8,63%	0,00	185.550.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (LHP)	5	71.715.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP)	40	469.949.600	14	158.150.000	14	158.150.000	35,00%	33,65%	14,00	158.150.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LHP)	29	554.605.000	-	3.900.000	-	3.900.000	0,00%	0,70%	0,00	3.900.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (LHP)	4	62.715.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (LHP)	42	741.761.500	-	3.900.000	-	3.900.000	0,00%	0,53%	0,00	3.900.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	250.000.000	-	19.600.000	-	19.600.000	0,00%	7,84%	0,00	19.600.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat dan pengawasan tertentu (LHP)	0	368.355.000	-	3.900.000	-	3.900.000	0,00%	1,06%	0,00	3.900.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	15	368.355.000	-	3.900.000	-	3.900.000	0,00%	1,06%	0,00	3.900.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				6,53%	7,52%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan (%)	50	1.267.691.000	-	51.885.000	-	51.885.000	0,00%	4,09%	50,00	51.885.000
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa (Kali)	16	1.267.691.000	-	51.885.000	-	51.885.000	0,00%	4,09%	0,00	51.885.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	34	118.620.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	34	22.805.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	26	1.103.461.000	2	51.885.000	2	51.885.000	7,69%	4,70%	2,00	51.885.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	34	22.805.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				6,70%	4,09%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		15.582.664.976		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				11,00%	10,25%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											
Sekretariat Daerah											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Persen)	100	23.527.637.101	-	4.133.581.692	-	4.133.581.692	0,00%	17,57%	100,00	4.133.581.692
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100	85.476.000	-	14.907.000	-	14.907.000	0,00%	17,44%	0,00	14.907.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	10.182.000	1	875	1	875	50,00%	8,59%	1,00	875
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.127.000	1	5.377.000	1	5.377.000	50,00%	35,55%	1,00	5.377.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	18.877.000	1	2.195.000	1	2.195.000	50,00%	11,63%	1,00	2.195.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	41.290.000	8	6.460.000	8	6.460.000	29,63%	15,65%	8,00	6.460.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	11.329.204.622	-	2.173.329.241	-	2.173.329.241	0,00%	19,18%	0,00	2.173.329.241
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	106	11.203.360.622	-	2.149.415.241	-	2.149.415.241	0,00%	19,19%	0,00	2.149.415.241
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			94.000.000		15.900.000		15.900.000		16,91%		15.900.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	31.844.000	-	8.014.000	-	8.014.000	0,00%	25,17%	0,00	8.014.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	1	344.283.510	-	67.669.000	-	67.669.000	0,00%	19,66%	0,00	67.669.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	100.200.000	1	12.800.000	0	12.800.000	25,00%	12,77%	0,25	12.800.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			76.785.710		2.645.600		2.645.600		3,45%		2.645.600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			167.297.800		52.223.400		52.223.400		31,22%		52.223.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	1.867.364.130	-	578.808.820	-	578.808.820	0,00%	31,00%	0,00	578.808.820
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	31.703.264	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.500.000	1	690	0	690	25,00%	6,00%	0,25	690
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	49.311.100	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	318.237.100	2	21.265.350	2	21.265.350	40,00%	6,68%	2,00	21.265.350
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	347.836.770	1	237.430.500	1	237.430.500	50,00%	68,26%	1,00	237.430.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1.108.775.896	3	319.422.970	3	319.422.970	25,00%	28,81%	3,00	319.422.970
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	1	359.791.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	344.791.000	5	-	5	-	35,71%	0,00%	5,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	4.596.620.390	-	372.530.567	-	372.530.567	0,00%	8,10%	0,00	372.530.567
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1.331.536.390	3	241.730.567	3	241.730.567	25,00%	18,15%	3,00	241.730.567
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3.265.084.000	3	130.800.000	3	130.800.000	25,00%	4,01%	3,00	130.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	1.016.396.100	-	130.943.500	-	130.943.500	0,00%	12,88%	0,00	130.943.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	208.733.200	4	23.881.000	4	23.881.000	44,44%	11,44%	4,00	23.881.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45	308.922.900	20	107.062.500	20	107.062.500	44,44%	34,66%	20,00	107.062.500
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	125	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	71	43.740.000	30	-	30	-	42,25%	0,00%	30,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	445.000.000	2	-	2	-	50,00%	0,00%	2,00	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu (1)	1	1.529.375.049	-	128.131.079	-	128.131.079	0,00%	8,38%	0,00	128.131.079
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	605.446.569	2	36.911.789	2	36.911.789	100,00%	6,10%	2,00	36.911.789
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	35.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	100,00%	85,71%	2,00	30.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	25.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	863.928.480	2	61.219.290	1	61.219.290	25,00%	7,09%	0,50	61.219.290
Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	Persentase Keterpenuhan Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah yang Dilaksanakan (1)	1	1.134.528.300	-	287.442.485	-	287.442.485	0,00%	25,34%	0,00	287.442.485
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan (Paket)	3	675.658.400	2	167.245.785	2	167.245.785	66,67%	24,75%	2,00	167.245.785
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	447.334.900	2	120.196.700	2	120.196.700	66,67%	26,87%	2,00	120.196.700
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan (Paket)	1	11.535.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penataan Organisasi	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi yang Disusun (Kebijakan)	10	181.098.000	-	9.500.000	-	9.500.000	0,00%	5,25%	0,00	9.500.000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	64.340.000	-	2.000.000	-	2.000.000	0,00%	3,11%	0,00	2.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	61.654.000	-	2.000.000	-	2.000.000	0,00%	3,24%	0,00	2.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	29.644.000	-	2.000.000	-	2.000.000	0,00%	6,75%	0,00	2.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	2	12.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	13.120.000	-	3.500.000	-	3.500.000	0,00%	26,68%	0,00	3.500.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Acara Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi (%)	1	1.083.500.000	-	370.320.000	-	370.320.000	0,00%	34,18%	0,00	370.320.000
Fasilitasi Keprotokol	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol (Laporan)	2	96.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	50,00%	14,58%	1,00	14.000.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2	987.500.000	1	356.320.000	1	356.320.000	50,00%	36,08%	1,00	356.320.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				19,34%	17,57%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan (%)	100				-		0,00%		100,00	
	Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan yang Dirumuskan (%)	100	2.114.724.220		221.000.000	-	221.000.000	0,00%	10,45%	100,00	221.000.000
	Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dirumuskan (%)	100				-		0,00%		100,00	
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang Disusun (Kebijakan)	10	89.555.000	10	4.200.000	10	4.200.000	100,00%	4,69%	0,00	4.200.000
Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	12.605.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	11,90%	0,00	1.500.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	31.290.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	4,79%	0,00	1.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4	45.660.000	3	1.200.000	3	1.200.000	75,00%	2,63%	3,00	1.200.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun (Kebijakan)	2	1.479.275.000	1	209.400.000	1	209.400.000	50,00%	14,16%	0,00	209.400.000
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	9	874.000.000	2	209.400.000	2	209.400.000	22,22%	23,96%	2,00	209.400.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	550.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	55.275.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Standar (%)	100	531.864.220	-	7.400.000	-	7.400.000	0,00%	1,39%	0,00	7.400.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	10	149.876.000	-	2.200.000	-	2.200.000	0,00%	1,47%	0,00	2.200.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	2	128.330.000	-	2.200.000	-	2.200.000	0,00%	1,71%	0,00	2.200.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	80	253.658.220	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1,18%	0,00	3.000.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang Disusun (Kebijakan)	1	14.030.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	30	11.020.000	15	-	15	-	50,00%	0,00%	15,00	-
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	30	3.010.000	15	-	15	-	50,00%	0,00%	15,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				11,14%	10,45%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dirumuskan (%)	100						0,00%		100,00	
	Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan (%)	100	655.923.624		35.466.400		35.466.400	0,00%	5,41%	100,00	35.466.400
	Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif (%)	9,9						0,00%		9,80	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang disusun (kebijakan)	5	97.782.800	1	5.900.000	1	5.900.000	20,00%	6,03%	0,00	5.900.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	97.782.800	-	5.900.000	-	5.900.000	0,00%	6,03%	0,00	5.900.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun (Kebijakan)	1	81.988.000	-	2.600.000	-	2.600.000	0,00%	3,17%	0,00	2.600.000
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	17.614.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	3	64.373.600	1	2.600.000	1	2.600.000	33,33%	4,04%	1,00	2.600.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	3	369.506.000	-	10.400.000	-	10.400.000	0,00%	2,81%	0,00	10.400.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	550	19.400.000	-	7.800.000	-	7.800.000	0,00%	40,21%	0,00	7.800.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	3	26.400.000	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	4,92%	0,00	1.300.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	200	323.706.000	-	1.300.000	-	1.300.000	0,00%	0,40%	0,00	1.300.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kegiatan Starategis Daerah yang memiliki SOP/Juknis (1)	1	106.646.824	-	16.566.400	-	16.566.400	0,00%	15,53%	0,00	16.566.400
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	106.646.824	-	16.566.400	-	16.566.400	0,00%	15,53%	0,00	16.566.400
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				3,27%	5,41%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			26.298.284.945	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				18,28%	16,69%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Sekretariat DPRD											
Semua Bidang											

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100	25.567.332.523		7.343.102.911	-	7.343.102.911	0,00%	28,72%	100,00	7.343.102.911
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.942.800		18.378.200		18.378.200		31,72%		18.378.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	15.700.800	1	3.560.000	1	3.560.000	50,00%	22,67%	1,00	3.560.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.320.000	1	8.813.600	1	8.813.600	100,00%	57,53%	1,00	8.813.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	14.462.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	12.460.000	7	6.004.600	7	6.004.600	25,93%	48,19%	7,00	6.004.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.774.953.722		677.812.529		677.812.529		24,43%		677.812.529
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	2.569.773.522	33	640.536.929	8	640.536.929	22,92%	24,93%	8,25	640.536.929
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	96	190.980.000	20	30.330.000	20	30.330.000	20,83%	15,88%	20,00	30.330.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	10.000.200	9	4.948.200	9	4.948.200	25,00%	49,48%	9,00	4.948.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	4.200.000	3	1.997.400	3	1.997.400	25,00%	47,56%	3,00	1.997.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.400		3.600.000		3.600.000		14,40%		3.600.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	25.000.400	1	3.600.000	1	3.600.000	25,00%	14,40%	1,00	3.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			41.560.000		-		-		0,00%		-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	68	50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	6.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	7.510.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	36	7.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	36	5.250.000	5	-	5	-	13,89%	0,00%	5,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000		-		-		0,00%		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.651.520.670		539.816.029		539.816.029		32,69%		539.816.029
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	19	180.004.600	5	98.852.700	5	98.852.700	26,32%	54,92%	5,00	98.852.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	351.475.000	5	231.065.000	5	231.065.000	33,33%	65,74%	5,00	231.065.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	90.000.000	1	12.500.000	0	12.500.000	25,00%	13,89%	0,25	12.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	194.999.500	1	19.129.000	1	19.129.000	20,00%	9,81%	1,00	19.129.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7	348.236.970	1	42.200.770	1	42.200.770	14,29%	12,12%	1,00	42.200.770
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	372.804.600	3	96.108.559	3	96.108.559	25,00%	25,78%	3,00	96.108.559
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	94.000.000	1	39.960.000	1	39.960.000	33,33%	42,51%	1,00	39.960.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.921.970.000		1.924.468.000		1.924.468.000		65,86%		1.924.468.000
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	363.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	558.370.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2.000.600.000	2	1.924.468.000	2	1.924.468.000	100,00%	96,19%	2,00	1.924.468.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.544.695.050		410.814.522		410.814.522		16,14%		410.814.522
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	477.457.050	3	120.817.522	3	120.817.522	25,00%	25,30%	3,00	120.817.522
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.067.238.000	3	289.997.000	3	289.997.000	25,00%	14,03%	3,00	289.997.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.039.203.082		297.999.716		297.999.716		28,68%		297.999.716
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	36	280.563.082	9	68.549.216	9	68.549.216	25,00%	24,43%	9,00	68.549.216
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	28	71.600.000	7	10.800.000	7	10.800.000	25,00%	15,08%	7,00	10.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	687.040.000	2	218.650.500	2	218.650.500	40,00%	31,83%	2,00	218.650.500
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			12.954.539.799		3.006.961.415		3.006.961.415		23,21%		3.006.961.415
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30	12.849.489.799	30	3.006.961.415	8	3.006.961.415	25,00%	23,40%	7,50	3.006.961.415
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	30	105.000.000	30	-	30	-	100,00%	0,00%	30,00	-
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Layanan Administrasi DPRD			1.555.947.000		463.252.500		463.252.500		29,77%		463.252.500
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	1	173.600.000	-	5.110.000	-	5.110.000	0,00%	2,94%	0,00	5.110.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3	1.382.347.000	1	458.142.500	1	458.142.500	33,33%	33,14%	1,00	458.142.500
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				30,68%	28,72%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
SEKRETARIAT DPRD											
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	7.592.881.300		1.562.648.143		1.562.648.143	0,00%	20,58%	100,00	1.562.648.143
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pembentukan Perda yang difasilitasi (Kegiatan)	3	336.500.200	-	12.393.000	-	12.393.000	0,00%	3,68%	0,00	12.393.000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	3	142.600.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	11	53.900.000	2	7.393.000	2	7.393.000	18,18%	13,72%	2,00	7.393.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	140.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	3,57%	0,00	5.000.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran			17.548.200		-		-		0,00%		-
Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1.949.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1.949.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	3.899.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	3.899.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan Laporan Semester	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1.949.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			3.899.800		-		-		0,00%		-
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.239.600		-		-		0,00%		-
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1	1.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	1	1.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	1	1.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	4.470.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1.949.600	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-
Peningkatan Kapasitas DPRD			982.198.100		166.825.000		166.825.000		16,98%		166.825.000
Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	1	450.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	2	144.000.000	2	24.000.000	1	24.000.000	25,00%	16,67%	0,50	24.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia (orang)	5	120.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	12.100.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1	256.097.500	-	142.825.000	-	142.825.000	0,00%	55,77%	0,00	142.825.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.020.126.400		-		-		0,00%		-
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3	5.999.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Reses	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	1.014.126.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Tugas DPRD			5.221.268.800		1.383.430.143		1.383.430.143		26,50%		1.383.430.143
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12	4.917.568.800	3	1.313.945.469	3	1.313.945.469	25,00%	26,72%	3,00	1.313.945.469
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	3.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	300.000.000	-	69.484.674	-	69.484.674	0,00%	23,16%	0,00	69.484.674
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16,82%	20,58%	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			33.160.213.823					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	27,51%	26,86%	
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Kecamatan Marioriwawo											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo (Persen)	100	3.802.008.702		802.365.265	-	802.365.265	0,00%	21,10%	100,00	802.365.265
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100	16.215.000	-	3.830.000	-	3.830.000	0,00%	23,62%	0,00	3.830.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	480	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.780.000	-	2.180.000	-	2.180.000	0,00%	28,02%	0,00	2.180.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	7.955.000	1	1.650.000	1	1.650.000	16,67%	20,74%	1,00	1.650.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	3.090.931.702	-	708.243.417	-	708.243.417	0,00%	22,91%	0,00	708.243.417
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	3.077.731.702	42	705.793.417	42	705.793.417	25,00%	22,93%	42,00	705.793.417
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.960.000		200		200		6,76%		200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	20	10.240.000	4	2.250.000	4	2.250.000	20,00%	21,97%	4,00	2.250.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (1)	1	387.466.100	-	70.554.892	-	70.554.892	0,00%	18,21%	0,00	70.554.892
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	35.380.000	-	2.390.000	-	2.390.000	0,00%	6,76%	0,00	2.390.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	35.565.000	-	6.690.000	-	6.690.000	0,00%	18,81%	0,00	6.690.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	187.415.100	1	35.665.500	1	35.665.500	25,00%	19,03%	1,00	35.665.500
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1000	16.945.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	112.161.000	69	25.809.392	69	25.809.392	23,00%	23,01%	69,00	25.809.392
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	1	131.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	131.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	109.495.900	-	19.736.956	-	19.736.956	0,00%	18,03%	0,00	19.736.956
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	63.641.900	3	13.708.156	3	13.708.156	25,00%	21,54%	3,00	13.708.156
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	45.854.000	2	6.028.800	2	6.028.800	16,67%	13,15%	2,00	6.028.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	66.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	52.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	17	14.240.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,86%	21,10%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan pada kecamatan (%)	100	42.000.000		7.500.000	-	7.500.000	0,00%	17,86%	100,00	7.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (1)	1	42.000.000	-	7.500.000	-	7.500.000	0,00%	17,86%	0,00	7.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	100	24.000.000	19	4.500.000	19	4.500.000	19,00%	18,75%	19,00	4.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	300	18.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	16,67%	16,67%	50,00	3.000.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				18,00%	17,86%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang diberdayakan pada kecamatan (%)	100	755.920.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (8) (Kali)	8	11.580.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	11.580.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan (paket)	0	744.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	400.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	344.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Kecamatan (%)	100	63.445.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas (orang)	0	63.445.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	240	63.445.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi pada Kecamatan (%)	100	16.200.000		4.050.000	-	4.050.000	0,00%	25,00%	100,00	4.050.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	0	16.200.000	-	4.050.000	-	4.050.000	0,00%	25,00%	0,00	4.050.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	16.200.000	3	4.050.000	3	4.050.000	27,27%	25,00%	3,00	4.050.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				27,27%	25,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			4.679.573.702	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				18,83%	17,39%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kecamatan Lalabata											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata (Persen)	100	7.784.559.756		1.743.442.865	-	1.743.442.865	0,00%	22,40%	100,00	1.743.442.865
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.482.000		5.149.600		5.149.600		20,21%		5.149.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	6.125.000	-	849,6	-	849,6	0,00%	13,87%	0,00	849,6
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.457.000	-	2.750.000	-	2.750.000	0,00%	26,30%	0,00	2.750.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	4.650.000	9	1.550.000	9	1.550.000	33,33%	33,33%	9,00	1.550.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.183.153.820		1.437.295.650		1.437.295.650		23,25%		1.437.295.650
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	6.126.903.820	75	1.435.213.450	75	1.435.213.450	25,00%	23,42%	75,00	1.435.213.450
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.250.000		2.082.200		2.082.200		9,36%		2.082.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	25.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			9.000.000		-		-		0,00%		-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.000.000		1.499.800		1.499.800		3,33%		1.499.800
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	5.000.000	-	1.499.800	-	1.499.800	0,00%	30,00%	0,00	1.499.800
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000		-		-		0,00%		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			418.776.700		160.423.224		160.423.224		38,31%		160.423.224
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.315.900		5.000.000		5.000.000	50,00%	48,47%		5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.270.000	-	2.070.000	-	2.070.000	0,00%	18,37%	0,00	2.070.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	37.143.000	-	13.004.200	-	13.004.200	0,00%	35,01%	0,00	13.004.200	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	138.854.800	1	47.535.800	1	47.535.800	25,00%	34,23%	1,00	47.535.800	
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	23.850.000	1	1.550.000	1	1.550.000	8,33%	6,50%	1,00	1.550.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	197.343.000	5	91.263.224	5	91.263.224	41,67%	46,25%	5,00	91.263.224	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (1)	1	254.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	254.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			720.601.236		113.745.991		113.745.991		15,78%		113.745.991	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	182.628.036	3	22.470.991	3	22.470.991	25,00%	12,30%	3,00	22.470.991	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	537.973.200	2	91.275.000	2	91.275.000	16,67%	16,97%	2,00	91.275.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136.906.000		25.328.600		25.328.600		18,50%		25.328.600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	35.100.000	-	3.838.400	-	3.838.400	0,00%	10,94%	0,00	3.838.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	12.096.000	-	611.200	-	611.200	0,00%	5,05%	0,00	611.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38	51.710.000	10	13.630.000	10	13.630.000	26,32%	26,36%	10,00	13.630.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			38.000.000		7.249.000		7.249.000		19,08%		7.249.000	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23,14%	22,40%		
					Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	100	39.950.000		11.700.000	-	11.700.000	0,00%	29,29%	100,00	11.700.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1.750.000		-		-		0,00%		-	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1.750.000		-		-		0,00%		-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			38.200.000		11.700.000		11.700.000		30,63%		11.700.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	45	19.100.000	9	3.900.000	9	3.900.000	20,00%	20,42%	9,00	3.900.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	19.100.000	1	7.800.000	1	7.800.000	25,00%	40,84%	1,00	7.800.000	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				21,51%	29,29%		
					Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang diberdayakan (%)	100	2.876.500.000		370.048.200	-	370.048.200	0,00%	12,86%	100,00	370.048.200	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.800.000		-		-		0,00%		-	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	12.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.863.700.000		370.048.200		370.048.200		12,92%		370.048.200	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	1.400.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1.463.700.000	-	370.048.200	-	370.048.200	0,00%	25,28%	0,00	370.048.200
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	12,86%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Kecamatan (%)	100	19.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			19.800.000	-	-	-	-		0,00%		-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	19.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi pada Kecamatan (%)	100	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			3.500.000	-	-	-	-		0,00%		-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	90	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			10.724.309.756	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				16,87%	19,82%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kecamatan Donri-Donri											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri (Persen)	100	1.990.069.310	-	349.735.802	-	349.735.802	0,00%	17,57%	100,00	349.735.802
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.933.138	-	2.250.000	-	2.250.000		16,15%		2.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	12.841.138	-	2.250.000	-	2.250.000	0,00%	17,52%	0,00	2.250.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.092.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.708.706.510	-	322.870.505	-	322.870.505		18,90%		322.870.505
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	1.689.606.510	19	318.370.505	19	318.370.505	25,00%	18,84%	19,00	318.370.505
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.500.000	-	2.250.000	-	2.250.000		23,68%		2.250.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	9.600.000	6	2.250.000	6	2.250.000	25,00%	23,44%	6,00	2.250.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			122.474.500	-	13.982.012	-	13.982.012		11,42%		13.982.012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			974	-	-	-	-		0,00%		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	6.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	24.990.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	7.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	80.000.000	35	13.982.012	35	13.982.012	17,50%	17,48%	35,00	13.982.012	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.060.000		-		-		0,00%		-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	8.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.845.162		6.556.585		6.556.585		6,99%		6.556.585	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	19.342.362	3	4.906.585	3	4.906.585	25,00%	25,37%	3,00	4.906.585	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	74.502.800	-	1.650.000	-	1.650.000	0,00%	2,21%	0,00	1.650.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.050.000		4.076.700		4.076.700		9,47%		4.076.700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	40.000.000	-	4.076.700	-	4.076.700	0,00%	10,19%	0,00	4.076.700	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	5	3.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					22,29%	17,57%		
				Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Donri - Donri (%)	100	31.200.000		7.500.000	-	7.500.000	0,00%	24,04%	100,00	7.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang telah dilaksanakan (%)	1	31.200.000	-	7.500.000	-	7.500.000	0,00%	24,04%	0,00	7.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	110	8.400.000	25	1.950.000	25	1.950.000	22,73%	23,21%	25,00	1.950.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	22.800.000	1	5.550.000	1	5.550.000	25,00%	24,34%	1,00	5.550.000	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					24,39%	24,04%		
				Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang diberdayakan (%)	100	13.750.000		1.650.000	-	1.650.000	0,00%	12,00%	100,00	1.650.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.750.000		1.650.000		1.650.000		12,00%		1.650.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	13.750.000	-	1.650.000	-	1.650.000	0,00%	12,00%	0,00	1.650.000	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00%	12,00%		
				Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada Kecamatan Donri - Donri (%)	100	19.800.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			19.800.000		-		-		0,00%		-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	19.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi (%)	100	11.300.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2										
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11.300.000		-		-		0,00%		-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	270	11.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			2.066.119.310	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				21,84%	17,37%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kecamatan Liliriaja											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja (Persen)	100				-		0,00%		100,00	
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	100	3.859.366.840		716.456.171		716.456.171	0,00%	18,56%	100,00	716.456.171
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0				-		0,00%		0,00	
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0				-		0,00%		0,00	
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0				-		0,00%		0,00	
	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%)	0				-		0,00%		0,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	1	45.930.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	10.100.000	1	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.640.000	1	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.395.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	8.595.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	10.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	2.868.356.640	25	642.823.894	25	642.823.894	25,00%	22,41%	0,00	642.823.894
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	2.851.756.640	35	640.873.894	35	640.873.894	25,00%	22,47%	35,00	640.873.894
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.800.000						0,00%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	9.800.000	-	1.950.000	-	1.950.000	0,00%	19,90%	0,00	1.950.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	15.500.000	25		25		25,00%	0,00%	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15.500.000						0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	317.125.312	25	29.632.014	25	29.632.014	25,00%	9,34%	0,00	29.632.014
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.675.812						0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	19.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	35.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	98.549.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	13.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	145.000.000	-	29.632.014	-	29.632.014	0,00%	20,44%	0,00	29.632.014
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100	143.170.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	133.170.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	365.170.100	25	38.224.263	25	38.224.263	25,00%	10,47%	0,00	38.224.263
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	85.962.300	3	12.874.263	3	12.874.263	25,00%	14,98%	3,00	12.874.263
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	279.207.800	3	25.350.000	3	25.350.000	25,00%	9,08%	3,00	25.350.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100	104.114.788	25	5.776.000	25	5.776.000	25,00%	5,55%	0,00	5.776.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	47.217.820	-	5.776.000	-	5.776.000	0,00%	12,23%	0,00	5.776.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	25.706.968	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	8	16.830.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	14.360.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				21,14%	18,56%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja (%)	100	38.000.000		3.900.000	-	3.900.000	0,00%	10,26%	100,00	3.900.000
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja (%)	100				-		0,00%		100,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perizinan non usaha dan non perizinan yang diterbitkan (Buah)	12	38.000.000	3	3.900.000	3	3.900.000	25,00%	10,26%	0,00	3.900.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	16.600.000	3	3.900.000	3	3.900.000	25,00%	23,49%	3,00	3.900.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	21.400.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	10,26%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja (%)	100	1.172.790.000		118.260.000	-	118.260.000	0,00%	10,08%	100,00	118.260.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (Kali)	4	18.750.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	18.750.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (Paket)	5	1.154.040.000	-	118.260.000	-	118.260.000	0,00%	10,25%	0,00	118.260.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	585.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	569.040.000	2	118.260.000	2	118.260.000	22,22%	20,78%	2,00	118.260.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				11,18%	10,08%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja (%)	100	27.600.000		6.900.000	-	6.900.000	0,00%	25,00%	100,00	6.900.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jasa narasumber penyuluhan kantibmas (Orang)	2	27.600.000	2	6.900.000	1	6.900.000	25,00%	25,00%	0,00	6.900.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	27.600.000	1	6.900.000	1	6.900.000	25,00%	25,00%	1,00	6.900.000
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	25,00%		
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi pada Kecamatan Liliriaja (%)	100	20.600.000		1.950.000	-	1.950.000	0,00%	9,47%	100,00	1.950.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan Dana ADD (Desa)	5	20.600.000	5	1.950.000	5	1.950.000	100,00%	9,47%	0,00	1.950.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100	20.600.000	25	1.950.000	25	1.950.000	25,00%	9,47%	25,00	1.950.000
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	9,47%		
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			5.118.356.840				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	18,92%	16,56%		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kecamatan Lilirilau

Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau (Persen)	100	4.372.874.650		859.012.313	-	859.012.313	0,00%	19,64%	100,00	859.012.313
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	7.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	660	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	1.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	3.304.498.992	-	763.169.279	-	763.169.279	0,00%	23,09%	0,00	763.169.279
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	3.295.748.992	38	763.169.279	38	763.169.279	25,00%	23,16%	38,00	763.169.279
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	20	2.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kabupaten (%)	100	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	341.505.718	-	41.511.214	-	41.511.214	0,00%	12,16%	0,00	41.511.214

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.849.120		-		-		0,00%		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	25.704.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	105.695.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	19.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	181.006.548	138	41.511.214	138	41.511.214	23,00%	22,93%	138,00	41.511.214
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	100	160.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	160.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	368.285.440	-	40.911.820	-	40.911.820	0,00%	11,11%	0,00	40.911.820
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	95.221.440	3	11.886.820	3	11.886.820	25,00%	12,48%	3,00	11.886.820
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	273.064.000	1	29.025.000	1	29.025.000	8,33%	10,63%	1,00	29.025.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	160.524.500	-	13.420.000	-	13.420.000	0,00%	8,36%	0,00	13.420.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	70.934.500	1	13.420.000	1	13.420.000	33,33%	18,92%	1,00	13.420.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	5	25.870.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			63.720.000		-		-		0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				21,40%	19,64%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	100	31.200.000		7.800.000	-	7.800.000	0,00%	25,00%	100,00	7.800.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana (%)	100	31.200.000	-	7.800.000	-	7.800.000	0,00%	25,00%	0,00	7.800.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	7.800.000	1	1.950.000	1	1.950.000	25,00%	25,00%	1,00	1.950.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	23.400.000	1	5.850.000	1	5.850.000	25,00%	25,00%	1,00	5.850.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	25,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang diberdayakan (%)	100	1.596.920.000		139.550.000	-	139.550.000	0,00%	8,74%	100,00	139.550.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	6.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	6.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.590.100.000		139.550.000		139.550.000		8,78%		139.550.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	800.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	790.100.000	1	139.550.000	1	139.550.000	50,00%	17,66%	1,00	139.550.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				24,74%	8,74%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Kecamatan (%)	100	21.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	21.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	21.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%		
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi pada Kecamatan (%)	100	3.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan (%)	100	3.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	160	3.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%		
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		6025634650						22,22%	16,70%			
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				
Kecamatan Marioriawa												
Semua Bidang												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.048.532.097		1.009.249.294		1.009.249.294		19,99%		1.009.249.294	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa (1)	1	34.675.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	18.125.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	11.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	1.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa (1)	1	3.580.298.937	-	891.492.236	-	891.492.236	0,00%	24,90%	0,00	891.492.236	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	3.570.698.937	52	891.492.236	52	891.492.236	25,00%	24,97%	52,00	891.492.236	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	20	9.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa (1)	1	535.232.220	-	68.836.544	-	68.836.544	0,00%	12,86%	0,00	68.836.544	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.412.675	-	-	-	-	0,00%			-	

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	18.860.000	-	1.150.000	-	1.150.000	0,00%	6,10%	0,00	1.150.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	24.999.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	159.257.000	1	19.602.250	1	19.602.250	20,00%	12,31%	1,00	19.602.250	
Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	38.350.000	-	350	-	350	0,00%	0,91%	0,00	350	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	275.053.545	61	47.734.294	61	47.734.294	17,43%	17,35%	61,00	47.734.294	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawa (1)	1	276.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	276.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawa (1)	1	498.545.940	-	42.196.814	-	42.196.814	0,00%	8,46%	0,00	42.196.814	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	136.245.940	3	22.621.814	3	22.621.814	25,00%	16,60%	3,00	22.621.814	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	362.300.000	1	19.575.000	1	19.575.000	8,33%	5,40%	1,00	19.575.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawa (1)	1	123.140.000	-	6.723.700	-	6.723.700	0,00%	5,46%	0,00	6.723.700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	37.970.000	-	5.223.700	-	5.223.700	0,00%	13,76%	0,00	5.223.700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	50.260.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	2,98%	0,00	1.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	36	22.910.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.000.000						0,00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								20,54%	19,99%			
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah			
KECAMATAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawa(%) (1)	1	38.850.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	9.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	29.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa (1)	1	16.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	16.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa (1)	1	1.697.380.000	-	27.885.000	-	27.885.000	0,00%	1,64%	0,00	27.885.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	1.000.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	697.380.000	1	27.885.000	1	27.885.000	10,00%	4,00%	1,00	27.885.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								4,07%	1,63%			

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			19.800.000		-		-		0,00%	0,00%	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa (1)	1	19.800.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	19.800.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			700		-		-		0,00%	0,00%	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa (1)	1	700	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100	700	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			6.821.312.097					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	16,22%	15,20%	
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Kecamatan Ganra											
Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra (Persen)	100	1.925.860.533		420.716.793	-	420.716.793		0,00%	21,85%	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.046.000		2.250.000		2.250.000			11,22%	2.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	12.100.000	-	2.250.000	-	2.250.000		0,00%	18,60%	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.350.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	3.596.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.577.866.233		386.401.357		386.401.357			24,49%	386.401.357
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	1.566.466.233	22	384.061.357	22	384.061.357		25,00%	24,52%	22,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			11.400.000		2.340.000		2.340.000		25,00%	20,53%	2.340.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			56.300.700		16.340.177		16.340.177			29,02%	16.340.177
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.315.000		-		-			0,00%	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.380.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3.600.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	10.296.800	1	1.882.250	1	1.882.250		25,00%	18,28%	1,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	6.000.000	-	-	-	-		0,00%	0,00%	0,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240	32.708.900	105	14.457.927	105	14.457.927	43,75%	44,20%	105,00	14.457.927
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			139.630.000		-		-		0,00%		-
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	24.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	95.630.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.587.600		11.601.659		11.601.659		14,58%		11.601.659
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	38.730.000	3	9.651.659	3	9.651.659	25,00%	24,92%	3,00	9.651.659
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	40.857.600	1	1.950.000	1	1.950.000	8,33%	4,77%	1,00	1.950.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.430.000		4.123.600		4.123.600		7,86%		4.123.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	27.100.000	1	4.123.600	1	4.123.600	33,33%	15,22%	1,00	4.123.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	14.330.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.000.000		-		-		0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,36%	21,85%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	26.300.000		6.000.000	-	6.000.000	0,00%	22,81%	100,00	6.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			26.300.000		6.000.000		6.000.000		22,81%		6.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	110	19.150.000	-	4.500.000	-	4.500.000	0,00%	23,50%	0,00	4.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	7.150.000	1	1.500.000	1	1.500.000	25,00%	20,98%	1,00	1.500.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				6,80%	22,81%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang diberdayakan (%)	100	5.300.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.300.000		-		-		0,00%		-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	5.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Kecamatan (%)	100	21.800.000		4.950.000	-	4.950.000	0,00%	22,71%	100,00	4.950.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			21.800.000		4.950.000		4.950.000		22,71%		4.950.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	21.800.000	1	4.950.000	1	4.950.000	25,00%	22,71%	1,00	4.950.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	22,71%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi pada Kecamatan (%)	100	2.625.000		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			2.625.000		-		-		0,00%		-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	60	2.625.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			1.981.885.533	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				22,09%	21,78%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kecamatan Citta

Semua Bidang											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.524.277.682		307.495.820		307.495.820		20,17%		307.495.820
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	1	19.327.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	15.607.800	2	-	2	-	20,00%	0,00%	2,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	780	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	780.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	810.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	1.208.984.482	-	288.158.052	-	288.158.052	0,00%	23,83%	0,00	288.158.052
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	1.200.389.482	25	288.158.052	6	288.158.052	25,00%	24,01%	6,25	288.158.052
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	8.595.000	9	-	9	-	25,00%	0,00%	9,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	149.592.200	-	5.296.950	-	5.296.950	0,00%	3,54%	0,00	5.296.950
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.419.000		1.706.600		1.706.600	50,00%	49,92%		1.706.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.140.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	29.755.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	5	27.203.200	1	3.590.350	1	3.590.350	20,00%	13,20%	1,00	3.590.350
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.575.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	83.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	91.303.200	-	14.040.818	-	14.040.818	0,00%	15,38%	0,00	14.040.818
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	55.100.000	12	14.040.818	3	14.040.818	25,00%	25,48%	3,00	14.040.818

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	36.203.200	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	55.070.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	45.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	8	5.070.000	2	-	2	-	25,00%	0,00%	2,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000		-		-		0,00%		-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23,75%	20,17%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.850.000		4.800.000		4.800.000		16,08%		4.800.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang telah dilaksanakan (%)	1	29.850.000	-	4.800.000	-	4.800.000	0,00%	16,08%	0,00	4.800.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	14.925.000	1	2.400.000	1	2.400.000	100,00%	16,08%	1,00	2.400.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	14.925.000	3	2.400.000	3	2.400.000	25,00%	16,08%	3,00	2.400.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				62,50%	16,08%		
				Predikat Kinerja				Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			16.210.000		-		-		0,00%		-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat (8) (Kali)	8	16.210.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	16.210.000	2	-	2	-	25,00%	0,00%	2,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			20.325.000		-		-		0,00%		-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas (orang)	0	20.325.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	20.325.000	6	-	6	-	25,00%	0,00%	6,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			18.610.000		2.600.000		2.600.000		13,97%		2.600.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi (4) (Desa)	4	18.610.000	-	2.600.000	-	2.600.000	0,00%	13,97%	0,00	2.600.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	18.610.000	1	2.600.000	1	2.600.000	25,00%	13,97%	1,00	2.600.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	13,97%		

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
			1.609.272.682				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		24,51%	19,57%		
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
Semua Bidang												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Persen)	100	3.270.576.791		687.017.113		-	687.017.113	0,00%	21,01%	100,00	687.017.113
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	1	25.500.000		4.500.000		-	4.500.000	0,00%	17,65%	0,00	4.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	12.600.000	1	2.250.000	1	2.250.000		50,00%	17,86%	1,00	2.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	27	12.900.000	8	2.250.000	8	2.250.000		29,63%	17,44%	8,00	2.250.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	1	2.471.353.411		569.576.536		-	569.576.536	0,00%	23,05%	0,00	569.576.536
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	2.439.853.741	24	562.476.536	6	562.476.536		18,75%	23,05%	6,00	562.476.536
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	96	3.599.670	12	500	12	500		12,50%	13,89%	12,00	500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	36	27.900.000	12	6.600.000	12	6.600.000		33,33%	23,66%	12,00	6.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng (Laporan)	12	3.049.800		-		-		0,00%	0,00%	0,00	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.049.800	3		3			25,00%	0,00%	3,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)	1	291.422.780		77.512.667		-	77.512.667	0,00%	26,60%	0,00	77.512.667
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.901.448	5	2.901.448	5	2.901.448		100,00%	100,00%	5,00	2.901.448
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.760.000	1	460	0	460		25,00%	16,67%	0,25	460
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.503.600	1	-	0	-		25,00%	0,00%	0,25	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	4	46.717.150	4	11.420.800	1	11.420.800		25,00%	24,45%	1,00	11.420.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	8.786.440	1	1.648.500	1	1.648.500		25,00%	18,76%	1,00	1.648.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	700	220.754.142	108	61.081.919	108	61.081.919		15,43%	27,67%	108,00	61.081.919
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor, dalam Kondisi Baik (1)	1	162.600.000		-		-		0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	1.100.000		-		-		0,00%	0,00%	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	161.500.000		-		-		0,00%	0,00%	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (1)	1	276.190.800		31.364.410		-	31.364.410	0,00%	11,36%	0,00	31.364.410
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	68.772.000	9	12.614.410	9	12.614.410		25,00%	18,34%	9,00	12.614.410
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	207.418.800	3	18.750.000	3	18.750.000		25,00%	9,04%	3,00	18.750.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	1	40.460.000		4.063.500		-	4.063.500	0,00%	10,04%	0,00	4.063.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	31.990.000		4.063.500		-	4.063.500	0,00%	12,70%	0,00	4.063.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	8.470.000	5		5			50,00%	0,00%	5,00	
									18,51%	21,01%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase keikutsertaan aparat dan masyarakat bela Negara (%)	100	142.889.000	-	6.300.000	-	6.300.000	0,00%	4,41%	100,00	6.300.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (1280 Orang)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1280	76.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	14.120.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka (Orang)	200	41.199.000	-	6.300.000	-	6.300.000	0,00%	15,29%	0,00	6.300.000
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	7.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	120	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	100	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0,00%	4,41%		
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik											
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi masyarakat dalam PILEG, PILPRES, PILKADA, dan PILKADES (%)	78	1.489.798.784	-	-	-	-	0,00%	0,00%	78,00	-
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	250	14.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	21	581.685.984	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	4	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Pelaksanaan tugas Paskibraka	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	4	893.112.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0,00%	0,00%		
						Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat											
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi (%)	100	291.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (1)	1	291.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		50	290.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		12	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (%)	100	793.904.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya (%)	1	793.904.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		20	17.904.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		250	775.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		12	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan terkait konflik sosial (%)	100	524.800.000		42.550.000	-	42.550.000	0,00%	8,11%	100,00	42.550.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial (%)	1	524.800.000	-	42.550.000	-	42.550.000	0,00%	8,11%	0,00	42.550.000
		35	163.600.000	-	39.250.000	-	39.250.000	0,00%	23,99%	0,00	39.250.000
		12	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		4	360.200.000	1	3.300.000	1	3.300.000	25,00%	0,92%	1,00	3.300.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				17,16%	8,11%		
				Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			6.513.669.175	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				10,68%	11,30%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d	
				I				K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
GRAND TOTAL								18,53%	10,49%		
								Sangat Rendah	Sangat Rendah		

2.3. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2025 banyak dipengaruhi oleh :

- a. Pemenuhan alokasi anggaran untuk penggunaan dana yang ditentukan (*Specific Grant*) tahun anggaran berjalan yang belum memenuhi ketentuan;
- b. Regulasi penggunaan dana khusus atau yang ditentukan (*Specific Grant*) terbit setelah APBD ditetapkan sehingga perlu adanya penyesuaian;
- c. Pendapatan transfer antar Daerah ditetapkan setelah tahun anggaran berjalan;
- d. Belum optimalnya SKPD dalam mematuhi jadwal kegiatan yang telah direncanakan;
- e. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan;
- f. Adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukannya penyesuaian anggaran;
- g. Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang terhambat dikarenakan penyesuaian atau perubahan indikator dalam kinerja pada sub kegiatan berdasarkan pemetaan nomenklatur yang terbaru;
- h. Masih adanya beberapa kegiatan yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan masih pada tahapan proses lelang ataupun masih belum memasuki tahapan kegiatan.

2.4. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan Ke I

Terkait dengan faktor penghambat pembangunan untuk tahun 2025 triwulan I di atas, maka upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya adalah:

- a. Komitmen bersama dalam pencapaian tujuan pembangunan demi masyarakat Kabupaten Soppeng yang sejahtera;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 secara maksimal;
- c. Adanya pedoman/dokumen standar pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar dalam pelaksanaan program/kegiatan;

- d. Mengoptimalkan koordinasi antara instansi pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan;
- f. Manajemen penahapan atau penjadwalan kegiatan yang belum terlaksana, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah awal dalam pencapaian kegiatan di tahun 2025;
- g. Peningkatan kualitas SDM yang Berakhlak (Berorientasi Pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.5. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Untuk Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan pada faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja di atas, maka rekomendasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 untuk triwulan selanjutnya adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita;
- b. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, terampil dan berkompeten;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peran aktif KPA dan PPTK dalam mengawal program/kegiatan yang berjalan;
- e. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program/kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- f. Pengambilan kebijakan atau keputusan demi kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Perubahan RKPD sebagai jalan untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan kondisi terkini, baik itu perkembangan ekonomi, kebijakan baru, atau hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya. Perubahan ini memastikan bahwa RKPD tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu perubahan RKPD 2025 Kabupaten Soppeng telah memedomani RKP Nasional 2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2025.

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi

tantangan geopolitik global. Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global. Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

Di tengah tantangan global, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh sebesar 3,2%, sementara impor meningkat 3,5%. Meskipun demikian, neraca perdagangan tetap terjaga dengan baik disisi lain tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 2,8%, berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran, seperti optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, dengan capaian positif ini, Indonesia optimis menghadapi tantangan ekonomi global di tahun-tahun mendatang, dengan fokus pada penguatan sektor-sektor strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2024 menunjukkan upaya yang komprehensif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas harga, disisi lain Pemerintah akan terus berupaya: Melakukan optimasi APBN sebagai shock

absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi, kedepan, peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2025, di antaranya:

1. Melemahnya Daya Beli Masyarakat, Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama PDB mengalami tekanan akibat berbagai faktor domestik dan global.
2. Kesenjangan Ekonomi, Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah serius, meskipun ada penurunan Gini Ratio.
3. Tingginya angka pengangguran dan ketergantungan pada impor pangan memperparah tekanan daya beli.
4. Perubahan Iklim, Ancaman perubahan iklim dapat mengganggu produksi pertanian dan infrastruktur.
5. Ketidakpastian Global, Ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik, dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.
6. Perubahan Iklim, Dampak perubahan iklim, seperti perubahan cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan air laut, dapat mengganggu produksi dan infrastruktur.
7. Fluktuasi Harga Komoditas, Fluktuasi harga komoditas, khususnya minyak dan gas, dapat memengaruhi APBN dan harga kebutuhan pokok.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti:

1. Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor;
3. Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi;

4. Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

3.1.2. Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi. Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2025, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negative terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan kedepan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda

akan tetap digenjut. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2025. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif di wilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

3.1.3. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

3.1.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,0%. Stabilitas ekonomi dan politik, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi investasi di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh beberapa sektor utama yaitu: (1) Industri Pengolahan: Sebagai kontributor terbesar, sektor ini tumbuh sebesar 4,5%, didukung oleh peningkatan produksi manufaktur dan ekspor produk olahan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran: Mencatat pertumbuhan 4,8%, sektor ini diuntungkan oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat; (3) Informasi dan Komunikasi: Dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,3%, sektor ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan penetrasi internet yang semakin luas; serta (4) Pengeluaran dan Konsumsi, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,9%. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,6%, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen sedangkan perkembangan ekonomi dengan perbandingan triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Tabel 3. 1. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Triw I-2025 terhadap Triw IV-2024 (Q-to-Q)	Triw I-2025 terhadap Triw I-2024 (Y-on-Y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,74	10,52	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,42	-1,23	-0,09
C	Industri Pengolahan	-0,67	4,55	0,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,88	5,11	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,63	0,18	~0
F	Konstruksi	-5,92	2,18	0,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,04	5,03	0,66
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,63	9,01	0,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,72	5,75	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,53	7,72	0,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,52	3,98	0,17
L	Real Estate	0,34	2,94	0,08
M,N	Jasa Perusahaan	2,81	9,27	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,92	4,78	0,16
P	Jasa Pendidikan	-8,45	5,03	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-6,97	5,78	0,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,42	9,84	0,2
	Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	-0,21	5,23	5,01
	Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	-16,76	-3,31	-0,14
	Produk Domestik Bruto (PDB)	-0,98	4,87	4,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dengan strategi yang tepat guna serta kebijakan tangguh dan lincah, perekonomian Indonesia diharapkan mampu mengarungi badai tantangan global dan domestik di 2025, serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap kokoh berakar pada stabilitas, kualitas, dan keberlanjutan.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y), sedangkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2025 sebesar 5,3-5,6% dan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2025-2029 untuk tahun 2025 sebesar 5,3%, penetapan target tersebut cukup optimis seiring dengan program strategis pemerintah yang didorong untuk membangun ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

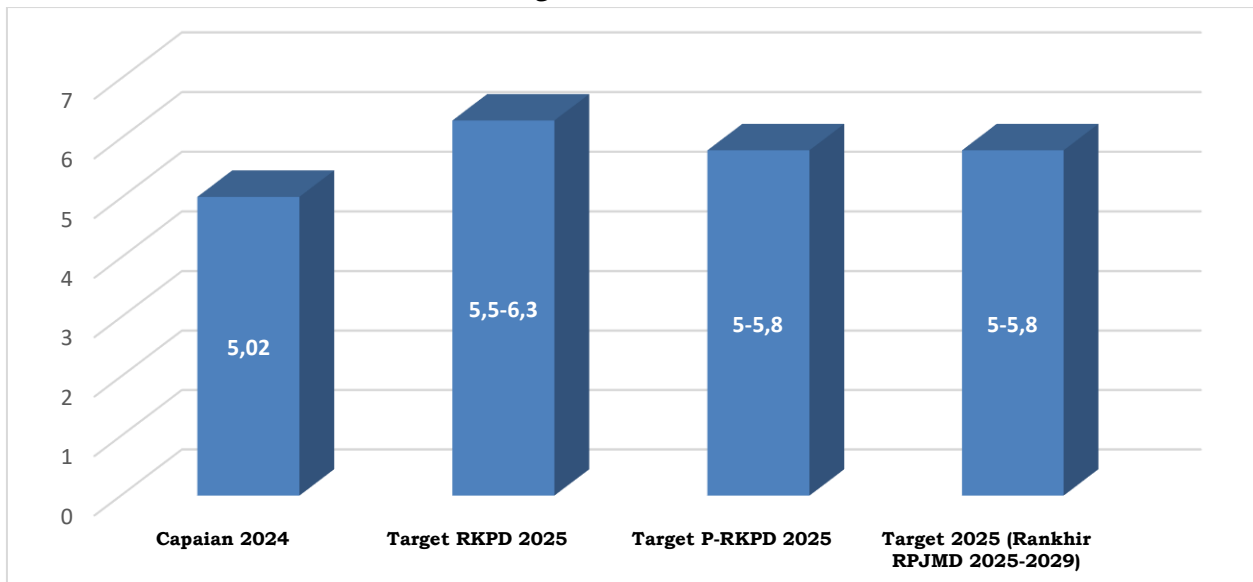
3.1.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan tingkat ekonomi terbesar di bagian timur Indonesia, Sulawesi Selatan telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, dari rentetan perjalanan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, memang ekonomi regional pulau Sulawesi telah tumbuh lebih cepat daripada pulau besar lainnya di Indonesia yang mencerminkan proses 'mengejar ketertinggalan' setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban. Tingkat pertumbuhan yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh kinerja yang solid di beberapa bagian industri jasa dan perdagangan: perikanan, makanan dan minuman, dan tambang mineral telah menjadi produk utama di sektor primer dan sekunder untuk menikmati tingkat pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan.

Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 173,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 97,36 triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61 persen, sedangkan pada tahun 2024 ekonomi Sulawesi Selatan berhasil tumbuh dengan capaian 5,02%, di sisi lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 5,0-5,8% dan RKPD pokok 2025 sebesar 5,5-6,3% sedangkan pada perubahan RKPD provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,8%, target-target pertumbuhan yang telah ditetapkan memerlukan upaya dan strategi untuk implementasi, program pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi harus didorong melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kabupaten/kota dengan bertumpu pada masing-masing sumber daya unggulan lokal daerah.

Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan target tahun 2025 serta target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

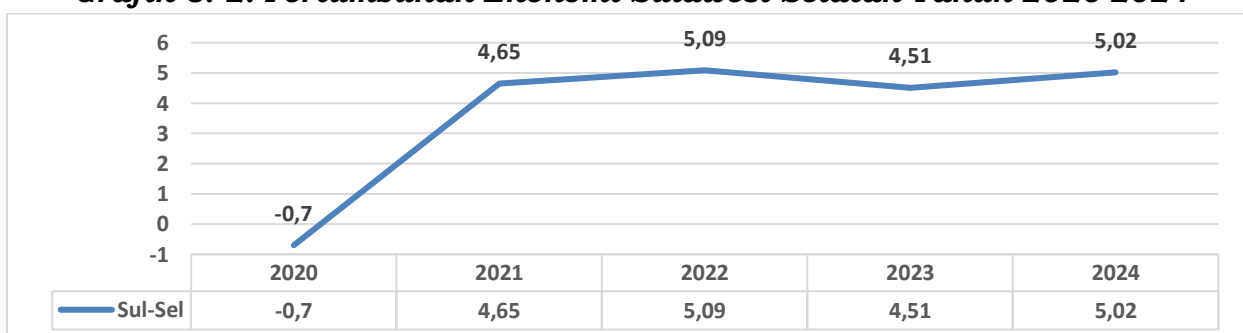
Grafik 3. 1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Tahun 2025



Sumber : RKP Provinsi Sul-Sel Tahun 2025, Rankhir RPJMD Provinsi Sul-Sel Tahun 2025-2029

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cukup optimis di tahun 2025, dengan perkembangan pata triwulan I di tahun yang sama akan tetapi Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -4,12 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi, sebesar -26,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 51,38 persen. secara nasional, provinsi sulawesi selatan berada pada 5 besar daerah dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, provinsi Sulawesi selatan memiliki berkontribusi yang berpengaruh untuk nasional dari wilayah timur Indonesia pada triwulan I tahun 2025, impresifnya pertumbuhan ekonomi Sulsel kali ini juga dipengaruhi *low base effect* Pertanian sebagai akibat produksi yang sangat rendah pada triwulan I tahun 2024.

Grafik 3. 2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

3.1.3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

Pembangunan ekonomi kabupaten soppeng merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi nasional dan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan,

dengan demikian kondisi perekonomian nasional dan propinsi beririsan terhadap pembangunan ekonomi kabupaten soppeng, oleh karena itu pembangunan nasional dan Provinsi akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di kabupaten Soppeng, dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan prioritas sektor-sektor ekonomi potensial yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir Sektor-sektor perekonomian mengalami perubahan selama proses pembangunan berlangsung. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi modern yang menyatakan bahwa perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industry ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.

Perekonomian Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.099,18 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp8.660,66 miliar. Ekonomi Kabupaten Soppeng kumulatif selama tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,01 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,83 persen

Pertumbuhan positif terjadi pada hampir semua kategori lapangan usaha dan hanya 2 kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan diantaranya Jasa Pendidikan sebesar 9,01 persen; disusul Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,33 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,12 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,05 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 5,39 persen. Adanya peningkatan belanja pegawai fungsi pendidikan dan peningkatan peserta didik di kampus-kampus swasta yang terdapat di Kabupaten Soppeng menjadi pemicu tingginya pertumbuhan di Kategori Jasa Pendidikan. Selain itu, adanya berbagai event yang diselenggarakan di Kabupaten Soppeng selama tahun 2024 juga mendorong tumbuhnya kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kegiatan Pemilu dan Pilkada di awal dan akhir tahun juga menjadi pendorong tumbuh

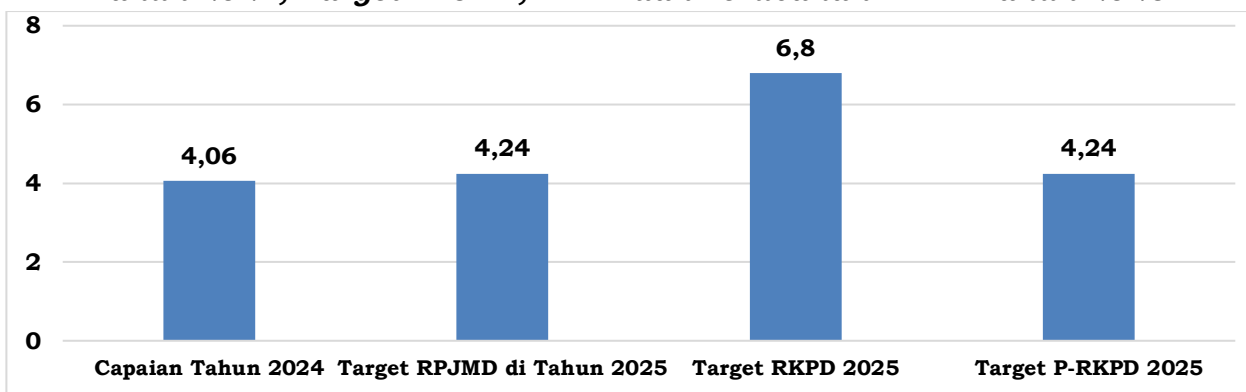
tingginya kegiatan Lapangan Usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi terjadi pada Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 2,56 persen; dan Konstruksi sebesar 1,00 persen. Bencana banjir yang sempat terjadi berakibat pada banyaknya pipa yang mengalami kebocoran dan diperparah oleh adanya kerusakan pompa serta berkurangnya sumber mata air di Kabupaten Soppeng menjadikan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami kontraksi

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha konstruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

Optimisme pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik dan membaik pada tahun 2025 memberikan angin segar disamping itu adanya momentum pelaksanaan makan bergizi gratis menjadi salah satu pemantik pergerakan distribusi barang dan jasa, disisi lain perbaikan tata Kelola dan penyelenggaraan pertanian juga menjadi bagian yang dapat diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi lokal, dengan demikian Sector pertanian, perikanan merupakan sector potensial yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

Dari asumsi tersebut diatas maka target pertumbuhan ekonomi pada RKPD perubahan tahun 2025 diprediksi pada capaian 4,24%, penentuan target tersebut didasari bahwa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian.

Grafik 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024, Target RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Soppeng

3.1.3.2 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa, dengan demikian inflasi mencerminkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi daerah.

Pada Desember 2024 inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, meliputi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,30 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5%±1%. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat.

Capaian inflasi 2024 tersebut menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 2,61% (yoy) dan merupakan terendah dalam dua dekade terakhir. Inflasi Indonesia di 2024 juga lebih rendah dibanding beberapa lainnya seperti G-20 yakni Argentina (118% yoy), Turki (44,28% yoy), Rusia (9,5% yoy), dan Amerika Serikat (2,90% yoy). Sementara itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain (seperti Prancis 1,20%, Inggris 1,00% dan Italia 0,5%).

Berdasarkan data dari WEO IMF Oktober 2024, Indonesia berada di posisi ke-8 dalam daftar ekonomi terbesar dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (GDP) yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) pada 2024. Indonesia mengungguli negara-negara seperti Perancis dengan GDP PPP sebesar USD4,4 triliun dan Inggris dengan GDP PPP USD4,3 triliun.

High Level Meeting TPIP menyepakati tiga langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK tetap stabil dan terkendali. Ketiga langkah strategis dimaksud meliputi menjaga inflasi di 2025 pada kisaran sasaran $2,5\% \pm 1\%$ guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan itu juga untuk menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada kisaran 3,0%-5,0% dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.

Peta jalan tersebut mengarahkan pada beberapa upaya seperti memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

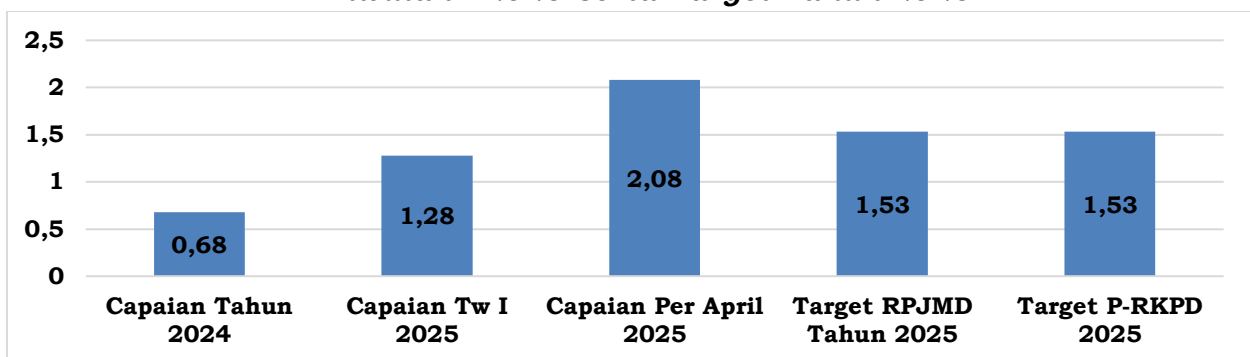
Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus dilanjutkan di 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga di sisi lain pemerintah mempertahankan stabilitas harga pangan pada tahun ini dengan mengeluarkan berbagai Paket Stimulus Ekonomi yakni di antaranya stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran yang terdiri atas diskon harga tiket pesawat, penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, BINA Diskon 2025, diskon tarif tol, serta stabilisasi harga pangan.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnasi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar 2,84%, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah tercatat sebesar 0,68%,

penurunan inflasi menjadi bagian penting bagi pelaku ekonomi untuk membangun investasi dan kestabilan produksi barang dan jasa, sedangkan Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2024 sama dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,81%, dan laju inflasi nasional sebesar 1,23%, di sisi lain inflasi Kabupaten Soppeng pada triwulan 1 dan data per April tahun 2025 yang merujuk ke Kabupaten Wajo masing-masing sebesar 1,28% dan 2,08%. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan laju inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia bersama dengan TPID di Sulawesi Selatan akan terus bersinergi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Grafik 3. 4 Inflasi Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024 dan Triwulan I 2025 Serta Target Tahun 2025



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Soppeng

3.1.3.3 Target Ekonomi Makro Daerah

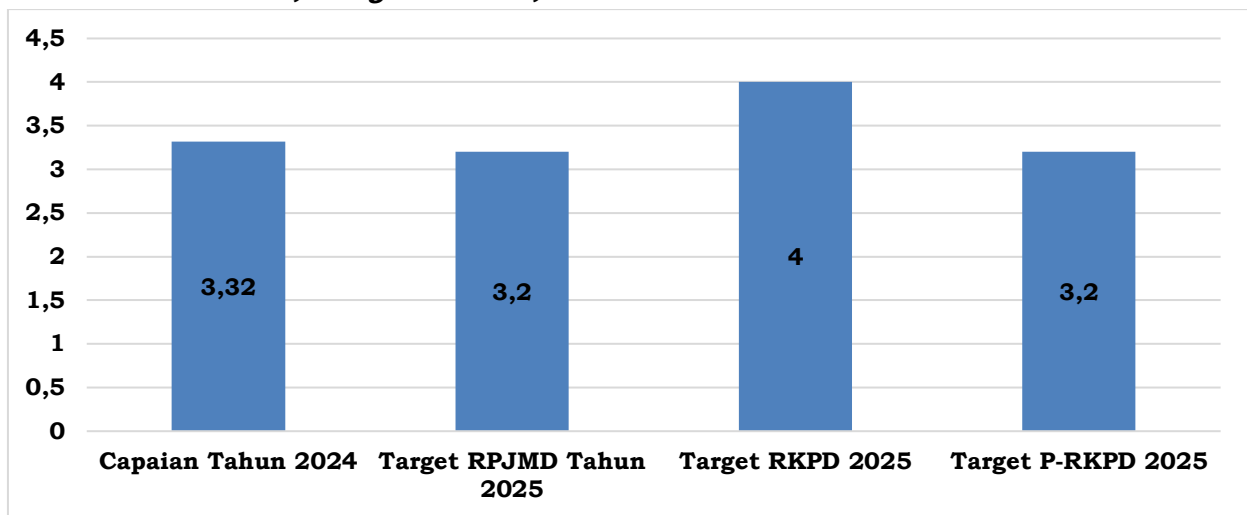
3.1.1.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian pada tahun 2025 yang diprediksi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan demikian TPT diperkirakan dapat menurun dengan bertumbuhnya sektor perdagangan, industry, pariwisata yang berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan demikian perluasan lapangan kerja dapat menekan tingkat pengangguran terbuka melalui upaya perluasan investasi, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM, mendorong digitalisasi transaksi ekonomi, peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

Pengangguran terbuka tahun 2023 mencapai 4,34%, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 3,32%, atau mencapai 3.996 penduduk usia 15 tahun ke atas. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan geliat ekonomi Kabupaten Soppeng yang tumbuh secara

signifikan yang berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan capaian TPT tahun 2024 tersebut di atas maka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada perubahan RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,2%.

Grafik 3. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024, Target RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Soppeng

3.1.1.3.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024 kemiskinan Kabupaten Soppeng mencatat jumlah 15.900 jiwa atau mencapai 6,90%.

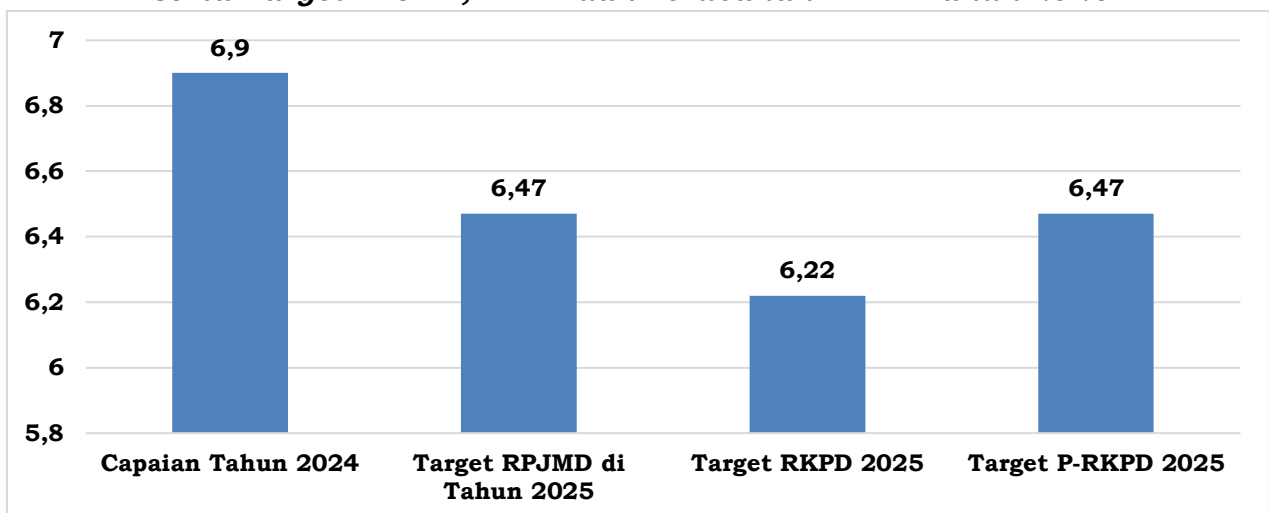
Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2022-2024 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dimana pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,91%, dan pada tahun 2023 sebesar 1,44% sedangkan tahun 2024 mencapai angka %,

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga berfluktuasi, dimana pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,21% dan pada tahun 2023 sebesar 0,40% sedangkan tahun 2024 pada capaian %. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (*poverty gap*) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat.

Untuk itu penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin. Tingkat kemiskinan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,47%.

Grafik 3. 6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2024 serta Target RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Soppeng

3.2. Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1. Aspek Eksternal

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2025 adalah Perekonomian global yang berat dari dampak perang rusia dan Ukraina mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri di samping itu perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah meluas ke Uni Eropa yang menjadi salah satu faktor terganggunya pergerakan ekonomi dunia, bahkan beberapa negara diperkirakan mengalami perlambatan

ekonomi dan ancaman resesi di sejumlah negara, disisi lain suku bunga bank sentral yang meningkat untuk melawan inflasi dan penarikan dukungan fiskal di tengah tingginya utang dapat memperlambat investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya mengurangi pertumbuhan ekonomi, demikian halnya pelambatan Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Amerika dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi global, karena kedua negara tersebut merupakan poros ekonomi terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global.

Indonesia harus menggunakan kekuatan perekonomian dalam negeri. konsumsi domestik, yang berkontribusi hampir separuh dari perekonomian nasional. Oleh karena itu mengorkestrasi ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilisasi fiskal, moneter dan sektor riil maka harmoni, ekonomi nasional dapat tumbuh secara Tangguh di masa yang akan datang, Selain itu, hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah perkembangan *Covid-19*, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara mitra dagang. Misalnya, di China, jika kebijakan zero covidnya diterapkan, maka akan berdampak ke perekonomian dalam negeri melalui sisi ekspor.

Sulawesi Selatan sebagai gerbang ekonomi Indonesia timur mengalami tantangan ekonomi yang besar, Oleh karena itu pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Meredanya El Nino dan program akselerasi pertanian yang didukung keberlanjutan program Swasembada pangan diperkirakan akan mendorong sektor pertanian.

Penguatan sinergi pemerintah dari sisi fiskal, moneter, maupun perbankan, kemudian pengembangan industri hilirisasi mineral serta pembangunan Kawasan Industri, kawasan industri galangan kapal, dan kawasan ekowisata juga akan menjadi pendorong.

Penopang pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa dinaikkan adalah belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. pertumbuhan ekonomi baru menysasar sektor yang dinilai punya potensi besar, antara lain sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan pariwisata inklusif. Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju;
2. ketidakpastian pasar keuangan global dan krisis energi;

3. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan;
4. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset krypto;
5. Tuntutan ekonomi keuangan hijau;
6. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

3.2.2. Aspek Internal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,33 %, dan 2024 tumbuh mencapai angka 4,06% beberapa sub sektor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi akan tetapi juga terdapat beberapa sub sektor yang mengalami pelambatan, sub sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi jasa pendidikan 9,01%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh pada angka 6,33%, sector pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 3,95% dan sector lainnya seperti sub sector pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan pesat. Sedangkan untuk sub sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sub sector Administrasi Pemerintahan tumbuh tidak signifikan dengan capaian masing-masing 0,08% dan 0,79% sedangkan untuk sub sector yang mengalami pelambatan berada pada Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sub sector konstruksi dengan capaian masing-masing -2,56% dan -1,00%

Kabupaten Soppeng tumbuh dan berkembang secara ekonomi didominasi pada sektor pertanian, memiliki tantangan yang cukup berat diantaranya :

1. Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan berstrategi yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian secara serius, karena sektor ini sangat besar kontribusinya pada pertumbuhan PDRB daerah. Daerah ketersediaan air dan sarana pertanian yang memadai inventarisasi lahan-lahan yang masih menganggur untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk ditanami tanaman yang produktif, penguatan lahan pertanian produktif untuk dimaksimalkan agar berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Pemerintah Daerah harus proaktif mendorong unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Satker vertikal untuk belanja

pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan di Kabupaten Soppeng agar peredaran uang semakin banyak di daerah dan menjadi trigger bagi supplier atau vendor semakin banyak;

3. Pemerintah Daerah proaktif mendorong usaha UMKM, menaikkan level UMKM dan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan margin yang kompetitif. UMKM merupakan penyanggah utama aktivitas ekonomi sehingga jika semakin banyak UMKM maka aktivitas ekonomi akan semakin meningkat;
4. Pemerintah Daerah harus punya *political will* yang kuat untuk menciptakan area wisata dan menciptakan brand yang menarik karena daerah Soppeng merupakan kota tujuan. Selain itu, mendorong potensi wisata baru yang berbasis alam dan budaya dapat menjadi daya Tarik untuk dikunjungi oleh tamu-tamu local maupun nasional;
5. Mendorong potensi ekonomi desa yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng;
6. Menjaga inflasi daerah pada level aman;
7. mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital pada sektor bisnis, UMKM dan sektor jasa.

Tantang ekonomi secara jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Soppeng maka melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi harus menjadi perhatian, oleh karena itu kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan harus dijaga dalam level aman.

3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Dalam konteks lain, ditengah-tengah lesunya perekonomian maka pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan fiskal daerah secara lebih arif, khususnya dalam mendukung atmosfer bisnis yang baik. Salah satunya dengan melakukan stimulus fiskal melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah akan mendorong “*multiplier*” ekonomi melalui kegiatan festival dan bazaar bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) secara kontinyu dengan skala yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya tentu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu

mendorong perekonomian sekaligus membangun “*city’s branding*” wilayah tersebut dengan potensi kebudayaan dan kreatifitas yang dimiliki.

Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah daerah dalam alokasi fiskal dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait disamping itu investasi dalam negeri harus terus digalakkan guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor, dengan demikian momentum pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang terus bergeliat secara positif, sebab capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2024 tercatat pada angka 4,06%, pertumbuhan ini cukup memadai di tengah tantangan ekonomi global.

Trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian Pada tahun 2024 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dicerminkan dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB).

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2023 sebesar Rp14.909,36 milyar mengalami peningkatan pada tahun 2024 yang sebesar Rp16.099,18, milyar sector lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar sebesar Rp4.886,78 milyar, menyusul lapangan usaha konstruksi sebesar Rp2,313,96 milyar sedangkan kontribusi terkecil ada pada sector lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dan sub sector lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing sebesar Rp12,49 juta dan Rp5,68 juta

Menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif di masa yang akan datang merupakan keniscayaan, oleh karena itu dibutuhkan strategi sebagai kebijakan politik ekonomi pemerintah daerah, kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak dan bertumbuh dalam mengakses pasar, penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perizinan, pemberian bantuan, dll), optimalisasi potensi pertanian terpadu dan pemanfaatan lahan produktif pertanian, membangun industrialisasi pertanian. Pemerintah Daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2025 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut

adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kab. Soppeng pada tahun 2025 akan mengalami perubahan dibanding target pada RKPD pokok 2025 Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2025 antara lain adalah:

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun pada RKPD tahun 2025 dan ditetapkan pada APBD Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan;
2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
3. Adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita

Selain hal tersebut juga terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah : (a) Adanya pergeseran anggaran antar SKPD dalam rangka penyesuaian program strategis daerah; (b) Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; (c) penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2. Perubahan Target Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET		
				RPJMD 2025-2029	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	4,24	6,8	4,24
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	67,26	70,12	70,88	70,12
3	Angka Kemiskinan	%	6,9	6,47	6,22	6,47

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET		
				RPJMD 2025-2029	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,2	4	3,2
5	Gini Ratio	%	0,371	0,369	0,363	0,369
6	IPM	Nilai	71,39	72,2	71,44	72,2

Pencapaian sasaran indikator makro kabupaten Soppeng ditopang dengan penyiapan anggaran yang memadai dalam APBD, oleh sebab itu APBD sebagai pembiayaan program pemerintah daerah seyogyanya menjadi katalis untuk mempercepat pemenuhan target pembangunan, di sisi lain pemerintah hadir untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi di kabupaten Soppeng, pada perspektif tersebut pemerintah daerah berupaya untuk mengelola anggaran APBD agar tepat sasaran, tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas belanja daerah sebagai jalan untuk mempercepat pencapaian target makro daerah.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2025-2029 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional di tahun berkenaan.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD ini bertujuan antara lain untuk :

- Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng;

- Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat;
- Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
- Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- Memastikan terpenuhinya alokasi anggaran belanja belanja wajib (*Mandatory Spending*) selain belanja pegawai dan Alokasi Anggaran Peningkatan kualitas SDM.

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan surplus APBD akibat peningkatan anggaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja. Seiring dengan perjalanan pemerintahan dan pelayanan publik dan beberapa target pembangunan yang hendak dicapai maka penyesuaian target pendapatan merupakan kemestian yang harus dilakukan, apalagi adanya perubahan regulasi pada bidang pendapatan, dengan lahirnya regulasi baru tersebut maka terdapat perubahan objek penerimaan dan mekanismenya, termasuk penerimaan transfer dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Di sisi lain sektor- sektor yang dapat menghasilkan penerimaan asli daerah baru mulai bergeliat penerimaan dalam daerah tersebut seperti sektor pariwisata, manufaktur, pajak dan UMKM menjadi penyangga penerimaan yang harus disesuaikan kembali pada perhitungan nota keuangan perubahan APBD tahun 2025.

Pengejawantahan gambaran pendapatan yang digambarkan di atas dapat dideskripsikan pada postur pendapatan yang dimuat dalam RKPD perubahan tahun 2025, dimana alokasi pendapatan yang ditargetkan pada perubahan RKPD tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.121.128.806.415,00 atau mengalami penurunan sebesar (5,39%) dari target pendapatan daerah pada RKPD Pokok tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.181.534.011.415,00. penurunan tersebut merupakan penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual penerimaan daerah terutama pada sisi penerimaan dana transfer pusat yang alokasinya telah disampaikan melalui penetapan alokasi definitif tahun berkenaan.

Perubahan alokasi dan perencanaan pendapatan daerah di prediksi atas kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Soppeng diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional;
2. Perubahan regulasi pendapatan daerah khususnya implementasi Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, yang memberikan perluasan objek pajak bagi pemerintah kabupaten;
3. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi sesuai alokasi definitif.

3.3.1.1. Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Soppeng dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp183.116.184.544,00 tidak mengalami perubahan target dari RKPD pokok 2025 perhitungan pendapatan asli daerah yang tidak mengalami perubahan merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam penetapan alokasi pendapatan yang memungkinkan dapat diterima pada periode tahun berjalan. Komponen pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah.

Pendapatan asli daerah seyogyanya menjadi potensi pembiayaan masa depan pembangunan daerah sehingga perlu di tata Kelola dengan baik dengan berbagai strategi yang dapat mendongkrak perolehan pendapatan daerah dari tahun ke tahun, di sisi lain inovasi dan implementasi digitalisasi pendapatan daerah menjadi isu serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, demikian halnya dari sisi pengawasan pajak dan retribusi daerah juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Soppeng.

3.3.1.2. Rencana Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan atas hak pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penerimaan tersebut akan disesuaikan seiring dengan penerimaan yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan. Alokasi asumsi Pendapatan Transfer pada RKPD perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp938.012.621.871,00 mengalami

penurunan sebesar (6,44%) dari target alokasi pada RKPD Pokok 2025 yang sebesar Rp998.417.826.871,00 perubahan pendapatan transfer ini disesuaikan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer secara rinci dibagi pada dua objek yang masing-masing mengalami perubahan, pendapatan transfer dari pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp905.251.082.000,00 pada RKPD perubahan tahun 2025 atau mengalami penurunan (5,35%) dari target pada RKPD Pokok 2025 yang dialokasikan sebesar Rp953.714.120.000,00 penurunan tersebut merupakan penyesuaian alokasi dana transfer pemerintah pusat pada komponen dana alokasi khusus fisik dan Dana Alokasi umum earmarking bidang pekerjaan umum

Pendapatan transfer antar daerah yang merupakan transfer pemerintah provinsi juga mengalami perubahan, pendapatan transfer provinsi dialokasikan pada RKPD perubahan 2025 sebesar Rp32.761.539.871,00 mengalami penurunan (36,45%) dari target pendapatan yang dialokasikan pada RKPD pokok 2025 sebesar Rp44.703.706.871,00, penyesuaian tersebut berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah di luar penerimaan pajak dan penerimaan retribusi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKPD perubahan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami kenaikan dibanding pada target RKPD pokok tahun 2025 yang sebesar Rp0,00.

Postur dan struktur pendapatan daerah pada rancangan perubahan RKPD tahun anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 3. 3. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	119.294.332.142,00	6.538.973.440,00	119.294.332.142,00	112.755.358.702,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00	-	-
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	3.500.000.000,00	116.255.358.702,00	3.500.000.000,00	(112.755.358.702,00)	-

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.2	Pendapatan Transfer	998.417.826.871,00	998.417.826.871,00	938.012.621.871,00	(60.405.205.000,00)	(6,44)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.916.287.000,00	953.714.120.000,00	905.251.082.000,00	(48.463.038.000,00)	(5,35)
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	22.501.539.871,00	44.703.706.871,00	32.761.539.871,00	(11.942.167.000,00)	(36,45)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah					
4.3.02	Dana Darurat					
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
Total		1.181.534.011.415,00	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00	(60.405.205.000,00)	(5,39)

3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.101.087.398.551,00 pada RKPD Perubahan Tahun 2025 mengalami penurunan (5,49%) dari alokasi pada RKPD pokok 2025 yang ditargetkan sebesar Rp1.161.492.603.551,00 penyesuaian ini merupakan implikasi dari penyesuaian pendapatan. sehingga terdapat belanja yang harus diakomodir pada RKPD perubahan tersebut

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025
2. Mempertahankan belanja daerah mandatory spending untuk pendidikan.
3. Belanja pegawai masih memiliki proporsi diatas 30% diluar belanja sertifikasi guru dari total APBD
4. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
5. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan

- capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2025.
6. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - a. Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - b. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2025-2029.
 7. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal asset tetap lainnya, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.3.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, Wakil kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah, Wakil kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Secara rinci target perubahan belanja daerah pada RKPD Perubahan tahun 2025 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4. Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PROYEKSI PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KENIKAN/ PENURUNAN
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi	884.962.641.120,00	848.858.191.215,00	878.193.654.268,00	29.335.463.053,00	3,34
5.1.01	Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	522.817.018.530,00	535.805.821.084,00	12.988.802.554,00	2,42
5.1.02	Belanja Barang Jasa	333.220.488.806,00	312.002.837.502,00	330.556.898.001,00	18.554.060.499,00	5,61
5.1.03	Belanja Bunga	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi				-	#DIV/0!
5.1.05	Belanja Hibah	10.970.625.984,00	8.012.125.984,00	5.804.725.984,00	(2.207.400.000,00)	(38,03)
5.1.06	Belanja Bansos				-	#DIV/0!
5.2	Belanja Modal	148.597.918.150,00	191.102.489.165,00	102.178.826.302,00	(88.923.662.863,00)	(87,03)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000,00	390.000.000,00	20.000.000,00	(370.000.000,00)	(1.850,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.801.008.790,00	69.340.533.056,00	36.297.668.242,00	(33.042.864.814,00)	(91,03)
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	36.150.270.660,00	50.010.191.806,00	34.764.929.660,00	(15.245.262.146,00)	(43,85)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.031.017.000,00	66.029.356.503,00	30.563.206.700,00	(35.466.149.803,00)	(116,04)
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	233.021.700,00	181.107.800,00	233.021.700,00	51.913.900,00	22,28
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	1.362.600.000,00	5.151.300.000,00	300.000.000,00	(4.851.300.000,00)	(1.617,10)
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	4.172.465.521,00	3.602.897.431,00	(569.568.090,00)	(15,81)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	4.172.465.521,00	3.602.897.431,00	(569.568.090,00)	(15,81)
5.4	Belanja Transfer	119.526.806.850,00	117.359.457.650,00	117.112.020.550,00	(247.437.100,00)	(0,21)
5.4.01	Belanja Bagi hasil	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.461.704.600,00	112.294.355.400,00	112.046.918.300,00	(247.437.100,00)	(0,22)
Jumlah Belanja		1.161.492.603.551,00	1.161.492.603.551,00	1.101.087.398.551,00	(60.405.205.000,00)	(5,49)

3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

3.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pemerintah daerah, dengan demikian kebijakan penerimaan pembiayaan pada RKPD perubahan tahun anggaran 2025 bersumber pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025, yang dialokasikan sebesar Rp0,00 sama halnya di PKPD pokok 2025 tidak terdapat penganggaran penerimaan pembiayaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 belum ditetapkan penggunaannya sehingga tidak dapat diakomodir dalam penyusunan RKPD perubahan ini.

3.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp20,041,407,864,00 merupakan pembayaran cicilan utang pokok jangka Panjang daerah untuk program pemulihan ekonomi nasional, berdasarkan perjanjian pinjaman nomor PERJ-228/SMI/1221, tanggal 30 desember 2021 dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Untuk lebih jelas target perubahan pembiayaan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PROYEKSI PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KENIKAN/ PENURUNAN
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	
6.1.01	Penggunaan Silpa tahun Sebelumnya					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.041.407.864,00	30.569.211.166,00	20.041.407.864,00	20.041.407.964,00	(52,53)
6.2.02	Penyertaan Modal		7.000.000.000,00		-7.000.000.000,00	#DIV/0!
6.2.03	Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	20.041.407.864,00	23.569.211.166,00	20.041.407.864,00	(3.527.803.302,00)	(17,60)
PEMBIAYAAN NETTO		-20.041.407.864,00	-30.569.211.166,00	-20.041.407.864,00	-20.041.407.964,00	(52,53)

Pembiayaan netto pada Perubahan RKPD 2025 sebesar (Rp20.041.407.864,00) dalam rangka penggunaan alokasi pengeluaran pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang, bernilai minus sebab tidak dialokasikan penerimaan pembiayaan. Postur keuangan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 menyajikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Soppeng, untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah selama satu periode anggaran. Berdasarkan hal tersebut postur keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Dalam Rupiah

URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PROYEKSI PERUBAHAN 2025
Pendapatan	1.181.534.011.415,00	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00 0,00
Belanja	1.161.492.603.551,00	1.161.492.603.551,00	1.101.087.398.551,00
Surplus/Defisit	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00
Pembiayaan			
Penerimaan	0		
Pengeluaran	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00
Surplus/Defisit	-20.041.407.864,00	-20.041.407.864,00	20.041.407.864,00
Netto	0,00	0,00	0,00

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa postur RKPD perubahan 2025 kabupaten Soppeng menganut basis penganggaran surplus yang digunakan untuk pembayaran cicilan utang pokok jangka Panjang atas program PEN.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng 2025 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 26 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025, dimana Perubahan RKPD tahun 2025 disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita untuk mencapai tujuan pembangunan. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Untuk hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud di atas dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasinya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 20254 mendasarkan dan memperhatikan pada:

1. Penyesuaian terhadap target pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Program Asta Cita ;
2. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan dalam RKP 2025;
3. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

4. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025;
5. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, Provinsi maupun Kabupaten;
6. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2025;
7. Pengalokasian anggaran terkait kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan ditingkat Nasional, Provinsi Sulawesi-Selatan maupun Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Soppeng memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan di Kabupaten Soppeng dirancang dalam kerangka mendukung ketercapaian terhadap target sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1.1 Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana

program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, berdasarkan tema tersebut maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2025:

1. Kebijakan Umum

- Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah
 - Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem OSS;
 - Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah);
 - Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan;
 - Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya;
 - Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah.;
 - Percepatan reforma agraria, penuntasan sertifikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
- Infrastruktur Dan Layanan Dasar
 - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA) dan akses SMP/MTs/ sederajat, atau SMA/MA/ sederajat bagi provinsi dengan capaian PAUD yang cukup tinggi;
 - Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola;

- Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi;
- Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (Naturebased Solution) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air;
- Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran;
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim;
- Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular;
- Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana;
- Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital.

2. Kebijakan Kewilayahan

➤ Pembangunan Perdesaan Dan Daerah Afirmasi

- Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan;
- Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan;
- Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan;
- Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal,

peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan..

➤ Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

- Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif;
- Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting;
- Penuntasan dan pemanfaatan PSN yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan carry over PSN serta penguatan kerjasama pengelolaan PSN.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2025, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 – 5,0 %;
3. Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382;
4. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%;
6. Emisi GRK sebesar 38,6%;
7. Nilai Tukar Petani (Kumulatif) sebesar 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif) Sebesar 104-105.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 mengacu pada Ranperda RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 akan mengakomodir dan disinergikan dengan beberapa target pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai Visi **“Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER”** maka upaya pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Misi pembangunan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan;
3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Modal Manusia;
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Adaptif;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
4. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Responsif
6. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 17 sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif;
3. Meningkatnya kualitas demokrasi;
4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan;
5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender;
6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan;
7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global;
8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah;
9. Meningkatnya pembangunan perdesaan;
10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;

11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat;
13. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah;
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah;
16. Menguatnya kualitas infrastruktur;
17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Tabel 4. 1. Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	IT.1. Indeks Modal Manusia	Angka	n.a	0,52
S. 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	73,95*
S. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS.2. Rata rata lama sekolah	Tahun	8,86	9,47
	IS.3. Harapan Lama sekolah	Tahun	13,55	13,80-13,81
	IS.4. Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi	Persen	23,04	24,11*
T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif	IT.2. Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,87	3,04
S. 3. Meningkatnya kualitas demokrasi	IS.5. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Angka	76,43(2023)	82,36
S. 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	IS.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,04	79,08
	IS.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	55,26 (2023)	56,43-56,51
S. 5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	IS.8. Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,74 (2023)	61,37-62,48
	IS.9. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,67 (2023)	56,78*
	IS.10. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,366 (2023)	0,348-0,344
T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,0 - 5,8
	IT.3.2. Rasio Gini	Angka	0,363	0,360
	IT.3.3. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	80,86 (data tahun 2023)	82,02*
S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	IS.11. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,02	13,05
	IS.12. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	0,90	0,95
	IS.13. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	6,99	7,05
	IS.14. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	83,82	85,02
IS. 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	IS.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9,68	10,5*

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
IS. 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	IS.16. Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,23	3,2-3,8
	IS.17. Inklusi Keuangan	Persen	75,02	80
IS.9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.18. Persentase Desa Mandiri	Persen	32,88	33,09
IS.10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IS.19. Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,77	7,30-7,89
	IS.20. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,19 (Agst)	3,80-4,10
T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	54,43 (2022)	55,37
IS. 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	IS.21. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	59,93 (2022)	61,66
IS. 12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	IS.22. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN	Nilai	53,92 (2022)	61,66
T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,74	81,80
S. 13. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	IS.23. Nilai SAKIP	Angka	69,02	69,27
S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.24. Indeks SPBE	Poin	3,94	4,01
	IS.25. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,12	4,41
S.15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	IS.26. Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	60
T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan	IT.6.1. Indeks Wiliamson	Angka	n.a	0,55
	IT.6.2. IKLH	Angka	75,69	77,6
	IT.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	n.a	29,70
S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IS.27. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	85,64	88,39
S.17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	IS.28. Indeks Risiko Bencana	Poin	140,76	135,46

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng

Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu **“Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”**.

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan lima tahun. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 4. 2. Penjelasan Visi sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan	<i>Sehat</i>	<i>Sehat</i> adalah kondisi kabupaten yang sehat dalam arti luas dan holistik. Kondisi sehat yang dimaksud tidak hanya melingkupi sehat fisik yang ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, namun juga sehat lingkungan yang ditandai dengan lingkungan lestari dan terkelola dengan baik, sehat mental dan sosial dimana kehidupan sosial masyarakatnya harmonis dan saling mendukung serta bertumpu pada prinsip hidup setara, sehat ekonomi yang ditandai kemiskinan berkurang dan ekonomi lokal yang tumbuh, sehat pemerintahan ditandai dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sehat infrastruktur dimana infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar mampu mendukung kualitas hidup. Sehat ini akan memberi penguatan dari aspek kualitas yang termuat pada pokok visi Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.
	<i>Maju</i>	<i>Maju</i> berbasis Agropolitan merupakan kondisi kabupaten yang mampu mengoptimalkan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi yang memadai dan terintegrasi dengan industri pengolahan, distribusi, penyedia sarana produksi, dan jasa penyedia pendukung lainnya secara berkelanjutan. Kondisi maju ini juga dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	<i>Berdaya Saing</i>	<i>Berdaya saing</i> berbasis Agropolitan adalah kondisi yang mencerminkan menguatnya ekonomi yang berakar pada sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang terintegrasi dengan wilayah perkotaan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bertumpu pada pilar pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan dan konektivitas, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga, daya tarik investasi yang memadai, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif.

Sumber : Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan;
2. Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa;
3. Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2025 mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029, menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1) Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2) Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)
		Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)
2	Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1) Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)
		Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)

No	Misi	Tujuan	Sasaran
3	Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)
			Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)
			Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)
			Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)
			Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)
			Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)
5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)
			Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)

Sumber : Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Adapun target untuk setiap indikator tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 berdasarkan Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 4. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	67.260.000	70.116.700
		Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,371	0,369
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,06	4,24
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	3,32	3,2
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,9	6,47
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	10,86	11
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Usaha	70	77
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah (T32.)	Nilai	3,25	3,31
	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Indeks Infrastruktur Daerah (S.3.1)	Nilai	72,53	76,8
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,34	27,84
		% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	2,26	4,55
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4)	Nilai		79,62 (maju)
	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	% Desa Mandiri (S.4.1)	%	22,45	22,75
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	Belum terlampaui
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	68,74	74,23

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5..2)	Nilai	131,2	131,2
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	n.a	27,51
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama masalah (T6)		IPM (T6)	Nilai	71,39	72,2
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6..1)	Nilai	82,72	83,2
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	67,17	65,7
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.547.000	11.050.000
	Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah kasus konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	n.a	0
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	72,05 (BB)	75 (BB)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,624	81,2
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,99 (B)	4,01 (A-)
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	85,11	86,11
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,17 (B)	66,25 (B)

Sumber : Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan dengan RKP tahun 2025 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Tema RKP Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029. Tema RKP Tahun 2025 yaitu ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu ***“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing”***, dengan prioritas pembangunan sesuai dengan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2030
T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	IT.1. Indeks Modal Manusia	Angka	n.a	0,52	0,57
S. 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	73,95*	75,14
S. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS.2. Rata rata lama sekolah	Tahun	8,86	9,47	10,09-10,11
	IS.3. Harapan Lama sekolah	Tahun	13,55	13,80-13,81	14,16-14,19
	IS.4. Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi	Persen	23,04	24,11*	29,43*
T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif	IT.2. Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,87	3,04	3,29
S. 3. Meningkatnya kualitas demokrasi	IS.5. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Angka	76,43(2023)	82,36	86,99
S. 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	IS.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,04	79,08	82,9
	IS.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	55,26 (2023)	56,43-56,51	59,24-59,52
S. 5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	IS.8. Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,74 (2023)	61,37-62,48	64,41 – 67,51
	IS.9. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,67 (2023)	56,78*	58,21-59,86
	IS.10. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,366 (2023)	0,348-0,344	0,289-0,278
T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,0 - 5,8	6,3-8,5
	IT.3.2. Rasio Gini	Angka	0,363	0,360	0,340
	IT.3.3. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	80,86 (data tahun 2023)	82,02*	135,05
S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	IS.11. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,02	13,05	13,49 - 14,73
	IS.12. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	0,90	0,95	2,01*
	IS.13. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	6,99	7,05	4,98
	IS.14. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	83,82	85,02	89,97
IS. 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	IS.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9,68	10,5*	12,6*
IS. 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	IS.16. Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,23	3,2-3,8	2,45 - 3,43
	IS.17. Inklusi Keuangan	Persen	75,02	80	95,61
IS.9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.18. Persentase Desa Mandiri	Persen	32,88	33,09	38,71
IS.10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IS.19. Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,77	7,30-7,89	5,35 -5.96
	IS.20. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,19 (Agst)	3,80-4,10	3,02-3,76
T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	54,43 (2022)	55,37	56,56
IS. 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	IS.21. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	59,93 (2022)	61,66	63,58
IS. 12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	IS.22. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN	Nilai	53,92 (2022)	61,66	63,58

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2030
T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,74	81,80	82,80
S. 13. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	IS.23. Nilai SAKIP	Angka	69,02	69,27	70,50
S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.24. Indeks SPBE	Poin	3,94	4,01	4,25
	IS.25. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,12	4,41	4,59
S.15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	IS.26. Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	60	65
T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan	IT.6.1. Indeks Wiliamson	Angka	n.a	0,55	0,5
	IT.6.2. IKLH	Angka	75,69	77,6	78,67
	IT.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	n.a	29,70	48,49
S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IS.27. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	85,64	88,39	90,33
S.17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	IS.28. Indeks Risiko Bencana	Poin	140,76	135,46	129,17 – 123,78

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 serta visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema RKPD Tahun 2025 adalah:

“ Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup “

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 terdapat tiga pokok tema, yaitu “*Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan*” dimaknai sebagai Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan dalam system pemerintah daerah melalui Reformasi kelembagaan dan tata kelola yang dilakukan dengan mendorong reformasi birokrasi dan memantapkan inovasi dalam sistem pemerintahan yang ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. “*Tata Kelola Pelayanan Publik*” dimaknai sebagai upaya dalam meningkatkan penguatan kualitas pelayanan publik dengan memantapkan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya.

Serta peningkatan Kualitas Infrastruktur dan peningkatan ekonomi Masyarakat. Pokok tema yang terakhir yaitu “*Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup*” sebagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan, menjaga, memelihara ataupun memperbaiki daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya.

Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup tersebut dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur, dan lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”.

Berangkat dari Tema pembangunan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) prioritas sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif. Di era digital sekarang ini tentunya menjadi tantangan dalam pemerintahan. Sehingga dalam pemerintahan perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terhubung dengan tiga pilar yang menjadi kunci dari pembentukan sebuah negara modern, yakni *rule of law*, *democracy*, dan *good governance*. Berbicara tentang *rule of law*, sambungnya, maka dapat dimaknai dengan adanya asas legalitas. Dalam praktiknya, hal ini berkaitan dengan keberadaan lembaga peradilan yang bertugas mengawasi lembaga legislatif dan eksekutif jika terjadi perbedaan di antara keduanya. Kemudian, pilar demokrasi berarti adanya kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya kedua pilar tersebut dapat dikatakan *good governance* telah tercipta. Dengan Kolaborasi antara pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi dan antar daerah tentunya mampu mengatasi permasalahan yang terjadi serta perwujudan pembangunan nasional maupun daerah dapat terwujud. Selain itu pemanfaatan inovasi juga sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah. Pembangunan tersebut dapat terwujud dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi, nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, opini laporan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan indeks inovasi daerah.

2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul. Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas SDM untuk dapat menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang sekaligus sebagai faktor menentukan keberhasilan pemerintah dalam pelayanan publik yang lebih optimal berbasis teknologi. Peningkatan SDM yang unggul kemudian didorong dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk membangun SDM yang berkompeten, berkarakter dan memiliki komitmen untuk membangun daerah maupun negara yang lebih baik. Prioritas pembangunan tersebut dapat terwujud dengan meningkatnya capaian SPM, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan dan kesehatan. Selain itu ditandai juga dengan menurunnya angka kemiskinan.
3. Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan. Setiap pembangunan yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan dampak ataupun kondisi lingkungan yang ada. Dimana tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional maupun kabupaten/kota. Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pengembangan sosial yang inklusif, dan perlindungan lingkungan berkelanjutan. Selain itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, juga perlu menjaga kualitas lingkungan yang merupakan upaya yang tidak dapat diabaikan. Pencapaian tersebut ditandai dengan meningkatnya nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Selain itu menurunnya potensi penurunan emisi gas rumah kaca dan indeks risiko bencana.
4. Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat. Diperlukan upaya yang mendukung peningkatan daya saing seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan teknologi dan lain

sebagainya. Selain itu dibutuhkan tatanan kehidupan yang demokratis, aman dan damai dengan memperkuat keamanan dan ketertiban sehingga menciptakan lingkungan yang produktif dan kondusif untuk investasi, bisnis dan perkembangan ekonomi. Sehingga mampu menarik investor dari luar untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Soppeng. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan daerah lebih kompetitif dan mampu bersaing dalam skala regional dan nasional. Produktivitas menjadi penentu tingkat kompetitif dan pertumbuhan ekonomi, produktivitas sangat terkait jumlah output yang mampu dihasilkan dengan biaya tertentu. Produktivitas menentukan apakah kegiatan produksi dilakukan secara efisien dan memberikan keuntungan, produktivitas ekonomi akan berjalan apabila dilengkapi dengan modal fisik, teknologi baru, dan modal sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pemenuhan produksi barang dan jasa, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mendukung infrastruktur dari pemerintah dan sektor privat untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat meningkatkan investasi pada daerah baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Soppeng. Pemantapan Sektor sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di sekitar kawasan pariwisata.

Penyusunan prioritas pembangunan ini selain mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, juga termasuk memperhatikan adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, selain itu juga memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 4. 6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun 2025
Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	67.260.000	70.116.700
			Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,371	0,369
		1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,06	4,24
		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	3,32	3,2

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun 2025
		kerja, dan peluang usaha (S.1.2)				
		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,9	6,47
	2. Meningkatkan nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	10,86	11
		4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Usaha	70	77
	3. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (T3.1)	Nilai	3,25	3,31
		5. Meningkatkan keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Indeks Infrastruktur Daerah (S.3.1)	Nilai	72,53	76,8
		6. Terpenuhnya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,34	27,84
			% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	2,26	4,55
	4. Meningkatkan kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4.1)	Nilai		79,62 (maju)
		7. Meningkatkan kemandirian desa (S.4.1)	% Desa Mandiri (S.4.1)	%	22,45	22,75
Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5.1)	Nilai	Belum terlampaui	Belum terlampaui
		8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	68,74	74,23
		9. Meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5..2)	Nilai	131,2	131,2
		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	N.a	27,51
Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul	6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan beragama masalah (T6)		IPM (T6.1)	Nilai	71,39	72,2
		11. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	82,72	83,2
		12. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	67,17	65,7
		13. Meningkatkan daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.547.000	11.050.000
		14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah kasus konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	n.a	0
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	7. Berkembangnya pemerintahan		Indeks reformasi birokrasi (T7.1)	Nilai	72,05 (BB)	75 (BB)

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun 2025
Akuntabel dan Inovatif	berintegritas dan adaptif (T7)	15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,624	81,2
		16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,99 (B)	4,01 (A-)
		17. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks pencegahan korupsi daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	85,11	86,11
		18. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,17 (B)	66,25 (B)

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 7. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;		
Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Memantapkan Kualitas Infastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;		
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);		
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Peningkatan Tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dilakukan penyesuaian kembali terhadap prioritas, sasaran dan indikator pembangunan dengan menyesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini telah disesuaikan berdasarkan Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 8. Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

RKPD 2025			PERUBAHAN RKPD 2025		
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR
Memantapkan Kualitas Infastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)
	Meningkatnya Fasilitas Ekonomi Wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)
				4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)
	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)		5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Indeks Infrastruktur Daearah (S.3.1)
				6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1) % Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)
Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	% Desa Mandiri (S.4.1)	
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	
		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5..2)	
Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	
	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6..1)	
	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	
			14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah kasus konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	

RKPD 2025			PERUBAHAN RKPD 2025		
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)
		Opini laporan keuangan		17. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks pencegahan korupsi daerah (Skor MCSP) (S.7.3)
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		18. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)
		Indeks Inovasi Daerah			

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 di Kabupaten Soppeng terutama pada dukungan penanganan kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi. Adapun target dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng pada perubahan RKPD tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 9. Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun 2025
Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,06	4,24
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	3,32	3,2
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,9	6,47
	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Usaha	70	77
	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Indeks Infrastruktur Daerah (S.3.1)	Nilai	72,53	76,8
	6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,34	27,84
		% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	2,26	4,55
7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	% Desa Mandiri (S.4.1)	%	22,45	22,75	
Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	68,74	74,23
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	131,2	131,2
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	N.a	27,51
Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	82,72	83,2
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	67,17	65,7
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.547.000	11.050.000
	14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah kasus konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	N.a	0
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,624	81,2
	16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,99 (B)	4,01 (A-)
	17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks pencegahan korupsi daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	85,11	86,11
	18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,17 (B)	66,25 (B)

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

4.3.1. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif tentang langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimisasi sumber daya, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 mempedomani Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang masih dalam tahap penyempurnaan. Sehingga masih terdapat strategi pembangunan daerah yang perlu disesuaikan. Untuk strategi kebijakan dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Soppeng yakni :

- Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar;
- Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi;
- Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olahraga serta kepemudaan;
- Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit;
- Mendorong kolaborasi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa;
- Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat;
- Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata;

- Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif;
- Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur;
- Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana;
- Mengakselerasi implementasi Road-Map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu.

4.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Soppeng mempedomani Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang masih dalam tahap penyempurnaan. Sehingga masih terdapat arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu disesuaikan. Untuk arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam RKPD Tahun 2025 yakni :

- Perbaikan kualitas penyelenggaraan SPM;
- Perbaikan kualitas penyelenggaraan Pelayanan publik non SPM;
- Peningkatan literasi masyarakat dan dukungan akses Pendidikan;
- Pemenuhan dan perbaikan prasarana, sarana, dan fasilitas kesehatan;
- Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis individu, rumah tangga dan kelompok;
- Optimalisasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- Pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata serta masyarakat sadar wisata;

- Akselerasi dan pemantapan penyuluhan pertanian untuk sistem pertanian terpadu dan hilirisasi pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Pemeliharaan kesatuan bangsa, sistem politik dan kehidupan berdemokrasi;
- Pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- Penerapan merit sistem dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

4.3.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2025 terbagi ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan, 18 (delapan belas) sasaran yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) indikator sasaran, selanjutnya terbagi ke dalam program prioritas sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 10. Program Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)		Pertumbuhan ekonomi (S1.1)		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pternakan)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)		Tingkat pengangguran terbuka (S.1.2)		
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan	
					Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)		Angka kemiskinan (S1.3)			
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
				Persentase pelaksanaan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
				Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
				Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI) Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang			

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan		
			berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan di bawah 10 Ha yang ditangani			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)			Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
				Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
5. Meningkatkan keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)			Indeks Infrastruktur Daerah (S.3.1)				
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob					

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan	
			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas			
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal			
		6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)		% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)			
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
		% Desa Mandiri (S.4.1)				

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparaturnya desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya Persentase fasilitasi tata kelola desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8 kecamatan
Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (S.5.1)		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara		
		Indeks kualitas lahan			
		Indeks risiko bencana (S.5..2)			
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial		
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)		Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)		
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	
Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)		Indeks kesehatan (S.6.1)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting		
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)					

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks pendidikan (S.6.2.1)			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)			
			Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
Pertumbuhan wirausaha						
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM			

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		
	14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)		Jumlah kasus konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)				
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah		
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)				
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda		
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD							
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik				
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar				
			Persentase penurunan SILPA				
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu				
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
		penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)		
	16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas		
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan.		
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan.			
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8 Kecamatan
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan				

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)		
	17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi		
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Prioritas	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Keterangan	
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik			
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Barang dan Jasa)	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	18. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)			Nilai SAKIP (S6.4)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.		
		Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan	Persentase capaian kinerja penunjang urusan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	

Prioritas, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan tahun 2025 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, rasio gini serta PDRB per kapita. Target indikator makro tersebut dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RKPD tahun 2025 dan menjadi hasil yang ingin dicapai melalui upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk mencapainya dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Untuk perubahan target indikator makro tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 4. 11. Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET RKPD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	6,8	4,24
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	67,26	70,88	70,12
3	Angka Kemiskinan	%	6,9	6,22	6,47
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	4	3,2
5	Gini Ratio	%	0,371	0,363	0,369
6	IPM	Nilai	71,39	71,44	72,2

Perubahan target indikator makro didasarkan pada capaian Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi dan sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, serta wilayah-wilayah terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Soppeng. Asumsi lainnya yang mempengaruhi penetapan target adalah terkait dengan kondisi daerah triwulan I pada tahun 2025.

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjarangan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berdasarkan hal tersebut dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun

2025 harus memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD. Saran dan pendapat tersebut diintegrasikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang terinput ke dalam aplikasi SIPD. Pada perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang dalam proses verifikasi oleh perangkat daerah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan renjanya. Terdapat 167 usulan yang merupakan hasil telaahan yang terbagi ke dalam 17 SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 12. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	SKPD	Jumlah Usulan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
2	Dinas Kesehatan	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25
5	Dinas Sosial	4
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	25
7	Dinas Lingkungan Hidup	6
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
9	Dinas Perhubungan	26
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
11	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	2
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2
13	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	2
14	Kecamatan Lilirilau	3
15	Kecamatan Marioriawa	1
16	Kecamatan Lalabata	2
17	Kecamatan Marioriwawo	1
TOTAL		167

Sumber : SIPD-RI Kemendagri

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tentang rencana program kegiatan beserta kebutuhan penganggaran sebelum, dan sesudah perubahan disertai dengan alasan dilakukannya perubahan adalah untuk memastikan bahwa belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat terdananai. Rencana kerja dan pendanaan juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan sebelum perubahan sebagaimana telah dituangkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025.

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana pendapatan daerah tahun 2025 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp1.101.087.398.551,00 yang bersumber dari PAD sebesar RP183.116.184.544,00 dan pendapatan transfer sebesar RP 938.012.621.871,00. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025, dengan jumlah belanja sebesar Rp1.101.087.398.551,00, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp0 serta pengeluaran pembiayaan senilai Rp20.041.407.964,00.

Target belanja pada perubahan RKPD tahun 2025, lebih rendah dari pada target belanja yang telah ditetapkan dalam RKPD Pokok 2025, hal ini disebabkan karena menurunnya Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer. Penurunan belanja tersebut dikarenakan adanya dana pencadangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025 serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut ini.

Tabel 5. 1. Rincian Kerangka Belanja Perubahan RKP Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PERUBAHAN RKP 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	183.116.184.544,00	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00	44.112.049.057,00	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	119.294.332.142,00	6.538.973.440,00	119.294.332.142,00	112.755.358.702,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00	16.209.803.345,00	-	-
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	3.500.000.000,00	116.255.358.702,00	3.500.000.000,00	112.755.358.702,00	-
4.2	Pendapatan Transfer	998.417.826.871,00	998.417.826.871,00	938.012.621.871,00	-60.405.205.000,00	-6,44
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.916.287.000,00	953.714.120.000,00	905.251.082.000,00	-48.463.038.000,00	-5,35
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	22.501.539.871,00	44.703.706.871,00	32.761.539.871,00	-11.942.167.000,00	-36,45
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah					
4.3.02	Dana Darurat					
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
Total		1.181.534.011.415,00	1.181.534.011.415,00	1.121.128.806.415,00	-60.405.205.000,00	-5,39
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi	884.962.641.120,00	848.858.191.215,00	878.193.654.268,00	29.335.463.053,00	3,34
5.1.01	Belanja Pegawai	534.745.317.131,00	522.817.018.530,00	535.805.821.084,00	12.988.802.554,00	2,42
5.1.02	Belanja Barang Jasa	333.220.488.806,00	312.002.837.502,00	330.556.898.001,00	18.554.060.499,00	5,61
5.1.03	Belanja Bunga	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	6.026.209.199,00	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi				-	#DIV/0!
5.1.05	Belanja Hibah	10.970.625.984,00	8.012.125.984,00	5.804.725.984,00	-2.207.400.000,00	-38,03
5.1.06	Belanja Bansos				-	#DIV/0!
5.2	Belanja Modal	148.597.918.150,00	191.102.489.165,00	102.178.826.302,00	-88.923.662.863,00	-87,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000,00	390.000.000,00	20.000.000,00	-370.000.000,00	1.850,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.801.008.790,00	69.340.533.056,00	36.297.668.242,00	-33.042.864.814,00	-91,03
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	36.150.270.660,00	50.010.191.806,00	34.764.929.660,00	-15.245.262.146,00	-43,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.031.017.000,00	66.029.356.503,00	30.563.206.700,00	-35.466.149.803,00	-116,04
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	233.021.700,00	181.107.800,00	233.021.700,00	51.913.900,00	22,28
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	1.362.600.000,00	5.151.300.000,00	300.000.000,00	-4.851.300.000,00	1.617,10
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	4.172.465.521,00	3.602.897.431,00	-569.568.090,00	-15,81
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.405.237.431,00	4.172.465.521,00	3.602.897.431,00	-569.568.090,00	-15,81
5.4	Belanja Transfer	119.526.806.850,00	117.359.457.650,00	117.112.020.550,00	-247.437.100,00	-0,21
5.4.01	Belanja Bagi hasil	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00	5.065.102.250,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.461.704.600,00	112.294.355.400,00	112.046.918.300,00	-247.437.100,00	-0,22
Total		1.161.492.603.551,00	1.161.492.603.551,00	1.101.087.398.551,00	-60.405.205.000,00	-5,49
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	

NO	URAIAN	APBD POKOK 2025	RKPD POKOK 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	%
6.1.01	Penggunaan Silpa tahun Sebelumnya					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.041.407.864,00	30.569.211.166,00	20.041.407.864,00	20.041.407.964,00	-52,53
6.2.02	Penyertaan Modal		7.000.000.000,00		-7.000.000.000,00	#DIV/0!
6.2.03	Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	20.041.407.864,00	23.569.211.166,00	20.041.407.864,00	-3.527.803.302,00	-17,6
	PEMBIAYAAN NETTO	-20.041.407.864,00	-30.569.211.166,00	-20.041.407.864,00	-20.041.407.964,00	-52,53

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Program prioritas yang telah melalui tahapan yang sesuai dengan aturan dalam prosedur perencanaan akan menjadi acuan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Untuk tahun 2025 terdapat 4 prioritas pembangunan daerah yakni Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif; Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul; Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan; dan Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat. Untuk prioritas pertama terbagi ke dalam 7 sasaran dengan 37 program prioritas. Dalam prioritas kedua terdapat 3 sasaran dengan 8 program prioritas sedangkan untuk prioritas ketiga terdapat 4 sasaran yang di dalamnya terdiri dari 20 program prioritas. Pada prioritas keempat terbagi ke dalam 4 sasaran dengan 21 program prioritas. Keseluruhan program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2. Perbandingan Program Prioritas RKPD 2025 dengan Perubahan RKPD 2025 Kabupaten Soppeng

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.518.293.296	1.527.363.554	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pternakan)	1.175.275.000	195.166.500	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	248.518.875	591.436.875	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
				Program Penyuluhan Pertanian	1.013.150.000	1.276.441.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	10.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20.000.000	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Promosi Penanaman Modal	38.650.000	38.090.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	376.646.000	286.420.850	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34.500.000	85.533.600	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	51.022.944	81.762.562	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	99.000.000	107.600.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	14.000.000	20.000.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);			3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Program Pengembangan UMKM	240.000.000	26.750.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.973.394.000	886.030.000	Dinas Sosial
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61.988.531.088	78.917.920.350	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Pendidikan	118.263.011.000	70.631.151.085	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	806.460.000	646.060.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Kawasan Permukiman	162.995.000	163.145.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;			4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	154.550.000	154.550.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13.897.309.000	2.629.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)	2.475.000.000	0	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	50.479.080	44.049.080	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata		5. Meningkatkan keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	149.557.360	183.455.124	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
				Program Penyelenggaraan Jalan	50.919.054.191	25.729.004.272	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.410.275.350	694.619.228	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	452.550.000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	451.100.000	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Kawasan Permukiman	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan
Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;				Program Pengembangan Perumahan	234.105.000	235.055.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1.229.658.400	2.575.774.500	Dinas Perhubungan
			6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	800.375.000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	688.800.000	4.210.181.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	260.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Persampahan	3.547.285.000	3.066.384.500	Dinas Lingkungan Hidup
			7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	958.350.000	941.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.147.589.800	8.117.940.000	8 kecamatan
Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (S.5.1)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	130.436.720	496.286.440	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	93.660.200	135.361.600	Dinas Lingkungan Hidup
			9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Program Penanggulangan Bencana	659.046.800	806.250.570	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.277.232.034	3.134.988.400	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Program Penanganan Bencana	116.860.000	120.083.000	Dinas Sosial
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	37.600.000	37.600.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Program Pengelolaan Persampahan	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	9.200.000	6.850.200	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),	Peningkatan Kesejahteraan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan			
Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;	Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Teknologi Melalui SDM yang Unggul		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	583.089.200	203.550.000	Dinas Kesehatan			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	390.881.000	343.507.800	Dinas Kesehatan			
				Program Pengendalian Penduduk	211.600.000	221.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.289.625.000	1.418.725.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	39.125.000	25.325.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Program Pengelolaan Pendidikan	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Program Pembinaan Perpustakaan	75.295.000	920.361.479	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
			Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;			13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
							Program Pengembangan UMKM	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7.200.000	36.450.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya					Dinas Sosial			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan			
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Kesehatan			
				Program Pengelolaan Pendidikan	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan			
			14. Terpeliharanya masalah kehidupan beragama (S.6.4)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.861.004.220	1.958.554.210	Sekretariat Daerah			
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.308.800.000	17.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	491.732.000	596.417.000	Bappelitbangda			
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	129.412.795.369	128.558.519.846	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah			
			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Peningkatan Tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	643.736.832	1.004.526.832	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.469.133.000	2.818.542.000	Inspektorat Daerah
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.061.524.650	1.024.706.262	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.908.438.763	2.846.674.126					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Program Pencatatan Sipil	12.089.000				8.048.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	343.000.000				340.400.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	276.150.000				229.250.000	8 Kecamatan			
17. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya				Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya				Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.129.678.879	1.096.298.400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Inspektorat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	467.180.000	681.650.000	Inspektorat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Bappelitbangda
				Program Kepegawaian Daerah	667.285.200	827.561.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Perekonomian dan Pembangunan	353.392.015	344.800.824	Sekretariat Daerah (Bagian Barang dan Jasa)
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Bappelitbangda
				Program Penunjang Urusan	286.006.200	221.704.260	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Sudah dianggarkan pada prioritas lainnya	Inspektorat
TOTAL					435.462.282.466	355.460.264.729	

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan dan peraturan bupati tentang uraian tugas perangkat daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis yang berasal dari tahapan perencanaan yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) yang terdiri dari urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Untuk urusan pemerintahan pilihan terdapat 6 (enam) urusan yang terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Dalam unsur pendukung urusan pemerintahan terdapat 11 (sebelas) unsur yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, inspektorat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik dan non urusan yang di dalamnya terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagai percepatan dalam pencapaian pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan RKP Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
					412.137.844.870	389.266.651.135	381.165.608.470							22.218.984.820			
1					410.064.349.870	388.279.556.635	380.442.198.970							22.218.984.820			
1	0 1				410.064.349.870	388.279.556.635	380.442.198.970							22.218.984.820			
1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	100 %	290.372.063.870	311.231.215.435	308.335.419.685			65.558.820			
1	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	259.4167.750	486.814.160	284.734.250			0	DISDIKBUD		
1	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.237.750	378.740.350	184.387.750	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	0	DISDIKBUD
1	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	312 Dokumen	312 Dokumen	58.930.000	108.073.810	100.346.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	0	DISDIKBUD
1	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	288.641.981.05 0	308.918.584.33 5	306.203.441.67 0			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	0	DISDIKBUD
1	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2500 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	288.531.031.05 0	308.714.284.33 5	306.113.241.67 0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya	0	DISDIKBUD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.01.2.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	5.000.000	10.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.2.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	105.950.000	194.300.000	85.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.2.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	94.424.800	94.424.800	72.500.000			-	Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.2.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	82.174.800	82.174.800	72.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.2.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12.250.000	12.250.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.2.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	100 %	100 %	473.237.770	454.714.140	454.215.765			-	Manusia yang Unggul		7.398.820	DISDIKBUD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.01.02.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.991.520	4.991.520	4.991.520	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		4.998.820	DISDIKBUD		
1.01.02.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		2.400.000	DISDIKBUD		
1.01.02.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	54.282.500	154.282.670	52.570.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.02.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	210.193.750	84.987.500	141.954.245	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.02.000.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan	3.000.000	8.860.500	8.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		
1.01.02.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	148 Laporan	198.370.000	199.191.950	244.300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.001.2.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	582.378.000	978.378.000	897.778.000				-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD
1.001.2.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	162.000.000	162.000.000	277.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.001.2.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	420.378.000	816.378.000	620.778.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.001.2.000.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	320.874.500	298.300.000	422.750.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		58.160.000	DISDIKBUD	
1.001.2.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	83 Unit	16.200.000	16.200.000	16.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		35.660.000	DISDIKBUD	
1.001.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	12.100.000	12.100.000	36.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1.01.2.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	80 Unit	292.574.500	270.000.000	370.050.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		22.500.000	DISDIKBUD	
1.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	118.263.011.000	74.996.502.200	70.631.151.085						22.153.426.000		
1.01.2.001	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase ketersediaan sarana prasarana Sekolah Dasar	100 %	100 %	66.496.421.250	51.549.473.000	44.166.028.485			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	10.415.200.000	DISDIKBUD	
1.01.2.000.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1.500.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.01.2.000.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1.500.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.01.2.000.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	254 Unit	2.084.000.000	5.880.276.000	1.718.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan		0	DISDIKBUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.0.0.2.000.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 Ruang	24 Ruang	1.500.000.000	0	0	Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				
1.0.0.2.001.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	9 Ruang	1.500.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		1.237.600.000		DISDIKBUD
1.0.0.2.001.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
1.0.0.2.002.5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21000 Peserta Didik	21000 Peserta Didik	34.800.000	5.265.800.000	3.612.395.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
1.0.0.2.002.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	88.800.000	3.585.087.500	3.204.188.630	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
1.0.0.2.002.9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	250 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	18.774.640.000	18.760.749.500	19.021.369.655	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis		0		DISDIKBUD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.012.005.0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	821.700.000	5.497.560.000	5.018.272.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.715.600.000	DISDIKBUD
1.012.005.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	20 Ruang	13.898.378.750	0	4.922.905.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
1.012.005.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	3.512.502.500	1.705.000.000	1.705.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
1.012.005.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	47 Paket	47 Paket	19.781.600.000	10.855.000.000	4.963.897.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
1.012.2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase ketersediaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	30.586.412.500	13.933.463.000	21.442.903.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		9.647.862.000	DISDIKBUD
1.012.001.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	0	0	123.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui		0		DISDIKBUD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.012.2.001.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang	3.250.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendidikan-Reguler-SMP DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.949.622.000	DISDIKBUD	
1.012.2.001.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	3.250.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			358.400.000	DISDIKBUD	
1.012.2.001.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	3.479.931.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			844.800.000	DISDIKBUD	
1.012.2.003.2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	1.502.475.000	1.265.000.000	1.527.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DISDIKBUD	
1.012.2.003.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	150.023.250	2.159.473.000	1.548.273.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DISDIKBUD	
1.012.2.004.1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	150.023.250	662.500.000	217.780.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya			0	DISDIKBUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.012.2.004	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	31 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	8.278.560.000	8.312.990.000	8.078.030.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.012.2.005	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	5.300.000.000	1.533.500.000	2.357.820.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.012.2.006	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	5.225.400.000	0	7.590.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.012.2.003	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase ketersediaan sarana prasarana PAUD	100 %	100 %	19.299.577.250	7.794.266.200	3.305.219.600			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		1.666.664.000	DISDIKBUD	
1.012.2.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	200.031.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		584.550.000	DISDIKBUD	
1.012.2.001	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	107.042.000	0	91.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.01.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	2.749.200.000	3.428.700.000	2.734.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		601.200.000	DISDIKBUD	
1.01.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1 Orang	1 Orang	4.149.996.000	1.213.966.200	401.219.600	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.01.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	774.167.500	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		139.125.000	DISDIKBUD	
1.01.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	10.943.447.250	3.151.600.000	78.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DISDIKBUD	
1.01.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	375.693.500	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		341.789.000	DISDIKBUD	
1.01.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketersediaan sarana prasarana pendidikan nonformal/kesetaraan	100 %	100 %	1.880.600.000	1.719.300.000	1.717.000.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		423.700.000	DISDIKBUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.01.2.04.001	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.880.600.000	1.719.300.000	1.717.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	0	DISDIKBUD	
1.01.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	1 Kurikulum	100%	27.000.000	300.826.500	119.494.700						0		
1.01.3.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum mulok pendidikan dasar yang ditetapkan	1 Kali	1 Kali	27.000.000	300.826.500	119.494.700			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	0	DISDIKBUD	
1.01.3.2.01.000	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000	300.826.500	119.494.700	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	0	DISDIKBUD	
1.01.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks pemerataan guru Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100 %	75 90 %	1.402.275.000	1.751.012.500	1.356.133.500						0		
1.01.4.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru/Murid	1 : 18	1 : 18	1.402.275.000	1.751.012.500	1.356.133.500			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	0	DISDIKBUD	
1.01.4.2.01.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40 Laporan	40 Laporan	1.402.275.000	1.751.012.500	1.356.133.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	0	DISDIKBUD	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.073.495.000	987.094.500	723.409.500						0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	2													
2	2	2	0											0	
			3												
2	2	2	0	2.0										0	DISDIKBUD
			3	1											
2	2	2	0	2.0	000									0	DISDIKBUD
			3	1	3										
2	2	2	0											0	
			5												
2	2	2	0	2.0										0	DISDIKBUD
			5	1											
2	2	2	0	2.0										0	DISDIKBUD
			5	2											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2 2 2 5 2 2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	5 Objek	313.880.000	478.714.500	423.409.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0		DISDIKBUD
TOTAL					412.137.844.870	389.266.651.135	381.165.608.470						22.218.984.820		
DINAS KESEHATAN															
	DINAS KESEHATAN				260.061.767.640	267.445.739.639	277.108.041.102							334.393.580.305	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				260.061.767.640	267.445.739.639	277.108.041.102							334.393.580.305	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				260.061.767.640	267.445.739.639	277.108.041.102							334.393.580.305	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %	100 %	194.516.468.152	197.087.768.639	196.060.968.502							229.998.105.097	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun tepat Waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang Disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	120.662.963	99.050.000	41.100.000				-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		135.809.163	DINKES
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.200.000	12.200.000	1.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		13.000.000	DINKES	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		16.500.000	DINKES	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	2.250.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui		20.000.000	DINKES	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.0.0.2.0.000.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	78.462.963	56.850.000	34.150.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			86.309.163	DINKES
1.0.0.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	79.287.214.554	81.622.045.204	81.088.346.667			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		87.759.878.327	DINKES
1.0.0.2.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	917 Orang/bulan	917 Orang/bulan	79.211.516.554	81.254.345.204	80.736.146.667	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			87.676.610.527	DINKES
1.0.0.2.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	75.698.000	367.700.000	352.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			83.267.800	DINKES
1.0.0.2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	25.865.038	28.319.784	21.819.784			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		197.230.000	DINKES
1.0.0.2.3.000.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25.865.038	28.319.784	21.819.784	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi			197.230.000	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01.2.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	24.300.000	26.867.965	20.367.965					Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			
1.02.01.2.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	24.300.000	26.867.965	20.367.965					Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	26.730.000	DINKES
1.02.01.2.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	24.300.000	26.867.965	20.367.965	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	26.730.000	DINKES
1.02.01.2.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	905.553.860	637.417.201	441.962.301					Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	778.314.246	DINKES
1.02.01.2.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8.895.600	8.895.000	6.595.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	1.100.000	DINKES
1.02.01.2.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.827.500	21.152.025	48.152.025	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-	13.010.250	DINKES
1.02.01.2.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	82.400.000	82.400.000	81.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya	-	7.040.000	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.02.01.2.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	51.450.000	54.450.000	34.850.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		10.450.000	DINKES		
1.02.01.2.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	190.980.760	190.980.760	109.075.860	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		37.295.390	DINKES		
1.02.01.2.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		1.100.000	DINKES		
1.02.01.2.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	269.539.416	153.889.416	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		385.000.000	DINKES		
1.02.01.2.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi Baik	100%	100%	17.590.000	388.700.000	12.700.000			-	Manusia yang Unggul		19.349.000	DINKES		
1.02.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	17.590.000	388.700.000	12.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Manusia yang Unggul		19.349.000	DINKES		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.0.0.2.0.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	869.734.114	804.366.018	442.136.018				-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		898.398.523	DINKES
1.0.2.0.1.8.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350.887.218	350.887.218	345.607.218	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		149.343.939	DINKES	
1.0.2.0.1.8.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	518.846.896	453.478.800	96.528.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		429.093.459	DINKES	
1.0.2.0.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100%	100%	510.188.921	725.643.765	729.659.765			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		560.030.813	DINKES	
1.0.2.0.1.9.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	16.965.000	16.965.000	16.965.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		18.661.500	DINKES	
1.0.2.0.1.9.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	63 Unit	436.223.921	651.678.765	684.194.765	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		277.750.000	DINKES	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1 0 2 1 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	49 Unit	57.000.000	57.000.000	28.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		41.800.000	DINKES		
1 0 2 1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kemandirian Keuangan BLUD	100%	100%	112.755.358.702	112.755.358.702	113.262.876.002			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		139.622.365.025	DINKES		
1 0 2 1 0 000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Kerja	19 Unit Kerja	112.755.358.702	112.755.358.702	113.262.876.002	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan dari BLUD	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		139.622.365.025	DINKES		
1 0 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (AKI) Prevalensi Stunting	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 80% 98% 100%	0,22 22	61.988.531.088	67.019.382.750	78.917.920.350						100.465.680.932			
1 0 2 2 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	100%	100%	23.929.100.068	29.038.913.488	32.873.221.788			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		27.235.662.207	DINKES		
1 0 2 2 1 000 2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	6.000.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi		6.500.000.000	DINKES		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	4 Unit	1.894.341.818	12.075.700.000	12.101.213.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan DasarDAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem KesehatanPendapatan Bagi Hasil Pajak RokokOpsen PKB	-	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.177.452.813	DINKES
1.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	17 Unit	6.490.386.073	1.010.000.000	1.130.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.500.000.000	DINKES
1.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	6 Unit	5.973.327.627	11.794.228.402	8.122.591.300	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.390.200.000	DINKES
1.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit	19 Unit	45.404.000	152.202.300	248.202.300	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			49.944.400	DINKES
1.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	0	0	4.979.098.402	Kab. Soppeng, Lababata, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.500.000.000	DINKES
1.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	1 Paket	1 Paket	3.419.522.350	3.961.382.786	6.274.482.786	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang			3.761.474.585	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kesehatan yang disediakan						Semua Kel/Desa	KesehatanDAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/KotaPendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				
1 2	0 2 0 2 2.0 1 002 6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	17 Paket	17 Paket	106.118.200	45.400.000	17.634.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		116.730.020	DINKES
1 2	0 2 0 2 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	37.328.430.020	37.390.437.762	45.841.783.192			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		72.426.780.291	DINKES
1 2	0 2 0 2 2.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5260 Orang	5260 Orang	277.340.000	362.860.000	332.860.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		284.237.667	DINKES
1 2	0 2 0 2 2.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4979 Orang	4979 Orang	121.635.000	266.548.750	9.198.750	Kab. Soppeng, Ganra, Belo Kab. Soppeng, Ganra, Ganra Kab. Soppeng, Ganra, Lompulle Kab. Soppeng, Ganra, Enrekang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		121.336.000	DINKES
1 2	0 2 0 2 2.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2790 Orang	2790 Orang	35.000.000	201.600.000	201.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		38.500.000	DINKES
1 2	0 2 0 2 2.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9846 Orang	9846 Orang	16.125.000	10.198.750	9.198.750	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang KesehatanDAK Non Fisik-Dana BOK-BOK	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis		17.737.500	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.2.2.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17998 Orang	17998 Orang	798.085.000	817.735.000	807.238.010	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			831.057.500	DINKES
1.02.2.2.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76216 Orang	76216 Orang	51.310.000	39.560.000	13.817.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			11.000.000	DINKES
1.02.2.2.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20317 Orang	20317 Orang	20.860.000	31.180.500	29.180.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			22.000.000	DINKES
1.02.2.2.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4940 Orang	4940 Orang	68.171.600	68.171.600	59.488.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			74.988.760	DINKES
1.02.2.2.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2555 Orang	2555 Orang	11.945.000	10.000.000	6.858.750	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			13.139.500	DINKES
1.02.2.2.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	413 Orang	964 Orang	17.839.200	10.000.000	147.858.750	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui			3.968.696.666	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.2.001.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2159 Orang	2198 Orang	142.655.000	214.180.000	213.389.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			130.124.500	DINKES
1.02.2.001.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4283 Orang	4283 Orang	146.799.800	334.699.800	48.362.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			72.967.500	DINKES
1.02.2.001.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000	73.781.550	66.180.550	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			55.000.000	DINKES
1.02.2.001.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	17 Dokumen	17 Dokumen	26.472.500	26.472.500	14.559.875	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			29.119.750	DINKES
1.02.2.001.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen	17 Dokumen	2.962.121.000	2.802.030.000	2.796.440.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.145.857.500	DINKES
1.02.2.001.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17 Dokumen	17 Dokumen	22.360.000	61.900.000	243.073.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.008.402.500	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17 Dokumen	17 Dokumen	305.860.000	994.657.000	529.357.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		313.691.667	DINKES	
1.02.2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17 Dokumen	17 Dokumen	182.589.200	313.574.000	313.574.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		200.848.120	DINKES	
1.02.2.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	7 Dokumen	106.600.000	160.386.200	144.075.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		117.260.000	DINKES	
1.02.2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17 Dokumen	17 Dokumen	881.297.800	689.960.000	654.110.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		703.162.723	DINKES	
1.02.2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	36033 Orang	36.958.300	0	169.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		3.989.503.333	DINKES	
1.02.2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	17 Dokumen	1.882.036.000	1.661.763.000	1.557.513.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		1.704.759.778	DINKES	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.02.2.002.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	21.185.966.970	18.158.911.700	28.418.911.700	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang KesehatanPendapatan Bagi Hasil Pajak RokokBantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		23.304.563.667	DINKES		
1.02.2.002.9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	46.430.000	46.430.000	12.967.250	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		51.073.000	DINKES		
1.02.2.003.2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	972.000.000	2.466.000.000	1.292.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		2.712.600.000	DINKES		
1.02.2.003.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen	17 Dokumen	3.316.489.000	4.424.938.200	4.789.605.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		3.551.247.845	DINKES		
1.02.2.003.4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	4 Dokumen	502.805.000	760.939.962	408.642.957	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		2.469.393.800	DINKES		
1.02.2.003.5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17 Unit	17 Unit	45.229.200	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		49.752.120	DINKES		
1.02.2.003.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	1 Laporan	1 Laporan	17.645.200	0	0	Kab. Soppeng, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	-	Memantapkan Kualitas		19.409.720	DINKES		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				
1.02.2.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1.732.739.250	1.732.739.250	1.546.502.450	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.906.013.175	DINKES
1.02.2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	741 Orang	741 Orang	119.550.000	151.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			131.235.000	DINKES
1.02.2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	938	0	29.325.000	162.975.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			36.731.667	DINKES
1.02.2.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	14869 Orang	0	0	42.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.876.860.000	DINKES
1.02.2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	17 Dokumen	17 Dokumen	119.690.000	96.840.000	96.840.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			128.836.223	DINKES
1.02.2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	17 Dokumen	17 Dokumen	1.076.500.000	238.205.000	238.205.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang			1.023.661.667	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	17 Dokumen	0	0	121.050.000	Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.865.685.000	DINKES
1.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	17 Dokumen	0	0	506.175.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.211.643.333	DINKES
1.02.2.02.0003	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100%	504.500.000	454.000.000	96.522.370			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			555.033.334	DINKES
1.02.2.02.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17 Dokumen	17 Dokumen	504.500.000	454.000.000	96.522.370	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			224.533.334	DINKES
1.02.2.02.0004	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki izin operasional	100%	100%	226.501.000	136.031.500	106.393.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			248.205.100	DINKES
1.02.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	2 Unit	38.260.000	38.260.000	26.932.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi			42.086.000	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.2.04.000.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	2.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			2.200.000	DINKES
1.02.2.2.04.000.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	20 Unit	20 Unit	165.381.000	86.911.500	69.600.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			181.919.100	DINKES
1.02.2.2.04.000.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.860.000	10.860.000	9.860.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			22.000.000	DINKES
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	100%	100%	2.582.798.200	2.760.274.450	1.582.094.450							2.870.778.020	
1.02.3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.736.198.250	1.880.597.450	702.417.450			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.939.518.075	DINKES
1.02.3.2.02.000.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 Orang	150 Orang	1.736.198.250	1.880.597.450	702.417.450	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.939.518.075	DINKES
1.02.3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan kompetensi	100%	100%	846.599.950	879.677.000	879.677.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis			931.259.945	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.03.000.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	230 Orang	230 Orang	846.599.950	879.677.000	879.677.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			931.259.945	DINKES
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	583.089.200	214.719.000	203.550.000							641.919.400	
1.02.04.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Izin	100%	100%	63.730.000	48.635.000	48.635.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		70.103.000	DINKES
1.02.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	63.730.000	48.635.000	48.635.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		70.103.000	DINKES
1.02.04.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi	100%	100%	40.515.200	28.320.000	20.976.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		45.000.000	DINKES
1.02.04.2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen	40.515.200	28.320.000	20.976.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		45.000.000	DINKES
1.02.04.3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan	100%	100%	126.859.000	93.325.500	93.325.500			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan	-		139.544.900	DINKES

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT									Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				
1 0 2 4	0 3 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	270 Dokumen	270 Dokumen	126.859.000	93.325.500	93.325.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		139.544.900	DINKES
1 0 2 4	0 4 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100%	100%	22.320.000	8.500.000	4.675.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		24.640.000	DINKES
1 0 2 4	0 4 4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	22.320.000	8.500.000	4.675.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		24.640.000	DINKES
1 0 2 4	0 6 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	100%	329.665.000	35.938.500	35.938.500			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		362.631.500	DINKES
1 0 2 4	0 6 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	270 Unit	270 Unit	329.665.000	35.938.500	35.938.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKE-Pengawasan Obat dan Makanan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		362.631.500	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100%	100%	390.881.000	363.594.800	343.507.800							417.096.856	
1.0.0.2.0.5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	18.300.000	92.000.000	77.700.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		20.000.000	DINKES
1.0.0.2.0.5.1.000.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen	17 Dokumen	18.300.000	92.000.000	77.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		20.000.000	DINKES
1.0.0.2.0.5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	74.470.000	0	0			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		81.900.000	DINKES
1.0.0.2.0.5.2.000.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	17 Dokumen	17 Dokumen	74.470.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		81.900.000	DINKES
1.0.0.2.0.5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	298.111.000	271.594.800	265.807.800			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		315.196.856	DINKES
1.0.0.2.0.5.3.000.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen	17 Dokumen	298.111.000	271.594.800	265.807.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya	-		235.196.856	DINKES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TOTAL							260.061.767.640	267.445.739.639	277.108.041.102			Manusia yang Unggul		334.393.580.305,00		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
							82.958.019.001	102.077.541.461	52.535.231.509					86.536.020.000		
1							82.958.019.001	102.077.541.461	52.535.231.509					86.536.020.000		
1	03						82.958.019.001	102.077.541.461	52.535.231.509					86.536.020.000		
1	03	01					11.392.287.810	11.983.554.761	11.629.187.109					16.412.370.000		
1	03	01	2.01				25.380.000	25.380.000	15.780.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.750.000	DPUPR
1	03	01	2.01	0001			6.600.000	6.600.000	5.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.500.000	DPUPR
1	03	01	2.01	0002			3.430.000	3.430.000	2.230.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	DPUPR
1	03	01	2.01	0003			4.150.000	4.150.000	2.550.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		4.250.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
1.03.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	11.200.000	11.200.000	5.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			16.000.000	DPUPR
1.03.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	9.868.032.110	9.913.238.761	10.047.958.109			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		14.239.870.000	DPUPR
1.03.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	9.850.032.110	9.889.988.761	10.032.208.109	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			14.182.370.000	DPUPR
1.03.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	13.000.000	13.000.000	9.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.031.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000	10.250.000	6.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		47.500.000	DPUPR		
1.031.2.000.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	1.440.000	1.440.000	1.440.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.000.000	DPUPR		
1.031.2.000.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1.440.000	1.440.000	1.440.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.000.000	DPUPR		
1.031.2.000.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	4.042.500	4.042.500	4.042.500			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.250.000	DPUPR		
1.031.2.000.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.042.500	4.042.500	4.042.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.250.000	DPUPR		
1.031.2.000.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	2.640.000	2.640.000	2.640.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	DPUPR		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.031.2.000.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	1.320.000	1.320.000	1.320.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.500.000	DPUPR	
1.031.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	1.320.000	1.320.000	1.320.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.500.000	DPUPR	
1.031.2.000.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	441.685.450	680.575.300	506.793.300			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			603.000.000	DPUPR	
1.031.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.000.000	6.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			12.000.000	DPUPR	
1.031.2.000.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.000.000	8.000.000	2.998.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.000.000	DPUPR	
1.031.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	44.250.000	44.250.000	31.850.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.000.000	DPUPR	
1.031.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.500.000	25.500.000	18.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			27.000.000	DPUPR	
1.031.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	51.453.670	48.258.220	32.217.720	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			78.000.000	DPUPR	
1.031.2.000.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	80 Laporan	7.491.580	7.503.280	7.503.280	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			12.000.000	DPUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.01.2.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1100 Laporan	1100 Laporan	283.990.200	526.063.800	395.623.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif			400.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0017	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi proses pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	18.200.000	160.085.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		100.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27 Unit	18.200.000	160.085.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			100.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	768.713.200	812.613.200	724.413.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		850.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	140.000.000	183.900.000	192.300.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			150.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	628.713.200	628.713.200	532.113.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			700.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.0019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	262.154.550	383.540.000	326.120.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		566.500.000	DPUPR	
1.03.01.2.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	35.000.000	34.965.000	34.965.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			39.000.000	DPUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kel/Desa			yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
1.03.01.2.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	26 Unit	112.200.000	112.185.300	92.185.300	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		225.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	5 Unit	82.800.000	82.849.700	69.849.700	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		260.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	34 Unit	19.404.550	33.540.000	21.120.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	DPUPR	
1.03.01.2.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12.750.000	120.000.000	108.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.500.000	DPUPR	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		0,41 0,82	11.410.275.350	7.797.327.260	694.619.228						2.406.050.000		
1.03.02.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	460,9 Ha	460,9 Ha	1.142.750.000	1.580.164.400	172.800.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Sungai di Kabupaten Soppeng		1.935.000.000	DPUPR
1.03.02.1.009	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 KM	0,2 KM	92.380.000	122.380.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		350.000.000	DPUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.5 KM	0.1 KM	920.999.600	1.328.414.000	155.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Masyarakat			1.200.000.000	DPUPR
1.03.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.2 KM	0.2 KM	100.000.000	100.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			350.000.000	DPUPR
1.03.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	29.370.400	29.370.400	17.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			35.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.2.2.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	7569 Ha	7569 Ha	10.267.525.350	6.217.162.860	521.819.228			berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.03.2.2.008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6 KM	3 KM	9.874.942.000	5.822.424.072	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Petani Pengguna Air Irigasi		471.050.000	DPUPR
1.03.2.2.002	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,2 KM	0,2 KM	130.255.562	128.411.000	261.819.228	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			150.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.02.2.003.2	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	50 DI	50 DI	213.000.000	213.000.000	210.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				211.050.000	DPUPR	
1.03.02.2.003.4	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Lembaga	5 Lembaga	49.327.788	53.327.788	50.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000	DPUPR	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah	100 %	100 %	800.375.000	1.250.375.000	0							950.000.000		
1.03.03.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	1 Unit	1 Unit	800.375.000	1.250.375.000	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Pengguna Air Bersih		950.000.000	DPUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		100.000.000	DPUPR
1.03.02.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	40 Liter/Detik	40 Liter/Detik	300.000.000	300.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		350.000.000	DPUPR
1.03.02.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	250 SR	250 SR	400.375.000	850.375.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat pembangunan sumber daya	Memperkuat pembangunan sumber daya	Memantapkan Kualitas Infrastruktur		500.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						Semua Kel/Desa		manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
1	034	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	68,00 %	260.000.000	260.000.000	0							300.000.000	
1	0341	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	14	260.000.000	260.000.000	0			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Soppeng		300.000.000	DPUPR
1	03410017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Unit	1 Unit	260.000.000	260.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			300.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2.0	003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	100 %	2,40%	688.800.000	4.218.041.600	4.210.181.000						1.029.600.000	
1	0	0	2.0	003	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan	316 Unit	316 Unit	688.800.000	4.218.041.600	4.210.181.000		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Soppeng		1.029.600.000	DPUPR
1	0	0	2.0	003	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	121.800.000	195.810.600	187.950.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		129.600.000	DPUPR
1	0	0	2.0	003	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	60 Rumah Tangga	225 Rumah Tangga	567.000.000	4.022.231.000	4.022.231.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		900.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	57 %	56,50%	452.550.000	472.550.000	0				perempunan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			350.000.000	
1.03.06.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan	0,4 Km	0,4 Km	452.550.000	472.550.000	0			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Drainase Permukiman		350.000.000	DPUPR
1.03.06.1.002.9	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	102.550.000	122.550.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			200.000.000	DPUPR
1.03.06.1.003.0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan ,	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			150.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	0 3 8	0 8								mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				5.330.000.000						
1	0 3 8	0 8	2.0 1		002 1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	0,70 %	70%	5.487.350.000	14.395.200.000	4.747.500.000				5.330.000.000	DPUPR			
						Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,0024	0,0024	5.487.350.000	14.395.200.000	4.747.500.000								
1	0 3 8	0 8	2.0 1	002 1		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6 Dokumen	5.164.950.000	14.072.800.000	4.605.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Gedung Daerah serta Masyarakat Pemohon Perizinan Bangunan		5.000.000.000	DPUPR
1	0 3 8	0 8	2.0 1	002 3		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	200 Dokumen	200 Dokumen	322.400.000	322.400.000	142.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan ,	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		330.000.000	DPUPR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
1	039	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 %	30 %	216.785.000	716.785.000	4.895.000.000						7.000.000.000		
1	0391	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang bangunan dan lingkungannya ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	216.785.000	716.785.000	4.895.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Bangunan dan Lingkungan		7.000.000.000	DPUPR
1	03910008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	5 Kawasan	3 Kawasan	216.785.000	716.785.000	4.895.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		7.000.000.000	DPUPR	
1	030	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	60,5 %	60%	50.919.054.191	59.235.018.140	25.729.004.272						51.640.000.000		
1	0301	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara kabupaten	17 Km	17 Km	50.919.054.191	59.235.018.140	25.729.004.272			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Jalan Kabupaten		51.640.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01.003	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	3 Jembatan	2 Jembatan	5.660.349.500	7.870.069.000	8.584.300.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				15.000.000.000	DPUPR
1.03.01.003	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	0,2 KM	0	0	764.999.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			1.000.000.000	DPUPR
1.03.01.003	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	106.800.000	173.669.400	174.335.124	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			120.000.000	DPUPR
1.03.01.004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	967 KM	967 KM	150.000.000	145.373.500	100.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)DAU yang	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Memantapkan Kualitas Infrastruktur			150.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								Semua Kel/Desa	Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat					
1.03.01.004	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8 KM	8 KM	44.667.404.691	50.178.148.000	15.590.707.700	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Sawit DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			35.000.000.000	DPUPR	
1.03.01.004	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	10 KM	334.500.000	867.758.240	514.662.448	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			370.000.000	DPUPR	
1.03.01	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0,40	0,45%	344.733.900	445.022.050	235.013.150								365.000.000	
1.03.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih	100 Orang	100 Orang	111.850.000	222.820.000	127.640.000				Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Memantapkan Kualitas Lingkungan	Tenaga Konstruksi		120.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.2.001.6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	80 Orang	80 Orang	111.850.000	222.820.000	127.640.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hidup Secara Berkelanjutan			120.000.000	DPUPR
1.03.1.2.001.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	63.730.300	51.263.450	36.985.150			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Jasa Konstruksi		65.000.000	DPUPR
1.03.1.2.001.3	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	63.730.300	51.263.450	36.985.150	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan			65.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0312									lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Masyarakat					
1	0314	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	169.153.600	170.938.600	70.388.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Jasa Konstruksi		180.000.000	DPUPR
1	0316	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	30 Lembaga	30 Lembaga	169.153.600	170.938.600	70.388.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		180.000.000	DPUPR	
1	032	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	47 %	100%	985.807.750	1.303.667.650	394.726.750						753.000.000		
1	0321	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	347.738.300	169.354.800			Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Memantapkan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Soppeng		150.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Ruang (RRTR) Kab yang disusun								dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
1.03.12.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	347.738.300	169.354.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			150.000.000	DPUPR
1.03.12.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	650.000.000	600.000.000	0			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Soppeng		500.000.000	DPUPR
1.03.12.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	600.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan			500.000.000	DPUPR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Masyarakat				
1.03.1.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	2 Dokumen	1 Dokumen	48.083.750	150.022.150	88.332.150			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Soppeng		65.000.000	DPUPR
1.03.1.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	48.083.750	150.022.150	88.332.150	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			65.000.000	DPUPR
1.03.1.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	137.724.000	205.907.200	137.039.800			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Soppeng		38.000.000	DPUPR

Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	032001	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	137.724.000	205.907.200	137.039.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
										Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			38.000.000	DPUPR	
TOTAL							82.958.019.001	102.077.541.461	52.535.231.509					86.536.020.000		
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.676.276.104	3.676.276.104	3.081.701.229							5.439.099.601		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.673.926.104	3.673.926.104	3.079.351.229							5.436.749.601		
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.673.926.104	3.673.926.104	3.079.351.229							5.436.749.601		
1	041	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	2.671.176.104	2.671.176.104	2.526.601.229						4.244.394.601		
1	0411	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	7.800.000	7.800.000	7.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		10.180.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01.2.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.290.000	DPERKIM
1.04.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.700.000	3.700.000	3.700.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.890.000	DPERKIM
1.04.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.857.067.904	1.857.067.904	1.925.693.029			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.327.285.000	DPERKIM
1.04.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.851.542.904	1.851.542.904	1.920.168.029	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.321.760.000	DPERKIM
1.04.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.025.000	4.025.000	4.025.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.025.000	DPERKIM
1.04.01.2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	312.231.171	312.231.171	167.131.171			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		368.834.530	DPERKIM
1.04.01.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.196.264	5.196.264	2.574.560	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.196.450	DPERKIM
1.04.01.2.000.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.009.500	4.009.500	2.992.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.012.200	DPERKIM
1.04.01.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	33.220.000	33.220.000	23.220.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			37.708.230	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.499.357	15.499.357	9.534.261	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.180.000	DPERKIM
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34.376.050	34.376.050	21.495.350	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			53.637.650	DPERKIM
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 Laporan	260 Laporan	219.930.000	219.930.000	107.315.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			253.100.000	DPERKIM
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	37.100.000	37.100.000	36.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		76.175.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.04.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit	37.100.000	37.100.000	36.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		76.175.000	DPERKIM		
1.04.01.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	360.577.029	360.577.029	324.077.029			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	365.520.071	DPERKIM		
1.04.01.2.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.343.829	50.343.829	50.343.829	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		57.686.871	DPERKIM		
1.04.01.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	310.233.200	310.233.200	273.733.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		307.833.200	DPERKIM		
1.04.01.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	96.400.000	96.400.000	65.300.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.400.000	DPERKIM		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.04.01.2.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	52.590.000	52.590.000	47.590.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			49.100.000	DPERKIM	
1.04.01.2.000.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13 Unit	11.410.000	11.410.000	8.210.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			11.410.000	DPERKIM	
1.04.01.2.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	32.400.000	32.400.000	9.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			35.890.000	DPERKIM	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemenuhan kabupaten/ kota	100 %100 %	100 %100 %	234.105.000	234.105.000	235.055.000							329.810.000		
1.04.02.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (dok)	2 Dokumen	2 Dokumen	103.085.000	103.085.000	104.035.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat yang terkena korban bencana			103.085.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.085.000	3.085.000	3.085.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				3.085.000	DPERKIM
1.04.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.950.000	Kab. Soppeng, Lirililau, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			100.000.000	DPERKIM
1.04.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun dan direhab	32 Unit	15 Unit	124.295.000	124.295.000	124.295.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya	Masyarakat yang terkena korban bencana		220.000.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.2.03.000.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	32 Unit Rumah	15 Unit Rumah	124.295.000	124.295.000	124.295.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Citta, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lilinlau, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Mariorawa, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Marionwawo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Unggul			220.000.000	DPERKIM
1.04.2.03.000.6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)	100 %	100 %	6.725.000	6.725.000	6.725.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pengembang Perumahan/Developer		6.725.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.042.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	6.725.000	6.725.000	6.725.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.725.000	DPERKIM
1.043	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan di bawah 10 Ha yang ditangani	1.13 %	1.13 %	162.995.000	162.995.000	163.145.000							185.495.000	
1.0431	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (rekomendasi)	100 %	100 %	5.100.000	5.100.000	5.100.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penanganan Kumuh dan Stunting		5.100.000	DPERKIM
1.0431	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	5.100.000	5.100.000	5.100.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			5.100.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.043.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah/luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditata (Kawasan/ Ha)	100 %	100 %	2.595.000	2.595.000	2.595.000			an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				2.595.000	DPERKIM
1.043.2.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.595.000	2.595.000	2.595.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			2.595.000	DPERKIM
1.043.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah/luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	100 %	100 %	155.300.000	155.300.000	155.450.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan an agromaritim industri di	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam kawasan kumuh		177.800.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.043.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	155.300.000	155.300.000	155.450.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Alokasi Umum (DAU)	sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			177.800.000	DPERKIM
1.044	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	93.44 %	93.44 %	154.550.000	154.550.000	154.550.000							177.050.000	
1.044.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Di Luar Kawasan Kumuh	100 %	100 %	154.550.000	154.550.000	154.550.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di luar kawasan kumuh		177.050.000	DPERKIM
1.044.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	154.550.000	154.550.000	154.550.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			177.050.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.37 %	42.37 %	451.100.000	451.100.000	0			industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				500.000.000	
1.04.5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang dibangun/ rehab (kawasan)	1 Paket	0 Paket	451.100.000	451.100.000	0			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		500.000.000	DPERKIM
1.04.5.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	0 Lokasi	451.100.000	451.100.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung, Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			500.000.000	DPERKIM
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.350.000	2.350.000	2.350.000							2.350.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.350.000	2.350.000	2.350.000							2.350.000	
2.10.4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100 %	100 %	2.350.000	2.350.000	2.350.000							2.350.000	
2.10.4.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	100 Persen	100 Persen	2.350.000	2.350.000	2.350.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Memantapkan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat yang terlibat sengketa tanah milik Pemerintah		2.350.000	DPERKIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Kabupaten yang diselesaikan								dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan ; mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat						
2	1 0 4	2.0 1 4	000 4	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.350.000	2.350.000	2.350.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan ; mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2.350.000	DPERKIM
TOTAL								3.676.276.104	3.676.276.104	3.081.701.229						5.439.099.601	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				11.596.975.848	11.841.318.129	11.605.448.511						15.885.701.950	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.596.975.848	11.841.318.129	11.605.448.511						15.885.701.950	
1	0 5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.596.975.848	11.841.318.129	11.605.448.511						15.885.701.950	
1	0 5	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	5.411.305.051	5.648.700.603	5.623.785.985						7.957.183.450	
1	0 5	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu;	100% 100% 100%	100% 100% 100%	36.100.000	86.100.000	79.400.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi	ASN dan Staf SatpolPP&PMK	84.000.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persensitase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu								pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				
1.05.1.1.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.1.1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	5.500.000	800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.1.1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.100.000	10.100.000	8.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.1.1.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	15.000.000	65.000.000	65.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			36.750.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100%	100%	4.187.421.051	4.235.782.034	4.322.548.416			Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Kualitas Pelayanan	ASN dan Staf SatpolPP&PMK		5.824.376.250	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	4.161.821.051	4.210.182.034	4.293.948.416	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.796.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.01.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	48 Dokumen	14.800.000	14.800.000	14.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	48 Dokumen	10.800.000	10.800.000	13.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			17.876.250	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.01.2.000.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	10.800.000	10.800.000	10.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN dan Staf SatpolPP&PMK		15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1 0 5 1 3 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1 0 5 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	40.800.000	24.862.000	25.462.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN dan Staf SatpolPP&PMK	66.675.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1 0 5 1 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		45.675.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1 0 5 1 5 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000	24.862.000	25.462.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		21.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1 0 5 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	268.155.000	476.337.975	421.972.975			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN dan Staf SatpolPP&PMK	281.364.250	SATPOL PP & DAMKAR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.204.000	20.980.000	20.980.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.964.200	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.01.2.000.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000	4.795.000	4.795.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.01.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.000.000	39.732.400	39.732.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		42.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.01.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29.000.000	59.800.000	54.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		30.450.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.01.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	91.841.000	72.912.000	105.312.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui		96.433.050	SATPOL PP & DAMKAR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.051.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.250.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.051.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	72.110.000	273.118.575	191.353.575	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			75.517.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.051.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	95.000.000	28.416.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN dan Staf SatpolPP&PMK		873.337.500	SATPOL PP & DAMKAR
1.051.200.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			735.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.051.200.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	25.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang			26.250.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	50.000.000	28.416.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			112.087.500	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.01.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	104.000.000	138.740.094	138.740.094			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN dan Staf SatpolPP&PMK		109.200.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.01.2.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	104.000.000	138.740.094	138.740.094	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			109.200.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.01.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	669.029.000	647.662.500	624.862.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	ASN dan Staf SatpolPP&PMK		702.480.450	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.05.01.2.000.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	118.278.000	118.278.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		52.500.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.01.2.000.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	32 Unit	600.000.000	520.284.500	480.284.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		630.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.01.2.000.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14 Unit	19.029.000	9.100.000	26.300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		19.980.450	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas;Persentase cakupan perlindungan masyarakat;Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	100%100%	40%100%100%50%	2.908.438.763	3.079.799.126	2.846.674.126						4.515.210.000		
1.05.02.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	2.836.017.966	2.899.441.200	2.671.566.200			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Soppeng		4.429.908.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.052.01.000.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.052.01.000.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	19.950.000	14.875.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		18.900.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.052.01.000.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	309 Orang	309 Orang	2.652.217.966	2.708.691.200	2.445.891.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		4.169.418.750	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.05.2.01.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000	45.800.000	45.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	71.000.000	61.000.000	71.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			74.550.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.2.01.001	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	64.000.000	64.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi			74.550.000	SATPOL PP & DAMKAR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul								
1	0 5	0 2	2.0 1	001 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	20.000.000	0	30.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		60.989.250	SATPOL PP & DAMKAR	
1	0 5	0 2	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	55%	40%	66.920.797	164.857.926	164.857.926			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Soppeng		69.510.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.05.2.2.001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	15.550.000	15.550.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.2.2.001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	41.920.797	12.800.000	12.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		43.260.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.2.2.001	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	136.507.926	136.507.926	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang terbina	100%	100%	5.500.000	15.500.000	10.250.000			generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PPNS Kabupaten Soppeng		15.792.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	2 Laporan	5.500.000	15.500.000	10.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.792.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran; Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	100% 100%	100% 100%	3.277.232.034	3.112.818.400	3.134.988.400							3.413.308.500	
1.05.4.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah; Persentase Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dalam Daerah/kota;	100% 100%	100% 100%	3.185.732.034	3.112.818.400	3.134.988.400			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya	Masyarakat Kabupaten Soppeng		3.312.508.500	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.054.2.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	3.134.732.034	3.026.174.400	2.295.674.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Unggul			3.258.958.500	SATPOL PP & DAMKAR
1.054.2.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	51.200.000	51.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.750.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.054.2.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam	20 Orang	20 Orang	20.000.000	20.000.000	16.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang			21.000.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran								(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul								
1	0 5	0 4	2.0 1	001 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	4 Unit	16.000.000	15.444.000	772.114.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		16.800.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1	0 5	0 4	2.0 2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen laporan penilaian peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	-	5.500.000	0	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tempat Usaha, Perkantoran, Perumahan dan Sarana Publik di Kabupaten Soppeng		10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.05.04.2.000.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	-	5.500.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-		10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.04.3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen laporan investigasi kejadian kebakaran	1 Dokumen	-	10.000.000	0	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Soppeng	10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR	
1.05.04.3.000.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	-	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.04.2.0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahankebakaran	5 Desi/Kel	-	25.000.000	0	0			generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1.05.04.2.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	70 Desa/Kelurahan	70 Desa/Kelurahan	25.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Soppeng		26.250.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.05.04.2.0005	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	-	51.000.000	0	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Soppeng		53.550.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.054.2.000.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			22.050.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.054.2.000.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			10.500.000	SATPOL PP & DAMKAR
1.054.2.000.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	20 Unit	20 Unit	20.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			21.000.000	SATPOL PP & DAMKAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTAL					11.596.975.848	11.841.318.129	11.605.448.511				kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			15.885.701.950			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
					3.052.906.626	3.475.232.626	3.355.159.844							5.374.249.021			
1					3.052.906.626	3.475.232.626	3.355.159.844							5.374.249.021			
1	05				3.052.906.626	3.475.232.626	3.355.159.844							5.374.249.021			
1	051													3.437.949.021			
1	051	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	16.390.000	31.690.000	40.208.575			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	74.000.000	BPBD
1	051	2.001	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.740.000	17.040.000	19.540.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	22.000.000	BPBD
1	051	2.011	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.200.000	2.450.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	15.000.000	BPBD
1	051	2.011	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.200.000	2.450.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	12.000.000	BPBD
1	051	2.011	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	12.250.000	12.250.000	15.768.575	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	25.000.000	BPBD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.05.01.2.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.688.144.228	1.695.344.226	1.728.571.444				-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		1.915.947.521	BPBD
1.05.01.2.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.680.844.228	1.680.844.226	1.715.371.444	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		1.896.516.821	BPBD	
1.05.01.2.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	125 Dokumen	3.800.000	11.000.000	8.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		15.062.700	BPBD	
1.05.01.2.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	2.400.000	3.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		2.990.000	BPBD	
1.05.01.2.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		1.378.000	BPBD	
1.05.01.5.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.470.000	7.500.000	4.000.000			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		39.000.000	BPBD	
1.05.01.5.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.520.000	7.500.000	4.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		15.000.000	BPBD	
1.05.01.5.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.350.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		12.000.000	BPBD	
1.05.01.5.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	2.600.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		12.000.000	BPBD	
1.05.01.6.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	256.878.198	243.756.950	267.238.375			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		690.645.000	BPBD	
1.05.01.6.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	716.000	716.000	716.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		2.700.000	BPBD	
1.05.01.6.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.380.100	4.349.800	4.349.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		18.000.000	BPBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.051.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.613.548	23.427.600	10.378.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		25.870.000	BPBD		
1.051.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	84.868.550	63.613.550	31.143.775	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		170.000.000	BPBD		
1.051.2.000.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.300.000	1.650.000	1.650.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		15.250.000	BPBD		
1.051.2.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	150.000.000	150.000.000	219.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		458.825.000	BPBD		
1.051.2.000.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	100 %	326.862.400	434.238.400	421.038.400			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-	365.181.500	BPBD		
1.051.2.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.000.000	37.000.000	37.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		70.181.500	BPBD		
1.051.2.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	289.862.400	397.238.400	384.038.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		295.000.000	BPBD		
1.051.2.000.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100.115.000	103.952.480	87.852.480			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-	165.675.000	BPBD		
1.051.2.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.000.000	33.750.000	33.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		65.000.000	BPBD		
1.051.2.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	50.000.000	49.940.000	41.440.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		50.000.000	BPBD		
1.051.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	12.000.000	17.010.000	9.410.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	-		35.675.000	BPBD		
1.051.2.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.115.000	3.252.480	3.252.480	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		15.000.000	BPBD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.05.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana; Persentase penanganan tanggap darurat bencana; Persentase penanganan pasca bencana;	100% 100% 79.44%	100% 100% 100%	659.046.800	958.750.570	806.250.570							1.936.300.000		
1.05.3.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan Informasi Rawan Bencana	1 layanan	1 layanan	25.200.000	346.227.520	341.227.520			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		400.000.000	BPBD	
1.05.3.1.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	800 Orang	800 Orang	25.200.000	30.077.520	25.077.520	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		100.000.000	BPBD	
1.05.3.1.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	316.150.000	316.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		300.000.000	BPBD	
1.05.3.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6 layanan	6 layanan	533.920.000	533.720.000	394.720.000			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		1.175.800.000	BPBD	
1.05.3.2.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	55 Orang	55 Orang	533.920.000	533.720.000	394.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		700.800.000	BPBD	
1.05.3.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 layanan	4 layanan	96.000.000	74.876.250	66.376.250			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		310.500.000	BPBD	
1.05.3.3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	38.400.000	20.900.000	12.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		60.500.000	BPBD	
1.05.3.3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	57.600.000	53.976.250	53.976.250	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		250.000.000	BPBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.05.3.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.	75 %	75 %	3.926.800	3.926.800	3.926.800				-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		50.000.000	BPBD
1.05.3.4.001.5	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	3.926.800	3.926.800	3.926.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		50.000.000	BPBD
TOTAL					3.052.906.626	3.475.232.626	3.355.159.844						5.374.249.021		
DINAS SOSIAL															
1.06.1.1.000.1	DINAS SOSIAL				5.931.361.579	5.955.094.016	4.938.500.821							8.066.579.000	
1.06.1.1.000.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.931.361.579	5.955.094.016	4.938.500.821							8.066.579.000	
1.06.1.1.000.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.931.361.579	5.955.094.016	4.938.500.821							8.066.579.000	
1.06.1.1.000.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial	100 %	100 %	3.345.407.579	3.687.034.016	3.518.688.621							5.411.579.000	
1.06.1.1.000.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	98.450.000	79.280.000	13.214.600				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	DINSOS
1.06.1.1.000.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	31.000.000	34.600.000	10.000.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	DINSOS
1.06.1.1.000.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.000	20.000.000	1.000.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	DINSOS
1.06.1.1.000.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000	11.000.000	1.000.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	DINSOS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.06.01.2.000.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	13.680.000	1.213.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	DINSOS	
1.06.01.2.000.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.221.040.178	2.597.170.480	2.696.947.285			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.954.079.000	DINSOS	
1.06.01.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.177.540.178	2.537.870.480	2.641.147.285	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.929.079.000	DINSOS	
1.06.01.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	500 Dokumen	3.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.000.000	DINSOS	
1.06.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000	27.800.000	27.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	DINSOS	
1.06.01.2.000.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	13.500.000	11.500.000	8.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	DINSOS	
1.06.01.3.000.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah	100 %	100 %	9.000.000	9.900.000	9.900.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.000.000	DINSOS	
1.06.01.3.000.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	9.000.000	9.900.000	9.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			9.000.000	DINSOS	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.061.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	103.510.000	135.110.000	41.110.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Akuntabel dan Inovatif				
1.061.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket	0	75.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			61.900.000	DINSOS
1.061.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	63.000.000	19.600.000	19.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	DINSOS
1.061.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.510.000	25.510.000	6.510.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	DINSOS
1.061.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	32 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	DINSOS
1.061.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhannya administrasi umum	100 %	100 %	432.048.150	298.426.100	199.659.300			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			543.000.000	DINSOS
1.061.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.590.000	3.795.000	3.795.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	DINSOS
1.061.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000	4.010.000	4.010.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	DINSOS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.06.01.2.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	2.400.000	10.710.900	10.710.900	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70000 Paket	70000 Paket	25.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	49.997.500	50.447.500	64.397.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		75.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	15.060.650	5.170.700	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		75.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	302.000.000	215.092.000	107.546.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		300.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	4.200.000	4.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	40.300.000	12.090.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	80.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	40.300.000	12.090.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		80.000.000	DINSOS		
1.06.01.2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	164.865.357	245.885.200	243.485.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	-	350.000.000	DINSOS		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.1.2.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	69.865.357	69.580.000	99.580.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		100.000.000	DINSOS	
1.06.1.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	95.000.000	176.305.200	143.905.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		250.000.000	DINSOS	
1.06.1.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	276.193.894	309.172.236	314.372.236			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		373.600.000	DINSOS	
1.06.1.2.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	221.623.894	191.842.236	174.842.236	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		250.000.000	DINSOS	
1.06.1.2.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6 Unit	24.570.000	17.670.000	9.870.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	DINSOS	
1.06.1.2.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	0	69.660.000	99.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		48.600.000	DINSOS	
1.06.1.2.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2500 Unit	2500 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	DINSOS	
1.06.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial;Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan	100%	100%100%100%100%100%	185.800.000	109.000.000	109.440.000						85.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA; Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar; Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial; Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial;	100 %	100 %	185.800.000	109.000.000	109.440.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		85.000.000	DINSOS
1.06.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	10.000.000	43.100.000	44.520.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	-		15.000.000	DINSOS	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.2.03.000.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	62.400.000	65.900.000	64.920.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			70.000.000	DINSOS
1.06.2.03.000.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Keluarga	35 Keluarga	17.500.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DINSOS
1.06.2.03.000.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Lembaga	42 Lembaga	65.900.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DINSOS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.062.03.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	10 Sertifikat	30.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				0	DINSOS	
1.064	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya; Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas; Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Indeks Peranan Sosial;	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 41% 45% 70%	274.900.000	249.620.000	248.675.200							310.000.000		
1.064.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	173 jiwa	173 jiwa	214.900.000	247.120.000	246.675.200			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan	-		285.000.000	DINSOS	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.064.2.000.1	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Luar Panti Sosial yang direhabilitasi									Ekonomi Masyarakat				
1.064.2.000.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	366 Orang	366 Orang	112.500.000	114.220.000	110.855.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			120.000.000	DINSOS
1.064.2.000.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	0	39.450.000	39.450.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			10.000.000	DINSOS
1.064.2.000.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	0	25.000.000	25.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			35.000.000	DINSOS
1.064.2.000.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	93 Orang	93 Orang	25.000.000	1.750.000	13.170.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			25.000.000	DINSOS
1.064.2.000.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	31.200.000	38.500.000	36.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			35.000.000	DINSOS
1.064.2.000.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	31.200.000	24.700.000	22.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			35.000.000	DINSOS
1.064.2.001.2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	15.000.000	3.500.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			25.000.000	DINSOS
1.064.2.002	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	2500 Orang	2500 Orang	60.000.000	2.500.000	2.000.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			25.000.000	DINSOS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1.06.04.2.000.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	10.000.000	2.500.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25.000.000	DINSOS		
1.06.04.2.000.3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	64 Orang	64 Orang	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DINSOS		
1.06.04.2.000.6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DINSOS		
1.06.04.2.000.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	29 Orang	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	DINSOS		
1.06.04.2.001.0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	2500 Orang	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DINSOS		
1.06.04.2.001.3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	10.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	DINSOS		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar;Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi;Persentase pelaksanaan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin;Peningkatan indeks kebutuhan dasar;Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi;Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan;	100%	100%100%100%71,99%70%100%	1.973.394.000	1.764.490.000	886.030.000						2.065.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1.06.5.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dipelihara ²	197 orang	197 orang	65.000.000	8.750.000	8.250.000				-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		65.000.000	DINSOS
1.06.5.1.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	15.000.000	3.750.000	3.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		15.000.000	DINSOS
1.06.5.1.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	25.000.000	2.500.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	DINSOS
1.06.5.1.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	185 Orang	185 Orang	25.000.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25.000.000	DINSOS
1.06.5.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	26764 KK	26764 KK	1.908.394.000	1.755.740.000	877.780.000				-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		2.000.000.000	DINSOS
1.06.5.2.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	26764 Orang	26764 Orang	20.000.000	20.500.000	20.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		30.000.000	DINSOS
1.06.5.2.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	15.600.000	25.800.000	25.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		20.000.000	DINSOS
1.06.5.2.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan	1462 Keluarga	1462 Keluarga	1.872.794.000	1.649.440.000	801.480.000	Semua Kota/Kab, Semua	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur		1.800.000.000	DINSOS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat							
1	0 6	0 5	2.0 2	000 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0	60.000.000	30.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		150.000.000	DINSOS
1	0 6	0 6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya; Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial;	100%	100% 100% 100%	116.860.000	95.360.000	120.083.000						145.000.000	
1	0 6	0 6	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	3283 jiwa	3283 jiwa	46.860.000	65.360.000	90.083.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	70.000.000	DINSOS
1	0 6	0 6	2.0 1	000 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	46.860.000	65.360.000	90.083.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	DINSOS
1	0 6	0 6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna siaga Bencana yang diberdayakan	17 Orang	17 Orang	70.000.000	30.000.000	30.000.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	75.000.000	DINSOS
1	0 6	0 6	2.0 2	000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	70.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		75.000.000	DINSOS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	35.000.000	49.590.000	55.584.000							50.000.000	
1.06.7.2.0.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	1 TMP	1 TMP	35.000.000	49.590.000	55.584.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		50.000.000	DINSOS
1.06.7.2.0.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	35.000.000	49.590.000	55.584.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.000.000	DINSOS
TOTAL							5.931.361.579	5.955.094.016	4.938.500.821					7.981.579.000	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.672.959.692	10.315.979.692	10.383.659.246							9.232.691.728	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.672.959.692	10.315.979.692	10.383.659.246							9.232.691.728	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.152.002.692	5.848.305.692	5.960.985.246							4.609.842.728	
2.08.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capain Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	100 %	100 %	3.634.202.692	3.634.202.692	3.766.029.246							4.148.842.728	
2.08.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 % 100 % 100 %	100%	37.750.000	37.750.000	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Data Perencanaan dan Evaluasi		23.547.600	DP3APPKB
2.08.1.1.000.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	4.400.000	4.400.000	4.720.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208012	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1.960.000	1.960.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	DP3APPKB	
208013	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2.640.000	2.640.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.640.000	DP3APPKB	
208016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	28.750.000	28.750.000	28.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.907.600	DP3APPKB	
20802	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan	100 %	100 %	3.083.452.092	3.083.452.092	3.132.206.646			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Data Realisasi Keuangan		3.046.081.062	DP3APPKB
208021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.043.552.092	3.043.552.092	3.111.231.646	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			3.040.441.062	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	5.750.000	5.750.000	3.475.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif			5.640.000	DP3APPKB
2.08.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	34.150.000	34.150.000	17.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0		DP3APPKB
2.08.01.2.000.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	14.520.000	14.520.000	7.320.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Data Barang Milik Daerah		15.547.000	DP3APPKB
2.08.01.2.000.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	14.520.000	14.520.000	7.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			15.547.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	081205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	100 %	100 %	38.620.000	38.620.000	30.432.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Akuntabel dan Inovatif			
2	0812050003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	63 Dokumen	24 Dokumen	38.620.000	38.620.000	30.432.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN DP3AP2KB	17.385.000	DP3APPKB
2	081206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	153.642.000	153.640.300	183.472.692			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN DP3AP2KB	366.107.966	DP3APPKB
2	0812060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	3.360.000	3.358.300	3.358.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.883.525	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	0 8 1 6 4	000	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	3.600.000	3.450.000	3.450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	DP3APPKB
2	0 8 1 6 5	000	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	4.620.000	4.770.000	4.770.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	DP3APPKB
2	0 8 1 6 7	000	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	62.062.000	62.062.000	61.018.700	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		66.328.600	DP3APPKB
2	0 8 1 6 9	000	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	24 Laporan	80.000.000	80.000.000	110.875.692	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		293.895.841	DP3APPKB
2	0 8 1 7		2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	0	0	105.280.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	ASN DP3AP2KB	100.000.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	0	0	105.280.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			100.000.000	DP3APPKB
2.08.01.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	231.780.300	231.780.300	179.594.908			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN DP3AP2KB		193.595.600	DP3APPKB
2.08.01.2.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 0	12 Laporan	64.400.000	64.400.000	62.334.308	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			64.270.000	DP3APPKB
2.08.01.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	167.380.300	167.380.300	117.260.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			129.325.600	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
20819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	74.438.300	74.440.000	94.253.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN DP3AP2KB		386.578.500	DP3APPKB
208191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	1 Unit	31.927.500	31.929.200	31.929.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		34.272.500	DP3APPKB	
208192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	68 Unit	29.138.300	29.138.300	48.951.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		44.846.000	DP3APPKB	
208196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	15 Unit	9.440.000	9.440.000	9.440.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.460.000	DP3APPKB	
208199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.932.500	3.932.500	3.932.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		300.000.000	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2082	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan;	93,75 % 14,45 %	40% 50%	15.600.000	15.600.000	28.478.000				narkoba, judi, dan penyeludupan.			27.500.000	
20821	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	3,25 %	3,25 %	0	0	12.878.000				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Perangkat daerah	27.500.000	DP3APPKB
208210006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	138 Orang	68 Orang	0	0	12.878.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		27.500.000	DP3APPKB	
20822	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %	9.225.000	9.225.000	9.225.000				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Organisasi Perempuan/Masyarakat Perempuan	0	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.2.2.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Organisasi	26 Organisasi	9.225.000	9.225.000	9.225.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				0	DP3APPKB
2.08.2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan yang terbina	100 %	100 %	6.375.000	6.375.000	6.375.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Penyedia Layanan Perempuan		0	DP3APPKB
2.08.2.3.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	12 Lembaga	6.375.000	6.375.000	6.375.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi			0	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
										pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			104.789.000			
2	083		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0	100%	104.789.000	1.739.403.200	1.739.403.200					104.789.000			
2	083	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pencegahan terhadap perempuan yang terlaksana	100 %	100 %	27.500.000	22.915.000	22.915.000		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Perangkat Daerah, stecholder/mitra kerja		27.500.000	DP3APPKB	
2	083	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000	22.915.000	22.915.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		27.500.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2 0 8 3 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban yang terlaksana	100 %	100 %	67.027.000	1.704.338.000	1.704.338.000			penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Layanan Perempuan		67.027.000	DP3APPKB
2 0 8 3 2 000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	7 Layanan	67.027.000	1.704.338.000	1.704.338.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			67.027.000	DP3APPKB	
2 0 8 3 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terbina	100 %	100 %	10.262.000	12.150.200	12.150.200			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Penyedia Layanan Perempuan		10.262.000	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	0 8	0 3	2.0 3	000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	20 Orang	10.262.000	12.150.200	12.150.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		10.262.000	DP3APPKB
2	0 8	0 4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	100 %	60%	39.125.000	39.125.000	25.325.000					27.500.000		
2	0 8	0 4	2.0 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang dibina	2,96 %	2,96 %	36.500.000	36.500.000	22.700.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Masyarakat/Keluarga Pra Sejahtera	21.500.000	DP3APPKB
2	0 8	0 4	2.0 1	000 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	36.500.000	36.500.000	22.700.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya		21.500.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	0 8 4 3	2.0		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pembelajaran keluarga yang tersedia	2 Lembaga	2 Lembaga	2.625.000	2.625.000	2.625.000			prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Unggul			
2	0 8 4 3	000 1		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	2.625.000	2.625.000	2.625.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Layanan Keluarga	6.000.000	DP3APPKB
2	0 8 5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi	58,82 %	65%	5.875.000	5.875.000	5.875.000						0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.08.5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan/ atau Penyusunan Kebijakan Persentase lembaga pemerintah yang memiliki petugas data informasi gender dan anak	75 %	75 %	5.875.000	5.875.000	5.875.000				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Pemerintah		0	DP3APPKB
2.08.5.1.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	5.875.000	5.875.000	5.875.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DP3APPKB	
2.08.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	87,50 %	63%	51.200.000	51.200.000	32.975.000							0		
2.08.6.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kel/desa yang terfasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha	15 Kec/Kel/Desa	15 Kec/Kel/Desa	43.200.000	43.175.000	24.950.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan Forum Anak		0	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.06.2.000.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	43.200.000	43.175.000	24.950.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				0	DP3APPKB
2.08.06.2.000.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan penguatan kelembagaan	100 %	100 %	8.000.000	8.025.000	8.025.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Penyedia Layanan Anak		0	DP3APPKB
2.08.06.2.000.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	8.000.000	8.025.000	8.025.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	087									kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
2	087	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif; Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA;	100 %	90 %62 %	301.211.000	362.899.800	362.899.800						301.211.000		
2	0871	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak	0,002	0,002	74.000.000	107.085.000	107.085.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Perangkat Daerah		74.000.000	DP3APPKB
2	08714	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	34 Orang	34 Orang	74.000.000	107.085.000	107.085.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		74.000.000	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2 0 8 7 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan yang memperoleh layanan komprehensif	100 %	100 %	168.453.000	179.565.000	179.565.000			penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Korban terhadap Perempuan dan Lembaga Penyedia layanan Anak		168.453.000	DP3APPKB
2 0 8 7 2 000 7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	2 Layanan	35 Layanan	168.453.000	179.565.000	179.565.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			168.453.000	DP3APPKB	
2 0 8 7 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	14 Lembaga	14 Lembaga	58.758.000	76.249.800	76.249.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Lembaga Penyedia Layanan Anak		58.758.000	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.000.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	28 Orang	35 Orang	58.758.000	76.249.800	76.249.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			58.758.000	DP3APPKB
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.520.957.000	4.467.674.000	4.422.674.000							4.622.849.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR); Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19);	58,00 %	2,11 19	211.600.000	221.000.000	221.000.000							227.000.000	
2.14.02.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB	27 %	27 %	211.600.000	221.000.000	221.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Data Pengendalian Penduduk DP3AP2KB		227.000.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2 1 4 2 2 000 9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	8 Laporan	8 Laporan	60.000.000	59.000.000	59.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		65.000.000	DP3APPKB		
2 1 4 2 2 001 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8 Laporan	8 Laporan	63.600.000	66.000.000	66.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		66.000.000	DP3APPKB		
2 1 4 2 2 001 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	8 Dokumen	88.000.000	96.000.000	96.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		96.000.000	DP3APPKB		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 4	0 3								generasi Z), dan penyandang disabilitas.				3.048.749.000				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR);Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need);	11,24 %79,28 %	64%10%	5.019.732.000	2.827.949.000	2.782.949.000										
2	1 4	0 3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang didampingi	8 Kecamatan	8 Kecamatan	1.095.800.000	877.000.000	877.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kampung KB	1.097.800.000	DP3APPKB
2	1 4	0 3	2.0 1	000 8	Pengendalian Program KKBPB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPB	6 Laporan	0 Laporan	124.800.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		124.800.000	DP3APPKB
2	1 4	0 3	2.0 1	001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan	8 Laporan	393.800.000	392.000.000	392.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui		488.000.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 4	0 3	2.0 1	001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	8 Laporan	8 Laporan	306.000.000	244.800.000	244.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia yang Unggul		244.800.000	DP3APPKB
2	1 4	0 3	2.0 1	001 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	125.000.000	125.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		125.000.000	DP3APPKB
2	1 4	0 3	2.0 1	001 4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	15 Organisasi	15 Organisasi	121.200.000	115.200.000	115.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya	Memantapkan Kualitas Pelayanan		115.200.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul							
2	1 4	0 3	2.0 2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih	100 %	100 %	1.241.752.000	591.200.000	575.600.000				591.200.000	DP3APPKB		
2	1 4	0 3	2.0 2	000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	70 Orang	70 Orang	241.200.000	591.200.000	575.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		591.200.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.0.2.000.4.3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	8 Laporan	8 Laporan	1.000.552.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	penyangang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			0	DP3APPKB
2.1.0.3.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di faskes	100 %	100 %	1.169.430.000	917.161.000	887.761.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	FASKES		917.161.000	DP3APPKB
2.1.0.3.3.000.4.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18 Laporan	18 Laporan	72.000.000	73.800.000	44.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			73.800.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1 4 0 3 2.0 3 000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5000 Orang	5000 Orang	319.330.000	421.084.000	421.084.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		421.084.000	DP3APPKB
2	1 4 0 3 2.0 3 000 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Unit	23 Unit	761.000.000	399.777.000	399.777.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		399.777.000	DP3APPKB
2	1 4 0 3 2.0 3 000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18 Laporan	8 Laporan	17.100.000	22.500.000	22.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	-		22.500.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 4	0 3	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Cakupan kemitraan yang dibina	100 %	100 %	1.512.750.000	442.588.000	442.588.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kampung KB dan Organisasi Kemasyarakatan/Mitra Kerja		442.588.000	DP3APPKB
2	1 4	0 3	2.0 4	000 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0 Dokumen	3.810.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DP3APPKB	
2	1 4	0 3	2.0 4	000 5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	33 Unit	21 Unit	990.000.000	324.988.000	324.988.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya		324.988.000	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 4	0 3	2.0 4	000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	33 Kampung	21 Kampung	518.940.000	117.600.000	117.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Unggul		117.600.000	DP3APPKB
2	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	87,50 % 100 % 90,22 %	60%	1.289.625.000	1.418.725.000	1.418.725.000						1.347.100.000	
2	1 4	0 4	2.0 1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	43 Kelompok	43 Kelompok	149.325.000	147.325.000	224.125.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Bina Kelompok Balita (BKB), Bina Kelompok Lansia (BKL), Bina Kelompok Remaja (BKR), Kelompok PIK-Remaja dan Kelompok UPPKS	206.800.000	DP3APPKB
2	1 4	0 4	2.0 1	001 6	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	8 Laporan / Dokumen	0	0	76.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		76.800.000	DP3APPKB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2 1 4 4 2.0 001 8	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	11 Unit	10 Unit	132.000.000	130.000.000	130.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		130.000.000	DP3APPKB	
2 1 4 4 2.0 002 4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	495 Orang	495 Orang	17.325.000	17.325.000	17.325.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		0	DP3APPKB	
2 1 4 4 2.0 002 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat/ mitra kerja yang dibina melalui pembinaan ke tahanan kesejahteraan keluarga	100 %	100 %	1.140.300.000	1.271.400.000	1.194.600.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Organisasi Masyarakat	1.140.300.000	DP3APPKB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 4	0 4	2.0 2	000 5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	8 laporan	8 laporan	543.000.000	543.000.000	543.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		543.000.000	DP3APPKB
2	1 4	0 4	2.0 2	000 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	8 laporan	8 laporan	597.300.000	728.400.000	651.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		597.300.000	DP3APPKB
TOTAL									10.672.959.692	10.315.979.692	10.383.659.246						9.232.691.728	
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN																		
					DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN				31.085.400.801	16.550.493.870	18.746.256.588						27.915.979.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.619.048.505	955.790.000	680.790.000						1.722.030.000	
2	0 9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.619.048.505	955.790.000	680.790.000						1.722.030.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan	98,30 %	82	806.460.000	926.460.000	646.060.000							1.122.030.000	
2.09.3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah fasilitasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Terhadap Stabilisasi Pasokan	6 kali	6 kali	640.130.000	640.130.000	298.920.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat, Keluarga Beresiko Stunting		641.290.000	DTPHPKP
2.09.3.1.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1050 Keluarga	300 Keluarga	610.000.000	610.000.000	274.190.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			547.000.000	DTPHPKP
2.09.3.1.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	17.765.000	17.765.000	17.765.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0		DTPHPKP
2.09.3.1.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.365.000	12.365.000	6.965.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			20.000.000	DTPHPKP
2.09.3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	8076 Kg	8076 Kg	120.000.000	240.000.000	300.810.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Korban Bencana, Kemiskinan Ekstrem, Rawan Pangan dan Lainnya di		201.500.000	DTPHPKP
2.09.3.2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	24 Ton	120.000.000	240.000.000	300.810.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			201.500.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.3.4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Paket fasilitasi Kegiatan Upaya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Masyarakat yang Dilaksanakan	2 Paket	2 Paket	46.330.000	46.330.000	46.330.000				nilai tambah di dalam negeri.	Masyarakat		279.240.000	DTPHPKP
2.09.3.4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	17.765.000	17.765.000	17.765.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			260.000.000	DTPHPKP
2.09.3.4.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	28.565.000	28.565.000	28.565.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			19.240.000	DTPHPKP
2.09.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	11,30 poin	10%	12.365.000	12.365.000	17.765.000							25.000.000	
2.09.4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kerentanan Pangan yang akan Dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.365.000	12.365.000	17.765.000				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Masyarakat, Stakeholder Terkait		15.000.000	DTPHPKP
2.09.4.1.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.365.000	12.365.000	17.765.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.000.000	DTPHPKP
2.09.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	75%	16.965.000	16.965.000	16.965.000							50.000.000	
2.09.5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengawasan Keamanan Pangan yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	16.965.000	16.965.000	16.965.000				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk	Masyarakat		50.000.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
2	09510004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	16.965.000	16.965.000	16.965.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		23.697.000	DTPHPKP
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				17.466.352.296	15.594.703.870	18.065.466.588						26.193.949.000	
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				17.466.352.296	15.594.703.870	18.065.466.588						26.193.949.000	
3	2701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	100 %	100 %	12.783.258.505	12.472.790.316	12.595.062.034						15.293.949.000	
3	2701	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	32.750.000	33.150.000	31.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas TPHPKP	22.050.000	DTPHPKP
3	2701	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	15.650.000	14.810.000	13.560.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.500.000	DTPHPKP
3	2701	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.400.000	11.040.000	11.040.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.280.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 7	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000	2.950.000	2.950.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.270.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	3.500.000	4.350.000	3.450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	11.938.272.105	11.613.603.916	11.937.160.634			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas TPHPKP	13.440.949.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/bulan	141 Orang/bulan	11.897.758.105	11.573.089.916	11.896.646.634	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.388.949.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340 Dokumen	100 Dokumen	38.400.000	38.400.000	38.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.000.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
3	2 7	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	2.114.000	2.114.000	2.114.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.000.000	DTPHPKP	
3	2 7	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	291.376.000	260.176.000	183.661.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas TPHPKP		882.724.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	800.000	800.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.000.000	DTPHPKP	
3	2 7	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.900.000	DTPHPKP	
3	2 7	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.000.000	5.400.000	3.366.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		18.000.000	DTPHPKP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 7	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	79.224.000	79.224.000	42.337.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		172.029.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.490.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	200 Laporan	199.852.000	169.252.000	135.957.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		636.305.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	-	100%	0	68.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	120.000.000	DTPHPKP
3	2 7	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	12 Unit	0	68.200.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		120.000.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
3 2 7 0 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 %	100 %	391.040.400	391.040.400	343.640.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas TPHPKP		338.400.000	DTPHPKP
3 2 7 0 1 2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	152.940.000	152.940.000	152.940.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			158.000.000	DTPHPKP
3 2 7 0 1 2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	238.100.400	238.100.400	190.700.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			180.400.000	DTPHPKP
3 2 7 0 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	129.820.000	106.620.000	99.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas TPHPKP		392.326.000	DTPHPKP
3 2 7 0 1 2.0 9 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	17.820.000	17.820.000	17.820.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			39.937.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149 Unit	149 Unit	85.000.000	85.000.000	77.980.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsi PKB	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		288.053.000	DTPHPKP	
3	2	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8 Unit	5.000.000	3.800.000	3.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.340.000	DTPHPKP	
3	2	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	22.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	DTPHPKP	
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	8.4514,668,88 %%%	75	2.518.293.296	1.660.963.554	1.527.363.554						1.800.000.000		
3	2	0	2.0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Penerima Sarana Pertanian yang Diawasi dan Didampingi Penggunaannya	26 kelompok	26 kelompok	2.266.293.296	1.395.363.554	1.395.363.554			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Petani/Kelompok Tani		666.668.000	DTPHPKP
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	6 Laporan	1.096.993.296	1.389.963.554	1.389.963.554	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		576.213.000	DTPHPKP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 7 2	0 2 1	2.0 1 2	000 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1.169.300.000	5.400.000	5.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		90.455.000	DTPHPKP
3	2 7 2	0 2 2	2.0 2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sumber Daya Genetik Tumbuhan yang Dikelola dan Dikembangkan	2 Jenis	2 Jenis	252.000.000	265.600.000	132.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Petani/Kelompok Tani	1.133.332.000	DTPHPKP
3	2 7 2	0 2 2	2.0 2	000 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000	214.600.000	81.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		951.977.500	DTPHPKP
3	2 7 2	0 2 2	2.0 2	000 4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	51.000.000	51.000.000	51.000.000	Kab. Soppeng, Liliiraja, Timusu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		181.354.500	DTPHPKP
3	2 7 3	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	100,00 %	75	13.897.309.000	768.400.000	2.629.000.000						6.400.000.000	
3	2 7 3	0 3 1	2.0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Paket Dukungan Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Paket	2 Paket	466.520.000	27.000.000	27.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Petani/Kelompok Tani	68.470.000	DTPHPKP
3	2 7 3	0 3 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	466.520.000	27.000.000	27.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DBH Sawit	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		68.470.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 7 3	0 2 2	2.0								sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Masyarakat						
3	2 7 3	0 2 2	2.0	000 3	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun dan Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	13.430.789.000	741.400.000	2.602.000.000					6.331.530.000	DTPHPKP	
3	2 7 3	0 2 2	2.0	000 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	48 Unit	6 Unit	9.985.689.000	150.200.000	972.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1.335.000.000	DTPHPKP
3	2 7 3	0 2 2	2.0	000 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0 Unit	50.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		900.000.000	DTPHPKP
3	2 7 3	0 2 2	2.0	001 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	25 Unit	24 Unit	3.395.100.000	591.200.000	1.630.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2.473.530.000	DTPHPKP
3	2 7 5	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian; Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian;	99,27 %	90% 90%	37.600.000	37.600.000	37.600.000						100.000.000	
3	2 7 5	0 2 1	2.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	99,27 %	99,27 %	37.600.000	37.600.000	37.600.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Petani/Kelompok Tani	100.000.000	DTPHPKP
3	2 7 5	0 2 1	2.0	000 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu	5 Ha	5 Ha	37.600.000	37.600.000	37.600.000	Kab. Soppeng, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan	Memantapkan Kualitas		100.000.000	DTPHPKP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
3	2 7	0 7												2.600.000.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan; Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi;	16 % 8 %	70% 90%	1.013.150.000	654.950.000	1.276.441.000									
3	2 7	0 7	2.0 1											2.600.000.000	DTPHPKP
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani Yang meningkat Skor Kemampuannya Jumlah Posludes Aktif yang difasilitasi	4 Unit 755 Unit	4 Unit 755 Unit	1.013.150.000	654.950.000	1.276.441.000				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Petani/Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian			
3	2 7	0 7	2.0 1	000 1				Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			805.000.000	DTPHPKP
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	8 Unit	776.800.000	616.800.000	705.600.000									
3	2 7	0 7	2.0 1	000 2				Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			585.000.000	DTPHPKP
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	628 Unit	628 Unit	36.350.000	38.150.000	37.435.000									
3	2 7	0 7	2.0 1	000 3				Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			590.000.000	DTPHPKP
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit	0 Unit	200.000.000	0	0									
3	2 7	0 7	2.0 1	000 6				Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0	DTPHPKP
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	87 Orang	0	0	533.406.000									
TOTAL						31.085.400.801	16.550.493.870	18.746.256.588						27.915.979.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				8.354.095.557	8.354.095.557	8.930.805.491							11.140.578.000				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.354.095.557	8.354.095.557	8.930.805.491							11.140.578.000				
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			8.354.095.557	8.354.095.557	8.930.805.491							11.140.578.000				
2	1	0			4.494.889.637	4.520.146.157	5.172.396.551							6.940.578.000				
2	1	1																
2	1	0	2.0															
2	1	1	1															
2	1	1	1															
2	1	0	2.0	000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	63.904.200	64.550.000	61.370.200			60.000.000	DLH			
2	1	1	1	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	32.799.600	32.850.000	26.115.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat penyelaras kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000	DLH
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14.854.800	15.100.000	17.855.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat penyelaras kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		15.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	16.249.800	16.600.000	17.400.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			15.000.000	DLH
2.1.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	3.964.733.357	3.964.634.157	4.043.892.491			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	-		6.040.000.000	DLH
2.1.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	3.921.534.157	3.921.534.157	4.010.944.091	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			5.990.000.000	DLH
2.1.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	5.899.600	5.800.000	2.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			20.000.000	DLH
2.1.01.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	37.299.600	37.300.000	30.348.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			30.000.000	DLH
2.1.01.2.0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.600.000	15.600.000	7.800.000			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup		20.000.000	DLH
2.1.01.2.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56 Dokumen	56 Dokumen	15.600.000	15.600.000	7.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			20.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum	100 %	100 %	155.885.280	180.595.200	113.567.060			alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
														Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup		382.000.000	DLH
2	1 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	921.536	804.048	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			7.000.000	DLH
2	1 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	21.900.000	18.665.440	18.665.440	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			20.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2 1 1 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.015.494	27.120.292	15.765.100	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		50.000.000	DLH		
2 1 1 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.137.250	35.288.500	29.276.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		50.000.000	DLH		
2 1 1 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.001.000	1.004.120	1.004.120	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		5.000.000	DLH		
2 1 1 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	76.910.000	97.712.800	48.856.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		250.000.000	DLH		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	1 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	127.766.400	127.766.400	779.966.400			beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
2	1 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	89.280.000	89.280.000	89.280.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup		115.000.000	DLH	
2	1 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.486.400	38.486.400	690.686.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		40.000.000	DLH		
2	1 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	167.000.400	167.000.400	165.800.400			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang hamonis dengan	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	ASN Dinas Lingkungan Hidup		223.578.000	DLH	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.01.2.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	108.585.000	108.585.000	108.585.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			113.578.000	DLH
2.1.01.2.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	45.305.400	45.305.400	45.305.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			50.000.000	DLH
2.1.01.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	8.110.000	8.110.000	6.910.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			20.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.0.2.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			40.000.000	DLH
2.1.0.1.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air; Indeks kualitas udara;	100%	55,5 96	93.660.200	93.411.000	135.361.600							205.000.000	
2.1.0.2.000.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	83.335.400	83.336.000	76.136.400			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	masyarakat kabupaten soppeng		170.000.000	DLH
2.1.0.2.000.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	4 Dokumen	73.185.800	73.186.000	72.686.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			130.000.000	DLH
2.1.0.2.000.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	1 Dokumen	1 Dokumen	10.149.600	10.150.000	3.450.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			40.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan								lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
2	1 1 0 3 2	2.0	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.324.800	10.075.000	59.225.200			masyarakat kabupaten soppeng		35.000.000	DLH	
2	1 1 0 3 2	2.0 000 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	10.324.800	10.075.000	59.225.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		35.000.000	DLH
2	1 1 0 4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	9351 m2	30%	130.436.720	157.296.440	496.286.440					200.000.000		
2	1 1 0 4	2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dikelola	3 Kawasan	3 Kawasan	130.436.720	157.296.440	496.286.440			-	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	masyarakat kabupaten soppeng	200.000.000	DLH
2	1 1 0 4	2.0 1 000 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,9351 Ha	0,9351 Ha	130.436.720	157.296.440	496.286.440	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		200.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1 1 6	0									peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			25.000.000	
2	1 1 6	0	2.0								Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Pelaku Usaha di kabupaten soppeng	25.000.000	DLH
2	1 1 6	0	2.0	000 9							Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		25.000.000	DLH
2	1 1 8	0												35.000.000	
2	1 1 8	0	2.0								Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	masyarakat kabupaten soppeng	35.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 1 8	0 1 1	2.0 1 2	000 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	39.099.800	38.250.400	29.750.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		15.000.000	DLH
2	1 1 8	0 1 1	2.0 1 3	000 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	50 Orang	16.149.600	16.150.000	9.075.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		20.000.000	DLH
2	1 1 9	0 1 1			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	85%	18.324.600	18.850.000	12.300.200							60.000.000	
2	1 1 9	0 1 1	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	18.324.600	18.850.000	12.300.200			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	sekolah-sekolah dan SKPD		60.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	1 1 0 1 000 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	48 Entitas	48 Entitas	18.324.600	18.850.000	12.300.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			60.000.000	DLH
2	1 1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	100 %	5.050.000	5.050.000	2.400.200							35.000.000	
2	1 1 0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindak Lanjuti	1 Pengaduan	1 Pengaduan	5.050.000	5.050.000	2.400.200			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Masyarakat Kabupaten Soppeng		35.000.000	DLH
2	1 1 0 1 000 4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	1 Pengaduan	5.050.000	5.050.000	2.400.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			35.000.000	DLH
2	1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah	71 %	75%	3.547.285.000	3.495.741.560	3.066.384.500							3.640.000.000	
2	1 1 1 1	Pengelolaan Sampah	volume timbulan sampah yang ditangani (M3)	8,155.3 M3	8,155.3 M3	3.547.285.000	3.495.741.560	3.066.384.500			Memperkuat penyalarasn	Memantapkan Kualitas	masyarakat kabupaten soppeng		3.640.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 1 1	1 1 1	2.0 1	000 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	575 Unit	575 Unit	51.600.000	68.107.560	315.075.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		275.000.000	DLH
2	1 1	1 1	2.0 1	001 3	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	10 Ton	10 Ton	83.420.000	86.144.000	86.144.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		120.000.000	DLH
2	1 1	1 1	2.0 1	002 0	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	23828,93 Ton	23828,93 Ton	3.412.265.000	3.341.490.000	2.665.165.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		3.245.000.000	DLH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TOTAL					8.354.095.557	8.354.095.557	8.930.805.491				mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			11.140.578.000		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.049.517.660	4.049.517.660	3.905.046.851							6.884.769.000		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.049.517.660	4.049.517.660	3.905.046.851							6.884.769.000		
2	1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.049.517.660	4.049.517.660	3.905.046.851							6.884.769.000		
2	1 2	0 1	2.0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	3.883.149.410	3.895.233.160	3.792.133.501			6.587.236.000		
2	1 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	19.950.000	21.211.400	17.990.000		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	79.357.039	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	12.500.000	12.501.800	11.256.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	25.000.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000	5.759.600	4.783.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8.000.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	2.950.000	2.950.000	1.950.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	46.357.039	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.527.090.460	2.528.330.060	2.587.578.051			-	4.027.231.196	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.501.390.460	2.501.390.460	2.562.139.651	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3.981.897.336	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 2	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	23.700.000	24.940.000	23.939.600	Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		39.930.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	1.999.600	1.498.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.403.860	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	47.650.000	47.505.800	38.964.800			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	91.273.325	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	54 Paket	8.100.000	7.956.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		33.940.500	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	23.075.000	23.075.000	22.865.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.712.825	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	16.475.000	16.474.800	16.099.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		26.620.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	420.781.750	425.825.550	356.643.800			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	1.098.523.169	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1 Paket	627.400	621.200	440.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.996.500	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2 2	1 0 1 2.0 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	215.154.350	215.134.700	215.134.700	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		263.881.451	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	500.000	534.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.331.000	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.000.000	12.000.000	9.560.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		66.550.000	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	4.000.000	7.038.400	3.519.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.953.999	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	85.000.000	86.997.250	67.079.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		143.117.479	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	2.275.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.317.000	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	702 Laporan	702 Laporan	100.000.000	100.000.000	58.634.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		592.375.740	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	141.277.400	139.500.000	79.100.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		302.500.000	DISDUKCAPIL	
2	1 2 1 0 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	2 Unit	141.277.400	139.500.000	79.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		302.500.000	DISDUKCAPIL	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.2.01.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %	100 %	632.727.200	644.730.350	632.730.350			-	Akuntabel dan Inovatif			803.000.000	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.850.000	139.853.150	139.853.150	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			165.000.000	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	492.877.200	504.877.200	492.877.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			638.000.000	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	93.672.600	88.130.000	79.126.500			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			185.351.271	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	28.800.000	27.796.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			49.500.000	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	20.000.000	21.200.000	17.700.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			85.415.171	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	8 Unit	5.000.000	4.880.000	4.880.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.436.100	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	23 Unit	1 Unit	5.750.000	3.250.000	3.250.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			11.000.000	DISDUKCAPIL
2.1.2.01.8.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	32.922.600	30.000.000	25.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 2	0 2									yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif							
2	1 2	0 2												209.317.000				
2	1 2	0 2	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	4 Dokumen	4 Dokumen	41.410.000	41.409.600	33.064.600			209.317.000	DISDUKCAPIL			
2	1 2	0 2	2.0 1	000 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	36.500.000	36.500.000	29.155.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		200.000.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 2	2.0 1	000 7	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	4.910.000	4.909.600	3.909.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		9.317.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan; Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan; Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan; Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan;	97,5 %	100% 99,45% 77,50% 56%	12.089.000	10.088.600	8.048.600					28.310.000		
2	1 2	0 3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.010.000	5.009.600	8.048.600			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.310.000	DISDUKCAPIL
2	1 2	0 3	2.0 1	000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	1 Dokumen	1 Dokumen	7.010.000	5.009.600	8.048.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		13.310.000	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pelaporan Peristiwa Penting									Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
2.1.0.2.0.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan	100 %	100 %	5.079.000	5.079.000	0			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.000.000	DISDUKCAPIL
2.1.0.2.0.8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	5.079.000	5.079.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.000.000	DISDUKCAPIL
2.1.0.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	88,23 %	100%	112.869.250	102.786.300	71.800.150							59.906.000	
2.1.0.4.3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Paket	2 Paket	112.869.250	102.786.300	71.800.150			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			59.906.000	DISDUKCAPIL
2.1.0.4.3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	84.496.138	74.413.188	44.927.350	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			13.310.000	DISDUKCAPIL
2.1.0.4.3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	28.373.112	28.373.112	26.872.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			46.596.000	DISDUKCAPIL
TOTAL					4.049.517.660	4.049.517.660	3.905.046.851							6.884.769.000	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.926.966.350	3.994.130.354	4.042.449.755							5.757.197.150	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2					3.926.966.350	3.994.130.354	4.042.449.755							5.757.197.150		
2	1				3.926.966.350	3.994.130.354	4.042.449.755							5.757.197.150		
2	1	0			2.432.466.350	2.505.370.354	2.423.105.835							4.158.172.000		
2	1	0	2.0		100 %	100 %	2.432.466.350	2.505.370.354	2.423.105.835					4.158.172.000		
2	1	0	2.0		100 %	100 %	11.340.000	13.890.000	10.889.400			Data Perencanaan dan Evaluasi		54.465.000	DPMD	
2	1	0	2.0	000	2 Dokumen	2 Dokumen	3.780.000	4.540.000	3.539.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.250.000	DPMD
2	1	0	2.0	000	2 Dokumen	2 Dokumen	3.780.000	4.790.000	3.789.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.500.000	DPMD
2	1	0	2.0	000	27 Laporan	27 Laporan	3.780.000	4.560.000	3.559.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.715.000	DPMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.0.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	1.924.041.550	1.994.935.554	2.004.726.155				dan penyeludupan.					
											Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Data Realisasi Keuangan dan ASN DPMD		2.682.207.000	DPMD
2.1.0.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.914.481.550	1.981.645.554	1.994.274.955	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.650.707.000	DPMD
2.1.0.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	5.780.000	9.330.000	7.491.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			18.500.000	DPMD
2.1.0.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	3.780.000	3.960.000	2.959.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			13.000.000	DPMD
2.1.0.2.0003	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada dinasPMD	100 %	100 %	3.780.000	4.520.000	3.519.800				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	-	Buku Inventaris Barang		12.500.000	DPMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2 3	0 1 3	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.780.000	4.520.000	3.519.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	12.500.000	DPMD	
2 3	0 1 5	2.0 5	000 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian permagkat daerah	100 %	100 %	7.560.000	9.040.000	7.039.600		Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN DPMD	35.000.000	DPMD
2 3	0 1 5	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	3.780.000	4.520.000	3.519.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		14.000.000	DPMD
2 3	0 1 5	2.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	3.780.000	4.520.000	3.519.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		21.000.000	DPMD
2 3	0 1 6	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	166.010.000	165.125.000	105.381.080			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.039.000.000	DPMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.01.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	500.000	502.900	502.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	DPMD
2.3.01.2.000.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	0	311.600	311.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			13.000.000	DPMD
2.3.01.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.760.000	12.760.100	12.760.100	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			190.000.000	DPMD
2.3.01.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	9.948.600	5.509.600	3.349.600	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.000.000	DPMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2 1 3 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	42.311.400	42.490.800	30.842.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300.000.000	DPMD		
2 1 3 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	14 Laporan	490.000	490.000	490.000	Kab. Soppeng, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		11.000.000	DPMD		
2 1 3 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	89 Laporan	100.000.000	103.060.000	57.124.580	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		505.000.000	DPMD		
2 1 3 0 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	20.200.000	20.200.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170.000.000	DPMD		
2 1 3 0 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		170.000.000	DPMD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.03.2.01.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	256.484.800	254.609.800	254.609.800			narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		97.000.000	DPMD
2.1.03.2.01.8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			70.000.000	DPMD	
2.1.03.2.01.8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.484.800	214.609.800	214.609.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			27.000.000	DPMD	
2.1.03.2.01.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	43.050.000	43.050.000	36.940.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		68.000.000	DPMD	
2.1.03.2.01.9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	40.000.000	40.000.000	34.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng,	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			60.000.000	DPMD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 3	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4 Unit	3.050.000	3.050.000	2.440.000	Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya; Persentase fasilitasi tata kelola desa;	100 %	75 % 100 %	958.350.000	952.120.000	941.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			8.000.000	DPMD
2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	441 orang	441 orang	958.350.000	952.120.000	941.750.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	70 Desa/Kel	1.450.000.000	DPMD
2	1 3	0 4	2.0 1	000 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	49 Dokumen	49 Dokumen	900.000.000	900.000.000	900.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		950.000.000	DPMD
2	1 3	0 4	2.0 1	000 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.200.000	10.610.000	5.150.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	DPMD
2	1 3	0 4	2.0 1	000 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49 Dokumen	49 Dokumen	4.550.000	5.060.000	8.306.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		105.000.000	DPMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2 3 4	0 1 4	2.0 1 4	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	11.700.000	12.110.000	10.535.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		98.000.000	DPMD
2 3 4	0 1 5	2.0 1 5	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	98 Orang	98 Orang	7.150.000	7.410.000	7.050.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		15.000.000	DPMD
2 3 4	0 1 8	2.0 1 8	000 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	49 Dokumen	49 Dokumen	4.200.000	4.710.000	5.410.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		55.000.000	DPMD
2 3 4	0 1 1	2.0 1 1	001 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	70 Dokumen	70 Dokumen	8.200.000	4.360.000	4.360.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		42.000.000	DPMD
2 3 4	0 1 8	2.0 1 8	001 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	70 Dokumen	70 Dokumen	7.350.000	7.860.000	939.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		175.000.000	DPMD
2 3 5	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lesa (LKD); Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat;	4,29 %	5 % 4 %	536.150.000	536.640.000	677.593.920						149.025.150	
2 3 5	0 1	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	7 LKD	7 LKD	536.150.000	536.640.000	677.593.920			Membangun dari desa dan	Memantapkan Tata Kelola	70 Desa/Kel	149.025.150	DPMD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 3	0 5	2.0 1	000 3	di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan	70 Lembaga	70 Lembaga	23.950.000	23.870.000	19.790.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			
2	1 3	0 5	2.0 1	000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Lembaga	70 Lembaga	23.950.000	23.870.000	19.790.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		21.919.800	DPMD
2	1 3	0 5	2.0 1	000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.060.000	9.510.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	DPMD
2	1 3	0 5	2.0 1	000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0 Laporan	7.200.000	7.710.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.780.000	DPMD
2	1 3	0 5	2.0 1	000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	21.300.000	21.300.000	18.680.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8.299.900	DPMD
2	1 3	0 5	2.0 1	000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	478.700.000	478.700.000	629.613.920	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		108.025.450	DPMD
TOTAL									3.926.966.350	3.994.130.354	4.042.449.755						5.757.197.150	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
DINAS PERHUBUNGAN																		
2					5.476.612.021	5.476.612.021	5.626.612.021	6.784.159.717						59.488.204.500				
					5.476.612.021	5.476.612.021	5.626.612.021	6.784.159.717						59.488.204.500				
2	1 5				5.476.612.021	5.476.612.021	5.626.612.021	6.784.159.717						59.488.204.500				
2	1 5	0 1				100 %	100 %	4.246.953.621	4.228.987.421	4.208.385.217				57.362.485.000				
2	1 5	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	35.200.000	38.650.000	36.030.000		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan	35.160.000	DISHUB	
2	1 5	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.400.000	11.850.000	9.980.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.800.000	12.050.000	13.050.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		9.160.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000	12.950.000	11.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			12.000.000	DISHUB
2.15.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.663.353.581	3.665.986.005	3.779.452.949			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		6.010.000.000	DISHUB
2.15.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.627.253.581	3.626.636.005	3.740.502.949	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			6.000.000.000	DISHUB
2.15.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	1.700.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			2.000.000	DISHUB
2.15.01.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	34.400.000	36.850.000	36.450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			8.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.15.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	72.000.000	92.858.400	85.858.400				pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
2.15.01.2.0.5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	245 Paket	245 Paket	0	13.500.000	13.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		186.125.000	DISHUB	
2.15.01.2.0.5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	72.000.000	79.358.400	72.358.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			5.000.000	DISHUB	
2.15.01.2.0.5.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	227.000.000	230.136.016	127.887.968				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		239.000.000	DISHUB
2.15.01.2.0.5.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.133.720	2.133.720	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan			1.000.000	DISHUB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 5	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000	3.200.400	2.571.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ekonomi Masyarakat Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000	3.200.000	3.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		38.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.875.000	5.225.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	55.000.000	62.074.100	43.106.450	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		31.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	5.650.000	2.650.000	Kab. Soppeng, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi	Memantapkan Kualitas		6.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 5	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	142.000.000	138.002.796	69.001.398	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
2	1 5	0 1	2.0 7	000 9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100 %	100 %	60.000.000	3.300.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			135.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	30.000.000	3.300.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		290.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	30.000.000	3.300.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			180.000.000	DISHUB
2	1 5	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	30.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			10.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.15.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	89.400.000	95.577.500	77.577.500			dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		50.470.000.000	DISHUB
2.15.01.2.0.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	44.217.500	44.217.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			70.000.000	DISHUB	
2.15.01.2.0.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.400.000	51.360.000	33.360.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			50.400.000.000	DISHUB	
2.15.01.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	100.000.040	102.479.500	101.578.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pegawai Dinas Perhubungan		132.200.000	DISHUB	
2.15.01.2.0.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	28.032.500	24.340.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			31.000.000	DISHUB	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01.2.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	50.000.040	50.667.000	59.238.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		94.000.000	DISHUB
2.15.01.2.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	20.000.000	23.780.000	18.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		7.200.000	DISHUB	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas darat; Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal;	85% 0,09	85% 85%	1.229.658.400	1.397.624.600	2.575.774.500							2.125.719.500	
2.15.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	100 %	100 %	497.200.000	665.974.600	1.705.274.500			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		975.854.850	DISHUB
2.15.02.2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	110 Unit	110 Unit	75.000.000	74.249.600	730.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			200.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	1 5	0 2	2.0 2	000 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	50 Unit	107.200.000	207.785.000	8.840.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		137.854.850	DISHUB
2	1 5	0 2	2.0 2	000 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit	1500 Unit	215.000.000	333.940.000	916.434.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	400.000.000	DISHUB
2	1 5	0 2	2.0 2	000 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	50 Unit	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	238.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.02.2.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Laporan	17 Laporan	316.400.000	315.200.000	309.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	mengembangkan an industri kreatif serta mengembangkan an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan an industri kreatif serta mengembangkan an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			503.951.000	DISHUB
2.15.02.2.005	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi Persyaratan Tekhnis dan Laik Jalan	100 %	100 %	73.000.000	67.900.000	67.900.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan an industri kreatif serta mengembangkan an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Sarana Transportasi Umum		108.400.000	DISHUB
2.15.02.2.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	0	4.500.000	4.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan an industri	Memantapkan Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			25.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 5	0 2	2.0 5	000 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	1000 Dokumen	52.000.000	55.900.000	55.900.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	<p> kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> <p> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		51.000.000	DISHUB
2	1 5	0 2	2.0 5	000 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	6 Unit	21.000.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	<p> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		32.400.000	DISHUB
2	1 5	0 2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100 %	100 %	326.858.400	316.050.000	453.900.000			<p> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangk</p>	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Sopir Angkutan Umum Personil LLAJ	317.200.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 5	0 2	2.0 6	001 4	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	14.800.000	19.050.000	19.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		14.000.000	DISHUB	
2	1 5	0 2	2.0 6	001 7	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	6 Laporan	6 Laporan	312.058.400	297.000.000	434.850.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		303.200.000	DISHUB	
2	1 5	0 2	2.0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Bersyarat yang Mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	100 %	100 %	0	6.500.000	15.500.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		185.936.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.2.07.000.5	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	2 Orang	0	4.500.000	13.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			60.000.000	DISHUB
2.15.2.07.000.6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	40 Laporan	40 Laporan	0	2.000.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			5.936.000	DISHUB
2.15.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	100 %	100 %	0	2.100.000	2.100.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		15.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.2.08.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	0	2.100.000	2.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			15.000.000	DISHUB
2.15.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disediakan Jumlah Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang Diterbitkan	100 % 1248 Angkutan	100 % 1248 Angkutan	3.000.000	3.000.000	3.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Angkutan		10.000.000	DISHUB
2.15.2.09.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1248 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			10.000.000	DISHUB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
2 5	0 2	2.1 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten yang di terbitkan	100 %	100 %	8.200.000	8.900.000	8.900.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pengemudi/Sopir Angkutan Umum	0		DISHUB
2 5	0 2	2.1 4	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	8.200.000	8.900.000	8.900.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0		DISHUB
TOTAL								5.476.612.021	5.626.612.021	6.784.159.717						59.488.204.500		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.953.667.306	5.343.667.306	5.302.759.502						10.577.944.000		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.953.667.306	5.343.667.306	5.302.759.502						10.577.944.000		
2	1 6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.835.702.306	5.125.148.306	5.102.260.502						10.402.444.000		
2	1 6	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	3.341.627.656	3.353.255.762	3.273.804.240						7.451.394.000		
2	1 6	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	597.185.912	228.085.000	25.245.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	234.200.000		DISKOMINFO
2	1 6	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.925.000	2.215.000	925.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.500.000	DISKOMINFO
2	1 6	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.700.000	9.350.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		11.000.000	DISKOMINFO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.01.2.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000	650.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif			4.200.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	2.450.000	2.450.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	10.470.000	10.470.000	9.870.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.500.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B Laporan	B Laporan	571.940.912	201.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			202.000.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.399.329.744	2.400.729.744	2.455.733.690			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		6.289.374.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	2.387.019.744	2.387.019.744	2.442.023.690	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.273.874.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	2.000.000	2.700.000	2.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.000.000	DISKOMINFO	
2.1.01.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	8 Dokumen	8 Dokumen	10.310.000	11.010.000	11.010.000	Kab. Soppeng, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola			11.500.000	DISKOMINFO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
2.1.02.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	100 %	100 %	1.700.000	1.700.000	1.700.000			-	-			2.500.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.500.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	32.300.000	32.300.000	31.940.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			35.000.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	32.300.000	32.300.000	31.940.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			35.000.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	107.961.500	150.206.218	100.150.000			-	-			188.960.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.001.000	1.001.000	1.001.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			2.360.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.062.500	1.062.500	1.062.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.000.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.000.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.6.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.473.000	11.473.000	11.473.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			23.000.000	DISKOMINFO
2.1.02.000.6.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	288 Laporan	288 Laporan	7.175.000	7.175.000	14.175.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			8.600.000	DISKOMINFO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.01.2.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	71.250.000	113.494.718	56.438.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Akuntabel dan Inovatif		130.000.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	0	144.202.300	458.995.550			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	270.000.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0	144.202.300	458.995.550	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	132.928.000	136.810.000	137.170.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	149.360.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.360.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.360.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	113.928.000	117.810.000	117.810.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		130.000.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	70.222.500	259.222.500	62.870.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	282.000.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	30.700.000	29.700.000	29.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	DISKOMINFO		
2.1.01.2.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	13.812.500	13.812.500	9.290.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		14.000.000	DISKOMINFO		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Semua Kel/Desa			yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
2.1.0.2.0.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	25.710.000	25.710.000	23.880.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		28.000.000		DISKOMINFO
2.1.0.2.0.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	190.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		200.000.000		DISKOMINFO
2.1.0.2.0.000.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	2,50 %	85 %	432.550.000	778.750.000	803.750.000							976.050.000	
2.1.0.2.0.000.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Strategi komunikasi (Strakom)	95 %	95 %	432.550.000	778.750.000	803.750.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		976.050.000	DISKOMINFO
2.1.0.2.0.001.4	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	86 Laporan	86 Laporan	380.400.000	719.400.000	744.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		866.800.000		DISKOMINFO
2.1.0.2.0.001.7	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	10 Permohonan	14.400.000	21.600.000	21.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.000.000		DISKOMINFO
2.1.0.2.0.002.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	1 Media	1 Media	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2.000.000		DISKOMINFO
2.1.0.2.0.002.3	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	20 Konten	20 Konten	36.000.000	36.000.000	36.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		38.000.000		DISKOMINFO
2.1.0.2.0.000.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	100 %	3	1.061.524.650	993.142.544	1.024.706.262							1.975.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2 1 6 3 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo no 5 tahun 2015	60 %	60 %	95.382.106	27.000.000	27.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	285.000.000	DISKOMINFO	
2 1 6 3 4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	95.382.106	27.000.000	27.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	285.000.000	DISKOMINFO	
2 1 6 3 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks SPBE	3.5	3.5	966.142.544	966.142.544	997.706.262			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	1.690.000.000	DISKOMINFO	
2 1 6 3 2 4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	216.142.544	216.142.544	247.706.262	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	540.000.000	DISKOMINFO	
2 1 6 3 2 0	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	750.000.000	750.000.000	750.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	800.000.000	DISKOMINFO	
2 2 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				84.810.000	77.390.000	44.000.000						105.000.000		
2 2 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100 %	2,6	84.810.000	77.390.000	44.000.000						105.000.000		
2 2 0 2 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten soppeng	100 %	100 %	84.810.000	77.390.000	44.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	105.000.000	DISKOMINFO	
2 2 0 2 1 9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	84.810.000	77.390.000	44.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	85.000.000	DISKOMINFO	
2 2 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				33.155.000	141.129.000	156.499.000						70.500.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.2.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	275	65	33.155.000	141.129.000	156.499.000							70.500.000		
2.2.1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	100 %	100 %	9.605.000	86.519.000	118.039.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		45.500.000	DISKOMINFO	
2.2.1.2.2.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	3 Laporan	9.605.000	86.519.000	118.039.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		15.500.000	DISKOMINFO	
2.2.1.2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0.02 %	0.02 %	23.550.000	54.610.000	38.460.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		25.000.000	DISKOMINFO	
2.2.1.2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	23.550.000	54.610.000	38.460.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		25.000.000	DISKOMINFO	
TOTAL					4.953.667.306	5.343.667.306	5.302.759.502							10.577.944.000		
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM																
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM				6.872.830.481	6.920.553.254	6.901.965.746							8.200.070.000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.807.343.121	5.819.098.130	5.781.130.622							7.027.662.000		
2.1.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.807.343.121	5.819.098.130	5.781.130.622							7.027.662.000		
2.1.7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100 %	100 %	5.540.743.121	5.552.498.130	5.685.440.622							6.720.750.000		
2.1.7.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 % 100 % 100 %	100 %	35.100.000	35.100.000	27.100.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		26.750.000	DPPKUKM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.01.2.000.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.100.000	8.100.000	8.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.250.000	DPPKUM
2.17.01.2.000.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.360.000	DPPKUM
2.17.01.2.000.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	19.500.000	19.500.000	11.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.140.000	DPPKUM
2.17.01.2.000.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	4.039.215.865	4.050.970.874	4.116.133.366			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		5.515.228.000	DPPKUM
2.17.01.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4.019.115.865	4.030.870.874	4.101.283.366	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.491.968.000	DPPKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 7 1	0 2	2.0 3	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	6.300.000	6.300.000	6.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.500.000	DPPKUM	
2	1 7	0 1	2.0 4	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	13.800.000	13.800.000	8.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.760.000	DPPKUM	
2	1 7	0 1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	100 %	52.518.056	52.518.056	53.268.056			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		21.374.000	DPPKUM
2	1 7	0 1	2.0 4	000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	52.518.056	52.518.056	53.268.056	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		21.374.000	DPPKUM	
2	1 7	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	23.800.000	23.800.000	24.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		49.132.000	DPPKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.02.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	13.800.000	13.800.000	14.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif				
2.17.02.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	2 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			30.382.000	DPPKUM
2.17.02.0016	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	414.170.000	414.170.000	445.655.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		447.418.000	DPPKUM
2.17.02.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	845.800	845.800	845.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			997.000	DPPKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2 1 7 0 1 2.0 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	10.295.000	10.295.000	10.295.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.290.000	DPPKUKM		
2 1 7 0 1 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	66.000.000	66.000.000	43.670.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.290.000	DPPKUKM		
2 1 7 0 1 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	81.629.200	81.629.200	71.004.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		90.381.000	DPPKUKM		
2 1 7 0 1 2.0 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.400.000	DPPKUKM		
2 1 7 0 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	253.000.000	253.000.000	317.440.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		283.060.000	DPPKUKM		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.01.2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	17.525.000	17.525.000	45.400.000			narkoba, judi, dan penyeludupan.					
2.17.01.2.0.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7 Unit	17.525.000	17.525.000	45.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		399.519.000	DPPKUM
2.17.01.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	904.939.200	904.939.200	915.689.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng		185.347.000	DPPKUM
2.17.01.2.0.8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	844.800.000	844.800.000	874.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			155.947.000	DPPKUM
2.17.01.2.0.8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.139.200	60.139.200	40.889.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			29.400.000	DPPKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Semua Kel/Desa			serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			
2	1 7 3													7.250.000	
2	1 7 3	2.0 1									Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Koperasi di Kabupaten Soppeng	7.250.000	DPPKUM
2	1 7 3	2.0 1	000 3					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			7.250.000	DPPKUM
2	1 7 4													22.250.000	
2	1 7 4	2.0 1									Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Koperasi di Kabupaten Soppeng	22.250.000	DPPKUM
2	1 7 4	2.0 1	000 1					Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			22.250.000	DPPKUM
2	1 7 5													20.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
2 1 7 0 5 2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perkoperasian	-	140 orang	0	0	25.090.000				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten Soppeng		20.000.000	DPPKUKM
2 1 7 0 5 2.0 000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	140 Orang	0	0	25.090.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			20.000.000	DPPKUKM	
2 1 7 0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	-	14,29 %	0	0	10.000.000							200.000.000		
2 1 7 0 6 2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang terfasilitasipemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	70 unit	0	0	10.000.000				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten Soppeng		200.000.000	DPPKUKM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2 7 6	0 2.0 1 000 9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	70 Unit Usaha	0	0	10.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			200.000.000	DPPKUM
2 7 7	0 0 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal; Pertumbuhan wirausaha;	1,8 %	2,5 % 10 %	14.000.000	14.000.000	20.000.000						0		
2 7 7	0 2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5 Unit	5 Unit	14.000.000	14.000.000	20.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Usaha Mikro di Kabupaten Soppeng	0	DPPKUM	
2 7 7	0 2.0 1 000 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 Unit Usaha	20 Unit Usaha	14.000.000	14.000.000	20.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		0	DPPKUM	
2 7 8	0 0 0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	68,20 %	10%	240.000.000	240.000.000	26.750.000						57.412.000		
2 7 8	0 2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil	125 usaha mikro	125 usaha mikro	240.000.000	240.000.000	26.750.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Usaha Mikro di Kabupaten Soppeng	57.412.000	DPPKUM	
2 7 8	0 2.0 1 000 6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	125 Unit Usaha	75 Unit Usaha	240.000.000	240.000.000	26.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta		57.412.000	DPPKUM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Manusia, Serta Desain dan Teknologi						Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.065.487.360	1.101.455.124	1.120.835.124							1.172.408.000	
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			903.330.000	903.330.000	923.280.000							716.990.000	
3	303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100 %	60%	730.825.000	730.825.000	720.025.000						607.460.000	
3	303	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan memanfaatkan sesuai peruntukannya	18 unit pasar	18 unit pasar	730.825.000	730.825.000	720.025.000		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha Dagang dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	607.460.000	DPPKUM
3	303	2.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	18 Unit	730.825.000	730.825.000	720.025.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	607.460.000	DPPKUM
3	304		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3,92 %	4,80%	7.200.000	7.200.000	36.450.000					23.600.000	
3	304	2.0	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah harga rata-rata dan stok barang Bapokting yang terdokumentasi	3 dokumen	3 dokumen	900.000	900.000	900.000		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha Dagang dan Masyarakat Kabupaten Soppeng	6.600.000	DPPKUM
3	304	2.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	900.000	900.000	900.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	6.600.000	DPPKUM
3	304	2.0003	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terawasi	8 Distributor	8 Distributor	6.300.000	6.300.000	35.550.000		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Distributor dan pengecer pupuk bersubsidi	17.000.000	DPPKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
3 0 4 3 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	16 Laporan	16 Laporan	6.300.000	6.300.000	35.550.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		17.000.000	DPPKUM		
3 0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	91,91 %	100%	18.305.000	18.305.000	19.805.000						45.930.000			
3 0 6 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat yang bertanda tera sah berlaku	400 alat	400 alat	18.305.000	18.305.000	19.805.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelaku usaha wajib tera dan masyarakat	45.930.000	DPPKUM		
3 0 6 1 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	400 Unit	400 Unit	9.430.000	8.805.000	9.555.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		33.700.000	DPPKUM		
3 0 6 1 2	Pengawasan/Perijinan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	80 Orang	15 Orang	8.875.000	9.500.000	10.250.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12.230.000	DPPKUM		
3 0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	3,43 %	60%	147.000.000	147.000.000	147.000.000						40.000.000			
3 0 7 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam promosi penggunaan produk dalam negeri	10 Unit	10 Unit	147.000.000	147.000.000	147.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelaku UMKM di Kabupaten Soppeng	40.000.000	DPPKUM		
3 0 7 1 5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	147.000.000	147.000.000	147.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		40.000.000	DPPKUM		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Masyarakat					
3	3 1				162.157.360	198.125.124	197.555.124							455.418.000		
3	3 1	0 2			149.557.360	185.525.124	183.455.124							420.418.000		
3	3 1	0 2	2.0 1		149.557.360	185.525.124	183.455.124			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Industri Keci Menengah (IKM) di Kabupaten Soppeng		420.418.000	DPPKUKM	
3	3 1	0 2	2.0 1	000 3			133.557.360	169.525.124	170.275.124	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		64.833.000	DPPKUKM
3	3 1	0 2	2.0 1	000 5			16.000.000	16.000.000	13.180.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		355.585.000	DPPKUKM
3	3 1	0 3			6.300.000	6.300.000	7.050.000							20.000.000		
3	3 1	0 3	2.0 1		6.300.000	6.300.000	7.050.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Industri Keci Menengah (IKM) di Kabupaten Soppeng		20.000.000	DPPKUKM	
3	3 1	0 3	2.0 1	000 3			6.300.000	6.300.000	7.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20.000.000	DPPKUKM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								nilai tambah di dalam negeri.								
3	3 1 4	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	95 %	97%	6.300.000	6.300.000	7.050.000				15.000.000			
3	3 1 4	0 4	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia	4 informasi	4 informasi	6.300.000	6.300.000	7.050.000				15.000.000	DPPKUM		
3	3 1 4	0 4	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000	6.300.000	7.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Soppeng	15.000.000	DPPKUM
TOTAL									6.872.830.481	6.920.553.254	6.901.965.746				8.200.070.000			
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				5.126.780.681	4.750.660.651	4.555.819.095					8.428.252.000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.091.680.681	4.715.560.651	4.520.719.095					7.678.252.000		
2	0 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				246.503.744	277.243.362	288.143.362					485.000.000		
2	0 7	0 2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60 %	40%	20.000.000	20.000.000	20.000.000					350.000.000		
2	0 7	0 2	2.0 1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan/Pencari kerja/Tenaga Kerja	350.000.000	DPMPSTPKT
2	0 7	0 2	2.0 1	000 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		350.000.000	DPMPSTPKT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	60 %	70%	51.022.944	81.762.562	81.762.562							50.000.000		
207031	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah jenis pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	2 jenis	2 jenis	51.022.944	81.762.562	81.762.562			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		50.000.000	DPMPTSPTKT	
2070310001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	20 Orang	51.022.944	81.762.562	81.762.562	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			50.000.000	DPMPTSPTKT	
20704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	5,25%	5,50%	99.000.000	99.000.000	107.600.000							45.000.000		
207041	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase pencari kerja yang memperoleh layanan antar kerja	100 %	100 %	99.000.000	99.000.000	107.600.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja		45.000.000	DPMPTSPTKT	
2070410005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	450 Orang	450 Orang	99.000.000	99.000.000	107.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			45.000.000	DPMPTSPTKT	
20705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	4,30 %	70%	76.480.800	76.480.800	78.780.800							40.000.000		
207052	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	1 jumlah	1 jumlah	76.480.800	76.480.800	78.780.800			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan/Peserta BPJS Ketenagakerjaan		40.000.000	DPMPTSPTKT	
2070520005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1250 Orang	1250 Orang	76.480.800	76.480.800	78.780.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			40.000.000	DPMPTSPTKT	
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.845.176.937	4.438.317.289	4.232.575.733							7.193.252.000		
21801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	100 %	100 %	3.979.691.937	3.980.867.289	3.791.685.733							6.058.052.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun tepat waktu	100% 100 % 100 %	100% 100 % 100 %	48.300.000	48.300.000	33.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS		77.000.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.100.000	20.100.000	17.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			30.000.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000	2.700.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			500.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000	2.700.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			500.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	2.700.000	2.700.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	2.700.000	2.700.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	17.400.000	17.400.000	15.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			43.000.000	DPMPTSPKTK
2.1.01.2.0.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.114.163.937	3.124.339.289	3.085.647.733			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS		4.834.052.000	DPMPTSPKTK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2.18.01.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.090.463.937	3.100.639.289	3.064.047.733	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.802.052.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.700.000	23.700.000	21.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		32.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	13.500.000	9.000.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS	22.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang	13.500.000	9.000.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		22.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	387.770.000	353.270.000	258.250.080			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS	266.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	906.452	906.452	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	31.150.000	28.150.000	47.152.684	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000	30.000.000	29.996.750	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		32.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.01.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	102.241.500	102.241.500	47.044.750	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		102.000.000	DPMPTSPTKT	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.01.2.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan	204 Laporan	223.472.048	191.972.048	134.055.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		90.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	4.030.000	4.030.000	8.060.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS	350.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4.030.000	4.030.000	8.060.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		350.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	251.350.000	281.350.000	259.999.920			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS	325.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	251.350.000	281.350.000	259.999.920	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		325.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	160.578.000	160.578.000	146.728.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	DPMPTSP-NAKERTRANS	184.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	148.028.000	148.028.000	128.078.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		165.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.01.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	12.550.000	12.550.000	18.650.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		19.000.000	DPMPTSPTKT		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
											yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif						
2.1.8.0.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	22,40 %	45%	20.000.000	20.000.000	0							20.000.000			
2.1.8.0.2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah jenis potensi investasi yang termuat dalam peta	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	0				-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Investor/Perusahaan/UMKM	20.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.8.0.2.2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20.000.000	DPMPTSPTKT		
2.1.8.0.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	70,00 %	15%	38.650.000	38.650.000	38.090.000							20.000.000			
2.1.8.0.3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	9 laporan	9 laporan	38.650.000	38.650.000	38.090.000					-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Investor/Perusahaan/UMKM	20.000.000	DPMPTSPTKT	
2.1.8.0.3.1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	38.650.000	38.650.000	38.090.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20.000.000	DPMPTSPTKT	
2.1.8.0.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 %	100 %	343.000.000	343.000.000	340.400.000							405.200.000			
2.1.8.0.4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis	2377 izin	2377 izin	343.000.000	343.000.000	340.400.000					-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pembuat Izin/Pelaku Usaha	405.200.000	DPMPTSPTKT	
2.1.8.0.4.1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1510 Pelaku Usaha	1510 Pelaku Usaha	259.000.000	259.000.000	259.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)				-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		335.000.000	DPMPTSPTKT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2.18.04.2.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	25.800.000	25.800.000	25.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		31.200.000	DPMPTSPTKT	
2.18.04.2.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	234 Kegiatan Usaha	234 Kegiatan Usaha	58.200.000	58.200.000	55.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		39.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	51,00 %	100%	417.035.000	9.000.000	15.600.000						600.000.000		
2.18.05.2.001	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dipantau dibina dan diawasi menjadi kewenangan daerah	90 perusahaan	90 perusahaan	417.035.000	9.000.000	15.600.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Investor/UMKM	600.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.05.2.006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	417.035.000	9.000.000	15.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		600.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	100 %	46.800.000	46.800.000	46.800.000						90.000.000		
2.18.06.2.001	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	2 dokumen	2 dokumen	46.800.000	46.800.000	46.800.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penerbitan Izin/Pelaku Usaha	90.000.000	DPMPTSPTKT	
2.18.06.2.002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	46.800.000	46.800.000	46.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		90.000.000	DPMPTSPTKT	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
3																	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				35.100.000	35.100.000	35.100.000								750.000.000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				35.100.000	35.100.000	35.100.000								750.000.000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	1 UPT	100%	35.100.000	35.100.000	35.100.000								750.000.000		
3	2	0	2.0														
3	2	4	1														
3	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	pendapatan perkapita transmigran	130000000 Rupiah	130000000 Rupiah	35.100.000	35.100.000	35.100.000				-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Transmigran		750.000.000	DPMPTSPTKT	
3	2	0	2.0	000													
3	2	4	1	000													
3	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	85 Kepala Keluarga	80 Kepala Keluarga	6.300.000	6.300.000	6.300.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000	DPMPTSPTKT	
3	2	0	2.0	000													
3	2	4	1	000													
3	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	28.800.000	28.800.000	28.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			650.000.000	DPMPTSPTKT	
TOTAL					5.126.780.681	4.750.660.651	4.555.819.095								8.428.252.000		
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
																8.900.627.650	
2																	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.501.182.406	1.376.200.000	1.368.400.000									679.689.650	
2	1	9															
2	9																
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio wirausaha pemuda	1,15 % 32,41 %	6%	27.000.000	292.248.200	258.086.200									280.000.000	
2	1	0	2.0														
2	9	2	1														
2	9	2	1														
2	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Dan Wirausaha Muda Yang Diberdayakan	80 Orang	80 Orang	15.100.000	201.735.700	213.523.700					Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Organisasi Pemuda, Wirausaha Pemula, dan Pemuda Pelopor		207.000.000	DISPARPORA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	1 9 2	0 2 1	2.0 1	001 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	40 Orang	40 Orang	15.100.000	108.942.000	161.711.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		102.000.000	DISPARPORA
2	1 9 2	0 2 1	2.0 1	001 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	40 Orang	25 Orang	0	92.793.700	51.812.700	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		105.000.000	DISPARPORA
2	1 9 2	0 2 2	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Diberdayakan Dan Dikembangkan	24 Organisasi	24 Organisasi	11.900.000	90.512.500	44.562.500			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	73.000.000	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 9 2	0 2	2.0 2	000 3	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	24 Organisasi	24 Organisasi	11.900.000	90.512.500	44.562.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		73.000.000	DISPARPORA
2	1 9 3	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	2 prestasi	2,5	989.650.000	1.052.800.000	1.052.800.000						350.000.000		
2	1 9 3	0 1	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga	8 Cabor	8 Cabor	136.000.000	202.130.000	241.580.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pengurus Olahraga, Pelatih, Atlit		75.000.000	DISPARPORA
2	1 9 3	0 1	2.0 1	000 5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	136.000.000	202.130.000	241.580.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi		75.000.000	DISPARPORA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota							Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul							
2	1 9	0 3	2.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	259.650.000	281.650.000	253.250.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pengurus Cabang Olahraga, Panitia, Pelatih, Official, Atlit	109.796.500	DISPARPORA
2	1 9	0 3	2.0 2	000 4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	92.400.000	68.400.000	68.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		62.489.250	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2 1 0 2.0 000 9 3 2 6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	40 Orang	40 Orang	167.250.000	213.250.000	184.850.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		47.307.250	DISPARPORA	
2 1 0 2.0 000 9 3 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Yang Dibina	26 Cabor	26 Cabor	532.750.000	517.770.000	506.720.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pengurus Cabang Olahraga, Pelatih, Atlit, Pemerhati Olahraga, Pelatih berprestasi dan berdedikasi, atlit berprestasi	105.203.500	DISPARPORA	
2 1 0 2.0 000 9 3 3 6	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	40 Orang	40 Orang	472.750.000	457.770.000	410.976.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		51.464.250	DISPARPORA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.0.2.0.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	50 Orang	60.000.000	60.000.000	95.743.550	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		53.739.250	DISPARPORA
2.1.0.2.0.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina	5 Cabor	5 Cabor	61.250.000	51.250.000	51.250.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pengurus Olahraga, Pelatih, Atlit	60.000.000	DISPARPORA	
2.1.0.2.0.000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	61.250.000	51.250.000	51.250.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		60.000.000	DISPARPORA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	1 9	0 4								perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				49.689.650					
2	1 9	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Yang Dibina	355 Organisasi	355 Organisasi	82.884.400	31.151.800	57.513.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Pembina Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Organisasi Kepramukaan		49.689.650	DISPARPORA
2	1 9	0 4	2.0 1	000 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	82.884.400	31.151.800	57.513.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		24.689.650	DISPARPORA	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				483.950.400	4.637.602.089	4.540.893.823							8.220.938.000	
3	2 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				483.950.400	4.637.602.089	4.540.893.823							8.220.938.000	
3	2 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas	100 %	100 %	4.401.648.006	4.157.442.439	4.168.939.373							6.296.438.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.06.1.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun tepat Waktu Persentase Dokument Penganggaran Yang disusun Tepat Waktu	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	68.648.000	65.874.800	51.512.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN dan Non ASN Disparpora		45.398.400	DISPARPORA
3.06.1.2.0.1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	29.460.000	28.436.800	21.625.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.279.800	DISPARPORA	
3.06.1.2.0.1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14.688.000	14.688.000	11.247.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		9.820.000	DISPARPORA	
3.06.1.2.0.1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	24.500.000	22.750.000	18.640.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		18.298.600	DISPARPORA	
3.06.1.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.559.611.270	3.583.348.539	3.627.715.273			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN dan Non ASN Disparpora		5.369.507.124	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.01.2.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.490.761.270	3.521.609.539	3.568.051.273	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.289.406.524	DISPARPORA
3.2.01.2.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180 Dokumen	180 Dokumen	29.300.000	28.000.000	28.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			35.000.000	DISPARPORA
3.2.01.2.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	29.050.000	26.739.000	25.739.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			27.100.600	DISPARPORA
3.2.01.2.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33 Laporan	33 Laporan	1.800.000	1.800.000	925.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	DISPARPORA
3.2.01.2.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8.700.000	5.200.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			8.000.000	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD								memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif							
3	2 6	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentasi Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pengkat Daerah	100 %	100 %	10.520.000	10.100.000	10.100.000				15.700.000	DISPARPORA		
3	2 6	0 1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	10.520.000	10.100.000	10.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.700.000	DISPARPORA
3	2 6	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	48.800.000	46.300.000	46.300.000				66.100.000	DISPARPORA		
3	2 6	0 1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	27.400.000	26.300.000	26.300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.100.000	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
3 2 6 0 1 2.0 000 5 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	21.400.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	DISPARPORA		
3 2 6 0 1 2.0 000 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	206.549.080	178.757.100	165.650.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN dan Non ASN Disparpora	347.138.873	DISPARPORA		
3 2 6 0 1 2.0 000 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	543.480	3.887.500	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.996.100	DISPARPORA		
3 2 6 0 1 2.0 000 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	23.569.700	5.777.600	29.677.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		16.190.000	DISPARPORA		
3 2 6 0 1 2.0 000 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		38.366.173	DISPARPORA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 2 6 0 1 2.0 000	6 1 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	44.799.300	39.292.000	29.672.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		44.998.600	DISPARPORA
3 2 6 0 1 2.0 000	6 1 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		34.320.000	DISPARPORA
3 2 6 0 1 2.0 000	6 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	260 Laporan	124.836.600	125.000.000	101.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		200.268.000	DISPARPORA
3 2 6 0 1 2.0 000	6 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Perkantoran	100 %	100 %	250.960.000	20.200.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN dan Non ASN Disparpora	150.277.000	DISPARPORA
3 2 6 0 1 2.0 000	6 1 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0 Unit	250.960.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		150.277.000	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif					
3	2 6 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22 Unit	10.720.000	17.200.000	14.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		34.520.000	DISPARPORA	
3	2 6 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	45,1%	7%	376.646.000	387.729.850	286.420.850						1.506.500.000		
3	2 6 2 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota Yang Dikelolah	2 Buah	2 Buah	371.546.000	387.729.850	286.420.850			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pengelola Objek Pariwisata, dan Masyarakat Umum		1.466.500.000	DISPARPORA
3	2 6 2 3 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	337.200.000	362.429.850	261.120.850	Kab. Soppeng, Citta, Citta Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		500.000.000	DISPARPORA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 6	0 2	2.0 3	000 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	188 Unit	1 Unit	8.846.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU)	industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		896.500.000	DISPARPORA
3	2 6	0 2	2.0 3	001 0	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	25.500.000	15.300.000	15.300.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		70.000.000	DISPARPORA
3	2 6	0 2	2.0 4		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina	340 Buah	-	5.100.000	0	0			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	40.000.000	DISPARPORA
3	2 6	0 2	2.0 4	000 7	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	2 Usaha	-	5.100.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		40.000.000	DISPARPORA
3	2 6	0 3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	3 Kali	-	67.704.400	0	0						260.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
3.2.0.2.0.000.3	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi pariwisata	1 Jenis	-	67.704.400	0	0				-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	260.000.000	DISPARPORA
3.2.0.3.1.000.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DISPARPORA
3.2.0.3.1.000.6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	0 Kegiatan	67.284.400	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		180.000.000	DISPARPORA
3.2.0.3.1.000.7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	0 Promosi	120.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		80.000.000	DISPARPORA
3.2.0.4.000.0	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	12%	-	5.100.000	0	0							0	
3.2.0.4.2.000.0	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Buah	-	5.100.000	0	0			-		Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	0	DISPARPORA
3.2.0.4.2.002.0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	5.100.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DISPARPORA
3.2.0.5.000.0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	41,70 %	85%	34.500.000	92.429.800	85.533.600							158.000.000	
3.2.0.5.1.000.0	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Pariwisata Tingkat Dasar	2 Jenis	2 Jenis	24.000.000	92.429.800	85.533.600			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Pelajar dan Masyarakat Umum		158.000.000	DISPARPORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
3 2 6 5 1 6	0 2.0 000 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	40 Orang	22.200.000	52.200.000	51.350.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		48.000.000	DISPARPORA		
3 2 6 5 1 9	0 2.0 000 9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	10 Orang	12 Orang	1.800.000	40.229.800	34.183.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		110.000.000	DISPARPORA		
3 2 6 5 2	0 2.0 000 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	30 Orang	-	10.500.000	0	0			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DISPARPORA		
3 2 6 5 2 1	0 2.0 000 1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	-	10.500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DISPARPORA		
TOTAL						5.985.132.806	6.013.802.089	5.909.293.823					8.900.627.650			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3.752.401.880	4.602.401.880	4.551.419.903						8.950.827.000			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.752.401.880	4.602.401.880	4.551.419.903						8.950.827.000			
2	2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3.709.571.880	4.564.971.880	4.520.819.903						8.855.827.000			
2	2 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.621.176.880	3.584.337.601	3.555.185.624						5.436.827.000			
2	2 3 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%100%100%	100%100%100%	28.900.000	55.900.000	55.900.000						94.000.000	DISPERPUSIP		
2	2 3 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.200.000	30.400.000	30.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		35.000.000	DISPERPUSIP		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 3 0 1 2.0 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.300.000	12.900.000	12.900.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			30.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	8.400.000	12.600.000	12.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			29.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100%	100%	3.080.352.692	3.098.387.781	3.165.435.804			-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		4.550.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.062.652.692	3.079.987.781	3.147.035.804	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.500.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	70 Dokumen	8.700.000	9.400.000	9.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			30.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	4.000.000	4.000.000	0			-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		7.000.000	DISPERPUSIP
2 3 0 1 2.0 000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	4.000.000	4.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			7.000.000	DISPERPUSIP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2 2 3 0 1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0	10.100.000	8.400.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		54.000.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 5 000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	0	10.100.000	8.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	151.151.380	163.492.380	73.375.678				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		313.300.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.322.080	2.971.680	2.971.680	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.200.000	6.200.000	3.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.000.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	17.429.300	29.120.700	10.488.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		67.300.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.000.000	DISPERPUSIP
2 2 3 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	150 Laporan	120.000.000	120.000.000	51.115.998	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		180.000.000	DISPERPUSIP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.3.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	290.672.808	168.814.400	168.814.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba		-	Akuntabel dan Inovatif				
2.2.3.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86.072.808	86.000.000	86.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			85.958.300	DISPERPUSIP
2.2.3.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	204.600.000	82.814.400	82.814.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			94.800.000	DISPERPUSIP
2.2.3.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	66.100.000	93.643.040	83.259.742			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			106.768.700	DISPERPUSIP
2.2.3.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.000.000	35.000.000	32.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			38.812.200	DISPERPUSIP
2.2.3.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	25.000.000	25.000.000	22.142.382	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			44.456.500	DISPERPUSIP
2.2.3.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	6.100.000	5.240.000	4.020.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.500.000	DISPERPUSIP
2.2.3.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	28.403.040	25.097.360	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	DISPERPUSIP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1,38%	75	75.295.000	925.361.479	920.361.479							3.405.000.000	
2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	4.51 %	4.51 %	2.320.000	186.537.700	186.537.700			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Perpustakaan Desa / Kelurahan		403.500.000	DISPERPUSIP
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	20 Perpustakaan	0	44.810.000	44.810.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		22.500.000	DISPERPUSIP	
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	600 Orang	0	141.727.700	141.727.700	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba, Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	DISPERPUSIP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2 3	0 2	2.0 1	001 7	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	15 Dokumen	15 Dokumen	2.320.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	-	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.000.000	DISPERPUSIP
2 3	0 2	2.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rata-Rata Pengunjung perpustakaan per Tahun	13860 Orang	13860 Orang	72.975.000	738.823.779	733.823.779		-	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.001.500.000	DISPERPUSIP	
2 3	0 2	2.0 2	000 6	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	10 Orang	25 Orang	7.500.000	95.905.579	95.905.579	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.000.000	DISPERPUSIP	
2 3	0 2	2.0 2	000 7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	100 Perpustakaan	0	353.179.900	353.179.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	DISPERPUSIP	
2 3	0 2	2.0 2	000 8	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.200.000	37.500.000	37.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.765.000.000	DISPERPUSIP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2 2 3 2 2 9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang	200 Orang	0	75.175.000	75.175.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		69.000.000	DISPERPUSIP		
2 2 3 2 2 0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	10 Lokus	1 Lokus	45.275.000	177.063.300	172.063.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba, Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		92.500.000	DISPERPUSIP		
2 2 3 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	2 Naskah	2	13.100.000	45.272.800	45.272.800						14.000.000			
2 2 3 3	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diakuisisi dan dialihmediakan	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	13.100.000	45.272.800	45.272.800			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	14.000.000	DISPERPUSIP		
2 2 3 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	1 Orang	13.100.000	45.272.800	45.272.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman BudayaDAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.000.000	DISPERPUSIP		
2 2 4 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				42.830.000	37.430.000	30.600.000						95.000.000			
2 2 4 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	100%	100%	42.830.000	37.430.000	30.600.000						75.000.000			
2 2 4 2	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis	6 SKPD	6 SKPD	33.000.000	27.600.000	24.600.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	17.000.000	DISPERPUSIP		
2 2 4 2	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10 Berkas	10 Berkas	29.000.000	15.800.000	12.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		14.000.000	DISPERPUSIP		
2 2 4 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5 Berkas	5 Berkas	4.000.000	11.800.000	11.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		3.000.000	DISPERPUSIP		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
3.2.0.2.000.5.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	4.360.000	4.360.000	3.135.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			26.300.000	DPKHP
3.2.0.2.000.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	4.080.266.111	4.096.759.511	4.195.420.399			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng		5.066.992.813	DPKHP
3.2.0.2.000.5.1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4.076.776.111	4.093.269.511	4.192.951.799	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.017.495.463	DPKHP
3.2.0.2.000.5.1.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	3.490.000	3.490.000	2.468.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			49.497.350	DPKHP
3.2.0.2.000.5.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	0	0	300.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng		5.239.632	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 5	0 1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	15 Laporan	0	0	300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif		5.239.632	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %	0	0	870.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng	10.688.850	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	9 Dokumen	0	0	450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.449.218	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 5	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	13 Dokumen	0	0	420.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.239.632	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	161.637.100	161.637.100	90.271.500			Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng	916.457.760	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 5	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	655.600	655.600	655.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.303.400	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.645.000	3.645.000	798.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.885.500	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	5.520.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		16.300.000	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.060.000	3.060.000	1.530.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.671.150	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
3 2 5 0 1 2.0 000 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	26.516.500	26.516.500	16.767.900	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		139.785.910	DPKHP		
3 2 5 0 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	173 Laporan	125.000.000	125.000.000	65.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		725.511.800	DPKHP		
3 2 5 0 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	6.400.000	6.400.000	4.950.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng	669.500.000	DPKHP		
3 2 5 0 1 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	6.400.000	6.400.000	4.950.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		669.500.000	DPKHP		
3 2 5 0 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	318.574.500	318.574.500	292.739.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng	210.750.209	DPKHP		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.01.2.000.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.514.300	100.514.300	100.514.300	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		79.350.209	DPKHP
3.2.01.2.000.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	218.060.200	218.060.200	192.225.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		131.400.000	DPKHP	
3.2.01.2.000.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	88.039.235	71.545.835	77.813.335			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng		674.711.454	DPKHP
3.2.01.2.000.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	36 Unit	24.131.500	24.131.500	34.135.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		167.194.848	DPKHP	
3.2.01.2.000.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	26.625.665	26.625.665	29.618.335	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		178.349.796	DPKHP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 5	0 1	2.0 9	000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	20.922.070	4.428.670	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		146.756.810	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8 Unit	6.500.000	6.500.000	5.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata RilauKab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		22.270.000	DPKHP
3	2 5	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.860.000	9.860.000	8.860.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		160.140.000	DPKHP
3	2 5	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.139,64 ton	2.900 ton	61.247.000	61.247.000	51.350.000						700.000.000	
3	2 5	0 3	2.0 1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/kota yang dikelola	1 paket	3 Unit	28.500.000	28.500.000	28.500.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan Kab. Soppeng	400.000.000	DPKHP
3	2 5	0 3	2.0 1	000 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	28.500.000	28.500.000	28.500.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing Kab. Soppeng, Marionawa,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		280.000.000	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
3	2 5	0 3	2.0 2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Mendapat Pembinaan dan/atau Pendampingan	3139.64 ton	4 Kelompok	5.250.000	5.250.000	1.750.000	Kaca Kab. Soppeng, Mariorawa, Limpomajang		sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Masyarakat				
3	2 5	0 3	2.0 2	000 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	5.250.000	5.250.000	1.750.000	Kaca Kab. Soppeng, Mariorawa, Kaca Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing Kab. Soppeng, Mariorawa, Attang Salo Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Mariorawa, Limpomajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan Kab. Soppeng		120.000.000	DPKHP
3	2 5	0 3	2.0 3		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	100 %	100 %	27.497.000	27.497.000	21.100.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		180.000.000	DPKHP
3	2 5	0 3	2.0 3	000 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	2 Layanan	27.497.000	27.497.000	21.100.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Mariorawa, Kaca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			180.000.000	DPKHP
3	2 5	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	451,98 ton	465,8 ton	248.518.875	248.518.875	591.436.875							1.150.000.000	
3	2 5	0 4	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	6 kelompok	6 kelompok	4.535.000	4.535.000	1.972.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan Kab. Soppeng		620.000.000	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
3 5	0 2 1	2.0 000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	6 Kelompok	4.535.000	4.535.000	1.972.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		620.000.000	DPKHP
3 5	0 4 4	2.0 000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	451.98 ton	4 Unit	243.983.875	243.983.875	589.464.875			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidayaan Ikan Kab. Soppeng	530.000.000	DPKHP
3 5	0 4 4	2.0 000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1 Unit	165.600.000	165.600.000	172.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		330.000.000	DPKHP
3 5	0 4 4	2.0 000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	3 Unit	78.383.875	78.383.875	416.664.875	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		200.000.000	DPKHP
3 5	0 6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	100 %	59,35 Kg/Kapita/Tahun	50.479.080	50.479.080	44.049.080						550.000.000	
3 5	0 1	2.0	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUP-HP) yang diterbitkan	5 unit usaha	3 Dokumen	15.190.000	15.190.000	13.760.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Agribisnis / Pelaku Usaha Perikanan Kab. Soppeng	20.000.000	DPKHP
3 5	0 1	2.0 000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	4 Dokumen	15.190.000	15.190.000	13.760.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20.000.000	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.2.0.2.0.5.6	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	30 kelompok	2 Pelaku Usaha	35.289.080	35.289.080	30.289.080					nilai tambah di dalam negeri.		87.500.000	DPKHP	
3.2.0.2.0.5.6	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35.289.080	35.289.080	30.289.080	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Kab. Soppeng		87.500.000	DPKHP	
3.2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.495.529.410	1.258.229.410	289.372.910							950.000.000		
3.2.7.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase distribusi dan kualitas sarana pertanian	570.58510.375.451111 827 KgKgKg	40 %	1.175.275.000	1.175.275.000	195.166.500							550.000.000		
3.2.7.2.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Lahan HPT Jumlah Unit Usaha (toko/ poultry shop) yang diawasi dalam Rangka Pengawasan dan Peredaran Pakan	37 unit 3 kelompok 535.97 ha 567 ekor	37 Unit 535,97 Ha	1.175.275.000	1.175.275.000	195.166.500					Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peternak / Kelompok Ternak Kab. Soppeng	550.000.000	DPKHP
3.2.7.2.3	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	16 Laporan	16 Laporan	1.175.275.000	1.175.275.000	195.166.500	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			550.000.000	DPKHP	
3.2.7.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	100,00 %	60,00%	2.475.000.000	0	0							250.000.000		
3.2.7.3	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang digunakan	1 unit	1 unit	2.475.000.000	0	0					Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ternak Kab. Soppeng	250.000.000	DPKHP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
3 2 7 3	0 2.0 000 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2 Unit	2 Unit	2.475.000.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		250.000.000	DPKHP	
3 2 7 4	0 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	0% 0,04 %	4 % 6,7 %	845.254.410	82.954.410	94.206.410						150.000.000		
3 2 7 4	0 2.0 000 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1400 ekor	5600 Ekor	77.746.660	77.746.660	88.998.660			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peternak, Kelompok Ternak dan Masyarakat sekitar Kab. Soppeng	110.000.000	DPKHP	
3 2 7 4	0 2.0 000 8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan	77.746.660	77.746.660	88.998.660	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		110.000.000	DPKHP	
3 2 7 4	0 2.0 000 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	85 %	-	762.300.000	0	0			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peternak, Kelompok Ternak dan Masyarakat sekitar	0	DPKHP	
3 2 7 4	0 2.0 000 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	-	762.300.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	DPKHP	
3 2 7 4	0 2.0 000 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	30 sampel	96 sampel	5.207.750	5.207.750	5.207.750			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan an industri	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta	Pelaku Usaha Peternakan Kab. Soppeng	40.000.000	DPKHP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	2 7 4	0 4	2.0 4	000 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	13 Laporan	13 Laporan	5.207.750	5.207.750	5.207.750	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		40.000.000	DPKHP
TOTAL									9.519.609.711	6.282.309.711	5.646.791.999					10.971.927.872		
SEKRETARIAT DAERAH																		
4					Bagian Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				223.928.500	232.961.750	214.457.830						253.131.000	
4	0 1								223.928.500	232.961.750	214.457.830						253.131.000	
4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	123.843.500	129.376.750	147.397.830						80.431.000	
4	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	109.143.500	114.676.750	134.097.830			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Pemerintahan/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	65.766.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.130.000	5.190.000	3.300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.127.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.336.800	16.810.050	13.102.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.761.400	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	92.676.700	92.676.700	117.695.330	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		52.877.600	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	14.700.000	14.700.000	13.300.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	Bagian Pemerintahan/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	14.665.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.0.0.2.0.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.700.000	14.700.000	13.300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			14.665.000	SETDA
4.0.0.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerja Sama Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan; Persentase Produk Hukum yang Dhasilkan;	100 %	100 % 2,5 % 100 % 100 %	100.085.000	103.585.000	67.060.000							172.700.000	
4.0.0.2.0.000.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah rumusan kebijakan administrasi tata pemerintahan yang disusun	10 Kebijakan	10 Kebijakan	86.055.000	89.555.000	61.810.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng		156.760.000	SETDA
4.0.0.2.0.000.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.605.000	12.605.000	12.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			40.600.000	SETDA
4.0.0.2.0.000.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	2 Dokumen	27.790.000	31.290.000	17.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			43.340.000	SETDA
4.0.0.2.0.000.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	45.660.000	45.660.000	31.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			72.820.000	SETDA
4.0.0.2.0.000.4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang disusun	1 Kebijakan	1 Kebijakan	14.030.000	14.030.000	5.250.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ Stakeholder		15.940.000	SETDA
4.0.0.2.0.000.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	30 Dokumen	11.020.000	11.020.000	3.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			10.940.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif								
4	0 1	0 2	2.0 4	000 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30 Laporan	30 Laporan	3.010.000	3.010.000	1.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	SETDA	
					Bagian Hukum				422.017.030	700.968.730	619.980.250						591.298.600		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				422.017.030	700.968.730	619.980.250						591.298.600		
4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH				422.017.030	700.968.730	619.980.250						591.298.600		
4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	140.152.810	169.104.510	126.256.040						212.216.600		
4	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	47.834.010	76.785.710	76.785.710			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Hukum/Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng/ Masyarakat		118.720.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700 Orang	700 Orang	47.834.010	76.785.710	76.785.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		118.720.000	SETDA	
4	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	U100 %	83.568.800	83.568.800	43.345.330			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Hukum/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		83.731.600	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.359.300	15.359.300	9.240.150	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.613.800	SETDA	
4	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	68.209.500	68.209.500	34.105.180	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		76.117.800	SETDA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	8.750.000	8.750.000	6.125.000	Semua Kel/Desa		-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Hukum/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		9.765.000	SETDA
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.750.000	8.750.000	6.125.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.765.000	SETDA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerja Sama Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan; Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan;	100 %	100 % 2.5 % 100 % 100 %	281.864.220	531.864.220	493.724.210							379.082.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi sesuai standar	100 %	100 %	281.864.220	531.864.220	493.724.210			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ Sekretariat Daerah/ Masyarakat		379.082.000	SETDA
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	49.876.000	149.876.000	135.970.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			98.807.000	SETDA
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus	128.330.000	128.330.000	124.523.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			148.065.000	SETDA
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	80 Dokumen	80 Dokumen	103.658.220	253.658.220	233.230.610	Kab. Soppeng, Lilirilau, ParotoKab. Soppeng, Liliraja, RompegadingKab. Soppeng, Marionawa, LimpomajangKab. Soppeng, Donri Donri, PesseKab. Soppeng, Lalabata, BottoKab.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			132.210.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Soppeng, Lalabata, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, OmpoKab. Soppeng, Mariorawa, Panincong							
	Bagian Organisasi				286.006.200	295.968.400	221.704.260							453.709.800	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				286.006.200	295.968.400	221.704.260							453.709.800	
4	01 SEKRETARIAT DAERAH				286.006.200	295.968.400	221.704.260							453.709.800	
4	001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	286.006.200	295.968.400	221.704.260							453.709.800	
4	0011 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	97.870.400	107.870.400	56.050.460			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Organisasi/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		70.042.800	SETDA
4	00116 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.800.000	1.800.000	1.080.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.074.000	SETDA
4	00117 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	18.852.600	18.852.600	11.360.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.612.800	SETDA
4	00119 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	77.217.800	87.217.800	43.609.660	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			59.356.000	SETDA
4	00118 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	7.000.000	7.000.000	6.650.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Organisasi/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		7.000.000	SETDA
4	001184 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	6.650.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			7.000.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.01.01.2.1.3	Penataan Organisasi	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi yang Disusun	10 Kebijakan	10 Kebijakan	181.135.800	181.098.000	159.003.800				-	Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ Sekretariat Daerah/ SKPD		376.667.000	SETDA
4.01.01.2.1.3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	64.340.000	64.340.000	54.464.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			102.050.400	SETDA	
4.01.01.2.1.3.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	61.658.600	61.654.000	53.797.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			70.594.400	SETDA	
4.01.01.2.1.3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	29.648.600	29.644.000	28.876.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			111.972.200	SETDA	
4.01.01.2.1.3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	12.340.000	12.340.000	9.854.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	SETDA	
4.01.01.2.1.3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.148.600	13.120.000	12.012.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			77.050.000	SETDA	
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				170.449.615	265.345.424	231.344.244								1.058.450.100	
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				170.449.615	265.345.424	231.344.244								1.058.450.100	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				170.449.615	265.345.424	231.344.244								1.058.450.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	51.115.600	60.915.800	29.457.420								33.568.650	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
4 0 1 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	42.365.600	52.165.800	27.707.420			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Perekonomian dan SDA/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		24.748.650	SETDA
4 0 1 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.723.400	8.723.400	5.956.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.747.050	SETDA
4 0 1 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	33.642.200	43.442.400	21.751.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			19.001.600	SETDA
4 0 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	8.750.000	8.750.000	1.750.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Perekonomian dan SDA/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		8.820.000	SETDA
4 0 1 1 2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.750.000	8.750.000	1.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.820.000	SETDA
4 0 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan; Tingkat Kematangan UKPBJ; Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan;	100 % 9,90 %	100 % 9 100%	119.334.015	204.429.624	201.886.824							1.024.881.450	
4 0 1 3 2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang disusun	5 Kebijakan	5 Kebijakan	47.583.000	97.782.800	95.240.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng/ SKPD/ Masyarakat		63.853.000	SETDA
4 0 1 3 2.0 1 000 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	47.583.000	97.782.800	95.240.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			63.853.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4	0 1	0 3	2.0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kegiatan Strategis Daerah yang memiliki SOP/Juknis	100 %	100 %	71.751.015	106.646.824	106.646.824	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng	961.028.450	SETDA
4	0 1	0 3	2.0 4	000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	71.751.015	106.646.824	106.646.824	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng	961.028.450	SETDA
					Bagian Pengadaan Barang/Jasa				425.642.200	711.924.200	304.900.050						457.771.600	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				425.642.200	711.924.200	304.900.050						457.771.600	
4	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	273.572.200	342.418.200	205.085.050						275.592.600	
4	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	123.033.800	161.747.800	95.734.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Pengadaan Barang/Jasa / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	168.740.800	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	16 Orang	123.033.800	161.747.800	95.734.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng	168.740.800	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	123.223.400	153.355.400	82.036.050			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Bagian Pengadaan Barang/Jasa / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	98.101.800	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.011.2.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	28.659.200	30.559.200	12.450.050	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		23.537.600	SETDA	
4.011.2.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	94.564.200	122.796.200	69.586.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		74.564.200	SETDA	
4.011.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	27.315.000	27.315.000	27.315.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Pengadaan Barang/Jasa / Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	8.750.000	SETDA	
4.011.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.315.000	27.315.000	27.315.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.750.000	SETDA	
4.011.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan; Tingkat Kematangan UKPBJ; Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan;	100 % 9,90 %	100 % 9 100%	152.070.000	369.506.000	99.815.000						182.179.000		
4.011.3.2.0003	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	152.070.000	369.506.000	99.815.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	SKPD terkait, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	182.179.000	SETDA	
4.011.3.2.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	550 Dokumen	550 Dokumen	104.720.000	19.400.000	19.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		126.319.500	SETDA	
4.011.3.2.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	26.400.000	26.400.000	22.445.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		23.749.500	SETDA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
4 0 1 1 2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.500.000	43.500.000	42.900.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.450.000	SETDA	
4 0 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerja Sama Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan; Persentase Produk Hukum yang Dihilangkan;	100 %	100 % 2.5 % 100 % 100 %	1.479.055.000	1.479.275.000	1.397.770.000						1.598.218.000		
4 0 1 2 2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	2 Kebijakan	2 Kebijakan	1.479.055.000	1.479.275.000	1.397.770.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Masyarakat	1.598.218.000	SETDA	
4 0 1 2 2.0 2 000 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	26 Dokumen	9 Dokumen	874.000.000	874.000.000	863.280.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.495.743.000	SETDA	
4 0 1 2 2.0 2 000 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	2 Dokumen	549.780.000	550.000.000	534.490.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		82.475.000	SETDA	
4 0 1 2 2.0 2 000 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	0 Dokumen	55.275.000	55.275.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	SETDA	
4	Bagian Umum dan Protokol UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				9.930.017.809	10.481.261.973	12.672.406.229						7.992.539.100		
4	SEKRETARIAT DAERAH				9.930.017.809	10.481.261.973	12.672.406.229						7.992.539.100		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	9.930.017.809	10.481.261.973	12.672.406.229							7.992.539.100	
4.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	107.200.000	100.200.000	100.200.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	41.850.000	SETDA
4.01.1.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	107.200.000	100.200.000	100.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		41.850.000	SETDA	
4.01.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	779.209.140	807.991.134	1.436.162.910				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Umum dan Protokol/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng/ Rujab KDH dan WKDH/ Rumdis/ Gedung Kantor	1.177.488.100	SETDA
4.01.1.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.711.270	31.703.264	222.967.440	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Lalabata, Bila Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.232.000	SETDA	
4.01.1.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.500.000	11.500.000	11.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		28.500.000	SETDA	
4.01.1.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	29.349.100	29.421.100	60.421.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		31.905.600	SETDA	
4.01.1.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	118.957.000	118.957.000	170.406.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		88.944.500	SETDA	
4.01.1.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	319.118.770	347.836.770	717.142.770	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		743.955.000	SETDA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
								Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau			Akuntabel dan Inovatif							
4	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	268.573.000	268.573.000	253.725.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		238.951.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	202.179.000	359.791.000	590.591.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng/ Rujab KDH dan WKDH/ Rumdis/ Gedung Kantor	36.110.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	11 Unit	15.000.000	15.000.000	110.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.750.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	50 Unit	187.179.000	344.791.000	479.991.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		27.360.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.499.554.000	4.449.480.390	4.524.894.370			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng/ Rujab KDH dan WKDH/ Rumdis/ Gedung Kantor	1.705.603.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.331.500.000	1.331.536.390	1.375.542.370	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.000.753.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.168.054.000	3.117.944.000	3.149.352.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		704.850.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	601.396.100	1.016.396.100	1.561.846.100			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional/ Barang Milik Daerah	1.458.011.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
4.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	208.733.200	208.733.200	198.473.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			955.086.000	SETDA
4.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94 Unit	45 Unit	308.922.900	308.922.900	709.182.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi HasilDana Alokasi Umum (DAU)Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			236.037.000	SETDA
4.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	125 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	SETDA
4.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	71 Unit	43.740.000	43.740.000	77.690.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			12.445.000	SETDA
4.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	30.000.000	445.000.000	566.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			252.943.000	SETDA
4.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keterpenuhan Pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu	100 %	100 %	1.528.444.569	1.529.375.049	1.776.375.049			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		2.192.732.000	SETDA
4.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	605.446.569	605.446.569	605.446.569	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			397.404.000	SETDA
4.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	14 Paket	2 Paket	35.000.000	35.000.000	263.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang			102.500.000	SETDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif								
4	0 1	0 1	2.1 1	000 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	SETDA	
4	0 1	0 1	2.1 1	000 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	862.998.000	863.928.480	882.928.480	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-			1.642.828.000	SETDA	
4	0 1	0 1	2.1 2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Keterpenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	1.134.535.000	1.134.528.300	1.271.891.800			-	-	KDH/WKDH/Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		1.380.745.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.1 2	000 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	675.664.650	675.658.400	690.648.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Alokasi Umum (DAU)	-	-			884.785.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.1 2	000 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	447.335.350	447.334.900	452.327.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			495.960.000	SETDA
4	0 1	0 1	2.1 3	000 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.535.000	11.535.000	128.915.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	-			0	SETDA
4	0 1	0 1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Acara Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi	100 %	100 %	1.077.500.000	1.083.500.000	1.410.445.000			-	-	Pemerintah Kabupaten Soppeng/KDH/WKDH/Sekretariat Daerah/Tamu Negara/Masyarakat		0	SETDA
4	0 1	0 1	2.1 4	000 1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan	96.000.000	96.000.000	96.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0	SETDA
4	0 1	0 1	2.1 4	000 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	981.500.000	987.500.000	1.314.445.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0	SETDA
					Bagian Perencanaan dan Keuangan				10.959.558.429	11.860.689.868	11.337.607.912							10.084.926.800	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				10.959.558.429	11.860.689.868	11.337.607.912							10.084.926.800	
4	0 1								10.959.558.429	11.860.689.868	11.337.607.912							10.084.926.800	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	10.959.558.429	11.860.689.868	11.337.607.912							10.084.926.800	
4 0 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	87.426.000	85.476.000	54.896.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Sekretariat Daerah/ Bappelitbangda/ BPKPD/ Inspektorat Daerah	106.695.000	SETDA
4 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.182.000	10.182.000	8.092.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.990.000	SETDA	
4 0 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.127.000	15.127.000	13.077.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		32.605.000	SETDA	
4 0 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	18.877.000	18.877.000	14.637.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		32.070.000	SETDA	
4 0 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	43.240.000	41.290.000	19.090.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		29.030.000	SETDA	
4 0 1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	10.356.033.569	11.329.204.622	11.032.851.132				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Sekretariat Daerah/ BPKPD/ Inspektorat	9.622.110.000	SETDA
4 0 1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	106 Orang/bulan	10.230.189.569	11.203.360.622	10.926.407.132	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.502.376.000	SETDA	
4 0 1 1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	94.000.000	94.000.000	76.650.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		83.500.000	SETDA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	31.844.000	31.844.000	29.794.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		36.234.000	SETDA	
4.01.2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.550.000	5.550.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	28.998.000	SETDA	
4.01.2.001.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	5.550.000	5.550.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		28.998.000	SETDA	
4.01.2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	485.173.860	413.134.246	223.960.780			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	304.373.800	SETDA	
4.01.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	83.197.300	79.349.050	66.235.350	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		53.694.400	SETDA	
4.01.2.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	401.976.560	333.785.196	157.725.430	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		250.679.400	SETDA	
4.01.2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	25.375.000	27.325.000	25.900.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		22.750.000	SETDA	
4.01.2.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	25.375.000	27.325.000	25.900.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		22.750.000	SETDA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
	Bagian Administrasi Pembangunan				142.530.300	142.530.300	103.632.980							102.027.050	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				142.530.300	142.530.300	103.632.980							102.027.050	
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			60.542.300	60.542.300	60.533.980							37.598.050	
4	011	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	50.742.300	50.742.300	50.733.980			-	-	Bagian Administrasi Pembangunan/ Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	33.048.050	SETDA
4	0116	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.770.000	1.770.000	1.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	2.070.000	SETDA
4	0116	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.160.300	14.160.300	8.843.550	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	6.152.450	SETDA
4	0116	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	34.812.000	34.812.000	40.610.430	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	24.825.600	SETDA
4	0118		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	9.800.000	9.800.000	9.800.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	4.550.000	SETDA
4	0118	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.800.000	9.800.000	9.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	4.550.000	SETDA
4	013		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan; Tingkat Kematangan UKPBJ;	100 % 9,90 %	100 % 9 100%	81.988.000	81.988.000	43.099.000					64.429.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	0 1 3	2.0 2													
4	0 1 3	2.0 2	000 1												
4	0 1 3	2.0 2	000 2												
TOTAL															
SEKRETARIAT DPRD															
4															
4	0 2														
4	0 2 1														
4	0 2 1	2.0 1	000 1												
4	0 2 1	2.0 1	000 2												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.462.000	14.462.000	11.570.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif			8.630.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	13.440.000	12.460.000	9.967.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			12.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	2.658.077.545	2.774.953.722	2.848.140.240			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		2.300.742.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.512.302.545	2.569.773.522	2.651.879.640	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.171.092.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	131.575.000	190.980.000	187.740.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			105.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	10.000.000	10.000.200	6.000.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	4.200.000	2.520.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0003	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	25.000.000	25.000.400	23.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	-		16.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000	25.000.400	23.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif			16.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	26.510.000	41.560.000	38.956.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		286.575.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	68 Paket	0	50.000	50.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			51.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	6.050.000	6.050.000	5.630.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.050.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	7.510.000	7.510.000	7.006.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			7.475.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	36 Dokumen	7.700.000	7.700.000	6.620.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	36 Orang	5.250.000	5.250.000	4.650.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	0	15.000.000	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			210.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	1.169.000.000	1.651.520.670	1.467.692.750				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		873.651.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	80.000.000	180.004.600	147.955.880	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		31.420.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	0	351.475.000	351.455.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.342.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		72.200.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.000.000	20.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		23.770.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	195.000.000	194.999.500	129.042.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		100.504.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	390.000.000	348.236.970	253.236.970	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		222.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000	372.804.600	402.002.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		303.415.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	69.000.000	94.000.000	94.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		108.000.000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Berbasis Elektronik pada SKPD							Dana Alokasi Umum (DAU)		Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	0	2.921.970.000	2.403.370.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	0	363.000.000	205.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	0	558.370.000	197.770.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			450.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0	2.000.600.000	2.000.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2.644.695.000	2.544.695.050	2.293.315.050			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.289.912.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	472.457.000	477.457.050	477.477.050	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			642.312.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.172.238.000	2.067.238.000	1.815.838.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.647.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	399.500.000	1.039.203.082	968.383.082			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			456.690.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
4.02.01.2.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	36 Unit	280.560.000	280.563.082	357.163.082	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		312.195.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	71.600.000	71.600.000	44.180.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		24.170.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	47.340.000	687.040.000	567.040.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		120.325.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.100.5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang terlayani administrasi keuangan dan kesejahteraannya	100%	100%	13.171.703.204	12.954.539.799	12.954.539.799			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	12.023.853.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.100.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	13.171.703.204	12.849.489.799	12.849.489.799	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		11.592.203.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.100.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	0	105.000.000	105.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		294.150.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.100.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	0	50.000	50.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		137.500.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.100.6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Jasa Administrasi DPRD yang disediakan	4 Paket	4 Paket	1.155.207.000	1.555.947.000	1.468.447.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	1.641.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.100.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	0	173.600.000	86.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		115.000.000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.1.000.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.155.207.000	1.382.347.000	1.382.347.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.526.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD; Persentase Penetapan Ranperda; Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;	100%	100 % 100 % 100 %	5.099.271.502	7.592.881.300	7.256.476.820							5.000.000.000	
4.02.2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pembentukan PERDA yang difasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	291.099.600	336.500.200	268.540.200			-	-	-		224.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.1.000.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	51.099.600	142.600.200	74.640.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			55.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.1.000.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000	53.900.000	53.900.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.1.000.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000	140.000.000	140.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			139.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Yang Difasilitasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	17.550.450	17.548.200	17.548.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			45.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.2.000.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.050	1.949.600	1.949.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.2.000.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.050	1.949.600	1.949.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.2.2.000.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.100	3.899.800	3.899.800	Kab. Soppeng, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Memantapkan Tata Kelola			9.900.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
								Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	(PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)		Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif							
4	0 2	0 2	2.0 2	000 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.100	3.899.800	3.899.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.900.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 2	000 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.050	1.949.600	1.949.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 2	000 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.100	3.899.800	3.899.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Yang Difasilitasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	15.239.600	15.239.600	15.239.600			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	20.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 3	000 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000	1.470.000	1.470.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 3	000 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000	1.470.000	1.470.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 3	000 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000	1.470.000	1.470.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.450.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 3	000 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000	1.470.000	1.470.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.450.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
4 0 2 2 2 3 000 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000	1.470.000	1.470.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.450.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 3 000 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.000	1.470.000	1.470.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.450.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 3 000 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	4.470.000	4.470.000	4.470.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 3 000 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.600	1.949.600	1.949.600	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 4 000 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	859.597.500	982.198.100	963.748.100			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	842.475.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 4 000 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 4 000 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	2 Orang	96.000.000	144.000.000	144.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		60.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 4 000 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		90.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4 0 2 2 2 4 000 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000	12.100.600	12.100.600	Kab. Soppeng, Lalabata,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		12.100.000	SEKRETARIAT DPRD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4	0 2	0 2	2.0 4	000 8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	181.497.500	256.097.500	237.647.500	Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
4	0 2	0 2	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.010.999.800	1.020.126.400	1.006.876.400			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		1.986.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 5	000 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	10.999.800	5.999.800	3.899.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			19.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 5	000 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000	1.014.126.600	1.002.976.600	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.967.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.904.784.552	5.221.268.800	4.984.524.320			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		1.879.925.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 8	000 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000.000	4.917.568.800	4.770.824.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.567.599.200	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 8	000 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.700.000	3.700.000	3.700.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	0 2	0 2	2.0 8	000 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	651.084.552	300.000.000	210.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			212.325.800	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)												
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
TOTAL															26.407.886.251	33.160.213.823	31.768.799.941								26.293.813.000	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																										
						6.028.577.280	6.028.577.280	5.842.077.838							6.193.445.255											
5						6.028.577.280	6.028.577.280	5.842.077.838							6.193.445.255											
5	0 1					5.936.077.280	5.928.577.280	5.587.182.838							6.018.945.255											
5	0 1	0 1				5.202.715.280	5.195.215.280	4.741.965.838							5.227.200.255											
5	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100% 100% 100%	100% 100% 100%	15.600.000	13.250.000	13.250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	36.583.255	BAPPELITBANG DA								
5	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000	3.370.000	3.370.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		21.789.000	BAPPELITBANG DA								
5	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000	3.620.000	3.620.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.255	BAPPELITBANG DA								
5	0 1	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000	3.620.000	3.620.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		3.621.000	BAPPELITBANG DA								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	0 1 1 1 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	2.400.000	2.640.000	2.640.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan inovatif			11.153.000	BAPPELITBANG DA
5	0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.899.710.080	2.866.589.280	2.934.879.838			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.059.505.000	BAPPELITBANG DA
5	0 1 1 2 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.894.910.080	2.861.789.280	2.930.079.838	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.035.478.000	BAPPELITBANG DA
5	0 1 1 2 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.738.000	BAPPELITBANG DA
5	0 1 1 2 000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			17.289.000	BAPPELITBANG DA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Semua Kel/Desa		dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif							
5	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	711.138.000	733.568.800	480.564.800				404.498.000	BAPPELITBANG DA		
5	0 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	3.252.480	2.601.060	2.601.060	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.852.000	BAPPELITBANG DA
5	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	50.000.000	206.050.000	186.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		37.450.000	BAPPELITBANG DA
5	0 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	37.530.000	18.880.000	6.630.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		48.573.000	BAPPELITBANG DA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
5 0 1 1 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	130.300.000	19.283.640	15.283.640	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		27.256.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 1 1 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	100.055.520	53.246.100	53.246.100	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		68.791.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 1 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	150 Laporan	390.000.000	433.508.000	216.754.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		217.576.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	842.600.000	955.920.000	707.890.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		48.150.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 1 1 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	17 Unit	842.600.000	955.920.000	707.890.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		48.150.000	BAPPELITBANG DA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.0.0.2.0.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	548.667.200	548.667.200	555.421.200			narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	514.493.000	BAPPELITBANG DA
5.0.0.2.0.000.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.210.000	171.210.000	177.964.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		183.903.000	BAPPELITBANG DA	
5.0.0.2.0.000.4.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	377.457.200	377.457.200	377.457.200	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		330.590.000	BAPPELITBANG DA	
5.0.0.2.0.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	185.000.000	77.220.000	49.960.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	163.971.000	BAPPELITBANG DA	
5.0.0.2.0.000.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	10 Unit	45.000.000	45.000.000	39.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		86.356.000	BAPPELITBANG DA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 1 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20 Unit	50.000.000	12.500.000	8.710.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			12.615.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	90.000.000	19.720.000	2.250.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			65.000.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD; Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD;	100 %	100 % 100 %	491.732.000	491.732.000	596.417.000							415.000.000	
5 0 1 2 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	413.232.000	413.232.000	536.996.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		380.000.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 2 2.0 1 000 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	132.479.000	132.479.000	114.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.000.000	BAPPELITBANG DA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.012.2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	32.150.000	32.150.000	22.650.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.000.000	BAPPELITBANG DA
5.012.2.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	73.224.000	73.224.000	58.997.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			100.000.000	BAPPELITBANG DA
5.012.2.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	3 Dokumen	175.379.000	175.379.000	340.949.400	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			180.000.000	BAPPELITBANG DA
5.012.2.0002	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan SKPD	100%	100%	5.550.000	5.550.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		15.000.000	BAPPELITBANG DA
5.012.2.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	34 Orang	34 Orang	5.550.000	5.550.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	BAPPELITBANG DA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.0.0.2.0	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	72.950.000	72.950.000	59.420.600			pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
5.0.0.2.0.0003	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	72.950.000	72.950.000	59.420.600			pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		20.000.000	BAPPELITBANG DA	
5.0.0.2.0.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	72.950.000	72.950.000	59.420.600	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.000.000	BAPPELITBANG DA	
5.0.0.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100% 100% 100%	241.630.000	241.630.000	248.800.000								376.745.000	
5.0.0.3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	100%	100%	96.700.000	113.360.000	125.438.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		146.880.000	BAPPELITBANG DA
5.0.0.3.1.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.105.000	4.105.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			8.800.000	BAPPELITBANG DA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Daerah Bidang Pemerintahan								memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif				
5 0 1 3	2.0 000 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	6.950.000	6.950.000	7.350.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		11.330.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 3	2.0 000 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	4.105.000	4.105.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.400.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 3	2.0 000 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	81.540.000	98.200.000	118.088.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		122.350.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 3	2.0 000 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang SDA	100%	100%	75.800.000	62.720.000	65.712.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	84.680.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 3	2.0 000 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	2 Laporan	2 Laporan	8.550.000	8.550.000	6.650.000	Kab. Soppeng, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi	Memantapkan Tata Kelola		11.330.000	BAPPELITBANG DA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						Kecamatan, Semua Kel/Desa		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
5.01.03.2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	4.400.000	4.400.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.400.000	BAPPELITBANG DA
5.01.03.2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	62.850.000	49.770.000	59.062.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			68.950.000	BAPPELITBANG DA
5.01.03.2.0003	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Infrastruktur Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan	100%	100%	69.130.000	65.550.000	57.650.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		145.185.000	BAPPELITBANG DA
5.01.03.2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	4.400.000	1.900.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.400.000	BAPPELITBANG DA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 1 3 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	11.550.000	11.550.000	9.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			11.330.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 3 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	13.330.000	7.660.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.400.000	BAPPELITBANG DA
5 0 1 3 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	39.850.000	44.440.000	48.250.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			125.055.000	BAPPELITBANG DA
5 0 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				92.500.000	100.000.000	254.895.000							174.500.000	
5 0 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan; Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah; Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah;	100% 100% 100% 60%	100% 100% 100% 60%	92.500.000	100.000.000	254.895.000							174.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5 0 5 2 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan	100%	100%	12.651.000	20.151.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		74.500.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 5 2 1 001 4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	12.651.000	20.151.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		74.500.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 5 2 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi	100%	100%	79.849.000	79.849.000	254.895.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		100.000.000	BAPPELITBANG DA	
5 0 5 2 4 000 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	79.849.000	79.849.000	254.895.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		100.000.000	BAPPELITBANG DA	
TOTAL					6.028.577.280	6.028.577.280	5.842.077.838							6.193.445.255		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				162.691.039.616	161.506.655.647	152.698.019.437							172.301.056.705		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				162.691.039.616	161.506.655.647	152.698.019.437							172.301.056.705		
5	02				162.691.039.616	161.506.655.647	152.698.019.437							172.301.056.705		
5	021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	31.558.828.536	23.454.861.740	22.073.689.759						30.793.254.080		
5	0211	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100 %	31.750.000	31.750.000	24.949.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		31.750.000	BPKPD
5	0211000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9 Dokumen	16.550.000	16.550.000	13.145.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		16.550.000	BPKPD	
5	02110006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	15.200.000	15.200.000	11.804.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.200.000	BPKPD	
5	02112	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	19.644.088.036	10.617.824.240	10.323.064.130			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		19.335.331.205	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	19.579.998.036	10.553.734.240	10.267.438.130	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			19.271.241.205	BPKPD
5.02.01.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	58.200.000	58.200.000	52.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			58.200.000	BPKPD
5.02.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	5.890.000	5.890.000	3.426.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.890.000	BPKPD
5.02.01.2.000.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	45.500.000	65.200.000	81.950.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		45.500.000	BPKPD
5.02.01.2.000.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	7 Dokumen	41.500.000	48.700.000	65.450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			41.500.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 2 0 1 2.0 5 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	1 Orang	4.000.000	16.500.000	16.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.000.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	811.163.192	1.702.048.792	906.634.233			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.002.059.592	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.733.092	14.733.092	10.174.692	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			14.733.092	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.450.000	8.450.000	5.773.100	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.450.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	240.500.100	240.038.700	162.325.484	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			240.500.100	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	0 2 1 6 7	0 2 1 6 7	2.0 6 7	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	197.000.000	198.450.000	122.347.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif		197.000.000	BPKPD
5	0 2 1 6 8	0 2 1 6 8	2.0 6 8	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000	25.500.000	18.817.605	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	BPKPD
5	0 2 1 6 9	0 2 1 6 9	2.0 6 9	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	324.980.000	1.214.877.000	587.196.052	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		324.980.000	BPKPD
5	0 2 1 7	0 2 1 7	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	370.000.000	202.800.000	89.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng	370.000.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
5 0 2 0 1 2.0 000 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	2 Unit	370.000.000	202.800.000	89.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			370.000.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 000 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	10.516.807.308	10.567.718.708	10.527.531.796			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		9.769.093.283	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 000 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36 Laporan	9.780.920.908	9.831.832.308	9.811.445.396	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.033.206.883	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 000 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	735.886.400	735.886.400	716.086.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Alokasi Umum (DAU)Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			735.886.400	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 000 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik	100 %	100 %	139.520.000	267.520.000	119.760.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		239.520.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 2 0 1 2.0 9 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	295 Unit	1 Unit	39.000.000	39.000.000	36.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			39.000.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	300 Unit	61.000.000	61.000.000	64.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			61.000.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	32 Unit	19.520.000	19.520.000	9.760.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			19.520.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	138.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.000.000	BPKPD
5 0 2 0 1 2.0 9 001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			100.000.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
										dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.								
5 0 2	0 2	0 2	2.0		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD; Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik; Persentase Penetapan APBD dan Regulasi Anggaran Tepat Waktu; Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Persentase Penurunan SILPA; Persentase laporan keuangan tepat waktu;	100 %	30%40%100%100%9,05%10 0%	129.412.795.36 9	136.144.606.19 6	128.558.519.84 6				139.989.414.914			
5 0 2	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100 %	100 %	1.049.215.200	1.049.215.200	993.597.630			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengelola Rencana Keuangan Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	1.049.215.200	BPKPD
5 0 2	0 2	0 2	2.0 1	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	535.205.000	535.205.000	511.455.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		535.205.000	BPKPD
5 0 2	0 2	0 2	2.0 1	000 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	484.615.200	484.615.200	460.667.630	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		484.615.200	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
5 0 2 2 1 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	29.395.000	29.395.000	21.475.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		29.395.000	BPKPD	
5 0 2 2 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100 %	100 %	348.375.000	365.575.000	376.752.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengelola Perbendaharaan Daerah	394.575.000	BPKPD	
5 0 2 2 2 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15.150.000	15.150.000	7.725.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.150.000	BPKPD	
5 0 2 2 2 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	16.200.000	16.200.000	14.260.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		16.200.000	BPKPD	
5 0 2 2 2 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	27.445.000	27.445.000	24.817.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		27.445.000	BPKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 2 0 2 2.0 000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6 Laporan	6 Laporan	32.900.000	32.900.000	29.570.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			32.900.000	BPKPD
5 0 2 0 2 2.0 000 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	6 Dokumen	29.150.000	29.150.000	28.050.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			29.150.000	BPKPD
5 0 2 0 2 2.0 001 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	227.530.000	244.730.000	272.330.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			273.730.000	BPKPD
5 0 2 0 2 2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100 %	100 %	265.510.300	576.910.300	252.390.820			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengelola Laporan Keuangan Daerah		265.510.300	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.02.2.000.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	2 Laporan	24.764.500	24.764.500	26.564.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			24.764.500	BPKPD	
5.02.2.000.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Dokumen	34 Dokumen	42.081.000	42.081.000	40.049.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			42.081.000	BPKPD	
5.02.2.000.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan dan Semesteran	612 Laporan	612 Laporan	41.965.000	41.965.000	32.613.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			41.965.000	BPKPD	
5.02.2.000.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	74.285.000	385.685.000	72.540.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			74.285.000	BPKPD	
5.02.2.000.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	36.662.800	36.662.800	34.872.320	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			36.662.800	BPKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								narkoba, judi, dan penyeludupan.					
5 0 2 2 2 3 000 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	45.752.000	45.752.000	45.752.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			45.752.000	BPKPD
5 0 2 2 2 4 000 3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100 %	100 %	127.749.694.869	134.152.905.696	126.935.779.396			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengelola Keuangan Daerah		138.280.114.414	BPKPD
5 0 2 2 2 4 000 3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	191.562.499	194.652.216	194.652.216	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			191.562.499	BPKPD
5 0 2 2 2 4 000 4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.026.209.199	6.026.209.199	6.026.209.199	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			6.026.209.199	BPKPD
5 0 2 2 2 4 000 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	112.294.355.400	114.461.704.600	112.046.918.300	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			112.294.355.400	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 2 2 2.0 4 000 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	4.172.465.521	8.405.237.431	3.602.897.431	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			16.858.328.116	BPKPD
5 0 2 2 2.0 4 001 0	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	5.065.102.250	5.065.102.250	5.065.102.250	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.909.659.200	BPKPD
5 0 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100 %	5%	643.736.832	825.536.832	1.004.526.832							713.736.832	
5 0 2 3 2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi	100 %	100 %	643.736.832	825.536.832	1.004.526.832			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah		713.736.832	BPKPD
5 0 2 3 2.0 1 000 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8.150.000	8.150.000	204.890.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.150.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
5 0 2 0 3 2.0 1 000 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	28.225.000	28.225.000	19.385.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		28.225.000	BPKPD		
5 0 2 0 3 2.0 1 000 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	BPKPD		
5 0 2 0 3 2.0 1 000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	442.961.832	624.761.832	621.491.832	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		522.961.832	BPKPD		
5 0 2 0 3 2.0 1 001 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	93.350.000	93.350.000	91.960.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		93.350.000	BPKPD		
5 0 2 0 3 2.0 1 001 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 Laporan	5 Laporan	61.050.000	61.050.000	58.700.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		61.050.000	BPKPD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital.	100 %	15% 100 % 100 %	1.075.678.879	1.081.650.879	1.061.283.000				narkoba, judi, dan penyeludupan.			804.650.879	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	1.075.678.879	1.081.650.879	1.061.283.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi	804.650.879	BPKPD
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.870.879	7.870.879	3.935.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.870.879	BPKPD
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	37.200.000	37.200.000	35.880.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		51.600.000	BPKPD
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	21.150.000	89.250.000	70.450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		21.150.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04.2.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	213.860.000	243.860.000	61.930.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	dan penyalangan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalangan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			123.860.000	BPKPD
5.02.04.2.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	679.098.000	518.570.000	494.510.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalangan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			325.870.000	BPKPD
5.02.04.2.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	108.600.000	108.600.000	103.700.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalangan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			62.400.000	BPKPD
5.02.04.2.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.900.000	76.300.000	140.878.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalangan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			7.900.000	BPKPD
5.02.04.2.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	0	0	150.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			150.000.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata				37.767.100	37.767.100	21.848.150							37.767.100	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				37.767.100	37.767.100	21.848.150							37.767.100	
5	02 KEUANGAN				37.767.100	37.767.100	21.848.150							37.767.100	
5	021 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	27.267.100	27.267.100	14.848.150							27.267.100	
5	0216 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	27.267.100	27.267.100	14.848.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		27.267.100	BPKPD
5	02160005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	BPKPD	
5	02160007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.567.900	BPKPD	
5	02160009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.199.200	15.199.200	7.480.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.199.200	BPKPD	

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15% 100 % 100 %	10.500.000	10.500.000	7.000.000					dan penyeludupan.			10.500.000	
5.02.04.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	10.500.000	10.500.000	7.000.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi		10.500.000	BPKPD
5.02.04.1.001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	10.500.000	7.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.500.000	BPKPD	
		UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri			27.497.100	27.497.100	15.808.150								27.497.100	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			27.497.100	27.497.100	15.808.150								27.497.100	
5.02					27.497.100	27.497.100	15.808.150								27.497.100	
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	21.997.100	21.997.100	12.298.150								21.997.100	
5.02.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	21.997.100	21.997.100	12.298.150				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		21.997.100	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
5 0 2 0 1 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	BPKPD	
5 0 2 0 1 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.567.900	BPKPD	
5 0 2 0 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.929.200	9.929.200	4.930.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.929.200	BPKPD	
5 0 2 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15% 100 % 100 %	5.500.000	5.500.000	3.510.000						5.500.000		
5 0 2 0 4 2.0 000 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	5.500.000	5.500.000	3.510.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng	5.500.000	BPKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
5 0 2 4 1 001 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000	3.510.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.500.000	BPKPD	
	UPTD Wilayah Kecamatan Liliraja				29.687.100	29.687.100	17.118.150						31.557.100		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29.687.100	29.687.100	17.118.150						31.557.100		
5 0 2	KEUANGAN				29.687.100	29.687.100	17.118.150						31.557.100		
5 0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100%	100%	23.187.100	23.187.100	12.808.150						25.057.100		
5 0 2 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	23.187.100	23.187.100	12.808.150			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	25.057.100	BPKPD	
5 0 2 1 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	BPKPD	
5 0 2 1 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.567.900	BPKPD	
5 0 2 1 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.119.200	11.119.200	5.440.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.989.200	BPKPD	
5 0 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15% 100 % 100 %	6.500.000	6.500.000	4.310.000						6.500.000		
5 0 2 4 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	6.500.000	6.500.000	4.310.000			Memperkuat reformasi	Memantapkan Tata Kelola	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan	6.500.000	BPKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
										politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng							
5	0 2	0 4	2.0 1	001 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	6.500.000	4.310.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.500.000	BPKPD	
					UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau				33.557.100	33.557.100	19.437.750					33.096.700			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				33.557.100	33.557.100	19.437.750					33.096.700			
5	0 2				KEUANGAN				33.557.100	33.557.100	19.437.750					33.096.700			
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100%	100%	25.057.100	25.057.100	13.828.150					24.596.700			
5	0 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	25.057.100	25.057.100	13.828.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		24.596.700	BPKPD
5	0 2	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	BPKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
5 0 2 1 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Liliilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.567.900	BPKPD		
5 0 2 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.989.200	12.989.200	6.460.000	Kab. Soppeng, Liliilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.528.800	BPKPD		
5 0 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15% 100 % 100 %	8.500.000	8.500.000	5.609.600						8.500.000			
5 0 2 4 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	8.500.000	8.500.000	5.609.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng	8.500.000	BPKPD		
5 0 2 4 1 001 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000	8.500.000	5.609.600	Kab. Soppeng, Liliilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.500.000	BPKPD		
	UPTD Wilayah Kecamatan Marionawa				27.497.100	27.497.100	15.807.950						27.497.100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			27.497.100	27.497.100	15.807.950							27.497.100			
5	0 2	KEUANGAN			27.497.100	27.497.100	15.807.950							27.497.100			
5	0 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	21.997.100	21.997.100	12.298.150						21.997.100			
5	0 2	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	21.997.100	21.997.100	12.298.150		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng	21.997.100	BPKPD	
5	0 2	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	1.500.000	BPKPD
5	0 2	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	10.567.900	BPKPD
5	0 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.929.200	9.929.200	4.930.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	9.929.200	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital.	100 %	15% 100 % 100 %	5.500.000	5.500.000	3.509.800							5.500.000	
5.02.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	5.500.000	5.500.000	3.509.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		5.500.000	BPKPD
5.02.4.2.01.001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000	3.509.800	Kab. Soppeng, Marionawa, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.500.000	BPKPD	
	UPTD Wilayah Kecamatan Marionawo				33.727.100	33.727.100	19.334.150							33.727.100	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				33.727.100	33.727.100	19.334.150							33.727.100	
5.02.4.2.01.0005	KEUANGAN				33.727.100	33.727.100	19.334.150							33.727.100	
5.02.4.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	25.227.100	25.227.100	13.828.150							25.227.100	
5.02.4.2.01.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	25.227.100	25.227.100	13.828.150			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		25.227.100	BPKPD
5.02.4.2.01.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Marionawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	BPKPD
5.02.4.2.01.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Marionawo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			10.567.900	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	0 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13.159.200	13.159.200	6.460.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marionwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	13.159.200	BPKPD
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan;Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15%100 %100 %	8.500.000	8.500.000	5.506.000						8.500.000	
5	0 2	0 4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	8.500.000	8.500.000	5.506.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	8.500.000	BPKPD
5	0 2	0 4	2.0 1	001 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000	8.500.000	5.506.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.500.000	BPKPD
					UPTD Wilayah Kecamatan Ganra				25.137.100	25.137.100	14.403.150						25.137.100	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				25.137.100	25.137.100	14.403.150						25.137.100	
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	20.637.100	20.637.100	11.618.150						20.637.100	
5	0 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	20.637.100	20.637.100	11.618.150			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	20.637.100	BPKPD
5	0 2	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	BPKPD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
5 0 2 1 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Gandra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.567.900	BPKPD		
5 0 2 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.569.200	8.569.200	4.250.000	Kab. Soppeng, Gandra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.569.200	BPKPD		
5 0 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15% 100 % 100 %	4.500.000	4.500.000	2.785.000						4.500.000			
5 0 2 4 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	4.500.000	4.500.000	2.785.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	4.500.000	BPKPD		
5 0 2 4 1 001 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	2.785.000	Kab. Soppeng, Gandra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.500.000	BPKPD		
	UPTD Wilayah Kecamatan Citta				24.117.100	24.117.100	13.893.150						24.117.100			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				24.117.100	24.117.100	13.893.150						24.117.100			
5 0 2					24.117.100	24.117.100	13.893.150						24.117.100			
5 0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	19.617.100	19.617.100	11.108.150						19.617.100			
5 0 2 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	19.617.100	19.617.100	11.108.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng	19.617.100	BPKPD		
5 0 2 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.500.000	1.500.000	750.000	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		1.500.000	BPKPD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
5	0 2	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.567.900	10.567.900	6.618.150	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.567.900	BPKPD	
5	0 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.549.200	7.549.200	3.740.000	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.549.200	BPKPD	
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah; Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan; Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital;	100 %	15% 100 % 100 %	4.500.000	4.500.000	2.785.000						4.500.000		
5	0 2	0 4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	4.500.000	4.500.000	2.785.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		4.500.000	BPKPD
5	0 2	0 4	2.0 1	001 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	2.785.000	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		4.500.000	BPKPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL							162.930.026.416	161.745.642.447	152.835.670.037					172.541.453.105	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
							6.135.309.466	6.595.009.180	6.385.067.045					11.229.066.000	
5							6.135.309.466	6.595.009.180	6.385.067.045					11.229.066.000	
5	03						5.240.177.466	5.615.584.180	5.899.142.045					8.229.066.000	
5	03	01					4.572.892.266	5.016.002.180	5.071.580.245					6.979.066.000	
5	03	01	2.0				29.050.000	35.050.000	37.225.000					80.000.000	BKPSDM
5	03	01	2.0	000	1		14.625.000	17.625.000	16.875.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB			25.000.000	BKPSDM
5	03	01	2.0	000	2		4.400.000	7.400.000	4.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB			20.000.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01.2.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000	4.400.000	7.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	BKPSDM
5.03.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	5.625.000	5.625.000	8.550.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.000.000	BKPSDM
5.03.01.2.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.642.040.466	3.651.740.180	3.811.923.930			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	BKPSDM Kab. Soppeng		4.537.725.000	BKPSDM
5.03.01.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.614.365.466	3.624.065.180	3.779.473.930	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.500.725.000	BKPSDM
5.03.01.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98 Dokumen	98 Dokumen	15.425.000	15.425.000	16.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5 0 3 1	0 2 4	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	12.250.000	12.250.000	16.350.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		22.000.000	BKPSDM
5 0 3 1	0 3 3	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD	100 %	100 %	25.998.000	25.998.000	29.948.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	BKPSDM Kab. Soppeng	11.000.000	BKPSDM
5 0 3 1	0 3 6	2.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	25.998.000	25.998.000	29.948.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		11.000.000	BKPSDM
5 0 3 1	0 5	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.750.000	4.750.000	12.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	BKPSDM Kab. Soppeng	24.000.000	BKPSDM
5 0 3 1	0 5 3	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	3.650.000	3.650.000	11.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		13.000.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 3 0 1 2.0 000 5 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif			1.000.000	BKPSDM
5 0 3 0 1 2.0 000 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100 %	100 %	417.425.800	510.036.000	513.955.315			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	BKPSDM Kab. Soppeng		708.165.000	BKPSDM
5 0 3 0 1 2.0 000 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1.922.880	1.922.880	1.922.880	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	BKPSDM
5 0 3 0 1 2.0 000 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	2.570.000	2.570.000	2.570.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.050.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
5 0 3 1 2.0 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	23.390.800	17.140.800	12.640.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		110.000.000	BKPSDM		
5 0 3 1 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	83.500.000	65.000.000	36.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.800.000	BKPSDM		
5 0 3 1 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	91.826.250	55.353.250	42.456.650	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		126.704.000	BKPSDM		
5 0 3 1 2.0 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	11.794.300	9.180.900	9.180.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		26.611.000	BKPSDM		
5 0 3 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	202.421.570	358.868.170	408.434.085	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		399.000.000	BKPSDM		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100 %	100 %	12.200.000	53.000.000	0			narkoba, judi, dan penyeludupan.		BKPSDM Kab. Soppeng		300.000.000	BKPSDM
503012070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	12.200.000	53.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			300.000.000	BKPSDM
50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpuenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100 %	100 %	371.378.000	371.378.000	309.578.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN		279.000.000	BKPSDM
503012080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000	230.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			240.000.000	BKPSDM
503012080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141.378.000	141.378.000	109.578.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			39.000.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik (%)	100 %	100 %	70.050.000	364.050.000	356.350.000				dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
5.03.01.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	36.000.000	36.000.000	36.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	BKPSDM Kab. Soppeng		1.039.176.000	BKPSDM
5.03.01.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	14.000.000	8.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			52.343.000	BKPSDM
5.03.01.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15 Unit	9.050.000	9.050.000	7.850.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			15.000.000	BKPSDM
5.03.01.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	1 Unit	0	300.000.000	300.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang			250.000.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
										serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif							
5	0 3	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	11.000.000	11.000.000	9.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		681.463.000	BKPSDM
5	0 3	0 2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi; Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya; Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya; Persentase Pegawai dengan SKP Bemilai Baik;	0,55 % 100 %	75% 3,2% 4% 100%	667.285.200	599.582.000	827.561.800					1.250.000.000		
5	0 3	0 2	2.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian	5221 ASN	5221 ASN	93.566.000	93.566.000	86.696.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN	566.310.000	BKPSDM
5	0 3	0 2	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000	10.000.000	7.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		478.880.000	BKPSDM
5	0 3	0 2	2.0 1	000 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.180.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		24.000.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemberhentian	Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
5 03 02 2.0 000 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga	4 Lembaga	29.766.000	34.766.000	42.846.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			25.000.000	BKPSDM
5 03 02 2.0 001 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	43.800.000	43.800.000	33.170.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			38.430.000	BKPSDM
5 03 02 2.0 000 2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kapasitasnya	1089 ASN	1089 ASN	69.825.000	66.400.000	58.900.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN		62.700.000	BKPSDM
5 03 02 2.0 000 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000	40.000.000	32.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.575.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
5 0 3 2 2 000 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	800 Dokumen	29.825.000	26.400.000	26.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			45.125.000	BKPSDM	
5 0 3 2 3 000 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya	232 ASN 25 ASN	232 ASN 25 ASN	430.044.200	368.266.000	643.615.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN		530.790.000	BKPSDM	
5 0 3 2 3 000 2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	418.544.200	10.000.000	276.349.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			200.000.000	BKPSDM	
5 0 3 2 3 000 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang	25 Orang	1.500.000	210.450.000	214.050.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			244.850.000	BKPSDM	
5 0 3 2 3 001 2	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	144.816.000	150.216.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.940.000	BKPSDM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.2.03.001.4	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	232 Orang	232 Orang	5.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			65.000.000	BKPSDM
5.03.2.04.000.1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100 %	100 %	73.850.000	71.350.000	38.350.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN		90.200.000	BKPSDM
5.03.2.04.000.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	BKPSDM
5.03.2.04.000.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	650 Orang	650 Orang	66.850.000	66.850.000	33.850.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			81.635.000	BKPSDM
5.03.2.04.000.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	21 Orang	21 Orang	5.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.565.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 0 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				895.132.000	979.425.000	485.925.000				dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			3.000.000.000	
5 0 4 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional; Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan; Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi; Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	20 JP	60% 15% 30% 5%	895.132.000	979.425.000	485.925.000							3.000.000.000	
5 0 4 0 2 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	400 ASN	400 ASN	19.975.000	9.675.000	9.675.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kab. Soppeng	445.003.000	BKPSDM
5 0 4 0 2 1 000 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang	40 Orang	10.750.000	450.000	450.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		442.503.000	BKPSDM
5 0 4 0 2 1 000 4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	9.225.000	9.225.000	9.225.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.500.000	BKPSDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
5 0 4 2 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	292 ASN	292 ASN	875.157.000	969.750.000	476.250.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kab. Soppeng		2.554.997.000	BKPSDM
5 0 4 2 2 000 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	873.132.000	967.725.000	474.225.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.550.472.000	BKPSDM	
5 0 4 2 2 000 8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	2.025.000	2.025.000	2.025.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.525.000	BKPSDM	
TOTAL					6.135.309.466	6.595.009.180	6.385.067.045							11.229.066.000		
INSPEKTORAT DAERAH																
6	INSPEKTORAT DAERAH				11.236.739.396	15.582.664.976	14.860.149.014								10.064.529.000	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.236.739.396	15.582.664.976	14.860.149.014								10.064.529.000	
6 0 1	INSPEKTORAT DAERAH				11.236.739.396	15.582.664.976	14.860.149.014								10.064.529.000	
6 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah	100 %	100 %	8.300.426.396	11.795.872.676	11.359.957.014								7.929.529.000	
6 0 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan dan yang disusun tepat waktu. Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu. Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu.	100%	100 %	23.220.000	30.663.800	29.577.200				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng		19.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01.2.000.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	9.640.000	12.343.800	11.257.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000	1.600.000	1.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000	3.080.000	3.080.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000	3.080.000	3.080.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01.2.000.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	8.960.000	8.960.000	8.960.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	6.562.755.318	5.616.268.996	6.889.433.634			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng		6.049.529.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.525.755.318	5.575.098.996	6.852.583.634	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.004.529.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	27.800.000	31.970.000	27.650.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	9.200.000	9.200.000	9.200.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
6 0 1 1 2.0 000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	57 Orang	199.667.800	2.050.221.072	2.050.221.072	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			400.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 0 1 1 2.0 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59 Orang	57 Orang	60.000.000	1.373.264.073	315.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			140.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 0 1 1 2.0 006 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	549.154.878	1.285.970.435	540.211.008			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng		495.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 0 1 1 2.0 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	5.311.228	5.311.228	5.928.528	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 0 1 1 2.0 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	28.380.000	35.880.000	34.615.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			95.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.575.000	22.930.000	20.690.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	87.459.850	92.439.750	97.944.250	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.2.000.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	80 Laporan	18.430.800	19.552.425	28.928.195	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.2.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	394.998.000	1.109.857.032	352.105.035	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			270.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.2.000.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100 %	100 %	568.800.000	840.400.000	882.210.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng		350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.0.0.2.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	72 Unit	185.000.000	217.000.000	231.040.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.0.0.2.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	56 Unit	383.800.000	623.400.000	651.170.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.0.0.2.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	189.668.400	200.368.400	232.916.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng		120.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.0.0.2.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	48 Laporan	37.000.000	47.600.000	79.948.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.0.0.2.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	6 Laporan	152.668.400	152.768.400	152.968.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang			50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
									Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif								
6	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik (%)	100 %	100 %	99.750.000	348.705.900	341.875.900					201.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6	0 1	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	45.000.000	64.500.000	64.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			80.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	78 Unit	36.750.000	53.780.000	51.950.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			71.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	18.000.000	230.425.900	225.425.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	95 %	80%	2.469.133.000	2.519.101.300	2.818.542.000							1.785.000.000		
6 0 1 2 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	91 LHP	91 LHP	1.981.648.000	2.150.746.300	2.390.497.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah		1.385.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 0 1 2 2.0 1 000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	5 Laporan	18.960.000	71.715.000	21.910.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6 0 1 2 2.0 1 000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan	40 Laporan	470.940.000	469.949.600	462.912.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6 0 1 2 2.0 1 000 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	23 Laporan	29 Laporan	568.025.000	554.605.000	698.980.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		425.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		
6 0 1 2 2.0 1 000 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	94.045.000	62.715.200	59.535.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.012.2.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan	42 Laporan	626.680.000	741.761.500	602.720.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.012.2.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	202.998.000	250.000.000	544.440.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			210.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.012.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat dan pengawasan tertentu	44 LHP	44 LHP	487.485.000	368.355.000	428.045.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah		400.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.012.2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	43 Laporan	15 Laporan	487.485.000	368.355.000	428.045.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			400.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.013	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Kapabilitas Aparat	50 %	3,23	467.180.000	1.267.691.000	681.650.000							350.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.013.2.0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pengawasan Intern Pemerintah APIP Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Kebijakan	-	19.960.000	0	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	0		INSPEKTORAT DAERAH
6.013.2.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	19.960.000	0	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0		INSPEKTORAT DAERAH
6.013.2.0	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa	16 Kali	16 Kali	447.220.000	1.267.691.000	681.650.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	SKPD Lingkup Pemerintah Daerah		350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.013.2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	24.745.000	118.620.000	119.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.013.2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	15.315.000	22.805.000	22.345.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			135.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.013.2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	26 Kegiatan	391.845.000	1.103.461.000	520.250.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			110.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
6	0 1 3	0 2	2.0 4	000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	15.315.000	22.805.000	19.455.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		55.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
TOTAL									11.236.739.396	15.582.664.976	14.860.149.014					10.064.529.000		
KECAMATAN LILIRILAU																		
					KECAMATAN LILIRILAU				3.873.311.050	6.025.634.650	5.693.347.259						11.185.565.868	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.873.311.050	6.025.634.650	5.693.347.259						11.185.565.868	
7	0 1				KECAMATAN				3.873.311.050	6.025.634.650	5.693.347.259						11.185.565.868	
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100%	100%	3.810.651.050	3.850.422.250	3.694.990.915						6.986.565.868	
7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;	100% 100% 100%	100% 100% 100%	7.660.000	7.660.000	2.960.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		116.903.700	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	660.000	660.000	300.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		49.374.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.800.000	2.800.000	700.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		38.029.700	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000	1.400.000	580.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000	1.400.000	630.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.400.000	1.400.000	750.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	3.325.148.992	3.300.148.992	3.343.285.601			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.070.762.168	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.295.748.992	3.295.748.992	3.341.691.601	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.041.112.168	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115 Dokumen	115 Dokumen	27.000.000	2.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		16.350.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	2.400.000	2.400.000	594.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	30.000.000	30.000.000	25.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	30.000.000	30.000.000	25.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	189.972.498	191.423.318	135.390.202			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		653.100.000	KECAMATAN LILIRILAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 1	2.0 6 1	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	3.326.400	1.970.320	2.933.228	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	13.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 6 4	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	1.200.000	800.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	80.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 6 5	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.110.800	14.310.800	11.600.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	17.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 6 7	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.891.750	43.118.650	44.430.500	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	95.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 6 8	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.500.000	10.500.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	60.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 6 9	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	600 Laporan	116.143.548	120.323.548	75.626.474	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	187.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	60.600.000	79.600.000	0			-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	628.750.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	2.0 7 6	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	60.600.000	79.600.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	155.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	106.619.560	151.535.440	131.370.112			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	318.700.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.056.760	46.821.440	48.456.112	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		49.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.562.800	104.714.000	82.914.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		60.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	90.650.000	90.054.500	56.985.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	173.350.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	40.500.000	42.584.500	38.545.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		75.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	39.150.000	11.470.000	8.440.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 9 001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	11.000.000	36.000.000	10.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		18.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau	100% 100%	100% 100%	31.200.000	31.200.000	31.200.000						137.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelimpahan Kewenangan Yang terlaksana	100 %	100 %	31.200.000	31.200.000	31.200.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		37.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 2 4 000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.800.000	7.800.000	7.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	SEMUA Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 2 4 000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	23.400.000	23.400.000	23.400.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100%	100%	6.820.000	6.820.000	5.080.000							4.018.000.000	
7 0 1 3 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 Kali	2 Kali	6.820.000	6.820.000	5.080.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		18.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 3 1 000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	6.820.000	6.820.000	5.080.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang		Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		18.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau	100%	100%	21.300.000	21.300.000	19.800.000							35.000.000	
7 0 1 4 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jasa Narasumber Penyuluhan Kantibmas	2 Orang	2 Orang	21.300.000	21.300.000	19.800.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 4 1 000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	12 Laporan	21.300.000	21.300.000	19.800.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang		Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7 0 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirliau	100%	100%	3.340.000	3.340.000	1.540.000							9.000.000	
7 0 0 1 6 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan Dana ADD	8 Desa	8 Desa	3.340.000	3.340.000	1.540.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		9.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 0 1 6 2.0 1 000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	160 Dokumen	160 Dokumen	3.340.000	3.340.000	1.540.000	Kab. Soppeng, Lilirliau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			9.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
	Kelurahan Ujung				488.740.800	487.231.600	444.515.091							1.154.500.000	
7 0 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				488.740.800	487.231.600	444.515.091							1.154.500.000	
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirliau	100%	100%	133.340.800	128.331.600	86.115.091							154.500.000	
7 0 0 1 1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		2.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 0 1 1 2.0 2 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Lilirliau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 0 1 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	34.281.600	38.531.600	32.812.400			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		48.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 0 1 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.217.600	618.400	0	Kab. Soppeng, Lilirliau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			2.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.000.000	1.000.000	1.200.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif			12.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.400.000	2.750.000	3.300.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	12.428.000	16.177.200	19.703.200	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	1.750.000	500.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.736.000	16.236.000	8.109.200	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang, Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 7 000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		37.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 8 000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	57.709.200	54.450.000	40.845.191			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		52.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7 0 1 1 2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	12 Laporan	12.100.000	12.100.000	10.995.191	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Air dan Listrik yang Disediakan									yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7.01.02.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.609.200	42.350.000	29.850.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.02.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	20.150.000	14.150.000	11.457.500			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	15.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.02.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	3 Unit	3 Unit	6.750.000	6.750.000	6.007.500	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.02.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	2.400.000	2.400.000	1.200.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.02.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	11.000.000	5.000.000	4.250.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100%	100%	355.400.000	358.900.000	358.400.000						1.000.000.000		
7.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	355.400.000	358.900.000	358.400.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	1.000.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.03.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		750.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7.01.03.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	155.400.000	158.900.000	158.400.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		250.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
	Kelurahan Cabbeng				577.281.600	575.337.600	534.543.059							1.156.700.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				577.281.600	575.337.600	534.543.059							1.156.700.000	
7	KECAMATAN				577.281.600	575.337.600	534.543.059							1.156.700.000	
7	011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100%	100%	132.181.600	130.237.600	89.443.059						156.700.000	
7	011	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.000.000	1.350.000	1.350.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	2.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	011	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126 Dokumen	126 Dokumen	1.000.000	1.350.000	1.350.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	2.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	011	0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	34.281.600	39.487.600	31.645.100			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	50.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	011	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.217.600	1.023.600	869.600	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	1.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	011	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.000.000	800.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	12.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	011	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.400.000	3.844.000	3.324.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	4.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	011	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	12.428.000	18.345.000	19.167.300	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	17.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.736.000	11.975.000	8.284.200	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		36.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	57.690.000	55.700.000	43.920.459			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		52.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.100.000	12.100.000	12.095.459	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.590.000	43.600.000	31.825.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	19.010.000	13.500.000	12.527.500			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.200.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	6.750.000	8.100.000	7.357.500	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsi PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		8.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.400.000	2.400.000	2.420.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif			3.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2.0 9 001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.860.000	3.000.000	2.750.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.700.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100%	100%	445.100.000	445.100.000	445.100.000							1.000.000.000		
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	445.100.000	445.100.000	445.100.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		1.000.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 3 2 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			750.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 3 2 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	245.100.000	245.100.000	245.100.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			250.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
		Kelurahan Pajalesang			537.165.600	536.841.600	493.092.484							1.158.750.000		
7		UNSUR KEWILAYAHAN			537.165.600	536.841.600	493.092.484							1.158.750.000		
7 0 1		KECAMATAN			537.165.600	536.841.600	493.092.484							1.158.750.000		
7 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100%	100%	126.265.600	125.941.600	82.192.484							158.750.000		
7 0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.500.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		2.300.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 1 2 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			2.300.000	KECAMATAN LILIRILAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	34.281.600	36.031.600	21.438.050			-	Akuntabel dan Inovatif			51.200.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.217.600	618.400	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.700.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.000.000	1.000.000	800.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			12.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.400.000	2.400.000	2.620.800	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.428.000	14.027.200	9.908.050	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	1.750.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.736.000	16.236.000	8.109.200	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			37.000.000	KECAMATAN LILIRILAU	
7 0 1 0 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			17.500.000	KECAMATAN LILIRILAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	51.774.000	49.700.000	42.936.934				yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			
7	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.100.000	12.100.000	11.011.934	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.674.000	37.600.000	31.925.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	19.010.000	19.010.000	16.317.500			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.750.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	6.750.000	6.750.000	6.007.500	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.400.000	2.400.000	1.200.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.860.000	9.860.000	9.110.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.750.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100%	100%	410.900.000	410.900.000	410.900.000						1.000.000.000	
7	0 1	0 3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	410.900.000	410.900.000	410.900.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		1.000.000.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
											Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif						
7	0 1 3	0 2 2	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		750.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 3	0 2 3	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	210.900.000	210.900.000	210.900.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	Pendapatan Bagi Hasil	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		250.000.000	KECAMATAN LILIRILAU
				Kelurahan Macanre				520.215.600	513.141.600	468.585.710						1.142.250.000	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				520.215.600	513.141.600	468.585.710						1.142.250.000	
7	0 1			KECAMATAN				520.215.600	513.141.600	468.585.710						1.142.250.000	
7	0 1 1	0 0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100%	100%	145.015.600	137.941.600	93.385.710						142.250.000	
7	0 1 1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	2.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	0 2 3	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	34.281.600	36.031.600	22.123.650			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	50.400.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	0 6 1	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.217.600	618.400	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	KECAMATAN LILIRILAU
7	0 1 1	0 6 4	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.000.000	1.000.000	600.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.500.000	KECAMATAN LILIRILAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.400.000	2.400.000	3.274.800	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.700.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.428.000	14.027.200	10.139.650	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.500.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	1.750.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.200.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.736.000	16.236.000	8.109.200	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.000.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		21.250.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.750.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	58.974.000	56.900.000	49.144.560			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		52.700.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.100.000	12.100.000	12.094.560	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.500.000	KECAMATAN LILIRILAU		
7 0 1 1 2.0 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	46.874.000	44.800.000	37.050.000	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		40.200.000	KECAMATAN LILIRILAU		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7 0 1	KECAMATAN				1.609.272.682	1.609.272.682	1.572.928.546							3.393.440.000			
7 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100 %	100 %	1.526.447.882	1.524.277.682	1.505.318.546							3.048.440.000			
7 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	22.799.400	19.327.800	6.007.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Kecamatan Citta		30.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1	0 1 1	2.0 1 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10 Dokumen	14.400.100	15.607.800	6.007.800	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN CITTA
7 0 1	0 1 1	2.0 1 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.199.900	750.000	0	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN CITTA
7 0 1	0 1 1	2.0 1 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.199.900	600.000	0	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN CITTA
7 0 1	0 1 1	2.0 1 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	2.399.800	780.000	0	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		5.000.000	KECAMATAN CITTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	2.399.800	780.000	0	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN CITTA
7	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	1.199.900	810.000	0	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN CITTA
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	1.208.839.482	1.208.984.482	1.245.940.346			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kantor Camat Citta	2.135.560.000	KECAMATAN CITTA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.200.389.482	1.200.389.482	1.241.545.346	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.115.560.000	KECAMATAN CITTA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	8.450.000	8.595.000	4.395.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN CITTA
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	149.135.800	149.592.200	95.397.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Kecamatan Citta	257.880.000	KECAMATAN CITTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 000 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	3.158.200	3.419.000	2.479.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2.760.000	4.140.000	2.300.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.880.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	34.449.650	29.755.000	15.499.600	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	27.192.950	27.203.200	31.118.600	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	12 Laporan	1.575.000	1.575.000	500.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	83.500.000	43.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		75.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	0	0	27.700.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Kecamatan Citta	290.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0	0	27.700.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	KECAMATAN CITTA		
7 0 1 1 2.0 000 6 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	90.673.200	91.303.200	79.133.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Kantor Kecamatan Citta	110.000.000	KECAMATAN CITTA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 1 2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.100.000	55.100.000	62.880.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		65.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 1 2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	35.573.200	36.203.200	16.253.200	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	55.000.000	55.070.000	51.140.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kantor Kecamatan Citta	115.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 1 2.0 9 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	45.000.000	45.000.000	41.000.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8 Unit	5.000.000	5.070.000	10.140.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	0	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 2 2.0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta	100% 100 %	100% 100 %	29.850.000	29.850.000	29.100.000						230.000.000		
7 0 1 2 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan yang telah dilaksanakan	100 %	100 %	29.850.000	29.850.000	29.100.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Masyarakat Se-Kecamatan Citta	115.000.000	KECAMATAN CITTA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	0 1	0 2	2.0 4	000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 Dokumen	1 Dokumen	14.925.000	14.925.000	14.550.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		57.500.000	KECAMATAN CITTA
7	0 1	0 2	2.0 4	000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	220 Laporan	12 Laporan	14.925.000	14.925.000	14.550.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		57.500.000	KECAMATAN CITTA	
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta	100 %	100 %	16.279.800	16.210.000	200.000							45.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 3 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	8 kali	8 kali	16.279.800	16.210.000	200.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Masyarakat Se-Kecamatan Citta		45.000.000	KECAMATAN CITTA
7 0 1 3 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	16.279.800	16.210.000	200.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.000.000	KECAMATAN CITTA	
7 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Kertertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta	100 %	100 %	20.325.000	20.325.000	19.950.000							35.000.000		
7 0 1 4 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas	240 orang	240 orang	20.325.000	20.325.000	19.950.000				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Se-Kecamatan Citta		35.000.000	KECAMATAN CITTA
7 0 1 4 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	240 Laporan	24 Laporan	20.325.000	20.325.000	19.950.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		35.000.000	KECAMATAN CITTA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta	100 %	100 %	16.370.000	18.610.000	18.360.000							35.000.000	
7 0 1 6 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi	4 Desa	4 Desa	16.370.000	18.610.000	18.360.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Desa Se-Kecamatan Citta		35.000.000	KECAMATAN CITTA
7 0 1 6 2.0 000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	16.370.000	18.610.000	18.360.000	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	KECAMATAN CITTA	
TOTAL							1.609.272.682	1.609.272.682	1.572.928.546					3.393.440.000	
KECAMATAN GANRA															
KECAMATAN GANRA							1.981.885.533	1.981.885.533	1.879.127.902					3.807.448.932	
UNSUR KEWILAYAHAN							1.981.885.533	1.981.885.533	1.879.127.902					3.807.448.932	
KECAMATAN							1.981.885.533	1.981.885.533	1.879.127.902					3.807.448.932	
7 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra	100%	100%	1.910.495.533	1.925.860.533	1.827.902.902							3.582.448.932	
7 0 1 1 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen	100% 100% 100%	100% 100% 100%	20.036.000	20.046.000	17.796.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	-		23.500.000	KECAMATAN GANRA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;									Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7 0 1 0 1 2.0 1 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.400.000	12.100.000	11.250.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 1 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.280.000	4.350.000	4.000.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.000.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 1 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	4.356.000	3.596.000	2.546.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.578.447.933	1.577.866.233	1.595.748.602			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.171.582.502	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 2 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.566.107.933	1.566.466.233	1.586.658.602	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.149.302.502	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 2 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	12.340.000	11.400.000	9.090.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.280.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0	0	3.150.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			91.800.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 5 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	1 Orang	0	0	3.150.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000	KECAMATAN GANRA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	117.114.000	56.300.700	41.056.250				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		450.449.700	KECAMATAN GANRA
7 0 1 0 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.727.500	2.315.000	2.315.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.840.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		90.000.000	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	5.806.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.449.700	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	11.113.800	10.296.800	9.656.800	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		90.000.000	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.000.000	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	7 Laporan	89.626.700	32.708.900	18.104.450	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	139.630.000	55.630.000			-	-		470.000.000	KECAMATAN GANRA	
7 0 1 0 1 2.0 7 000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	0	24.000.000	24.000.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN GANRA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	20.200.000	95.630.000	31.630.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	0	20.000.000	0	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsi PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	101.277.600	79.587.600	70.587.600			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		74.183.365	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.760.000	38.730.000	38.730.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		43.383.365	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.517.600	40.857.600	31.857.600	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.800.000	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	73.420.000	52.430.000	43.934.450			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		300.933.365	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	45.000.000	27.100.000	25.204.450	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Bagi Hasil (DBH) Opsi PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		43.383.365	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	17.420.000	14.330.000	9.230.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.800.000	KECAMATAN GANRA		
7 0 1 1 2.0 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	11.000.000	11.000.000	9.500.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		46.750.000	KECAMATAN GANRA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra	100% 100%	100% 100%	26.300.000	26.300.000	24.300.000				Akuntabel dan Inovatif			115.000.000	
7 0 1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	100%	26.300.000	26.300.000	24.300.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	115.000.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 2 4 000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	110 Dokumen	100 Dokumen	19.150.000	19.150.000	18.150.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			57.500.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 2 4 000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	7.150.000	7.150.000	6.150.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			57.500.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra	100%	100%	8.850.000	5.300.000	3.500.000							40.000.000	
7 0 1 3 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	8.850.000	5.300.000	3.500.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	40.000.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 3 1 000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	8.850.000	5.300.000	3.500.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			40.000.000	KECAMATAN GANRA
7 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra	100%	100%	23.440.000	21.800.000	20.800.000							35.000.000	
7 0 1 4 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinerqitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	4 Laporan	4 Laporan	23.440.000	21.800.000	20.800.000				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	-	35.000.000	KECAMATAN GANRA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1 4	0 1	2.0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	23.440.000	21.800.000	20.800.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	KECAMATAN GANRA
7	0 1 6	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra	100%	100%	12.800.000	2.625.000	2.625.000						35.000.000	
7	0 1 6	0 1	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	12.800.000	2.625.000	2.625.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	35.000.000	KECAMATAN GANRA
7	0 1 6	0 1	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	12.800.000	2.625.000	2.625.000	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	KECAMATAN GANRA
TOTAL									1.981.885.533	1.981.885.533	1.879.127.902						3.807.448.932	
KECAMATAN DONRI-DONRI																		
					KECAMATAN DONRI-DONRI				2.066.119.310	2.066.119.310	2.010.848.069						3.890.913.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.066.119.310	2.066.119.310	2.010.848.069						3.890.913.000	
7	0 1				KECAMATAN				2.066.119.310	2.066.119.310	2.010.848.069						3.890.913.000	
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri	100 %	100 %	1.991.269.310	1.990.069.310	1.935.398.069						3.550.913.000	
7	0 1 1	0 1 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;	100% 100% 100%	100% 100% 100%	16.843.138	13.933.138	10.907.138			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	26.300.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	0 1 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.750.000	12.841.138	10.361.138	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		14.300.000	KECAMATAN DONRI-DONRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.011.2.000.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	4.093.138	0	0	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.011.2.000.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	0	1.092.000	546.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.011.2.000.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.707.606.510	1.708.706.510	1.726.355.269			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		2.889.213.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.011.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.689.606.510	1.689.606.510	1.707.555.269	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.876.838.250	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.011.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	9.000.000	9.500.000	9.500.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.011.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	9.000.000	9.600.000	9.300.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			11.374.750	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.011.2.000.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	118.734.000	122.474.500	81.795.500			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	-		239.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.011.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	974.000	974.000	974.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		2.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3.000.000	6.750.000	6.750.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.000.000	24.990.500	20.811.500	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	100 Laporan	80.000.000	80.000.000	43.500.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	15.600.000	8.060.000	8.060.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	155.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.600.000	8.060.000	8.060.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		55.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	
7.011.2.000.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	89.445.162	93.845.162	70.450.162			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	-	64.400.000	KECAMATAN DONRI-DONRI	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19.342.362	19.342.362	24.342.362	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7.01.02.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.102.800	74.502.800	46.107.800	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			29.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	43.040.500	43.050.000	37.830.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		115.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	39.990.500	40.000.000	36.000.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			60.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3 Unit	3.050.000	3.050.000	1.830.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri	100 %100 %	100 %100 %	30.000.000	31.200.000	30.600.000							220.000.000	
7.01.02.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan	100 %	100 %	30.000.000	31.200.000	30.600.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		105.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 2 4 000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	110 Dokumen	110 Dokumen	7.800.000	8.400.000	8.100.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			35.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7 0 1 2 4 000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	22.200.000	22.800.000	22.500.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			70.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri	100 %	100 %	13.750.000	13.750.000	13.750.000							50.000.000	
7 0 1 3 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	100%	100%	13.750.000	13.750.000	13.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		50.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1 3	0 1 3	2.0 1 3	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	13.750.000	13.750.000	13.750.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	0 1 4	0 1 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri	100 %	100 %	19.800.000	19.800.000	19.800.000						35.000.000	
7	0 1 4	0 1 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Kamtibmas	350 Orang	350 Orang	19.800.000	19.800.000	19.800.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	35.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	0 1 4	0 1 4	2.0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		35.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
7	0 1 6	0 1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri	100 %	100 %	11.300.000	11.300.000	11.300.000						35.000.000	
7	0 1 6	0 1 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri	100%	100%	11.300.000	11.300.000	11.300.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang	-	35.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 6	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	270 Dokumen	270 Dokumen	11.300.000	11.300.000	11.300.000	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		35.000.000	KECAMATAN DONRI-DONRI
TOTAL									2.066.119.310	2.066.119.310	2.010.848.069				3.890.913.000			
KECAMATAN MARIORIAWA																		
KECAMATAN MARIORIAWA									4.461.149.126	4.422.273.030	4.158.659.461					9.591.176.031		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.461.149.126	4.422.273.030	4.158.659.461					9.591.176.031		
7	0 1				KECAMATAN				4.461.149.126	4.422.273.030	4.158.659.461					9.591.176.031		
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Mariorawa	100 %	100 %	4.385.749.126	4.346.873.030	4.090.459.461					5.418.360.031		
7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;	100% 100 % 100 %	100% 100 % 100 %	43.100.000	34.675.000	11.745.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Batu - Batu	33.600.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.000.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	26.550.000	18.125.000	6.465.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			4.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	11.250.000	11.250.000	1.750.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			4.800.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	930.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000	900.000	900.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000	900.000	900.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	1.500.000	1.500.000	800.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Manusia yang Unggul		15.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	3.580.298.937	3.580.298.937	3.655.081.818			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu	3.964.412.139	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3.570.698.937	3.570.698.937	3.645.481.818	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		3.934.302.139	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	320.219.841	279.843.745	190.865.830			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu	613.188.067	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.000.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	11.379.070	10.568.850	10.589.010	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			7.516.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.000.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	7.500.000	3.300.000	3.300.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			5.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.060.000	5.060.000	5.060.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			70.770.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.000.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.000.000	18.000.000	24.324.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			8.100.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	94.330.771	73.072.150	62.552.850	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		79.865.882	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 000 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	38.950.000	24.850.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		8.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	215 Laporan	145.000.000	144.992.745	82.539.970	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		90.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 000 6 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	160.000.000	156.490.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Batu - Batu	209.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 000 6 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	160.000.000	156.490.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		122.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.0.0.2.0.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	189.955.348	214.075.348	160.210.348			narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu		381.780.675	KECAMATAN MARIORIAWA
7.0.0.2.0.1.1.8.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.935.348	80.935.348	80.935.348	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		92.973.583	KECAMATAN MARIORIAWA	
7.0.0.2.0.1.1.8.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	109.020.000	133.140.000	79.275.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		95.400.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7.0.0.2.0.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	92.175.000	81.490.000	72.556.465			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu		118.979.150	KECAMATAN MARIORIAWA
7.0.0.2.0.1.1.9.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	47.375.000	37.970.000	33.961.465	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng,	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui		38.630.000	KECAMATAN MARIORIAWA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	0 1	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	11.500.000	10.220.000	8.275.000	Mariorawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Sumber Daya Manusia yang Unggul		5.842.750	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	22.300.000	22.300.000	21.320.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		6.810.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	11.000.000	11.000.000	9.000.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		10.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Mariorawa(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Mariorawa	100% 100%	100% 100%	38.850.000	38.850.000	31.650.000						110.000.000		
7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Mariorawa(%)	100 %	100 %	38.850.000	38.850.000	31.650.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Batu - Batu		110.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 2	2.0 4	000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia yang Unggul		29.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 2	2.0 4	000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	29.250.000	29.250.000	22.050.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		81.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Mariorawa	100 %	100 %	16.050.000	16.050.000	16.050.000						3.997.816.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 3 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	16.050.000	16.050.000	16.050.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu		16.050.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 3 1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	16.050.000	16.050.000	16.050.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		16.050.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	19.800.000	19.800.000	19.800.000							35.000.000		
7 0 1 4 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	19.800.000	19.800.000	19.800.000				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu		35.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 4 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		35.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	700.000	700.000	700.000							30.000.000		
7 0 1 6 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	700.000	700.000	700.000				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu		30.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 6 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	100 Dokumen	700.000	700.000	700.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			30.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
	Kelurahan Batu-Batu				448.890.349	462.820.095	415.893.145							1.011.859.795		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				448.890.349	462.820.095	415.893.145							1.011.859.795		
7 0 1	KECAMATAN				448.890.349	462.820.095	415.893.145							1.011.859.795		
7 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	128.830.349	142.760.095	95.833.145							133.495.795		
7 0 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	47.184.374	50.684.300	43.509.100				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Batu - Batu		72.167.250	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	1.854.450	1.854.450	1.854.450	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Sumber Daya Manusia yang Unggul		1.854.450	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		18.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	19.142.724	19.142.650	22.414.650	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		25.142.824	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Marioriaawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		2.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	20.927.200	24.427.200	13.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang		24.969.976	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
								Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul							
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.400.000	24.030.000	0				2.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA		
7	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.400.000	24.030.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	48.965.975	60.765.795	44.756.545			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Batu - Batu	48.965.795	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.675.975	13.675.795	13.706.545	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		13.675.795	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.290.000	47.090.000	31.050.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		35.290.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	7.280.000	7.280.000	7.567.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Batu - Batu	10.362.750	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 000 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.280.000	7.280.000	7.567.500	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		7.662.750	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Mariorawa	100 %	100 %	320.060.000	320.060.000	320.060.000						878.364.000		
7 0 1 3 2.0 000 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Mariorawa	100 %	100 %	320.060.000	320.060.000	320.060.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Batu - Batu	878.364.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 3 2.0 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi		746.390.000	KECAMATAN MARIORIAWA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul					
7	0 1 3	2.0 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	120.060.000	120.060.000	120.060.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		131.974.000	KECAMATAN MARIORIAWA
			Kelurahan Kaca				467.200.952	463.138.252	416.961.302						1.047.732.202	
7			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				467.200.952	463.138.252	416.961.302						1.047.732.202	
7	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	136.100.952	132.038.252	85.861.302						158.328.202	
7	0 1 1	2.0 000 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	47.352.750	49.445.050	39.538.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Kaca	63.057.750	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	2.0 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	751.950	751.950	751.950	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		751.950	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	2.0 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		15.865.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	0 1 1 2.0 000 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.100.000	1.500.000	0	Kab. Soppeng, Mariorawa, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		1.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1 2.0 000 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	16.992.208	13.784.700	17.618.250	Kab. Soppeng, Mariorawa, Kaca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		14.992.208	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1 2.0 000 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Soppeng, Mariorawa, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		2.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	22.248.592	28.148.400	15.908.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		28.248.592	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.400.000	24.030.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	-	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Kaca	25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 0 1 1	2.0 000 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.400.000	24.030.000	0	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 8	2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	52.428.202	47.643.202	34.723.202			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Kaca	52.428.202	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 8	2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.838.202	9.838.202	8.338.202	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		9.838.202	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 8	2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.590.000	37.805.000	26.385.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		42.590.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	10.920.000	10.920.000	11.599.500				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriwawa Kel. Kaca		17.242.250	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 1 2.0 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	10.920.000	10.920.000	8.329.500	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Limpomajang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			14.542.250	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5 Unit	0	0	3.270.000	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Kaca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa	100 %	100 %	331.100.000	331.100.000	331.100.000								889.404.000	
7 0 1 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa	100 %	100 %	331.100.000	331.100.000	331.100.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriwawa Kel. Kaca		889.404.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 3 2.0 2 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Kaca	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi				746.390.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul					
7	0 1 3	2.0 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	131.100.000	131.100.000	131.100.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		143.014.000	KECAMATAN MARIORIAWA
			Kelurahan Attangsalo				456.554.140	460.623.080	415.628.680					1.007.735.040		
7			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				456.554.140	460.623.080	415.628.680					1.007.735.040		
7	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	145.014.140	149.083.080	104.088.680					135.491.040		
7	0 1 1	2.0 000 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	50.295.685	53.794.625	45.201.225			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Attangsalo	69.502.685	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	2.0 000 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	494.675	494.675	494.675	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		494.675	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	2.0 000 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya		17.390.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.499.000	2.499.000	2.499.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Manusia yang Unggul		2.311.200	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	19.033.610	19.032.550	21.549.150	Kab. Soppeng, Mariorawa, Attang Salo Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		19.223.410	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	3.600.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Mariorawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		4.575.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	21.508.400	25.008.400	14.298.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		25.508.400	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.400.000	24.030.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Attangsalo		25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 0 1 1	2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.400.000	24.030.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ekonomi Masyarakat				
7 0 1 0 1 1	2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	61.428.455	62.368.455	50.743.455			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 0 1 1	2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	61.428.455	62.368.455	50.743.455			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Attangsalo		27.528.455	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 1	2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.828.455	9.828.455	9.828.455	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		9.828.455	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 0 1 1	2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.600.000	52.540.000	40.915.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		17.700.000	KECAMATAN MARIORIAWA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujng Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	7.890.000	8.890.000	8.144.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriwawa Kel. Attangsalo		12.439.900	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 1 2.0 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.280.000	7.280.000	6.534.000	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Attang Salo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			9.739.900	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	610.000	610.000	610.000	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	1.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Marioriwawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			1.500.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa	100 %	100 %	311.540.000	311.540.000	311.540.000							872.244.000		
7 0 1 3 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawa	100 %	100 %	311.540.000	311.540.000	311.540.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi	Kab. Soppeng Kec Marioriwawa Kel. Attangsalo		872.244.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 3	0 2 2	2.0 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			
7	0 1 3	0 2 3	2.0 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	111.540.000	111.540.000	111.540.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		125.854.000	KECAMATAN MARIORIAWA
				Kelurahan Manorangsalu				523.251.690	535.082.940	487.215.040						576.544.640	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				523.251.690	535.082.940	487.215.040						576.544.640	
7	0 1			KECAMATAN				523.251.690	535.082.940	487.215.040						576.544.640	
7	0 1 1	0 0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	120.391.690	132.222.940	84.355.040						123.684.640	
7	0 1 1	0 0 6	2.0 000 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	50.227.050	53.128.300	33.922.900			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Manorangsalu	64.872.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	0 0 6	2.0 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	990.800	990.800	990.800	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya		990.800	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Manusia yang Unggul		17.400.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.100.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		1.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	18.317.850	18.319.100	10.992.100	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		15.481.536	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Batu Batu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	24.058.400	27.558.400	15.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis		27.799.664	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul								
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.400.000	24.030.000	0				10.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA			
7	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25.400.000	24.030.000	0	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		10.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	37.484.640	47.784.640	43.884.640			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Manorang Salo		37.484.640	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.084.640	8.084.640	8.084.640	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		8.084.640	KECAMATAN MARIORIAWA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.400.000	39.700.000	35.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			29.400.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 1 2.0 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	7.280.000	7.280.000	6.547.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Manorangsalu		10.588.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 1 2.0 000 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.280.000	7.280.000	6.547.500	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			9.388.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	402.860.000	402.860.000	402.860.000							452.860.000	
7 0 1 3 2.0 000 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	402.860.000	402.860.000	402.860.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Manorangsalu		452.860.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 3 2.0 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Soppeng,	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi			200.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
								Mariorawa, Manorang Salo		pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul						
7	0 1 3	2.0 2 3	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	202.860.000	202.860.000	202.860.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Manorang Salo Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		252.860.000	KECAMATAN MARIORIAWA
				Kelurahan Limpomajang				440.145.840	477.374.700	429.597.350					1.023.094.000		
7				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				440.145.840	477.374.700	429.597.350					1.023.094.000		
7	0 1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Mariorawa	100 %	100 %	108.325.840	145.554.700	97.777.350					134.200.000		
7	0 1 1	2.0 6	000 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	45.437.340	48.336.200	38.858.850			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Limpomajang	74.336.500	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	751.950	751.950	751.950	Kab. Soppeng, Mariorawa, Limpomajang	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		751.950	KECAMATAN MARIORIAWA
7	0 1 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Limpomajang	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya		25.275.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.100.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Lompomajang	Dana Bagi Hasil (DBH)	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Manusia yang Unggul		1.200.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	15.906.990	15.905.850	14.166.900	Kab. Soppeng, Mariorawa, Lompomajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		18.840.690	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Mariorawa, Lompomajang	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		3.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	21.418.400	24.918.400	17.180.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lompomajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		25.268.860	KECAMATAN MARIORIAWA	
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	0	24.030.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis	Kab. Soppeng Kec Mariorawa Kel. Lompomajang		25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 0 1 1	2.0 000 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	24.030.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			25.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 8	2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	55.608.500	65.908.500	52.383.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Limpomajang		27.000.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 8	2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.883.500	13.883.500	14.813.500	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			15.900.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 0 1 8	2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	41.725.000	52.025.000	37.570.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			11.100.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	7.280.000	7.280.000	6.535.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Limpomajang		7.063.500	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 1 2.0 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.280.000	7.280.000	6.535.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			7.063.500	KECAMATAN MARIORIAWA	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	331.820.000	331.820.000	331.820.000								888.894.000	
7 0 1 3 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	331.820.000	331.820.000	331.820.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kab. Soppeng Kec Marioriawa Kel. Limpomajang		888.894.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 3 2.0 2 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				746.390.000	KECAMATAN MARIORIAWA
7 0 1 3 2.0 2 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	131.820.000	131.820.000	131.820.000	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi				142.504.000	KECAMATAN MARIORIAWA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL					6.797.192.097	6.821.312.097	6.323.954.978				pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul			14.258.141.708
KECAMATAN LILIRAJA															
					3.510.741.600	3.535.601.600	3.421.232.024							9.331.265.118	
UNSUB					3.510.741.600	3.535.601.600	3.421.232.024							9.331.265.118	
KEMAJU					3.510.741.600	3.535.601.600	3.421.232.024							9.331.265.118	
7	0	0	0	1	1									6.647.925.118	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	3.416.291.600	3.430.651.600	3.351.232.024						6.647.925.118	
7	0	0	0	1	1	2.0	1							66.500.000	KECAMATAN LILIRAJA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu, Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu, Persentase Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	45.030.000	45.930.000	16.630.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	66.500.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0	0	0	1	1	2.0	000	1						12.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.200.000	10.100.000	900.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0	0	0	1	1	2.0	000	2						12.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.640.000	5.640.000	3.390.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0	0	0	1	1	2.0	000	3						10.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.395.000	4.395.000	3.195.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0	0	0	1	1	2.0	000	4						10.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.595.000	8.595.000	3.495.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0	0	0	1	1	2.0	000	5						10.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	7.000.000	3.250.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0	0	0	1	1	2.0	000	6						12.500.000	KECAMATAN LILIRAJA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	27 Laporan	27 Laporan	10.200.000	10.200.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		12.500.000	KECAMATAN LILIRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7.01.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.865.156.640	2.866.556.640	2.927.317.064			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kecamatan Liliraja		5.143.226.000	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.851.756.640	2.851.756.640	2.915.837.064	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			5.115.726.000	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen	32 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.600.000	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	8.400.000	9.800.000	9.480.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.500.000	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	0	15.500.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kecamatan Liliraja		90.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	2 Orang	0	15.500.000	0	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			60.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	192.264.340	192.264.340	166.444.590			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kecamatan Liliraja		400.255.618	KECAMATAN LILIRAJA
7.01.1.6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.744.340	3.744.340	3.744.340	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,			25.000.000	KECAMATAN LILIRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 0 1 2.0 000 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.520.000	15.520.000	15.520.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Akuntabel dan Inovatif		51.040.000	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	9.440.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.057.400	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	53.000.000	53.000.000	45.940.250	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		43.044.450	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	2.100.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.620.000	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	89.700.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		59.609.800	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 7 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	98.770.000	84.370.000	30.060.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kecamatan Liliraja	382.100.000	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	24.400.000	10.000.000	0	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4 Unit Unit	74.370.000	74.370.000	30.060.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		120.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA		
7 0 1 0 1 2.0 000 8 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	138.332.800	160.292.800	140.192.800			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	ASN Kecamatan Liliraja	305.823.100	KECAMATAN LILIRIAJA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 1 2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		64.017.468	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	78.332.800	100.292.800	80.192.800	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		80.800.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	76.737.820	65.737.820	70.587.570			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kecamatan Liliraja	260.020.400	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 9 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4 Unit	47.217.820	47.217.820	53.567.570	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	12 Unit	8.660.000	8.660.000	8.660.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		23.810.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.860.000	9.860.000	8.360.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		85.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliraja	100% 100%	100% 100%	38.000.000	38.000.000	21.200.000						225.000.000		
7 0 1 2 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perizinan non usaha dan non perizinan yang diterbitkan	500 Buah	500 Buah	38.000.000	38.000.000	21.200.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan Liliraja	110.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 2 4 000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	16.600.000	16.600.000	16.600.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		40.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 2 4 000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	21.400.000	21.400.000	4.600.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	15.400.000	18.750.000	10.950.000						2.388.340.000		
7 0 1 3 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	4 Kali	4 Kali	15.400.000	18.750.000	10.950.000			-	-	Masyarakat Kecamatan Liliraja	22.800.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 3 1 000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	15.400.000	18.750.000	10.950.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		22.800.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	20.450.000	27.600.000	27.600.000						35.000.000		
7 0 1 4 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jasa narasumber penyuluhan kantribmas	2 Orang	2 Orang	20.450.000	27.600.000	27.600.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan Liliraja	35.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 4 1 000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.450.000	27.600.000	27.600.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	20.600.000	20.600.000	10.250.000						35.000.000		
7 0 1 6 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan dana ADD	5 Desa	5 Desa	20.600.000	20.600.000	10.250.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan Liliraja	35.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 6 1 000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	100 Dokumen	100 Dokumen	20.600.000	20.600.000	10.250.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Desa dan Pdayagunaan Aset Desa							Dana Alokasi Umum (DAU)		yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
	Kelurahan Appanang				564.677.760	561.777.760	524.417.760							941.240.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				564.677.760	561.777.760	524.417.760							941.240.000	
7	01	KECAMATAN			564.677.760	561.777.760	524.417.760							941.240.000	
7	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	157.437.760	154.537.760	117.177.760						122.000.000	
7	001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Appanang	400.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen	32 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		400.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	43.145.472	43.145.472	33.965.472			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	37.468.905	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	857.472	857.472	857.472	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		866.805	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	920.000	920.000	920.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.800.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.900.000	10.900.000	5.300.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5.239.400	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.468.000	12.468.000	13.338.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.763.900	KECAMATAN LILIRAJA
7	001	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		5.000.000	KECAMATAN LILIRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1 1	0 6 9	2.0 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	12.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.798.800	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 7 7	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	19.600.000	19.600.000	0			-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Appanang	5.400.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 7 6	2.0 000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	19.600.000	19.600.000	0	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.400.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 8 8	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	78.294.100	78.294.100	70.494.100			-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Appanang	61.460.095	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 8 2	2.0 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.894.100	8.894.100	8.894.100	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.860.095	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 8 4	2.0 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	69.400.000	69.400.000	61.600.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		54.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 9 9	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	15.398.188	12.498.188	11.718.188			-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Appanang	17.271.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7	0 1 1	0 9 2	2.0 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	3 Unit	4 Unit	7.818.188	7.818.188	7.038.188	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.990.600	KECAMATAN LILIRIAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 000 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	3.180.000	3.180.000	3.180.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.890.000	KECAMATAN LILIRAJA		
7 0 1 1 2.0 000 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.400.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.390.400	KECAMATAN LILIRAJA		
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	407.240.000	407.240.000	407.240.000						819.240.000			
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	407.240.000	407.240.000	407.240.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	819.240.000	KECAMATAN LILIRAJA		
7 0 1 3 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	185.000.000	185.000.000	185.000.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		600.000.000	KECAMATAN LILIRAJA		
7 0 1 3 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	222.240.000	222.240.000	222.240.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		219.240.000	KECAMATAN LILIRAJA		
	Kelurahan Galung				473.512.650	473.512.650	436.272.650						857.600.000			
7	UNSUR KEWILAYAHAN				473.512.650	473.512.650	436.272.650						857.600.000			
7 0 1	KECAMATAN				473.512.650	473.512.650	436.272.650						857.600.000			
7 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	137.012.650	137.012.650	99.772.650						121.600.000			
7 0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	200.000	200.000	200.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Galung	400.000	KECAMATAN LILIRAJA		
7 0 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen	32 Dokumen	200.000	200.000	200.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		400.000	KECAMATAN LILIRAJA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	41.719.900	41.719.900	28.619.900			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	37.970.500	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	644.400	644.400	644.400	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.800.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.800.000	5.800.000	3.200.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	17.395.500	17.395.500	12.395.500	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.370.500	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.600.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	9.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		11.200.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	19.600.000	19.600.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Galung	15.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7 0 1 1 2.0 6 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	19.600.000	19.600.000	0	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		15.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	62.009.100	62.009.100	58.409.100			-	Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Galung		53.619.500	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.534.100	8.534.100	8.534.100	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			8.019.500	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	53.475.000	53.475.000	49.875.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			45.600.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	13.483.650	13.483.650	12.543.650			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Galung		14.610.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	9.483.650	9.483.650	8.543.650	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.800.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4 Unit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.810.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	336.500.000	336.500.000	336.500.000							736.000.000	
7.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	336.500.000	336.500.000	336.500.000			-	-	Masyarakat Kelurahan Galung		736.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03.2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			600.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03.2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	136.500.000	136.500.000	136.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			136.000.000	KECAMATAN LILIRIAJA
	Kelurahan JennaE				547.464.830	547.464.830	510.624.830							932.300.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			547.464.830	547.464.830	510.624.830							932.300.000		
7	01	KECAMATAN			547.464.830	547.464.830	510.624.830							932.300.000		
7	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	137.164.830	137.164.830	100.324.830						122.000.000		
7	011	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	600.000	600.000	600.000				Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		600.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7	011	2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	600.000	600.000	600.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		600.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	011	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	39.995.600	39.995.600	29.719.100				Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Jenneae	39.444.563	KECAMATAN LILIRAJA
7	011	2.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	429.600	429.600	429.600	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		500.213	KECAMATAN LILIRAJA
7	011	2.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.360.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	011	2.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.300.000	3.300.000	1.800.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.203.200	KECAMATAN LILIRAJA
7	011	2.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.686.000	15.686.000	12.409.500	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.821.150	KECAMATAN LILIRAJA
7	011	2.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	4.200.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		3.780.000	KECAMATAN LILIRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.011.2.006.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.200.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		5.780.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	19.600.000	19.600.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Jenneae	21.700.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	19.600.000	19.600.000	0	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		21.700.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	64.574.100	64.574.100	57.274.100			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Jenneae	45.926.037	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.534.100	8.534.100	8.534.100	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.926.037	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.040.000	56.040.000	48.740.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		39.000.000	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	12.395.130	12.395.130	12.731.630			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Jenneae	14.329.400	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	8.405.130	8.405.130	8.741.630	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.809.400	KECAMATAN LILIRAJA	
7.011.2.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4 Unit	2.490.000	2.490.000	2.490.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		2.490.000	KECAMATAN LILIRAJA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.030.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliraja	100 %	100 %	410.300.000	410.300.000	410.300.000						810.300.000	
7	0 1	0 3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	410.300.000	410.300.000	410.300.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kelurahan Jenneae	810.300.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0 1	0 3	2.0 2	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		600.000.000	KECAMATAN LILIRAJA
7	0 1	0 3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	210.300.000	210.300.000	210.300.000	Kab. Soppeng, Liliraja, Jenneae	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		210.300.000	KECAMATAN LILIRAJA
TOTAL									5.096.396.840	5.118.356.840	4.892.547.264						12.062.405.118	
KECAMATAN LALABATA																		
					KECAMATAN LALABATA				6.911.352.120	6.955.952.120	6.773.250.168						9.913.857.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.911.352.120	6.955.952.120	6.773.250.168						9.913.857.000	
7	0 1				KECAMATAN				6.911.352.120	6.955.952.120	6.773.250.168						9.913.857.000	
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	6.831.802.120	6.879.902.120	6.713.100.168						9.653.857.000	
7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;	100% 100% 100%	100% 100% 100%	24.825.000	25.482.000	37.002.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	26.800.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2/1 Dokumen	2/1 Dokumen	6.125.000	6.125.000	7.125.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	2 Dokumen	9.800.000	10.457.000	15.457.000	Kab. Soppeng, Lalabata,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana	-	Memantapkan Tata Kelola		9.800.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						BottoKab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif							
7	0 1	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000	4.250.000	7.130.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	4.650.000	4.650.000	7.290.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	6.183.153.820	6.183.153.820	6.241.638.968			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	8.860.125.760	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	6.126.903.820	6.126.903.820	6.218.388.968	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.795.515.760	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	387 Dokumen	387 Dokumen	22.250.000	22.250.000	9.250.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		24.610.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	86.500.000	45.000.000	3.250.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	-	88.000.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 1	2.0 5 3	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	5.000.000	3.250.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		8.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 5 1	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	85.000.000	40.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		60.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	183.740.100	179.983.100	170.993.800			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	375.735.070	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6 1	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	10.315.900	10.315.900	8.002.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		39.426.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6 4	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		43.035.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6 5	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	11.900.000	19.280.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		17.695.550	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6 7	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43.874.200	43.874.200	57.174.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		51.069.420	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6 8	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9.450.000	9.450.000	7.245.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.575.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	2.0 6 9	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	102.800.000	102.143.000	76.991.500	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Tata Kelola		118.934.100	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	113.240.000	113.240.000	0		Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	ASN Kecamatan Lalabata		77.050.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	113.240.000	113.240.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		32.300.000	KECAMATAN LALABATA	
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	175.223.200	267.923.200	187.628.200			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	129.609.050	KECAMATAN LALABATA	
7	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.000.000	115.000.000	56.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		85.209.050	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 0 1 1	2.0 8 4	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.223.200	152.923.200	131.628.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		44.400.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	65.120.000	65.120.000	72.587.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		91.537.120	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	35.100.000	35.100.000	37.937.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		51.967.120	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	19.020.000	19.020.000	23.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.610.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	11.000.000	11.000.000	11.250.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.960.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%) Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata	100% 100%	100% 100%	39.950.000	39.950.000	31.200.000						145.000.000	
7 0 1 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	1.750.000	1.750.000	0			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		50.000.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 2	2.0 1	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	1 Laporan	1.750.000	1.750.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi		50.000.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul				
7	0 1 0 2 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan	100%	100%	38.200.000	38.200.000	31.200.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		95.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 0 2 2.0 4 000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	45 Dokumen	45 Dokumen	19.100.000	19.100.000	15.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		47.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 0 2 2.0 4 000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	19.100.000	19.100.000	15.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		47.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	12.800.000	12.800.000	7.400.000						45.000.000	
7	0 1 0 3 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	4 Kali	4 Kali	12.800.000	12.800.000	7.400.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		45.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 0 3 2.0 1 000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	12.800.000	12.800.000	7.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		45.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	100%	100%	19.800.000	19.800.000	19.800.000						35.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.014.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata Jumlah masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Kamtibmas	350 Orang	350 Orang	19.800.000	19.800.000	19.800.000			-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		35.000.000	KECAMATAN LALABATA
7.014.2.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	-		35.000.000	KECAMATAN LALABATA
7.016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	7.000.000	3.500.000	1.750.000							35.000.000	
7.016.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	3 Desa	3 Desa	7.000.000	3.500.000	1.750.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		35.000.000	KECAMATAN LALABATA
7.016.2.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90 Dokumen	90 Dokumen	7.000.000	3.500.000	1.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		35.000.000	KECAMATAN LALABATA
7	Kelurahan Lalabata Rilau				630.455.400	630.455.400	596.112.200							1.076.596.242	
7	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				630.455.400	630.455.400	596.112.200							1.076.596.242	
7.011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	127.035.400	127.035.400	92.692.200							121.230.800	
7.011.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		0	KECAMATAN LALABATA
7.011.2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	37 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		0	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	38.758.400	39.258.400	27.525.200				-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	58.674.800	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		18.050.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.550.000	5.550.000	5.550.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3.000.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.928.400	15.928.400	8.305.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		24.006.400	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.800.000	2.800.000	1.800.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.100.000	13.600.000	10.490.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		13.618.400	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	24.600.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		9.600.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 8 000 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	52.411.000	52.411.000	50.906.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	25.956.000	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.036.000	8.036.000	8.036.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25.956.000	KECAMATAN LALABATA	
7 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.375.000	44.375.000	42.870.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	KECAMATAN LALABATA	
7 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	15.166.000	15.166.000	14.261.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6.000.000	KECAMATAN LALABATA	
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.566.000	1.566.000	1.161.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	KECAMATAN LALABATA	
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	7.600.000	7.600.000	7.600.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	KECAMATAN LALABATA	
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.000.000	6.000.000	5.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6.000.000	KECAMATAN LALABATA	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	503.420.000	503.420.000	503.420.000						955.365.442		
7 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	100%	503.420.000	503.420.000	503.420.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		955.365.442	KECAMATAN LALABATA	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		528.857.143	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1 3	0 2 3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	303.420.000	303.420.000	303.420.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	426.508.299	KECAMATAN LALABATA
					Kelurahan Ompo			467.795.100	470.795.100	436.932.950							932.202.692	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			467.795.100	470.795.100	436.932.950							932.202.692	
7	0 1				KECAMATAN			467.795.100	470.795.100	436.932.950							932.202.692	
7	0 1 1	0 1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	126.615.100	129.615.100	95.752.950						152.829.250	
7	0 1 1	0 1 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	1.150.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 1 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	1.150.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 1 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	33.955.200	37.455.200	42.583.050			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	85.990.950	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 1 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	25.650.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 1 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.501.800	5.501.800	9.927.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	6.393.150	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 1 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	17.173.400	14.173.400	20.105.250	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	23.829.400	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 1 1	2.0 6	000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.800.000	2.800.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur	-	12.250.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat				
7.01.02.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.100.000	13.600.000	11.170.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		17.868.400	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.07.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		14.000.000	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		14.000.000	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.08.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	54.993.900	54.993.900	40.769.900			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		42.743.500	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.418.900	12.418.900	12.899.900	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		23.443.500	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.575.000	42.575.000	27.870.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		19.300.000	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.09.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	16.966.000	16.966.000	12.400.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		8.944.800	KECAMATAN LALABATA	
7.01.02.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 Unit	1 Unit	1.566.000	1.566.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Opsen PKB	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2.934.800	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 000 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	9.400.000	9.400.000	9.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6.010.000	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.000.000	6.000.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	341.180.000	341.180.000	341.180.000						779.373.442			
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	100%	341.180.000	341.180.000	341.180.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	779.373.442	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 3 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		528.857.143	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 3 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	141.180.000	141.180.000	141.180.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		250.516.299	KECAMATAN LALABATA		
7	Kelurahan Botto				533.188.800	536.188.800	505.394.250						1.010.035.442			
7	UNSUR KEWILAYAHAN				533.188.800	536.188.800	505.394.250						1.010.035.442			
7 0 1	KECAMATAN				533.188.800	536.188.800	505.394.250						1.010.035.442			
7 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	126.548.800	129.548.800	98.754.250						168.850.000			
7 0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	550.000	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		550.000	KECAMATAN LALABATA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 0 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	26.870.200	30.370.200	35.703.250				-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		66.001.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	690.000	690.000	1.150.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		21.125.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.500.000	3.870.000	5.080.600	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.010.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.180.200	10.810.200	16.582.650	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	-		17.980.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.400.000	1.400.000	2.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.750.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.100.000	13.600.000	10.490.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.136.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.200.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 0 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		20.200.000	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.1.2.01.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	71.222.600	71.222.600	57.003.000			-	Akuntabel dan Inovatif			70.859.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.2.01.8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.322.600	8.322.600	5.728.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			20.359.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.2.01.8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	62.900.000	62.900.000	51.275.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			50.500.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.2.01.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	7.756.000	7.756.000	6.048.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			11.240.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.2.01.9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.566.000	1.566.000	108.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.530.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.2.01.9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	3.190.000	3.190.000	3.190.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.710.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.2.01.9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	2.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			4.000.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	406.640.000	406.640.000	406.640.000							841.185.442	
7.01.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	406.640.000	406.640.000	406.640.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan			841.185.442	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan									Ekonomi Masyarakat				
7.013.2.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			528.857.143	KECAMATAN LALABATA
7.013.2.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	206.640.000	206.640.000	206.640.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			312.328.299	KECAMATAN LALABATA
	Kelurahan Lemba				501.357.200	501.357.200	469.003.350							1.026.555.442	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				501.357.200	501.357.200	469.003.350							1.026.555.442	
7.01	KECAMATAN				501.357.200	501.357.200	469.003.350							1.026.555.442	
7.011	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	129.997.200	129.997.200	97.643.350							148.650.000	
7.011.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		650.000	KECAMATAN LALABATA
7.011.2.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			650.000	KECAMATAN LALABATA
7.011.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	30.853.000	32.080.200	22.195.950			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		60.020.800	KECAMATAN LALABATA
7.011.6.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	572.800	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			574.000	KECAMATAN LALABATA
7.011.6.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			17.700.000	KECAMATAN LALABATA
7.011.6.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.501.800	2.315.800	2.670.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			8.161.400	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7.01.2.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.898.400	13.384.400	6.655.550	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.137.100	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.400.000	1.400.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			9.500.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.100.000	13.600.000	10.490.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			8.948.300	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		6.400.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			6.400.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	70.078.200	70.651.000	69.391.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		66.833.200	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.828.200	14.401.000	14.401.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			25.933.200	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.250.000	56.250.000	54.990.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			40.900.000	KECAMATAN LALABATA
7.01.2.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	8.366.000	7.066.000	6.056.400			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	-		14.746.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 1	0 2 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.566.000	1.566.000	1.161.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Opsen PKB	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.236.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 2 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	3.800.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		6.010.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 1	0 2 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	2.395.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.500.000	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	371.360.000	371.360.000	371.360.000						877.905.442	
7	0 1 3	0 2 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	100%	371.360.000	371.360.000	371.360.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	877.905.442	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 3	0 2 2	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		528.857.143	KECAMATAN LALABATA
7	0 1 3	0 2 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	171.360.000	171.360.000	171.360.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		349.048.299	KECAMATAN LALABATA
				Kelurahan Bila				591.040.336	591.040.336	554.824.536						1.042.464.442	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				591.040.336	591.040.336	554.824.536						1.042.464.442	
7	0 1 1			KECAMATAN				591.040.336	591.040.336	554.824.536						1.042.464.442	
7	0 1 1	0 0 0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	129.620.336	129.620.336	93.404.536						148.650.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0				-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	1.330.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	1.330.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	31.426.200	32.616.200	27.410.400			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	68.458.600	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	22.125.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.501.800	2.501.800	3.245.800	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	9.501.400	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 6 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.644.400	13.134.400	14.784.600	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	17.073.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2.800.000	2.000.000	1.200.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	11.250.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan	10.100.000	13.600.000	6.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	8.509.200	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	-	14.700.000	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.011.2.000.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Akuntabel dan Inovatif		14.700.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	68.604.136	68.604.136	60.744.136			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	52.313.400	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.154.136	8.154.136	8.154.136	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.413.400	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.450.000	60.450.000	52.590.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		31.900.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	8.890.000	8.200.000	5.250.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	11.848.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	2.700.000	2.700.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.518.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4 Unit	3.190.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.690.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	2.750.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.640.000	KECAMATAN LALABATA	
7.013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang	100%	100%	461.420.000	461.420.000	461.420.000						893.814.442		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata													
7 0 0 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	100%	461.420.000	461.420.000	461.420.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-		893.814.442	KECAMATAN LALABATA
7 0 0 2.0 000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			528.857.143	KECAMATAN LALABATA
7 0 0 2.0 000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	261.420.000	261.420.000	261.420.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			364.957.299	KECAMATAN LALABATA
	Kelurahan Lapajung				556.694.500	556.694.500	533.366.700							990.935.442	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				556.694.500	556.694.500	533.366.700							990.935.442	
7 0 1	KECAMATAN				556.694.500	556.694.500	533.366.700							990.935.442	
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	129.654.500	129.654.500	106.326.700							152.150.000	
7 0 0 2.0 1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		610.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 0 2.0 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			610.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 0 2.0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	28.777.200	30.577.200	42.354.400			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-		75.063.100	KECAMATAN LALABATA
7 0 0 2.0 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	0	0	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			3.500.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7 0 1 1 2.0 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.380.000	1.380.000	1.840.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.920.000	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.501.800	2.501.800	7.505.400	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.290.500	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.995.400	11.895.400	18.519.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.649.200	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2.800.000	1.200.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 Laporan	58 Laporan	10.100.000	13.600.000	10.490.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.703.400	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	0	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	71.811.300	71.811.300	52.401.300			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	59.774.100	KECAMATAN LALABATA		
7 0 1 1 2.0 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.961.300	11.961.300	11.961.300	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		23.574.100	KECAMATAN LALABATA		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.011.2.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.850.000	59.850.000	40.440.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif		36.200.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	8.366.000	7.066.000	11.571.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	16.702.800	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.566.000	1.566.000	1.161.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.922.800	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4 Unit	3.800.000	2.500.000	7.660.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.490.000	KECAMATAN LALABATA	
7.011.2.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	2.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.290.000	KECAMATAN LALABATA	
7.013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	427.040.000	427.040.000	427.040.000						838.785.442		
7.013.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	100%	427.040.000	427.040.000	427.040.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	838.785.442	KECAMATAN LALABATA	
7.013.2.000.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		528.857.143	KECAMATAN LALABATA	
7.013.2.000.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	227.040.000	227.040.000	227.040.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		309.928.299	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Ekonomi Masyarakat				
	Kelurahan Salokaraja				477.826.300	481.826.300	447.806.750							917.220.349	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				477.826.300	481.826.300	447.806.750							917.220.349	
7	01	KECAMATAN			477.826.300	481.826.300	447.806.750							917.220.349	
7	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100%	100%	125.186.300	129.186.300	95.166.750						148.650.000	
7	011	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	500.000	0	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	550.000	KECAMATAN LALABATA
7	011	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	500.000	0	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	550.000	KECAMATAN LALABATA
7	011	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	31.936.200	36.436.200	36.521.650			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	63.788.250	KECAMATAN LALABATA
7	011	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	15.900.000	KECAMATAN LALABATA
7	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.501.800	3.001.800	4.801.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	7.018.000	KECAMATAN LALABATA
7	011	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.154.400	15.654.400	16.179.850	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	17.341.050	KECAMATAN LALABATA
7	011	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2.800.000	2.800.000	1.800.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	-	8.700.000	KECAMATAN LALABATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	21 Laporan	10.100.000	13.600.000	12.360.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		14.829.200	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	20.200.000	20.200.000	0			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.400.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.200.000	20.200.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		19.400.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	62.984.100	62.984.100	49.734.100			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		51.211.750	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.334.100	4.334.100	4.334.100	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.111.750	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.650.000	58.650.000	45.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		36.100.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	9.566.000	9.566.000	8.911.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		13.700.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.566.000	1.566.000	1.161.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.530.000	KECAMATAN LALABATA	
7 0 1 1 2.0 000 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,		6.510.000	KECAMATAN LALABATA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 0 2.0 000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	2.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akuntabel dan Inovatif	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.660.000	KECAMATAN LALABATA
7 0 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100%	100%	352.640.000	352.640.000	352.640.000						768.570.349		
7 0 0 2.0 000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	100%	352.640.000	352.640.000	352.640.000			-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	-	768.570.349	KECAMATAN LALABATA	
7 0 0 2.0 000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		528.857.143	KECAMATAN LALABATA	
7 0 0 2.0 000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	152.640.000	152.640.000	152.640.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		239.713.206	KECAMATAN LALABATA	
TOTAL					10.669.709.756	10.724.309.756	10.316.690.904						16.909.867.051		
KECAMATAN MARIORIWAWO															
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.618.099.468	3.621.059.468	3.498.445.408							8.419.818.000	
7 0 1	KECAMATAN				3.618.099.468	3.621.059.468	3.498.445.408							8.419.818.000	
7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	3.484.862.468	3.487.834.468	3.422.265.408							6.119.818.000	
7 0 0 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %100 %100 %	100 %100 %100 %	16.215.000	16.215.000	17.620.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Camat Marioriwawo		23.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 0 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	480.000	480.000	1.350.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, TettiKenrae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		1.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.780.000	7.780.000	8.495.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
7	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	7.955.000	7.955.000	7.775.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		3.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	7.955.000	7.955.000	7.775.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.089.571.702	3.089.571.702	3.139.272.442			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Camat Marioriwawo		5.177.018.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.077.731.702	3.077.731.702	3.135.272.442	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		5.161.018.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.000.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.800.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2 000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	10.240.000	10.240.000	3.000.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 6 000 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	167.836.000	169.708.000	129.347.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Camat Marioriwawo	363.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		43.195.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.965.000	22.965.000	20.145.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		6.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.0.0.2.000.1.1.6.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	48.053.000	49.925.000	42.595.300	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		85.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.0.2.000.1.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	7.445.000	7.445.000	7.405.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		12.250.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.0.2.000.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	87.073.000	87.073.000	56.902.500	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.0.2.000.1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	82.660.000	69.600.000	5.852.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Camat Marioriwawo	225.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.0.2.000.1.1.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	16 Unit	82.660.000	69.600.000	5.852.600	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		45.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	75.655.766	89.815.766	83.670.766				dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
											Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Camat Marioriwawo	70.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 1 2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43.961.766	43.961.766	43.961.766	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		37.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 1 2.0 8 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31.694.000	45.854.000	39.709.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	52.924.000	52.924.000	46.501.800				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Camat Marioriwawo	170.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 1 2.0 9 000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10 Unit	5 Unit	42.304.000	42.304.000	40.801.800	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang		30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif								
7	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17 Unit	10.620.000	10.620.000	5.700.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		7.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo; Presentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana pada kecamatan marioriwawo;	100% 100%	100% 100%	42.000.000	42.000.000	30.000.000					230.000.000			
7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	100 %	100 %	42.000.000	42.000.000	30.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Kantor Camat Marioriwawo		115.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 2	2.0 4	000 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen	24.000.000	24.000.000	18.000.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		57.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 2	0 4 2	2.0 000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	300 Laporan	300 Laporan	18.000.000	18.000.000	12.000.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		57.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	11.580.000	11.580.000	8.950.000					2.000.000.000		
7	0 1	0 3	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	8 kali	8 kali	11.580.000	11.580.000	8.950.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Marioriwawo	30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 3	2.0 000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	6 Laporan	11.580.000	11.580.000	8.950.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		30.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 4									dan penyeludupan.				35.000.000			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	63.457.000	63.445.000	21.030.000									
7	0 1 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas	240 Orang	240 Orang	63.457.000	63.445.000	21.030.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Marioriwawo	35.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1 4	2.0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	240 Laporan	240 Laporan	63.457.000	63.445.000	21.030.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		35.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	16.200.000	16.200.000	16.200.000						35.000.000	
7	0 1 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	11 desa	11 desa	16.200.000	16.200.000	16.200.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul	Desa se Kecamatan Marioriwawo	35.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	0 1 6	0 2.0 1 000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	16.200.000	16.200.000	16.200.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		35.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
			Kelurahan TettikenraraE				553.342.717	558.942.717	512.123.217						1.049.127.500	
7			UNSUR KEWILAYAHAN				553.342.717	558.942.717	512.123.217						1.049.127.500	
7	0 1		KECAMATAN				553.342.717	558.942.717	512.123.217						1.049.127.500	
7	0 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	148.502.717	154.102.717	107.283.217						64.127.500	
7	0 1 1	0 2.0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	680.000	680.000	250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Tettikenrarae	600.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1 1	0 2.0 2 000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	680.000	680.000	250.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		600.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1 1	0 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	106.343.650	106.343.650	90.954.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	Kantor Lurah Tettikenrarae	40.527.500	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	0 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	20.040.000	16.540.000	15.140.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.902.500	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.300.000	6.300.000	5.550.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenrarae	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	66.184.650	66.184.650	57.635.150	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenrarae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	4.775.000	4.775.000	3.325.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		2.625.000	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
7 0 1 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	9.044.000	12.544.000	9.304.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul		10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.400.000	31.000.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Tettikenrarae	0	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25.400.000	31.000.000	0	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	9.841.067	9.841.067	9.841.067			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Tettikenrarae	11.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.841.067	9.841.067	9.841.067	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.0.0.2.0.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	6.238.000	6.238.000	6.238.000			narkoba, judi, dan penyeludupan.		Kantor Lurah Tettikenraae		11.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.0.0.2.0.1.1.9.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	1 Unit	4.428.000	4.428.000	4.428.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenraae	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.0.2.0.1.1.9.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3 Unit	1.810.000	1.810.000	1.810.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenraae	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		1.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	404.840.000	404.840.000	404.840.000						985.000.000		
7.0.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	16 paket	16 paket	404.840.000	404.840.000	404.840.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kelurahan Tettikenraae	985.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.1.3.2.000.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Tettikenraae	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		600.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
										dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif						
7	0 1 3	0 2 3	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	204.840.000	204.840.000	204.840.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenararae	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		385.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
				Kelurahan Labessi				493.971.517	499.571.517	453.670.817						1.049.127.500	
7				UNSUR KEWILAYAHAN				493.971.517	499.571.517	453.670.817						1.049.127.500	
7	0 1			KECAMATAN				493.971.517	499.571.517	453.670.817						1.049.127.500	
7	0 1 1	0 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	154.471.517	160.071.517	111.170.817						64.127.500	
7	0 1 1	0 1 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	680.000	680.000	250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Labessi	600.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1 1	0 1 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	680.000	680.000	250.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		600.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7	0 1 1	0 1 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	111.414.450	111.414.450	93.943.750			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif,	Kantor Lurah Labessi	40.527.500	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 0 1 0 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	20.040.000	16.540.000	15.140.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Alokasi Umum (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel dan Inovatif			15.902.500	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 0 1 2.0 6 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.300.000	6.300.000	6.009.600	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 0 1 2.0 6 000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	71.305.450	71.305.450	60.675.150	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7 0 1 0 1 2.0 6 000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	4.725.000	4.725.000	3.275.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			2.625.000	KECAMATAN MARIORIWAWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
7 0 1 1 2.0 000 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	9.044.000	12.544.000	8.844.000	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	25.400.000	31.000.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Labessi	0	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25.400.000	31.000.000	0	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		0	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	9.839.067	9.839.067	9.839.067			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Labessi	11.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7 0 1 1 2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.839.067	9.839.067	9.839.067	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.0.0.2.0.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	7.138.000	7.138.000	7.138.000			narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kantor Lurah Labessi		11.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.0.0.2.0.1.1.9.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 0	10 0	5.328.000	5.328.000	5.328.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Labessi	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan BermotorOpsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			10.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.0.2.0.1.1.9.000.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3 Unit	1.810.000	1.810.000	1.810.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Labessi	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif			1.500.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	100 %	100 %	339.500.000	339.500.000	342.500.000							985.000.000		
7.0.1.3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	16 paket	16 paket	339.500.000	339.500.000	342.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Kelurahan Labessi		985.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	
7.0.1.3.2.000.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Soppeng, Marionwawo, Labessi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	0 1 3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	139.500.000	139.500.000	142.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	Dana Bagi Hasil (DBH)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		385.000.000	KECAMATAN MARIORIWAWO
TOTAL							4.665.413.702	4.679.573.702	4.464.239.442					10.518.073.000			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.513.669.175	6.513.669.175	5.499.711.655						32.067.984.224	
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6.513.669.175	6.513.669.175	5.499.711.655						32.067.984.224	
8	0 1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.513.669.175	6.513.669.175	5.499.711.655						32.067.984.224	
8	0 1 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100 %	3.131.671.391	3.270.576.791	3.140.854.271						5.181.011.000	
8	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	34.500.000	25.500.000	19.500.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng	27.000.000	BAKESBANGPOL
8	0 1	0 1	2.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	21.600.000	12.600.000	9.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		10.815.000	BAKESBANGPOL
8	0 1	0 1	2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	12.900.000	12.900.000	9.750.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		16.185.000	BAKESBANGPOL
8	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.472.906.961	2.471.353.411	2.553.635.091			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng	4.155.011.000	BAKESBANGPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.011.2.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.442.407.291	2.439.853.741	2.524.235.091	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		4.100.011.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen	2.599.670	3.599.670	3.000.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	27.900.000	27.900.000	26.400.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		35.000.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng	-	12 Laporan	0	3.049.800	875.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng	9.000.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	8 Dokumen	0	3.049.800	875.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		9.000.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	252.843.630	291.422.780	190.781.380			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng	450.000.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	446.448	2.901.448	2.901.448	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		15.000.000	BAKESBANGPOL	
8.011.2.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.760.000	2.760.000	2.760.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000	BAKESBANGPOL	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.151.800	9.503.600	18.001.200	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif				
8.01.02.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	47.358.600	46.717.150	38.496.150	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		100.000.000		BAKESBANGPOL
8.01.02.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	8.786.440	8.786.440	8.786.440	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		25.000.000		BAKESBANGPOL
8.01.02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	350 Laporan	176.340.342	220.754.142	119.836.142	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		230.000.000		BAKESBANGPOL
8.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor, dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	56.720.000	162.600.000	25.400.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng		300.000.000	BAKESBANGPOL
8.01.02.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	0	1.100.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000		BAKESBANGPOL
8.01.02.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	56.720.000	161.500.000	25.400.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		230.000.000		BAKESBANGPOL
8.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	273.240.800	276.190.800	314.440.800			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng		150.000.000	BAKESBANGPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
8 0 1 1 2.0 000 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.002.000	68.772.000	112.302.000	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		50.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 1 2.0 000 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	181.238.800	207.418.800	202.138.800	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		100.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 1 2.0 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	41.460.000	40.460.000	36.222.000			-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng	90.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 1 2.0 000 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	32.990.000	31.990.000	30.172.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		70.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 1 2.0 000 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	14 Unit	8.470.000	8.470.000	6.050.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		20.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara	100 %	100 %	188.699.000	142.889.000	989.871.400						525.000.000		
8 0 1 2 2.0 000 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1280 Orang	1280 Orang	188.699.000	142.889.000	989.871.400			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelajar Kab. Soppeng	525.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 2 2.0 000 1 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1280 Orang	1280 Orang	99.750.000	76.800.000	951.371.400	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		100.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 2 2.0 000 1 7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	26.250.000	14.120.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan		100.000.000	BAKESBANGPOL	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	250 Orang	200 Orang	41.199.000	41.199.000	38.500.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	manusia (HAM). Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Ekonomi Masyarakat Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			25.000.000	BAKESBANGPOL
8.01.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	7.150.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000	BAKESBANGPOL
8.01.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	0	120.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000	BAKESBANGPOL
8.01.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	100 Orang	100 Orang	3.500.000	3.500.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			100.000.000	BAKESBANGPOL
8.01.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES, PILKADA, dan PILKADES	78 %	78 %	1.350.948.784	1.489.798.784	595.685.984							19.871.173.224	
8.01.3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 Orang	250 Orang	1.350.948.784	1.489.798.784	595.685.984			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Partai Politik dan Masyarakat Kab. Soppeng		19.871.173.224	BAKESBANGPOL
8.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 Orang	250 Orang	36.950.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			350.000.000	BAKESBANGPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8 0 1 3	2.0 1 4	000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 Orang	21 Orang	596.085.984	581.685.984	581.685.984	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		19.020.173.224	BAKESBANGPOL
8 0 1 3	2.0 1 5	000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 3	2.0 1 6	000 6	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	4 Kegiatan	4 Kegiatan	716.912.800	893.112.800	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif		500.000.000	BAKESBANGPOL	
8 0 1 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi	100 %	100 %	15.350.000	291.700.000	9.700.000						51.000.000		
8 0 1 4	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100 %	100 %	15.350.000	291.700.000	9.700.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Ormas/LSM Kab.Soppeng	51.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 0 1 4	2.0 1 3	000								penyangang disabilitas.					
8 0 1 4	2.0 1 5	000								penyangang disabilitas.					
8 0 1 5	2.0 1									penyangang disabilitas.					
8 0 1 4	2.0 1 5	000								penyangang disabilitas.					
8 0 1 4	2.0 1 5	000								penyangang disabilitas.					
8 0 1 5	2.0 1									penyangang disabilitas.					
8 0 1 4	2.0 1 5	000								penyangang disabilitas.					
8 0 1 5	2.0 1									penyangang disabilitas.					
8 0 1 4	2.0 1 5	000								penyangang disabilitas.					
8 0 1 5	2.0 1									penyangang disabilitas.					

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8 0 1 5	2.0 1	000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Orang	20 Orang	0	17.904.600	17.700.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10.000.000	BAKESBANGPOL
8 0 1 5	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	250 Orang	1.307.800.000	775.000.000	0	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		800.000.000	BAKESBANGPOL
8 0 1 5	2.0 1	000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1.000.000	BAKESBANGPOL
8 0 1 6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	100 %	100 %	518.200.000	524.800.000	745.900.000						5.628.800.000	
8 0 1 6	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	518.200.000	524.800.000	745.900.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kab.Soppeng	5.628.800.000	BAKESBANGPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 0 1 6 1 000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	35 Orang	157.000.000	163.600.000	157.000.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			155.000.000	BAKESBANGPOL
8 0 1 6 1 000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	0	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			1.000.000	BAKESBANGPOL
8 0 1 6 1 000 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	360.200.000	360.200.000	588.900.000	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Memantapkan Kualitas Infrastruktur Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat			5.472.800.000	BAKESBANGPOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
TOTAL							6.513.669.175	6.513.669.175	5.499.711.655						32.067.984.224
GRAND TOTAL							1.161.492.603.551	1.161.492.603.551	1.101.087.398.551						1.001.672.616.631

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kabupaten Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Target indikator makro dalam perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan berdasarkan target yang ada dalam Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029.

Tabel 6. 1 Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET KINERJA	
				RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	6,8	4,24
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	67,26	70,88	70,12
3	Angka Kemiskinan	%	6,9	6,22	6,47
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	4	3,2

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET KINERJA	
				RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
5	Gini Ratio	%	0,371	0,363	0,369
6	IPM	Nilai	71,39	71,44	72,2

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama diambil dari indikator tujuan sasaran strategis RPJMD. Target capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah untuk tahun 2025 disajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	PDRB/kapita (T1.1)	Rp	67.260.000	70.116.700
2	Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,371	0,369
3	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,06	4,24
4	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	3,32	3,2
5	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,9	6,47
6	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	10,86	11
7	Jumlah usaha mikro baru dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Usaha	70	77
8	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (T32.)	Nilai	3,25	3,31
9	Indeks Infrastruktur Daearah (S.3.1)	Nilai	72,53	76,8
10	% Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,34	27,84
11	% Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	2,26	4,55
12	Indeks Desa (T4)	Nilai		79,62 (maju)
13	% Desa Mandiri (S.4.1)	%	22,45	22,75
14	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	Belum terlampaui
15	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	68,74	74,23
16	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	131,2	131,2
17	% Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	n.a	27,51
18	IPM (T6)	Nilai	71,39	72,2
19	Indeks kesehatan (S.6..1)	Nilai	82,72	83,2
20	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	67,17	65,7
21	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.547.000	11.050.000
22	Jumlah Kasus Konflik Sosial Bernuansa Keagamaan (S.6.4)	Nilai	n.a	0
23	Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	72,05 (BB)	75 (BB)
24	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,624	81,2
25	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,99 (B)	4,01 (A-)
26	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	85,11	86,11
27	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,17 (B)	66,25 (B)

6.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 tersebut berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 serta peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 maupun indikator lainnya, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. 3 Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2025**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	87,9	73,99	IUP
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	12,87	12,54	IUP
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/kapita	124.366.904 Kwh Terjual (515,33 Kwh/Kapita)	118.560.500	IUP
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	8,92	32	IUP
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik		0,38	IUP
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	68,74	74,23	IUP
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,26	4,55	IUP
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,89	15	IUP
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20,31	40	IUP
10	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia		0,9	1,36	IUP
11	Indeks Pertanian (IP) Padi	Nilai	199,1	156,32	IUP
12	Proporsi sawah irigasi		79,5	80,42	IUP
13	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	445,72	377,15	IUP
14	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		27,51	IUP
15	Indeks Risiko Bencana	poin	131,2	131,2	IUP
16	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,25	0,42	
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,16	0,18	
18	Rasio Penduduk yang bekerja	%	96,67	93,79	
19	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	160,89	184,05	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,06	4,5	Makro
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,9	6,6	Makro/IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	70,12	70,84	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,2	IUP
5	Indeks Gini	angka	0,371	0,376	Makro/IUP
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	71,39	71,94	Makro
7	Usia Harapan Hidup	tahun	70,79	74	IUP
8	Prevalensi Stunting	%	26,6	24,57	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
9	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	IUP
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	30,33	40,2	IUP
11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	81,7	82	IUP
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	78,34	98	IUP
13	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,45	8,38	IUP
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,22	13,39	IUP
15	Angka Literasi	Nilai	80,84	81,84	IUP
16	Angka Numerasi	Nilai	79,22	80,22	IUP
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	73,98	75,06	IUP
18	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%		57,8	IUP
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		58,82	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%		25,05	IUP
21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%		0,65	IUP
22	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	%		100	IUP
23	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	61,3 *	62,88	IUP
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	61,15 *	62,37	IUP
25	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,265	0,4	IUP
26	Laju Inflasi	%	0,68	1,53	Makro
27	Angka Melek huruf	%		100	
28	persentase balita gizi buruk	%	0,08	0,009	
29	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,41	13,6	
30	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	
31	Angka partisipasi angkatan kerja	%		60,34	
32	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	62,49	72,29	IUP
33	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,32	3,2	
34	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,67	62,68	
35	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,04	88,96	
36	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	14,98	15,23	
37	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
38	Indeks Pola Pangan Harapan (PPH)	%		86,65	IUP
39	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	81,8	81,7	IUP
40	Penguatan cadangan pangan	%	24	16	
41	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	26,35	25,75	
42	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53	16,34	
43	Produksi sektor pertanian (ton)	Ton	430.925	680,43	
44	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	38,02	33,68	
45	Produksi sektor perkebunan (Ton)	Ton	12.887,91	25,49	
46	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	
47	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,90 *	0,25	
48	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,98 *	4,11	
49	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15,17 *	15,23	
50	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,92 *	11,02	
51	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%		3,45	
52	Pertumbuhan industri	%	1,55	0,42	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka Ketergantungan	%	46,13	46	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,81 *	11	IUP
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,5	1,62	IUP
4	Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)/ Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jiwa	272.169	262.500	IUP
5	Jumlah industri ekonomi kreatif di kab/kota	Unit	71	60	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	%	100	100	IUP
7	Persentase koperasi sehat di kab/kota	%	14,88	13,61	IUP
8	Return on Aset (ROA) BUMD (%)			-4,52	IUP
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49,33	54,48	IUP
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,49	72,86	IUP
11	Indeks Inovasi Daerah	skor	64,54	50,01	IUP
12	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD			0,02	IUP
13	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai		50,26	IUP
14	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	IUP
15	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%		10,69	IUP
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	38,54	41	IUP
17	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB		-470	IUP
18	Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi		2,31	2,5	IUP
19	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	72,53	77,65	IUP
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	64,89	73,21	IUP
21	Persentase Desa Mandiri	%	22,45	10,2	IUP
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,17	0,24	IUP
23	Tingkat Inflasi	%	0,68	1,53	Makro/IUP
24	Pertumbuhan Investasi Daerah	%		77,11	IUP
25	Nilai tukar petani (Sektor Pangan)	Nilai	103,42	104,69	IUP
26	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,02	4,08	
27	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	18,37	14,68	
28	Rasio Ketergantungan	%	46,13	45,32	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,72	97,75	IUP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,98	2,7	IUP
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,99	4,01 (A-)	IUP
4	Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	76,65	74	IUP
5	Indeks Pencegahan Korupsi	Nilai	85,11	81	IUP
6	Indeks Maturitas	Nilai	3,02	3,05	IUP
7	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	IUP
8	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	96,98	84	IUP
9	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	26,67	25	IUP
10	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,41	3,28	IUP
11	Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)	Kerjasama	39	147	IUP
Layanan Urusan Wajib					
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Pendidikan				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	73,35	69,07	
1.2	Angka Partisipasi kasar				
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	98,47*	98,78	
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	99,04*	99,42	
1.4	Angka Partisipasi Murni				
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	91,9*	92,4	
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	81,61*	82,35	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:				
01.05.01	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	98,87*	99	
01.05.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	96,29*	97,29	
1.6	Angka Putus Sekolah:				
01.06.01	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,05*	0,043	
01.06.02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,12*	0,1	
1.7	Angka Kelulusan:				
01.07.01	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,86*	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
01.07.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,53*	99,73	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):				
01.08.01	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100,45*	100	
01.08.02	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	99,82*	100	
1.9	Fasilitas Pendidikan:				
01.09.01	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	75,77*	80	
01.09.02	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	81,28*	82,28	
01.10	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	110,72*	100	
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	0,12*	0,12	
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	94,50*	97,05	
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,05*	96,9	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	91,99	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	79,83	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,96	100	
2	Kesehatan				DINAS KESEHATAN
02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	14,8	1,25	
02.02	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,52	98,62	
02.03	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,05	0,06	
02.04	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,64	0,28	
02.05	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	249,58	159,5	
02.06	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	28,15	26	
02.07	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,26	0,29	
02.08	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0041	0,009	
02.09	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,42	0,49	
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	5,36	5,71	
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	
02.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	0	86	
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	1,58	1,25	
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	63,06	67,2	
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0,0043	0	
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	12,09	100	
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	22,05	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	168,65	0	
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	14,92	0	
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	26,65	40,2	IUP
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	81,7	40,2	IUP
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	57,96	100	
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	5,39	0	
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,0095	0	
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	65,44*	100	
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	105,23	100	
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,75	
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	87,75	62,96	
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	53,25	100	
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	55,17	100	
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	97,82	100	
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	53,75	100	
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	
02.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100*	100	
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,1	0,15	
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	38,4	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	45,4	45,5	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	43,9	44	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	124,5	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	76,1	76,2	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0,25	0,25	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
03.01	Pekerjaan Umum:				
03.01.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,52	0,57	
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,004	0,005	
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	9,76	3	
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	52,8	54,92	
03.01.05	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	46,8	47,12	
03.01.07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	75,02	77,3	
03.01.09	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,21	54,27	
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	2,28	0,8	
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	81	84,81	
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	9,62	30,41	
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	98,95	99,38	
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	%	38,29	44,63	
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	15,38	15,84	
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,165	0,017	
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0021	0,00202	
03.02	Penataan Ruang:				
03.02.02	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	5,02	5,04	
03.02.06	Ketaatan terhadap RTRW	%	60,53	60,89	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,05	0,06	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	Tidak Ada Pantai		
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,84	0,86	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	44,43	44,63	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,1	77,2	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Poin	0,9231	0,93	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	54,76	55	
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,337	0,56	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	1,72	1	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
04.01	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,217	0,24	
04.02	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,98	0,29	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,14	92,39	
04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	68,88	65,43	
04.05	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,54	0,75	
04.06	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,06	0,05	
04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		2,05	4	
04.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	100	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	0	0	
	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	0	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,82	7,43	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,29	0,3	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
	Cakupan petugas :				
05.01	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	128	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
05.02	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	100	
	Cakupan pelayanan :				
05.03	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94,2	94,4	
05.04	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	92,38	84	
05.05	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	
	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	8,39	9,22	
6	Sosial				
06.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	DINAS SOSIAL
06.02	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	
06.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	
06.04	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	
06.05	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	
06.06	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100	
06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	
06.08	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	
06.09	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	107	100	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	Tenaga Kerja				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
01.01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	
01.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	6,95	26	
01.04	Keselamatan dan perlindungan	%	2,3	5,33	
01.05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	21,64	56,41	
01.06	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,09	0,1	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,36	0,37	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	25,71	25,81	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	123.337.350	123.337.400,00	
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan	3	1	
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK	3	85	
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kawasan	0 (Sudah Lepas Bina)	1	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,79	8,9	
02.02	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	26,67	20	
02.03	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	91,21	91,31	
02.04	Rasio KDRT	Nilai	0,011	0,09	
02.06	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97,24	97,44	
02.07	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	
02.08	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	
02.09	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	2,22	100	
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	0,95	0,952	
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,06	1,07	
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,43	1,44	
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,66	1,67	
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,98	0,982	
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	19,44	19,46	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,36	8,46	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,06	100	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	9,64	9,44	
3	Pangan				DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
03.01	Ketersediaan pangan utama	%	339,78	340,25	
03.02	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11.061	11.401	
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	265	280,42	
03.03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0	100	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	64,44	64,74	
4	Pertanahan				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	%	36,78	100	
04.02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0	100	
04.03	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	100	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	
5	Lingkungan Hidup				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak Ada	Ada	
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak Ada	Ada	
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	ada	
05.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	54,44	54,66	
05.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	95,18	95,24	
05.31	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	44,39	44,45	
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	7	7,5	
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		2	Ada	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	0	
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0	0	
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	ada	
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	80	81	
05.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14	15	
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	28,6	30	
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80,29	80,5	
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	75	74,02	
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	68,74	73,06	
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	80	100	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	8	100	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
06.01	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	
06.02	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,99	0,99	
06.03	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,76	0,78	
06.04	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	
06.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	
06.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,61	98,71	
06.07	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,3	99,35	
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,24	100	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,14	100	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,27	100	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	100	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
07.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	96	96,2	
07.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	
07.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	11	5	
07.04	Persentase LSM aktif	%	100	100	
07.05	Persentase LPM Berprestasi	%	100	5	
07.06	Persentase PKK aktif	%	100	100	
07.07	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
07.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,6	34,8	
07.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	81	
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	25	22,84	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
08.01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,16	0,48	
08.02	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,07	2,1	
08.03	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	100	
08.04	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	38,24	38,26	
08.05	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	0	0	
08.06	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	9	10	
08.07	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	3	4	
08.08	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	1	2	
08.09	Rasio Akseptor KB	%	64,25	65	
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,25	64,5	
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	20,9	19,08	
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	32,46	32,21	
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64	10,32	
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,33	20	
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,66	31,88	
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	80	
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	78,45	78,55	
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,04	72,06	
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	662,5	62,75	
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	140,52	100	
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	75,12	75,8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60,96	62,5	
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21,5	21	
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,58	0,59	
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,07	2,1	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62,86	63,23	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64	10,32	
9	Perhubungan				DINAS PERHUBUNGAN
09.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	720	800	
09.02	Rasio ijin trayek	Poin	0	0	
09.03	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1988 *	1100	
09.04	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2*	2	
09.05	Persentase layanan angkutan darat	%	45,45*	46,54	
09.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	12,26*	52	
09.07	Pemasangan Rambu- rambu	%	83,3*	100	
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	0,22*	85	
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,064*	0,09	
10	Komunikasi dan Informatika				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		550	560	
10.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi		66,67	66,77	
10.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	80	81	
10.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	91,67	91,77	
10.05	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	66,67	66,77	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	91,18	91,58	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	79,8	80,43	
11	Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
11.01	Persentase koperasi aktif	%	92,26	92,46	
11.02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,38	99,39	
11.03	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	99,39	
11.04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,38	99,39	
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,69	38,98	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	7,36	7,56	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
12	Penanaman Modal				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
12.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	115	70	
12.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	83.478.114.550 *	85.518.339.185	
12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	42,02 *	77,22	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	-13,22	77,11	
13	Kepemudaan dan Olah Raga				DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	21,69	23	
13.02	Persentase Wirausaha Muda	%	5,31	53	
13.03	Cakupan pembinaan olahraga	%	51,85	56	
13.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	56,94	57,44	
13.05	Cakupan pembinaan atlet muda	%	16,13	16,43	
13.06	Jumlah atlet berprestasi	Orang	105	110	
13.07	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	105	110	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	1,3	1,15	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	37,86	32,41	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	42	110	
14	Statistik				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	
14.02	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	
14.03	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	
15	Persandian				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	91	91,25	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	275	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	
16	Kebudayaan				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	8	10	
16.02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	39,02	40	IUP
16.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	4	4	
16.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	16	16	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	40	21,88	
17	Perpustakaan				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,48	0,68	
17.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	34,13	31,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
17.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,49	0,5	
17.04	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	122.849	112.974	
17.05	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	12.953	111.100	
17.06	Jumlah pustakawan, tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	5	100	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,32	52,67	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	58,62	58,82	
18	Kearsipan				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	
18.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	3	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	
Layanan Urusan Pilihan					
1	Pariwisata				DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
01.01	Kunjungan wisata	%	129	149	
01.02	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	
01.03	PAD sektor pariwisata	%	1,54	1,64	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	39,66	62	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	6,32	46	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	9,61	10	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,90*	1,56	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,54	0,2	
2	Pertanian				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
02.01	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	24,43	26,46	
02.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	15,76	17,64	
02.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	33,49	38,04	
02.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	
02.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,49	5,6	
02.06	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,17	5,47	
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	71	0	
5	Perdagangan				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
05.01	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)		-492000,33*	-423849,02	
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	34	39	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	44,74	45,65	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	37,23	37,85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
6	Perindustrian				DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
06.01	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	66,3	66,6	
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	13,31	13,61	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	18	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		90	91	
	1. Keterkinian informasi industri :				
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	50	50	
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	25	25	
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :				
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10	10	
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10	10	
8	Kelautan dan Perikanan				DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
08.01	Produksi perikanan	ton	3.252,94	3146,97	IUP
08.02	Konsumsi ikan	kg/kapita	100	59,35	IUP
08.03	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	0	
08.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	86,3	86,9	
08.05	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	125	
08.06	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3.252,94	3.343,30	
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.807,22	2.891,40	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	445,72	451,9	
Penunjang Urusan					
1	Perencanaan Pembangunan				BAPPELITBANGDA
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
01.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
01.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100	100	
01.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	100	100	
01.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	
2	Keuangan				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
02.01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TMT/TW	WTP	WTP	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
02.02	Persentase SILPA	%	2,95	1	
02.03	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,12	1	
02.04	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0,017	0	
02.04	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,021	0	
02.05	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	30,64	20	
02.06	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	21,56	10	
02.07	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	86,92	86,94	
		%	13,08		
02.08	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,26	0,28	
02.09	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	11,46	11,47	
	Rasio PAD	Poin	14,98	14,98	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	71,68	74,75	
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,11	5,21	
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	15,04	15,1	
	Assets Management				
	Apakah ada daftar aset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/Tidak	Ya	Tidak	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/Tidak	Ya	Tidak	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,19	1,33	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA
03.01	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	21	
03.02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	19,11	5	
03.03	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	6,22	10,59	
03.04	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	33	
03.05	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	126	449	
03.06	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	3.981	3982	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60,76	11,25	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,69	0,26	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11	0,81	
4	Penelitian dan pengembangan				BAPPPELITBANGDA
04.01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	
04.02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	
	Penerapan SIDA:				
04.03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	41,18	41,28	
04.04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	
5	Pengawasan				INSPEKTORAT DAERAH
05.01	Persentase tindak lanjut temuan	%	51,1	48,75	
05.02	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,0006	0,14	
05.03	Jumlah temuan BPK	Temuan	14	22	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KET.
6	Sekretariat Dewan				SEKRETARIAT DPRD
06.01	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
06.02	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
06.03	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	
7	PENGADAAN				SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	2,32	2,32	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	95,48	95,48	

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 4 Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja		Target Nasional
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	73,35%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	%	82,38%	100%	100%	100%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)	%	81,50%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	12,21%	100%	100%	100%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	%	84,62%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
2	KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang	%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja		Target Nasional
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		mendapatkan pelayanan kesehatan					
		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	38,30%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	45,40%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	43,90%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	125%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	76,10%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	0,25%	100%	100%	100%
		3	PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	99,36%	100%
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%			100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara	%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja		Target Nasional
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
6	SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2025-2030.

7.2. Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-

PPAS) Tahun 2025 dan Perubahan APBD tahun 2025. Daftar program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *bottom up* dan *top down*. Selain itu secara substansi melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial. Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD) masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025.

Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG

SUWARDI HASENG